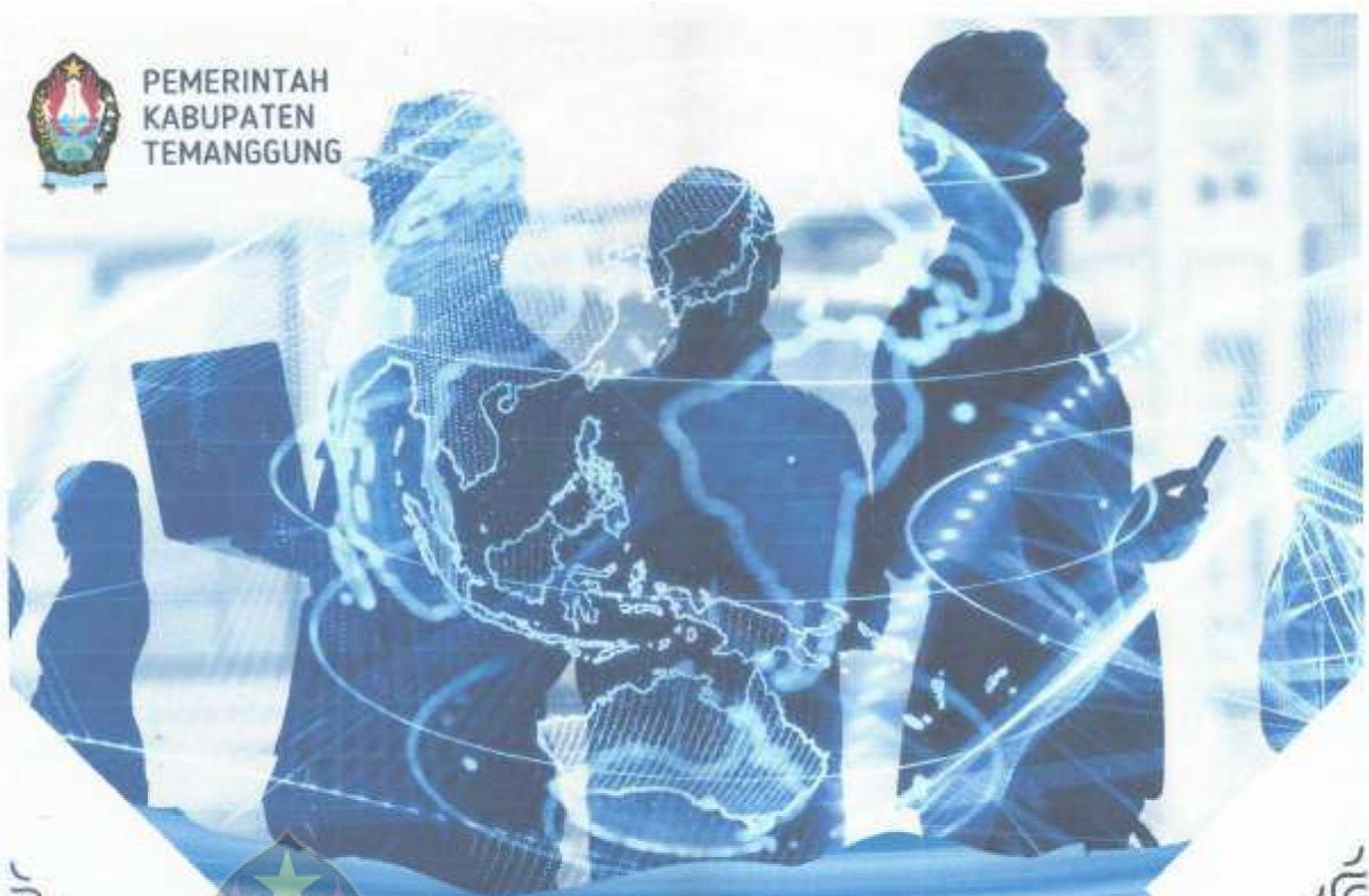




PEMERINTAH
KABUPATEN
TEMANGGUNG



**BAPPEDA
KABUPATEN
TEMANGGUNG**

RENJA BAPPEDA 2024



ONE PLAN FOR ALL
SATU PERENCANAAN UNTUK SEMUA

**RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024**



**BKPSDM
Kabupaten
Temanggung**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan BKPSDM Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari urusan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yaitu *“Terwujudnya SDM aparatur yang berkinerja tinggi”* Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Temanggung melaksanakan 3 Program dan 10 Kegiatan, yaitu Program Kepegawaian Daerah, Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Program Penunjang Urusan Perangkat Daerah. Untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut dibutuhkan dukungan anggaran sejumlah Rp8.073.770.663,00.

Demikian Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang akan datang, dengan harapan semua rencana kegiatan yang telah disusun mendapatkan prioritas dalam APBD dan dapat terlaksana sesuai yang diharapkan.

Temanggung, 03 Juli 2023

KEPALA BKPSDM
KABUPATEN TEMANGGUNG



UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19660508 199603 2 004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM TAHUN 2022	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2022 dan capaian Renstra BKPSDM Tahun 2019-2023	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM	29
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM.....	43
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD	48
2.5. Inovasi BKPSDM	56
2.6. Penghargaan	58
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	59
3.1. Telaahan terhadap arah Kebijakan Nasional	59
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM	59
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	63
4.1. Program dan Kegiatan	62
BAB V : PENUTUP	75

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM s.d Tahun 2022	11
Tabel 2.2. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM s.d Triwulan I Tahun 2022	20
Tabel 2.3. Capaian Kinerja Pembangunan Daerah BKPSDM Triwulan I Tahun 2023 (Laporan IKPD) Kabupaten Temanggung	30
Tabel 2.4. IP ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022..	38
Tabel 2.5. Indeks Sistem Merit Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022..	39
Tabel 2.6. Penyusunan Formasi Pegawai Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022.....	39
Tabel 2.7. Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	39
Tabel 2.8. Persentase Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	40
Tabel 2.9. Persentase Penyelesaian Pengangkatan dan Kenaikan Jabatan Fungsional Tahun 2018-2022	40
Tabel 2.10. Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki kompetensi diklat Kepemimpinan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	41
Tabel 2.11. Persentase ASN yang memiliki kompetensi diklat teknis dan fungsional Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	41
Tabel 2.12. Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	41
Tabel 2.13. Persentase Perempuan pada jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	42
Tabel 2.14. Persentase Pelanggaran Disiplin ASN Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022.....	42
Tabel 2.15. Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	42
Tabel 2.16. Persentase Pelaksanaan Updating Data Kepegawaian Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	43
Tabel 2.17. Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024	50
Tabel 2.18. Daftar Inovasi Perangkat Daerah 2020-2022	56

Tabel 2.19. Daftar Penghargaan BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2022	58
Tabel 3.1. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2024	61
Tabel 4.1. Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Kab. Temanggung Tahun 2024	64
Tabel 4.2. Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Kab. Temanggung Tahun 2024	67

HALAMAN VERIFIKASI


RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

disusun Oleh :


TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 03 Juli 2023

Koordinator
Bidang Pembangunan
Manusia dan Pemerintahan


Rinawati Heri Prastuti, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19730501 199603 2 004

Petugas Verifikator


Eko Budi Mulyanto, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19681117 199003 1 002

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG


DWI SUKARMEI, S.T., M.T.
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

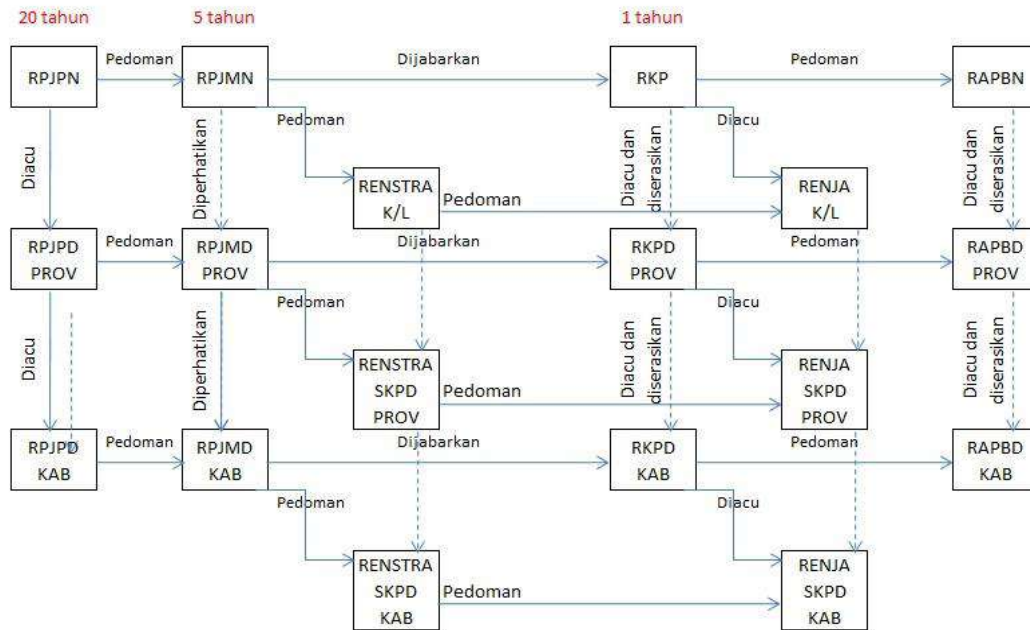
RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah, serta rencana pendanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan jangka waktu RPD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan BKPSDM Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Renja BKPSDM Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja BKPSDM Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja BKPSDM, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal BKPSDM, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan BKPSDM;
- 2) Kondisi pelayanan BKPSDM;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM;
- 4) Data Pokok Pembangunan BKPSDM;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan BKPSDM;

- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan BKPSDM.

b. Analisis gambaran pelayanan BKPSDM;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan BKPSDM adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan BKPSDM.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra BKPSDM untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2023, dan perkiraan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada BKPSDM

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM tahun lalu berdasarkan renstra BKPSDM;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan BKPSDM. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra BKPSDM dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;

- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra BKPSDM tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra BKPSDM;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra BKPSDM;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra BKPSDM sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra BKPSDM.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan BKPSDM dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan BKPSDM;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi BKPSDM;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan BKPSDM;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau

kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk BKPSDM.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra BKPSDM.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi BKPSDM.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh BKPSDM. Namun dalam proses ini BKPSDM mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh BKPSDM terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja BKPSDM;

Penyusunan dokumen rancangan Renja BKPSDM merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang

dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja BKPSDM;

Penyempurnaan rancangan Renja BKPSDM perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja BKPSDM dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja BKPSDM dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja BKPSDM yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2024;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja BKPSDM Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi BKPSDM Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja BKPSDM untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BKPSDM.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja BKPSDM Tahun 2024 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;

2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan BKPSDM selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan BKPSDM Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan BKPSDM Tahun 2024; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BKPSDM Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja BKPSDM Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKPSDM****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2022 dan Capaian Renstra BKPSDM Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2022 terhadap capaian Renstra BKPSDM Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2023.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja BKPSDM sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023 terhadap target di Tahun 2023.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra BKPSDM Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun ke-empat pelaksanaan Renstra BKPSDM 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM
s.d Tahun 2022

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN

Meningkatnya Indeks Merit System

No	Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2022			Realisasi per Triwulan Th. 2022								Realisasi 2022		Capaian 2022		Ket.
							I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	BIDANG KEPEGAWAIAN																		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
	a Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran			141,600,000	96,594,490		11,030,900		34,513,278		69,276,528		82,536,828		82,536,828			
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor		12	5,000,000	5,000,000	3	434,000	3	1,399,500	3	3,505,500	3	4,948,000	12	4,948,000	100	98.96	
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersediannya ATK		12	21,000,000	21,000,000	3	3,351,500	3	7,335,600	3	15,140,900	3	20,665,300	12	20,665,300	100	98.41	
	3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		12	15,600,000	15,600,000	3	2,175,400	3	5,194,200	3	9,435,200	3	13,293,900	12	13,293,900	100	85.22	
	4 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya jamuan makan dan minuman rapat / tamu		12	30,000,000	14,999,990	3	99,000	3	1,284,000	3	2,927,800	3	3,855,300	12	3,855,300	100	25.70	

	5 Penyelenggara Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		12	70,000,000	39,994,500	3	4,971,000	3	19,299,978	3	38,267,128	3	39,774,328	12	39,774,328	100	99.45	
	b Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				57,000,000														
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor		1	35,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor		1	22,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				330,997,750	323,764,750		72,317,332		138,871,871		206,194,754		274,360,523		274,360,523			
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, materai dan benda pos		12	8,000,000	5,000,000	3	658,500	3	1,134,500	3	1,390,500	3	2,352,500	12	2,352,500	100	47.05	
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik		12	48,000,000	53,000,000	3	9,025,429	3	17,494,549	3	26,200,463	3	34,601,413	12	34,601,413	100	65.29	
	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan, jasa kebersihan dan jasa keamanan kantor		12	274,997,750	265,764,750	3	62,633,403	3	120,242,822	3	178,603,791	3	237,406,610	12	237,406,610	100	89.33	
	d Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				165,000,000	132,994,967		14,241,446		39,056,892		73,155,392		118,262,224		118,262,224			

	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		12	90,000,000	99,998,000	3	11,776,446	3	34,481,892	3	59,795,392	3	93,843,224	12	93,843,224	100	93.85
	2	Pemeliharaan mebel	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebel		12	3,000,000	3,000,000	3	0	3	-	3	-	3	3,000,000	12	3,000,000	100	100.00
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor		12	35,000,000	24,999,762	3	2,165,000	3	4,275,000	3	13,060,000	3	19,430,000	12	19,430,000	100	77.72
	4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor		12	30,000,000													
	5	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor		12	7,000,000	4,997,205	3	300,000	3	300,000	3	300,000	3	1,989,000	12	1,989,000	100	39.80
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1																		100	
																		Predikat	Sangat Tinggi
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH																		
	a	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				335,000,000	362,500,000		8,102,500		17,208,400		33,253,700		124,272,600		124,272,600		
		Persentase penyusunan formasi pegawai	%	100				100		100		100		100		100		100	
		Persentase penyelesaian pensiun PNS tepat waktu	%	100				100		99.25		99.58		100		100		100	

		Persentase penyelesaian kenaikan pangkat tepat waktu	%	100			37.04		37.04		94.60		100		100		100		
		Persentase penyelesaian pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional	%	100			100		87,39		100		100		100		100		
		Persentase keterisian jabatan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas	%	80			83.48		90.94		88.91		86.51		86.51		100		
		Persentase perempuan pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas	%	47			43.44		42,28		42.41		42.09		42.09		89.56		
		Persentase pelanggaran disiplin ASN	%	0.3			0		0		0		0.02		0.02		100		
		Persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN	%	90			0		0		0		14.29		14.29		15.87		
		Persentase pelaksanaan updating data kepegawaian	%	95			79.33		86,05		88.30		100		100		100		
	1	Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Dokumen	1	270,000,000	327,500,000	3	2,673,000	3	6,574,000	3	13,020,500	3	89,999,700	3	89,999,700	100	27.48	
	2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	kartu/sk	400	30,000,000	15,000,000	284	1,582,500	376	2,941,500	527	10,310,300	619	14,364,150	619	14,364,150	100	95.76	

	3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Pengelolaan Aplikasi Kepegawaian dan terlaksananya update data kepegawaian PNS	OPD / record	24/5000	35,000,000	20,000,000	46/4614	3,847,000	46/5648	7,692,900	46/6911	9,922,900	46/12219	19,908,750	46/12219	19,908,750	100	99.54
	b	Mutasi dan Promosi ASN				260,000,000	165,000,000	1,382	36,822,500	1,386	122,105,000	1,731	149,420,300		159,097,100		159,097,100		
	1	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Diserahkan SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS (ex Pengangkatan PNS)	keg / org	0	50,000,000	15,000,000	884	1,823,000	884	6,860,500	884	12,086,300	884	14,916,800	884	14,916,800	100	99.45
			Terbitnya SK Kenaikan pangkat bagi PNS yang memenuhi syarat (Ex. Penataan sistem administrasi KP)	SK	1000			494		494		833		833		833		83.30	
	2	Pengelolaan Promosi ASN	Tersusunnya dokumen rencana pembinaan karir PNS	Dokumen	12	210,000,000	150,000,000	2	34,999,500	5	115,244,500	8	137,334,000	12	144,180,300	12	144,180,300	100	96.12
			Terlaksananya Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Kgt	1			1		1		1		1		1		100	
			Terlaksananya prosesi pengambilan sumpah, pelantikan, dan penyerahan SK	kgt	6			1		2		5		5		5		83.33	
	c	Pengembangan Kompetensi ASN				83,000,000	40,000,000	432	1,372,000	438	15,872,000	487	16,861,700		39,152,750		39,152,750		
	1	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Diberikannya bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	orang	3	21,000,000	30,000,000		0	2	10,000,000	2	10,000,000	14	30,000,000	14	30,000,000	100	100.00
	2	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Terbinanya tim PAK dan pejabat fungsional	PD/SK	250	17,000,000	10,000,000	432	1,372,000	436	5,872,000	485	6,861,700	485	9,152,750	485	9,152,750	100	91.53
	3	Pengelolaan Assessment Center	Terlaksananya assessment center bagi PNS	byte		45,000,000													

	d Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				115,000,000	38,759,800		1,390,000		5,031,225		13,172,432		17,515,032		17,515,032			
	1 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Tersusunnya Perbup tentang TPP Pegawai ASN Pemkab. Temanggung	Perbup	1	30,000,000	7,999,900		955,000		1,605,000		2,404,100	1	2,536,100	1	2,536,100	100	31.70	
		Terlaksananya fasilitasi penyusunan SKP/P2KP bagi PNS	unit kerja/ OPD	46						7		8		8			17.39		
	2 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terkirimnya dokumen usulan pemberian penghargaan satyaencana karya satya dan pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi (Penghargaan Satya lencana karya satya)	dokumen/ orang	1 / 50	15,000,000	9,000,000	0		0	2,681,225	124	4,405,225	124	5,601,125	124	5,601,125	100		
		Terfasilitasinya uji kesehatan bagi PNS yang sakit berkelanjutan	orang	3			1		1		1		3		3		100		
	3 Pembinaan Disiplin ASN	Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian bagi Kepala OPD dan/pengelola kepegawaian	orang	140	50,000,000	15,000,000	0	355,000	0	665,000	0	6,283,107	140	6,894,807	140	6,894,807	100	45.97	
		Terlaksananya monev pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawain	unit kerja/ OPD	25			3		3		10		10		10		40.00		
		Tercetaknya ID Card bagi ASN	buah	1200			51		51		150		150		150		12.50		

	4	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Diberikannya surat/SK hukuman disiplin pada PNS yang in disiplin sebagai bentuk pembinaan	orang	15	20,000,000	6,759,900	-	80,000	-	80,000	-	80,000	1	2,483,000	1	2,483,000	6.67	36.73
			Terselesaikannya SK izin perceraian	SK/orang	15			11	13		16		21		21			100	
																		Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A2	80,18
																		Predikat	Tinggi
																RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN BIDANG KEPEGAWAIAN	90,09		
																PREDIKAT	Sangat Tinggi		
																RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM BIDANG KEPEGAWAIAN	89.49		
																PREDIKAT	AKAN TERCAPAI		
B	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																		
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																		
			Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki kompetensi diklat kepemimpinan	%	32			21.29	18.09		29.31		30.13		30.13			94.15	
			Persentase ASN yang memenuhi kompetensi Diklat teknis dan fungsional	%	13.5			0.22	15.60		16.25		16.50		16.50			100	
	a	Pengembangan Kompetensi Teknis				100,000,000	0												

	1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya bimtek mandiri	orang	4	100,000,000	-													
	b Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				1,600,000,000	4,881,500,000		7,833,500		81,671,350		1,190,569,765		3,630,307,009		3,630,307,009			
	1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terkirimnya diklatsar/prajabatan bagi CPNSD	orang	884	1,600,000,000	4,881,500,000		7,833,500	160	81,671,350	399	1,190,569,765	884	3,630,307,009	884	3,630,307,009	100	74.37	
		Terkirimnya PNS untuk mengikuti diklat pim II, III dan IV	orang	3			0		0		3		3		3		100		
		Terkirimnya peserta kursus, pelatihan sosialisasi bimtek, ujian dinas, diklat profesi serta sertifikasi	orang	112			3		151		176		176		176		100		
		Terfasilitasinya uji kompetensi bagi pejabat fungsional	orang	25			10		10		10		10		10		40.00		
																		Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1	85.00

											Predikat	Tinggi		
											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	85.00		
											PREDIKAT	Tinggi		
											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	97.08		
											PREDIKAT	AKAN TERCAPAI		
JUMLAH			3,187,597,750	6,041,114,007		153,110,178		454,330,016		1,751,904,571		4,445,504,066	4,445,504,066	
											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH	87.54		
											PREDIKAT	Tinggi		
											RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH	93.28		
											PREDIKAT	AKAN TERCAPAI		

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja BKPSDM
s.d Triwulan I Tahun 2023

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD :

Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN

Meningkatnya Indeks Merit System

No	Bidang / Program / Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2023			Realisasi per Triwulan Th. 2023								Realisasi 2023		Capaian 2023		Ket.
							I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	BIDANG KEPEGAWAIAN																		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
	a Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran			135,600,000	135,594,410		11,480,000							11,480,000	100			
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik bangunan kantor		12	3,600,000	3,599,910	3	85,000							3	85,000	100	2.36	
	2 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersediannya ATK		12	20,000,000	19,999,500	3	2,194,500							3	2,194,500	100	10.97	
	3 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan		12	20,000,000	20,000,000	3	2,321,000							3	2,321,000	100	11.61	
	4 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya jamuan makan dan minuman rapat / tamu		12	42,000,000	41,995,000	3	3,617,000							3	3,617,000	100	8.61	
	5 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		12	50,000,000	50,000,000	3	3,262,500							3	3,262,500	100	6.53	
	b Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				19,000,000														
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor		1	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor	1	13,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			292,607,000	304,605,900		68,676,449							68,676,449				
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat, materai dan benda pos	12	5,000,000	5,000,000	3	21,500						3	21,500	100	0.43		
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	12	40,000,000	39,999,000	3	8,661,095						3	8,661,095	100	21.65		
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya jasa administrasi keuangan, jasa kebersihan dan jasa keamanan kantor	12	247,607,000	259,606,900	3	59,993,854						3	59,993,854	100	23.11		
d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			171,000,000	108,995,020		9,854,272							9,854,272				
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	12	80,000,000	80,000,000	3	9,654,272						3	9,654,272	100	12.07		
2	Pemeliharaan mebel	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebel	12	2,000,000	1,997,500	3	0						3	0	100	0.00		
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terlaksananya pemeliharaan rutin peralatan gedung kantor	12	25,000,000	25,000,000	3	200,000						3	200,000	100	0.80		
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	12	62,000,000			0							0				
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor	12	2,000,000	1,997,520	3	0						3	0	100	0.00		
														Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A1		92		

														Predikat	Sangat Tinggi		
2	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH																
	a Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				290,000,000	237,833,500		18,913,600							18,913,600		
		Persentase penyusunan formasi pegawai	%	100			100							100		100	
		Persentase penyelesaian pensiun PNS tepat waktu	%	100			100							100		100	
		Persentase penyelesaian kenaikan pangkat tepat waktu	%	100			100.00							100		100	
		Persentase penyelesaian pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional	%	100			100							100		100	
		Persentase keterisian jabatan tinggi pratama, jabatan administrator dan jabatan pengawas	%	80			90.46							90		100	
		Persentase perempuan pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas	%	47			41.99							42		89.34	
		Persentase pelanggaran disiplin ASN	%	0.3			0.05							0		100	
		Persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN	%	90			50.00							50		55.56	
		Persentase pelaksanaan updating data kepegawaian	%	95			34.64							35		100	
	1 Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Tersedianya data formasi pegawai dan seleksi ASN	Dokumen	1	260,000,000	212,834,000	2	17,602,250						2	17,602,250	100	8.27

	2	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Diterbitkannya dan diserahkan KARIS / KARSU, KARPEG dan SK pensiun	kartu/sk	400	10,000,000	9,999,500	87	1,311,350						87	1,311,350	100	13.11
	3	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Terkelolanya Pengelolaan Aplikasi Kepegawaian dan terlaksananya update data kepegawaian PNS	OPD / record	24/5000	20,000,000	15,000,000	46/3554	0						46/3554	0	92.28	0.00
	b Mutasi dan Promosi ASN					135,000,000	70,000,000	1,318	16,720,500						16,720,500			
	1	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Diserahkannya SK Pengangkatan CPNS menjadi PNS (ex Pengangkatan PNS)	keg / org	0	15,000,000	10,000,000	884	2,144,500						884	2,144,500	100	21.45
			Terbitnya SK Kenaikan pangkat bagi PNS yang memenuhi syarat (Ex. Penataan sistem administrasi KP)	SK	1000			426							426	0	42.60	
	2	Pengelolaan Promosi ASN	Tersusunnya dokumen rencana pembinaan karir PNS	Dokumen	12	120,000,000	60,000,000	6	14,576,000						6	14,576,000	50	24.29
			Terlaksananya Seleksi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama	Kgt	1			-							0	0	0	
			Terlaksananya prosesi pengambilan sumpah, pelantikan, dan penyerahan SK	kgt	6			2							2	0	33.33	
	c Pengembangan Kompetensi ASN					1,065,000,000	144,766,000	821	542,200						821	542,200	100	5
	1	Pengelolaan Assessment Center	Terlaksananya assessment center bagi PNS	byte		1,000,000,000	134,766,000		0						0	0		
	2	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Diberikannya bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	orang	3	50,000,000	-		0						0	0	0	
	3	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Terbinanya tim PAK dan pejabat fungsional	PD/SK	250	15,000,000	10,000,000	821	542,200						821	542,200	100	5.42
	d Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur					75,000,000	29,999,600		2,662,250						2,662,250			
	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja	Tersusunnya Perbup tentang TPP Pegawai ASN Pemkab.	Perbup	1	22,000,000	9,999,800	1	875,000						1	875,000	100	8.75

	Aparatur	Temanggung															
		Terlaksananya fasilitas penyusunan SKP/P2KP bagi PNS	unit kerja/ OPD	46	22,000,000	9,999,800		875,000					0	875,000	0.00	8.75	
	2 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Terkirimnya dokumen usulan pemberian penghargaan satya lencana karya satya dan pemberian penghargaan bagi PNS berprestasi (Penghargaan Satya lencana karya satya)	dokumen/ orang	1 / 50	7,000,000	9,999,800	95	1,672,250					95	1,672,250	0.52		
		Terfasilitasinya uji kesehatan bagi PNS yang sakit berkelanjutan	Orang	3			2						2		67		
	3 Pembinaan Disiplin ASN	Terseleenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan kepegawaian bagi Kepala OPD dan/pengelola kepegawaian	orang	140	37,000,000	10,000,000	0	115,000					0	115,000	0	1.15	
		Terlaksananya monev pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang kepegawain	unit kerja/ OPD	25			3						3		12.00		
		Tercetaknya ID Card bagi ASN	buah	1200			51						51		4.25		
	4 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Diberikannya surat/SK hukuman disiplin pada PNS yang in disiplin sebagai bentuk pembinaan	orang	15	9,000,000	-	0	0					0	0	0.00		
		Terselesaikannya SK izin perceraian	SK/orang	15			11						11		100		
													Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program A2		50.08		
													Predikat		Sangat Tinggi		
													RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN BIDANG KEPEGAWAIAN		71.20		
													PREDIKAT		Sedang		

														RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM BIDANG KEPEGAWAIAN	93.88	
														PREDIKAT	AKAN TERCAPAI	
B	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN															
1	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA															
		Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki kompetensi diklat kepemimpinan	%	32			28.60							28.60		89.38
		Persentase ASN yang memenuhi kompetensi Diklat teknis dan fungsional	%	13.5			0.29							0.29		100
	a Pengembangan Kompetensi Teknis				200,000,000	30,000,000		3,452,500							3,452,500	
	1 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Terselenggaranya bimtek mandiri	orang	4	200,000,000	30,000,000	10	3,452,500							3,452,500	
	b Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional				411,000,000	330,890,000		1,661,500							1,661,500	

1	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Terkirimnya diklatsar/prajabatan bagi CPNSD	orang	884	411,000,000	330,890,000	884	1,661,500						884	1,661,500	100	0.50
		Terkirimnya PNS untuk mengikuti diklat pim II, III dan IV	orang	3										0		0	
		Terkirimnya peserta kursus, pelatihan sosialisasi bimtek, ujian dinas, diklat profesi serta sertifikasi	orang	112										18		100	
		Terfasilitasinya uji kompetensi bagi pejabat fungsional	orang	25			8							0		0.00	
														Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program B1		60.00	
															Predikat	Sangat Tinggi	
														RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		60.00	
															PREDIKAT	Sangat Tinggi	
														RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		94.69	
															PREDIKAT	UPAYA KERAS	
JUMLAH					2,794,207,000	1,392,684,430		133,963,271	0	0	0			133,963,271			
														RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH		65.60	
															PREDIKAT	Sangat Tinggi	
														RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH		94.28	
															PREDIKAT	UPAYA KERAS	

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2022 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra BKPSDM Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja BKPSDM di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan BKPSDM berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan/sub kegiatan sbb:
 - a. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 4) Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan mebel
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - a. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Mutasi dan Promosi ASN
 - 1) Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN (83,30%)
 - d. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 1) Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- 2) Pembinaan Disiplin ASN
- e. Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional
 - 1) Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
- 2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan/sub Kegiatan sbb:
 - a. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN
 - 1) Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN
 - 2) Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan
 - 3) Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - b. Pengembangan Kompetensi ASN
 - 1) Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
 - 2) Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional
 - c. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 1) Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- 3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, kegiatan/sub kegiatan tersebut adalah:
 - b. Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
 - 1) Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

Penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan Penyelesaian kasus pelanggaran disiplin yang ditargetkan 100% namun capaian kinerjanya hanya 6,67% adalah karena kasus terjadi/dilaporkan pada akhir tahun 2022, sehingga pada akhir tahun tersebut masih dalam proses penanganan kasus, sehingga belum dapat diterbitkan SK pelanggaran disiplinya.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2022, maka dapat dikatakan bahwa BKPSDM dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja sasaran dengan

kategori **Baik** yaitu dengan nilai **97,25%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

- ❖ Meningkatkan kualitas manajemen kepegawaian;

Capaian Kinerja : 97,25 % kategori Baik

Dari Tabel 2.1. dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2022 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan BKPSDM

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan BKPSDM dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah BKPSDM Triwulan I Tahun 2023 (**Laporan IKPD**)
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2023 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Indeks Profesionalitas ASN	angka indeks	49	50.03	50.05	50.07	50.09	51.7	50.03	51.24	53.13	53.16	100	TT
2	Indeks Sistem Merit	angka indeks	n.a	n.a	0.41	0.51	0,61	-	-	0.259	0.482	0.482	79.02	UK
3	Persentase penyusunan formasi pegawai	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT
4	Persentase penyelesaian usulan pensiun PNS tepat waktu	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT
5	Persentase penyelesaian usulan kenaikan pangkat tepat waktu	%	99.81	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT
6	Persentase keterisian jabatan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas	%	80	80	80	80	80	77.48	76.38	90.33	86.51	90.46	100	TT
7	Persentase perempuan pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas	%	45.5	46	47	47	48	45.81	46.79	46.96	42.09	41.99	87.47	UK
8	Persentase pelanggaran disiplin ASN	%	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.22	0.25	0.25	0.02	0.05	100	TT
9	Persentase penyelesaian penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN	%	90	90	90	90	90	100	100	86.67	14.29	50.00	55.56	UK
10	Persentase pelaksanaan updating data kepegawaian	%	80	85	90	95	95	100	100	100	100	34.64	36.46	UK
11	Persentase penyelesaian pengangkatan dan kenaikan jabatan fungsional	%	n.a	95	100	100	100	n.a	n.a	100	100.00	100.00	100	TT
12	Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki kompetensi diklat	%	37.6	27.08	29.69	32	35	37.91	27.08	25.08	30.13	28.60	81.72	UK

	kepemimpinan													
13	Persentase ASN yang memenuhi kompetensi diklat teknis dan fungsional	%	3	4.5	9	13.5	18	4.87	7.36	14.57	16.50	17.01	94.50	UK
	Jumlah Indikator Sasaran	2	Rata rata capaian kinerja sasaran										89,51	
	Jumlah Indikator Program	11	Rata rata capaian kinerja program										87,36	
	Jumlah semua Indikator	13	Rata rata capaian perangkat daerah										88,43	

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Indikator Sasaran PD

a. Indeks Profesionalitas ASN dengan status telah tercapai.

Penghitungan pencapaian IP ASN sebelum tahun tahun 2022 masih berdasarkan hasil hitungan secara manual dengan data yang ada di BKPSDM dan belum mendapatkan verifikasi dari BKN. Verifikasi dari BKN untuk mendapatkan nilai ASN Kabupaten Temanggung baru diketahui pada awal triwulan II tahun 2022, karena di akhir tahun 2021 data kinerja (nilai P2KP) belum terunggah di aplikasi SAPK/IP ASN. Pada awal tahun 2022, BKN telah mengupdate data IP ASN yang telah terkoneksi dengan MySAPK.

Capaian IP ASN triwulan I tahun 2023 yaitu sebesar 53,16 lebih tinggi 3,09 dari target yang direncanakan yaitu 50,07. Nilai IP ASN yang melebihi target tersebut disebabkan oleh sudah terinputnya sebagian besar data kinerja pegawai (P2KP) dan data kompetensi pegawai (sertifikat diklat) yang merupakan bagian dari dimensi penilaian IP ASN. Meskipun capaian IP ASN tahun 2023 meningkat dari tahun-tahun sebelumnya dan telah mencapai dari target yang direncanakan, akan tetapi masih tergolong dalam kategori sangat rendah.

Faktor pendorong, penghambat dan tindak lanjut/rekomendasi indikator ini adalah :

- 1) Faktor Pendorong: Update data kepegawaian yang dilakukan oleh pengelola kepegawaian di PD dan atau update data yang dilakukan secara mandiri oleh ASN lewat aplikasi MySAPK dan keikutsertaan ASN mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi secara mandiri.
- 2) Faktor penghambat: belum terkoneksinya Data Kepegawaian dengan perhitungan Indeks
- 3) Rekomendasi/tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan koordinasi yang intensif dengan BKN selaku pengelola data kepegawaian (SAPK) dan pemberi rekomendasi/mengeluarkan nilai indeks.

b. Indeks Merit System dengan status perlu upaya keras

Pengukuran pengembangan karir dengan sistem merit baru dilakukan pada Tahun 2021, capaian kinerja indikator ini tahun 2021 merupakan hasil verifikasi dari KASN terhadap bukti dukung aspek-aspek penilaian sistem merit di tahun 2020.

Pada tahun 2020 penilaian merit system dilakukan secara mandiri dengan cara mengunggah data dukung aspek aspek sistem merit lewat aplikasi *sipinter*, dan baru mendapatkan penilaian/verifikasi dari KASN di bulan November 2021, adapun tambahan kinerja setiap aspek penilaian *merit system* yang telah dilakukan di tahun 2021 belum dapat ditambahkan untuk penambahan skor *merit system* tahun 2021 karena dokumen pendukung/pelaksanaan kegiatannya baru dilaksanakan pada akhir triwulan IV tahun 2021.

Pada Triwulan I 2023 ini capaian kinerja sasaran indeks sistem merit masih menggunakan hasil penilaian sistem merit dari KASN tahun 2022 dengan nilai yang diperoleh sebesar 200 atau indeks sebesar 0,482 dan kategori kurang. Hasil tersebut belum sesuai target capaian tahun 2023 yaitu sebesar 0,61. Penyebab masih belum tercapainya target tersebut antara lain:

1. Aspek Pengembangan Karir, yaitu belum tersusunnya Standar Kompetensi Jabatan Administrator dan Pengawas sehingga belum dapat merumuskan kesenjangan (*gap*) kompetensi dan kualifikasi. Tindak lanjut yang dilakukan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk menyusun Standar Kompetensi Jabatan.
2. Aspek Promosi dan Mutasi, yaitu belum memiliki rencana suksesi *by system* untuk seluruh pegawai. Tindak lanjut yang dilakukan menyusun rencana suksesi dari hasil asesmen yang kemudian diinput dalam aplikasi *sinta merit*.
3. Aspek Manajemen Kinerja, yaitu belum menyusun kesenjangan (*gap*) kinerja. Tindak Lanjut yang dilakukan membangun aplikasi 360°.

Untuk dapat mencapai target yang ditetapkan pada indikator kinerja indeks sistem merit maka diperlukan komitmen Pemerintah Daerah untuk menggunakan sistem merit dalam pengelolaan manajemen PNS berupa Peraturan Bupati.

2. Capaian indikator Program dengan status telah tercapai ada 5 terdiri dari:
 - a. Persentase Penyusunan Formasi Pegawai.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kebutuhan akan SDM yang mendesak karena pegawai pensiun dan mutasi sehingga semua PD mengusulkan formasi kebutuhan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah:
 - a) Beberapa jabatan belum disesuaikan dengan peta jabatan yang ada
 - b) Beberapa jenjang JF belum terakomodir dalam peta jabatan yang ada
 - c) Pengusulan kebutuhan SDM menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah terbatas
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah dilakukan bimtek/diklat penghitungan dan koordinasi internal di BKPSDM dan Koordinasi yang intensif dengan Bagian Ortala Setda.
 - b. Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun PNS tepat waktu
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kesadaran pegawai agar tidak terjadi keterlambatan dalam penyaluran gaji pensiunan, sehingga memacu untuk mengusulkan pensiun 6 bulan - 1 tahun sebelum BUP. Semakin meningkatnya Pelayanan Administrasi urusan pensiun di BKN, adanya kerjasama dan kinerja yang baik antar pengelola kepegawaian tingkat kabupaten maupun Perangkat Daerah.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kelengkapan dan kevalidan berkas usul pensiun dan pegawai yang akan pensiun belum/tidak upload pdf dokumen kepegawaian sebagai kelengkapan usul pensiun melalui e-file di Simpeg.

- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Membuat surat edaran dan sosialisasi kepada yang menangani kepegawaian atau PNS yang akan pensiun agar melakukan update data dan upload dokumen elektronik di SIMPEG serta oordinasi yang intensif dengan PD dan BKN.
- c. Persentase Penyelesaian Usulan kenaikan pangkat PNS tepat waktu
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah anggapan kenaikan pangkat sebagai hak setiap PNS dan tugas PD berusaha untuk mengusulkan kenaikan pangkat tepat waktu.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah:
 - a. Berkas belum lengkap.
 - b. Proses verifikasi hingga terbitnya SK menunggu Pertek BKN yang memakan waktu lama.
 - c. Keterlambatan upload dokumen P2KP dan SKP dikarenakan ada perubahan peraturan.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mengoptimalkan personil/SDM pengampu usul kenaikan pangkat (petugas verifikator, petugas input data SAPK dan petugas upload dokumen di DocuDigital BKN) serta mengoptimalkan komunikasi dengan PD dan BKN.
- d. Persentase Penyelesaian Pengangkatan dan Kenaikan Jabatan Fungsional
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah angka kredit yang sudah mencukupi untuk naik jabatan fungsional dan setelah itu keinginan untuk proses usul kenaikan pangkat karena sk pengangkatan dan kenaikan jabatan merupakan salah persyaratan kenaikan pangkat.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah perlu ketelitian dalam proses verifikasi usulan JF, dikarenakan peraturan perundang-undangan yang berbeda bagi masing-masing jabatan fungsional yang ada.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah: dilakukan pembinaan dan koordinasi dengan instansi pengusul.

- e. Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jababat Pengawas.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah komitmen dari PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian) untuk segera dilakukan pengisian jabatan yang kosong, dan adanya penyederhanaan birokrasi
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah keterbatasan sumberdaya SDM yang akan diproyeksikan untuk menduduki jabatan struktural
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Menambah kuota peserta diklatpim, dan dilakukan assessment/talenta terhadap PNS yang memenuhi syarat untuk diproyeksikan menduduki jabatan struktural.
 - f. Persentase Pelanggaran Disiplin ASN.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah meningkatnya kepatuhan ASN/PNS terhadap Peraturan Perundang-undangan Bidang Kepegawaian.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian terhadap para pejabat struktural kadang tidak tersampaikan kepada para pejabat pelaksana/fungsional
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah dilakukan sosialisasi kepada unit PD terkecil secara non formal.
3. Capaian indikator Program dengan status Upaya Keras ada 5 terdiri dari:
- a. Persentase Perempuan pada Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan jabatan Pengawas
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah makin terbuka dan meningkatnya kompetensi perempuan untuk menjabat pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah keterbatasan sumberdaya SDM yang akan diproyeksikan untuk menduduki jabatan.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah menambah kuota peserta diklatpim, khususnya

perempuan

- b. Persentase Pelaksanaan updating data kepegawaian
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kinerja pengelola kepegawaian PD yang konsisten mengirimkan update data kepegawaiannya ke BKPSDM dan adanya SIMPEG Online memudahkan pengiriman/update data kepegawaian secara mandiri
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah bukti fisik terhadap update data kepegawaian dari PD tidak tersampaikan ke BKPSDM
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah konfirmasi ke PD atas kebenaran perubahan/ update data kepegawaian yang dilakukan.
- c. Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah atasan langsung segera menindaklanjuti atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh bawahannya
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah terjadinya kasus pada akhir triwulan I sehingga pada saat tersebut masih dilakukan tahapan penyelesaian kasus.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah memaksimalkan dan mengupayakan penyelesaian kasus di bulan/triwulan/tahun berkenaan.
- d. Persentase Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang memiliki kompetensi Diklat Kepemimpinan.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah perencanaan pengukuran target kinerja yang realistis dengan kemampuan keuangan yang ada dan komitmen peserta diklat untuk lulus diklat
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah keterbatasan kuota dari penyelenggara diklat manajerial (BPSDMD Prov. Jateng) dan keterbatasan keuangan daerah untuk pembiayaan diklat, dan adanya refocusing anggaran
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah

melakukan kerjasama dengan Badan Diklat Kemendagri dan Badan Diklat Prov.DIY.

- e. Persentase ASN yang memenuhi kompetensi Diklat teknis dan fungsional
- 1) Faktor Penghambat indikator tersebut adalah dengan adanya Covid -19 pada T.A 2020 maka penyelenggaraan maupun pengiriman peserta Bimtek/diklat teknis fungsional mengalami penundaan dan untuk Bimtek TF, berkurangnya anggaran untuk Bimtek TF sehingga mengurangi target peserta bimtek, sehingga berdampak pada capaian indikator di tahun 2023.
 - 2) Faktor pendorong indikator tersebut adalah tawaran keikutsertaan Diklat Teknis/Fungsional tidak hanya dari Badan Diklat Provinsi Jateng (BPSDMD) akan tetapi juga dari instansi vertikal penyelenggara diklat.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah dilakukan komunikasi ke BPSDMD untuk penyelenggaraan Bimtek TF secara virtual.

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok Pembangunan pada BKPSDM Kabupaten Temanggung terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok capaian Indikator sasaran perangkat Daerah dan Data Pokok Bidang pendukung capaian indikator kinerja program dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok capaian indikator sasaran Perangkat Daerah
 - a. Indeks Profesionalitas ASN

Realisasi Indeks Profesionalitas ASN tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4

IP ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-2022

No.	Dimensi Pengukuran	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Kualifikasi	9	10,34	10,82	11,907	12,39
2.	Kompetensi	7	11,48	9,15	9,343	12,73
3.	Kinerja	25	25,07	25,09	25	23,01
4.	Disiplin	5	4,95	4,97	4,997	5
TOTAL		46	51,74	50,03	51,247	53,13

b. Indeks Merit System

Realisasi Indeks Merit System tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.5
Indeks Sistem Merit Kabupaten Temanggung
Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020*	2021	2022
1.	Penilaian Sistem Merit	n.a	n.a	218	113	200
2.	Indeks Sistem Merit	n.a	n.a	0,52	0,259	0,482

2. Data Pokok Pendukung capaian Indikator Program

a. Persentase Penyusunan Formasi Pegawai

Tabel 2.6
Penyusunan Formasi Pegawai
Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah perangkat daerah yang menyusun formasi dan terverifikasi	48	47	47	46	46
2.	Jumlah perangkat daerah	48	47	47	46	46
3.	Persentase Penyusunan formasi Pegawai	100	100	100	100	100

b. Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun PNS tepat waktu.

Tabel 2.7
Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun Tepat Waktu
Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah usulan Pensiun yang memenuhi syarat	304	366	381	424	378
2	SK Pensiun yang terbit sebelum TMT Pensiun	304	366	381	424	378
3	Persentase Penyelesaian Usulan Pensiun tepat waktu (%)	100	100	100	100	100

- c. Persentase Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat PNS tepat waktu.

Tabel 2.8
Persentase Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat Tepat Waktu Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah usulan Kenaikan Pangkat yang memenuhi syarat	1.034	1.020	1.053	915	833
2	SK Kenaikan pangkat yang terbit sebelum TMT	1.032	1.020	1.053	915	833
3	Persentase Penyelesaian Usulan kenaikan pangkat tepat waktu (%)	99,81	100	100	100	100

- d. Persentase Penyelesaian Pengangkatan dan Kenaikan Jabatan Fungsional

Tabel 2.9
Persentase Penyelesaian Pengangkatan dan Kenaikan Jabatan Fungsional Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah usulan Pengangkatan dan kenaikan Jabatan Fungsional	n.a	n.a	n.a	377	203
2	SK Pengangkatan dan kenaikan Jabatan Fungsional yang terbit	n.a	n.a	n.a	377	203
3	Persentase Penyelesaian Usulan Pengangkatan dan kenaikan Jabatan Fungsional (%)	n.a	n.a	n.a	100%	100%

- e. Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki kompetensi diklat kepemimpinan.

Tabel 2.10

Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memiliki kompetensi diklat Kepemimpinan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pejabat yang telah lulus diklat PIM	253	240	169	157	141
2	Jumlah pejabat	710	633	624	626	481
3	Persentase pejabat yang memiliki kompetensi diklat PIM (%)	35,63	37,91	27,08	25,08	30,13

- f. Persentase ASN yang memiliki kompetensi diklat teknis dan fungsional

Tabel 2.11

Persentase ASN yang memiliki kompetensi diklat teknis dan fungsional Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah PNS yang ikut diklat teknis/fungsional	678	325	462	861	1.047
2	Jumlah PNS	6.778	6.670	6.280	5.910	6.347
3	Persentase PNS yang ikut diklat teknis/fungsional	10,00	4,87	7,36	14,57	16,50

- g. Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas

Tabel 2.12

Persentase Keterisian Jabatan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Jabatan Terisi	710	633	624	626	468
2	Jumlah Jabatan Kosong	36	184	193	67	73
3	Jumlah formasi jabatan	746	817	817	693	541
4	Persentase Keterisian Jabatan	95,17	77,48	76,37	90,33	86,51

- h. Persentase Perempuan pada jabatan Pimpinan Tinggi, jabatan Administrator, dan jabatan Pengawas

Tabel 2.13
Persentase Perempuan pada jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas
Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Pejabat Perempuan	318	290	292	294	197
2	Jabatan Terisi	710	633	624	626	468
3	Jumlah formasi jabatan	44,79	45,81	46,79	46,796	42,09

- i. Persentase Pelanggaran Disiplin ASN

Tabel 2.14
Persentase Pelanggaran Disiplin ASN
Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah ASN yang melakukan pelanggaran disiplin	12	15	16	15	1
2	Jumlah PNS	6.778	6.670	6.280	5.910	6.347
3	Persentase Pelanggaran Disiplin ASN	0,17	0,22	0,25	0,25	0,02

- j. Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN

Tabel 2.15
Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah SK Hukuman Disiplin yang terbit	7	17	15	13	1
2	Jumlah Kasus pelanggaran Disiplin ASN yang masuk	7	17	15	15	7
3	Persentase Penanganan kasus pelanggaran disiplin ASN	100	100	100	86,67	14,29

k. Persentase Pelaksanaan Updating Data Kepegawaian

Tabel 2.16

Persentase Pelaksanaan Updating Data Kepegawaian
Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah data PNS yang terverifikasi	1.797	5.023	5.760	6.256	12.219
2	Jumlah PNS yang mengusulkan updating data	1.797	5.023	5.760	6.256	12.219
3	Persentase Updating data kepegawaian	100	100	100	100	100

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan BKPSDM dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja BKPSDM dari 13 indikator terdapat 6 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

- Indikator Indeks *Merit System*

Angka indeks *merit system* masih rendah disebabkan oleh belum terpenuhinya bobot nilai di beberapa sub aspek pada aspek yaitu:

1) Aspek Pengembangan Karir

- Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi;
- Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;
- Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja;
- Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN;
- Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai;

- f) Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring;

2) Aspek Promosi dan Mutasi

- a) Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) tentang pola karir;
- b) Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwali) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi;

Oleh karena itu upaya-upaya yang telah dan akan dilakukan guna pemenuhan beberapa sub aspek tersebut di atas adalah sebagai berikut:

o Tahun 2021

Di penghujung tahun 2021 pemkab telah menerbitkan peraturan bupati tentang pola karir dan pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada *talent pool* dan rencana suksesi. Namun demikian berdasarkan hasil penilaian dari KASN, dokumen yang diupload belum ternilai.

o Tahun 2022

a. Sebagai langkah tindak lanjut dari kegiatan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional, BKPSDM telah menyusun dokumen Pemetaan Pola Karir sekaligus mereview perbup tentang Pola Karir

b. peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring dengan konsep:

1) coaching dilakukan dengan menugaskan pegawai lintas Perangkat Daerah untuk peningkatan kompetensi teknis

2) mentoring dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja organisasi (Perangkat Daerah)

o Tahun 2023

Rencana tindak lanjut BKPSDM terhadap indikator sasaran indeks sistem merit yang belum tercapai adalah sebagai berikut:

1. Dengan anggaran tersedia BKPSDM telah melakukan asesmen (CAT Potensi bekerja sama dengan BKD Provinsi Jawa Tengah) untuk seluruh pejabat eselon III, IV dan beberapa Pejabat Fungsional serta pelaksana sejumlah 464 pegawai. Selanjutnya BKPSDM juga akan mengirim 9 pegawai untuk mengikuti asesmen bekerja sama dengan Polda Jawa Tengah.
2. BKPSDM bekerja sama dengan Dinkominfo dalam mengembangkan aplikasi Sinta Merit yang merupakan aplikasi untuk mendukung penerapan sistem merit terutama dalam hal manajemen talenta. BKPSDM juga telah bekerja sama dengan Dinkominfo dalam mengembangkan aplikasi penilaian kinerja 360° yang juga untuk mendukung penerapan sistem merit dalam aspek manajemen kinerja.
3. BKPSDM telah menyusun draft Peraturan Bupati Temanggung tentang Kesejahteraan, Pemberian Bantuan Hukum, dan Penghargaan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung yang mendukung dua aspek sistem merit yaitu aspek penggajian, penghargaan dan disiplin serta aspek perlindungan dan pelayanan.

Aspek pada indikator *merit system* bukan hanya dikawal oleh BKPSDM tetapi juga oleh Bagian Organisasi Setda yaitu dalam kegiatan penyusunan standar kompetensi jabatan, peta jabatan, analisis jabatan dan analisis beban kerja.

- Indikator persentase perempuan pada jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan jabatan pengawas
Hal ini disebabkan berkurangnya jumlah ASN perempuan yang menduduki jabatan fungsional karena kebijakan penyederhanaan birokrasi dengan penyetaraan ke jabatan fungsional serta penerapan Sistem Merit dalam pengangkatan pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas. Namun dengan makin terbuka dan meningkatnya kompetensi perempuan untuk menjabat pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas maka perlu

memberi kesempatan yang sama dalam peningkatan kompetensi, khususnya bagi perempuan sehingga diharapkan bisa meningkatkan persentase perempuan pada JPT, jabatan administrator dan jabatan pengawas.

- **Persentase Pelaksanaan updating data kepegawaian**
 Pada triwulan I 2023 update data yang sudah selesai diverifikasi baru data pegawai CPNS yang baru diangkat menjadi PNS. Sebagian besar data dukung terhadap update data kepegawaian dari PD tidak tersampaikan ke BKPSDM.
- **Indikator Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN**
 Hal ini disebabkan karena terjadinya kasus pada akhir Triwulan I tahun 2023 sehingga pada saat tersebut masih dilakukan tahapan penyelesaian kasus.
- **Indikator persentase Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat Pengawas yang memiliki kompetensi Diklat Kepemimpinan.**
 Hal ini disebabkan karena pejabat yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan sudah purna tugas (pensiun) dan adanya promosi pejabat struktural (Pejabat yang promosi ke jenjang lebih tinggi meskipun yang bersangkutan sudah mengikuti diklatpim pada eselon di bawahnya tidak dihitung lagi keikutsertaan diklatpimnya). Hal ini jika dibandingkan dengan anggaran untuk pengiriman diklat kepemimpinan yang setiap tahunnya statis sebanyak kurang lebih 30 orang tidak signifikan untuk mengimbangi jumlah pejabat struktural yang pensiun dan promosi.
- **Persentase ASN yang memenuhi kompetensi Diklat teknis dan fungsional**
 Sejak tahun 2020 dengan adanya Covid -19 maka penyelenggaraan maupun pengiriman peserta Bimtek/diklat teknis fungsional mengalami penundaan dan untuk Bimtek TF, berkurangnya anggaran untuk Bimtek TF karena refocusing covid 19, sehingga mengurangi target peserta bimtek dan berdampak pada capaian indikator di tahun 2023

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM Kabupaten Temanggung antara lain :

a) Bidang Kepegawaian

Capaian Indeks Profesionalitas ASN pada Triwulan I Tahun 2023 masih rendah yaitu di angka 53,16 atau jika dalam nilai prestasi kerja masih pada kategori sangat rendah (≤ 60). Hal ini disebabkan karena belum terkoneksi data kepegawaian dengan perhitungan indeks, dan belum semua pegawai melakukan update dan upload data kepegawaian seperti P2KP (kinerja) dan sertifikat diklat (kompetensi) yang merupakan salah satu aspek dalam dimensi penilaian IP ASN. Pencapaian skor paling rendah ada pada dimensi kompetensi yaitu sebesar 32%, padahal bobot dimensi kompetensi menyumbang nilai paling besar terhadap pengukuran IP ASN yaitu sebesar 40%. Skor dimensi kompetensi diperoleh melalui pendataan terhadap riwayat keikutsertaan PNS dalam kegiatan diklat atau bimbingan teknis minimal 20 JP selama 1 tahun terakhir dan seminar selama 2 tahun terakhir yang relevan dengan tugas dan jabatannya. Di masa pandemi Covid-19 dilakukan *refocusing* anggaran sehingga terjadi pengurangan anggaran pengembangan kompetensi PNS, hal ini berpengaruh terhadap pencapaian IP ASN.

Belum maksimalnya capaian Indeks Sistem Merit yang mana pada Triwulan I Tahun 2023 hasil penilaiannya sebesar 0,482 atau masih berada pada kategori III (0,41-0,6) dengan status kurang. Kabupaten Temanggung masih dibawah 12 kota/kabupaten di Jawa Tengah yang kemarin menyabet penghargaan dengan kategori baik. Hal ini dikarenakan Kabupaten Temanggung belum mempunyai kebijakan internal yang mengatur beberapa aspek dalam sistem merit, serta masih terbatasnya jumlah sumber daya manusia pelaksana manajemen ASN.

b) Bidang Pendidikan dan Pelatihan

Penurunan persentase kompetensi diklat kepemimpinan yang mana jumlah pejabat yang telah lulus diklat kepemimpinan sampai dengan Triwulan I tahun 2023 tercapai 26,80% lebih

rendah 8,2% dari target tahun 2023 yaitu sebesar 35%. Hal ini disebabkan karena adanya keterbatasan kuota dari penyelenggara diklat manajerial (BPSDMD Provinsi Jawa Tengah) serta karena adanya proses manajemen kepegawaian yaitu adanya pejabat yang pensiun, promosi maupun mutasi, serta penyetaraan dalam jabatan fungsional. Promosi jabatan berdampak pada pengurangan jumlah pejabat yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan pada setiap jenjang.

Terhadap permasalahan dan hambatan sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan upaya mengatasinya sebagai berikut:

- a) Koordinasi yang intensif dengan BKN selaku pengelola data kepegawaian (SAPK) dan pemberi rekomendasi/ yang mengeluarkan nilai indeks. Sebagian pegawai telah melakukan update data kepegawaian seperti P2KP (kinerja) dan sertifikat diklat (kompetensi) yang merupakan aspek dalam dimensi penilaian dalam IP ASN.
- b) Tindak lanjut upaya pencapaian target system merit adalah pada tahun 2023, telah diasesmen (CAT Potensi BKD Provinsi Jawa Tengah) 464 pegawai dan 9 pegawai akan diasesmen di Polda Jawa Tengah. BKPSDM dengan Dinkominfo mengembangkan aplikasi Sinta Merit untuk manajemen talenta dan aplikasi penilaian kinerja 360° untuk aspek manajemen kinerja. BKPSDM menyusun draft Perbup tentang Kesejahteraan, Pemberian Bantuan Hukum, dan Penghargaan Bagi ASN di Temanggung untuk aspek penggajian, penghargaan dan disiplin serta aspek perlindungan dan pelayanan.
- c) Melakukan kerjasama dengan Badan Diklat Kemendagri dan Badan Diklat Prov.DIY, dan mengusulkan peserta untuk mengikuti diklat yang tidak berbayar ke BPSDM Kemendagri.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan pagu indikatif pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemda, sub kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp50.000.000,00
2. Terdapat penambahan pagu indikatif Program Kepegawaian daerah sebesar Rp237.000.000,00 yang terdiri dari
 - a. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN sebesar Rp198.000.000,00 ;
 - b. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebesar Rp39.000.000,00 yang terdiri dari:
 - i. Sub Kegiatan Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur sebesar Rp20.000.000,00
 - ii. Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN sebesar Rp10.000.000,00
 - iii. Sub Kegiatan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN sebesar Rp9.000.000,00
3. Terdapat penambahan pagu indikatif Program Pengembangan SDM, Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp24.000.000,00

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.17 berikut:

Tabel 2.17

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
1	KEPEGAWAIAN						1	KEPEGAWAIAN						
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Paket	3.599.910		- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Paket	3.599.910	
	- Penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya bahan logistik kantor	12	Paket	19.999.500		- Penyediaan bahan logistik kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya bahan logistik kantor	12	Paket	19.999.500	
	- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	Paket	20.000.000		- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12	Paket	20.000.000	
	- Fasilitas kunjungan tamu	Kab. Temanggung	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	12	Laporan	41.995.000		- Fasilitas kunjungan tamu	Kab. Temanggung	Terlaksananya fasilitasi kunjungan tamu	12	Laporan	41.995.000	
	- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Terlak Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sananya	12	Laporan	50.000.000		- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Terlak Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sananya	12	Laporan	50.000.000	
2.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
	- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5.000.000		- Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Tersedianya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	38.989.400		- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Tersedianya Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	Laporan	38.989.400	
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	38.989.400		- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	Laporan	38.989.400	
2.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemda						4.	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang Urusan Pemda						
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kab. Temanggung	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	19	Unit	80.000.000		- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kab. Temanggung	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	19	Unit	80.000.000	
	- Pemeliharaan Mebel	Kab. Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	353	Unit	1.997.500		- Pemeliharaan Mebel	Kab. Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	353	Unit	1.997.500	
	- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya	408	Unit	25.000.000		- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya Peralatan dan Mesin Lainnya	408	Unit	25.000.000	
	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	Unit	0		- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2	Unit	50.000.000	Rehab atap dan ruang kantor

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor dan Bangunan Lainnya	45	Unit	1.957.520		- Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor dan Bangunan Lainnya	45	Unit	1.957.520	
B.	Program Kepegawaian Daerah						B.	Program Kepegawaian Daerah						
1.	Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian						1.	Pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian						
	- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	dokumen	202,765,000		- Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	dokumen	202,765,000	
	- Koordinasi Pelaksanaan administrasi pemberhentian	Kab. Temanggung	Jml dokumen hasil koord. Pelaksanaan administrasi pemberhentian	400	dokumen	28,252,000		- Koordinasi Pelaksanaan administrasi pemberhentian	Kab. Temanggung	Jml dokumen hasil koord. Pelaksanaan administrasi pemberhentian	400	dokumen	28,252,000	
	- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Temanggung	Jml dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5000	dokumen	25,104,000		- Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Kab. Temanggung	Jml dokumen hasil pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5000	dokumen	25,104,000	
2	Mutasi dan Promosi ASN						1.	Mutasi dan Promosi ASN						

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	- Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Kab. Temanggung	Jml Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	750	dokumen	39,408,000	2.	- Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	Kab. Temanggung	Jml Pengelolaan kenaikan pangkat ASN	750	dokumen	39,408,000	
	- Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Temanggung	Jml dokumen hasil pengelolaan promosi	6	dokumen	175,000,000		- Pengelolaan Promosi ASN	Kab. Temanggung	Jml dokumen hasil pengelolaan promosi	6	dokumen	175,000,000	
3	Pengembangan Kompetensi ASN						3.	Pengembangan Kompetensi ASN						
	- Pengelolaan Assessment Center	Kab. Temanggung	Jml dokumen pengelolaan assessment	1	dokumen	1,171,000,000		- Pengelolaan Assesment Center	Kab. Temanggung	Jml dokumen pengelolaan assessment	1	dokumen	1,171,000,000	
	- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Temanggung	Jml ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	12	orang	0		- Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Temanggung	Jml ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	12	orang	198,000,000	Bantuan Tugas Belajar
	- Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kab. Temanggung	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	400	orang	25,571,500		- Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kab. Temanggung	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	400	orang	25,571,500	
4.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						4.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						
	- Penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3	dokumen	31,181,600		- Penyusunan kebijakan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3	dokumen	31,181,600	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
	-Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	laporan	15,000,000		-Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	laporan	35,000,000	Medical Check up
	- Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Temanggung	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	300	orang	25,488,400		- Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Temanggung	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	300	orang	35,488,400	Keg. Sosialisasi dan Cetak Id Card
	- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	laporan	0		- Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	laporan	9,000,000	Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran Disiplin
C	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						C	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA						
1.	Pengembangan Kompetensi Teknis Umum							Pengembangan Kompetensi Teknis -						
	-Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan	Kab. Temanggung	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	400	orang	291,026,000		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Kab. Temanggung	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	400	orang	315,026,000	Kepesertaan Ujikom PPK

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
2.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						2.	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						
	- Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5	laporan	1,829,373,000		-Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5	laporan	1,829,373,000	

Sumber : BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di BKPSDM ada 3 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.18
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2020-2022

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
1	E-File	ASN	--	ASN mengubah semua file kepegawaian dalam bentuk digital dengan format PDF. File tersebut di upload di E-File melalui akun masing-masing ASN. File tersebut akan di download admin sesuai kebutuhan untuk proses upload pada saat pelayanan kepegawaian di BKN secara online	Tersedianya <i>Soft file</i> kepegawaian ASN	Mempercepat proses layanan kepegawaian yang dilakukan melalui aplikasi BKN yang sudah mulai mengurangi layanan dengan berkas (paperless) seperti Kenaikan Pangkat, Kenaikan Jabatan / Pensiun	Diskominfo & BKPSDM / 2020
2	Pengembangan Mutasi Pegawai	BKPSDM	APBD	BKPSDM menginput nominasi pegawai yang akan promosi dan pegawai yang akan mutasi. Tim Penilai Kinerja melakukan penataan pegawai. Selanjutnya Tim Penilai Kinerja memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam bentuk Berita Acara Tim Penilai Kinerja	Tersedianya Aplikasi Penataan Pegawai di Lingkungan Pemkab Temanggung	Meningkatnya akurasi penempatan pegawai sesuai dengan latar belakang pendidikan, syarat jabatan, dan kompetensi yang dimiliki.	CV. Indotech Solution, Magelang Tahun 2020
3.	Pemutakhiran E-SKP	ASN	--	ASN memasukkan butir-butir kegiatan sasaran kinerja pegawai (SKP) sesuai dengan jenis jabatan ASN ke aplikasi E-Kinerja pada modul SKP melalui akun masing-masing ASN. SKP yang di masukkan sesuai dengan perjanjian kinerja (PK) masing-masing ASN. Kinerja	Integrasi SKP dengan kinerja pegawai	Mengintegrasikan butir kegiatan SKP dengan kinerja ASN, sehingga SKP ASN akan sinkron dengan kinerja hariannya dan dapat dinilai secara periodik.	Dinkominfo & BKPSDM / 2021

				pegawai bisa dimasukkan apabila sasaran SKP sudah dimasukkan.			
4	KOMPAK (Komunikasi Kepegawaian) Centre	BKPSDM		Merupakan suatu wadah untuk ASN Kabupaten Temanggung berbentuk Podcast pada Alamat Youtube BKPSDM Temanggung. Dengan adanya KOMPAK CENTRE diharapkan ASN Kabupaten Temanggung dapat menerima informasi terkait aturan dan layanan kepegawaian tanpa harus datang ke BKPSDM namun hanya dengan mendengarkan dan melihat podcast di Youtube BKPSDM.	Tersedianya layanan informasi BKPSDM melalui media podcast	Inovasi tersebut merupakan salah satu resolusi BKPSDM yaitu pelayanan kepegawaian berbasis digital dan untuk menuju <i>Smart ASN</i> .	BKPSDM 2021
5	Dataku Tanggung Jawabku	ASN	--	Latar belakangnya masih banyak ASN yang kurang, bahkan tidak peduli dengan datanya sendiri. ASN berpangku tangan dan menyerahkan semua tanggung jawab data kepegawaiannya kepada pengelola kepegawaian. Akibatnya, jika data kepegawaian tidak update dan tidak lengkap maka: <ul style="list-style-type: none"> - Menghambat proses kenaikan pangkat - Menghambat proses pensiun - Menjadi faktor kesalahan dalam pengambilan kebijakan - Menghambat proses ijin belajar - Menghambat penyesuaian gelar pendidikan, dll 	Meningkatnya kepedulian ASN terhadap pentingnya data kepegawaian	Inovasi ini dalam rangka mengoptimalkan Aplikasi SIMPEG BKPSDM dan layanan kepegawaian yang semakin <i>go green/paper less</i> .	BKPSDM 2022

2.6. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui BKPSDM ada 1 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.19
Daftar Penghargaan BKPSDM Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2022

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Peringkat Terbaik ke-3 dalam Pengelolaan Layanan Informasi Kepegawaian Tahun 2021	Kantor Regional I BKN Yogyakarta	Se-Wilayah Kerja Kantor Regional I BKN Yogyakarta	BKPSDM

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

BKPSDM Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh BKPSDM lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh BKPSDM Kabupaten.

Tahun 2024 merupakan tahun pertama untuk pembangunan jangka menengah Kabupaten Temanggung tiga tahun ke depan. Pembangunan Tahun 2024 ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia pemulihan ekonomi, dan tata kelola pemerintahan yang baik. BKPSDM Kabupaten Temanggung merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi salah satu arah kebijakan nasional yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2024, maka tujuan dari penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2024 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh BKPSDM;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di BKPSDM dalam rangka akuntabilitas kinerja BKPSDM.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2024 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh BKPSDM Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2024 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target BKPSDM Kab. Temanggung pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
BKPSDM Kabupaten Temanggung Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2024	TARGET KONDISI AKHIR 2024
Meningkatnya kualitas SDM Aparatur	Terwujudnya SDM aparatur yang berkinerja tinggi		Indeks Merit System	Angka Indeks	0,50	0,50
			Indeks Profesionalitas ASN	Angka Indeks	53,18	53,18
		Program Kepegawaian Daerah	Cakupan Pengembangan SDM Aparatur	%	41,39	41,39
			Cakupan Peningkatan Pendayagunaan Aparatur dan Layanan Aparatur	%	86,5	86,5
		Program Pengembangan Sumberdaya Manusia	Cakupan Pembinaan SDM Aparatur	%	96,18	96,18

Sumber : Renstra BKPSDM Kab. Temanggung Tahun 2024-2026.

Kebijakan dan strategi BKPSDM Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra BKPSDM Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran BKPSDM Tahun 2024-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan BKPSDM Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan BKPSDM Tahun 2024 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2024 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2024.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja BKPSDM Tahun 2024 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
BKPSDM Kab. Temanggung Tahun 2024

RANCANGAN RENJA BKPSDM TAHUN 2024			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN	6.256.382.674,-	A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN	6.256.382.674,-	-127.000.000,-
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.280.612.174,-	1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	4.280.612.174,-	0,-
a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.681.416.844,-	a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.681.416.844,-	0,-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.681.416.844,-		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.681.416.844,-	0,-
b.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.594.410,-	b.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	135.594.410,-	0,-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.599.910,-		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.599.910,-	0,-
	Penyediaan Logistik Kantor	19.999.500,-		Penyediaan Logistik Kantor	19.999.500,-	0,-
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,-		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.000.000,-	0,-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	41.995.000,-		Fasilitasi Kunjungan Tamu	41.995.000,-	0,-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,-		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50.000.000,-	0,-
c..	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	304.605.900,-	c..	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	304.605.900,-	0,-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,-		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000,-	0,-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.999.000,-		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	39.999.000,-	0,-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	259.606.900,-		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	259.606.900,-	0,-
d..	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.995.020,-	d..	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	158.995.020,-	0,-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	80.000.000,-		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	80.000.000,-	0,-
	Pemeliharaan Mebel	1.997.500,-		Pemeliharaan Mebel	1.997.500,-	0,-
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	25.000.000,-		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	25.000.000,-	0,-

	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	1.997.520,-
2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.975.770.500,-
a.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	256.121.000,-
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	202.765.000,-
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	28.252.000,-
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	25.104.000,-
b.	Mutasi dan Promosi ASN	214.408.000,-
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	39.408.000,-
	Pengelolaan Promosi ASN	175.000.000,-
c.	Pengembangan Kompetensi ASN	1.394.571.500,-
	Pengelolaan Assessment Center	1.171.000.000,-
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	198.000.000,-
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	25.571.500,-
d.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	110.670.000,-
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	31.181.600,-
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	35.000.000,-
	Pembinaan Disiplin ASN	35.488.400,-
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	9.000.000,-
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2.144.399.000,-
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	2.144.399.000,-
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	315.026.000,-
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan	315.026.000,-

	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000,-	0,-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	1.997.520,-	0,-
2.	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.848.770.500,-	-128.000.000,-
a.	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	306.121.000,-	0,-
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	202.765.000,-	0,-
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	28.252.000,-	0,-
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	75.104.000,-	50.000.000,-
b.	Mutasi dan Promosi ASN	214.408.000,-	0,-
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	39.408.000,-	0,-
	Pengelolaan Promosi ASN	175.000.000,-	0,-
c.	Pengembangan Kompetensi ASN	1.216.571.500,-	-178.000.000,-
	Pengelolaan Assessment Center	1.171.000.000,-	0,-
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	20.000.000,-	-178.000.000,-
	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	25.571.500,-	0,-
d.	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	111.670.000,-	1.000.000,-
	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	31.181.600,-	0,-
	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	15.000.000,-	-20.000.000,-
	Pembinaan Disiplin ASN	56.488.400,-	21.000.000,-
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	9.000.000,-	0,-
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1.944.399.000,-	-200.000.000,-
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1.944.399.000,-	-200.000.000,-
1	Pengembangan Kompetensi Teknis	315.026.000,-	-200.000.000,-
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan	115.026.000,-	-200.000.000,-

	Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum			Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		
2	Sertifikasi Kelembagaan, pengembangan kompetensi managerial dan fungsional	1.829.373.000,-	2	Sertifikasi Kelembagaan, pengembangan kompetensi managerial dan fungsional	1.829.373.000,-	0,-
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.829.373.000,-		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	1.829.373.000,-	0,-
	JUMLAH	8.400.781.674,-		JUMLAH	8.073.781.674,-	-327.000.000,-

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2024

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan pagu indikatif Tahun 2024 sebesar Rp327.000.000,00 dari semula pagu Rancangan Renja BKPSDM Tahun 2024 sebesar Rp8.400.781.674,00 menjadi sebesar Rp8.073.781.674,00 pada pagu RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Nilai Pagu Rancangan Renja BKPSDM Tahun 2024 sebesar Rp8.400.781.674,00 ini didapatkan setelah dilakukan analisis kebutuhan tambahan anggaran yang perlu diusulkan karena belum terakomodir sebesar Rp311.000.000,00 dari nilai pagu Rancangan Awal BKPSDM Tahun 2024 yang semula sebesar Rp8.089.781.674,00.

Jika dilihat lebih jauh untuk penurunan pagu indikatif Tahun 2024 dikarenakan adanya penyesuaian dengan kemampuan keuangan daerah, berikut rinciannya:

1. Program Kepegawaian Daerah terjadi penurunan anggaran sebesar Rp128.000.000,00
2. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia terjadi penurunan anggaran sebesar Rp200.000.000,00

Dari nilai pagu indikatif RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang ditetapkan sebesar Rp8.073.781.674,00 ini telah dilakukan penambahan anggaran beberapa sub kegiatan yang belum teranggarkan sebelumnya antara lain:

1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp50.000.000,00 yang akan digunakan untuk rehab atap dan ruang gedung kantor BKPSDM.
2. Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian sebesar Rp50.000.000,00 untuk melakukan pengembangan aplikasi SIMPEG.
3. Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN sebesar Rp20.000.000,00 untuk bantuan tugas belajar.
4. Pembinaan Disiplin ASN sebesar Rp21.000.000,00 untuk kegiatan Sosialisasi dan cetak Id Card pegawai.
5. Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN sebesar Rp9.000.000,00 untuk kegiatan tindak lanjut penanganan pelanggaran disiplin.

Pada bulan Juni 2023 telah diinput pada aplikasi SIPD RI pagu indikatif Renja BKPSDM Tahun 2024 dengan total nilai pagu

sebesar Rp8.073.770.663,00 (lihat Tabel 4.2) dimana ada selisih kurang sebesar Rp11.011,00 dengan pagu indikatif RKPD Kabupaten Temanggung yang nilainya Rp8.073.781.674,00 (lihat Tabel 4.1). Selisih tersebut merupakan jumlah nilai yang sisa yang tidak bisa terinput karena adanya proses penyesuaian dengan standar satuan harga pada penyusunan RKA. Maka pagu indikatif Renja dan RKPD Tahun 2024 yang ditetapkan adalah sesuai jumlah nominal yang sudah diinput dalam aplikasi SIPD RI yaitu sebesar Rp8.073.770.663,00 sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan BKPSDM Kab. Temanggung
Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
					Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia					8.073.770.663,00				8.164.513.197,00		
5					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					8.073.770.663,00				8.164.513.197,00		
5	03				KEPEGAWAIAN					6.129.371.663,00				6.019.359.197,00		
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.280.601.163,00				4.340.927.697,00		
5	03	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					3.681.416.844,00				3.681.416.844,00		
5	03	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN											
					-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	35 Orang/bulan	-	3.681.416.844,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	3.681.416.844,00
5	03	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					135.593.000,00				149.549.841,00		
5	03	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor											
					-	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	3.599.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket	4.355.891,00
5	03	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor											
					-	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	19.999.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	21.999.450,00

5	03	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan												
					-	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Paket	-	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	22.000.000,00
5	03	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu												
					-	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	41.994.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	46.194.500,00
5	03	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
					-	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	50.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	55.000.000,00
5	03	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							304.596.300,00					335.066.490,00
5	03	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat												
					-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	5.500.000,00
5	03	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik												
					-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	39.989.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	43.998.900,00
5	03	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor												
					-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	259.606.900,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	285.567.590,00

5	03	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							158.995.019,00					174.894.522,00
5	03	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan												
					-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	19 Unit	-	80.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit	88.000.000,00
5	03	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel												
					-	Jumlah Mebel yang Dipelihara	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	353 Unit	-	1.997.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Mebel yang Dipelihara	353 Unit	2.197.250,00
5	03	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya												
					-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	408 Unit	-	25.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	408 Unit	27.500.000,00
5	03	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya												
					-	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Unit	-	49.999.999,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	55.000.000,00
5	03	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya												
					-	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	45 Unit	-	1.997.520,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45 Unit	2.197.272,00

5	03	02			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH						1.848.770.500,00					1.678.431.500,00
5	03	02	2.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						306.121.000,00					174.639.000,00
5	03	02	2.01	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN											
					-	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	202.765.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	117.235.000,00
5	03	02	2.01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian											
					-	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	400 Dokumen	-	28.252.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	400 Dokumen	27.302.000,00
5	03	02	2.01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian											
					-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5000 Dokumen	-	75.104.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	5000 Dokumen	30.102.000,00
5	03	02	2.02		Mutasi dan Promosi ASN						214.408.000,00					195.640.000,00
5	03	02	2.02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN											
					-	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	750 Dokumen	-	39.408.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	750 Dokumen	20.640.000,00
5	03	02	2.02	0003	Pengelolaan Promosi ASN											
					-	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	6 Dokumen	-	175.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	6 Dokumen	175.000.000,00

5	03	02	2.03		Pengembangan Kompetensi ASN							1.216.571.500,00					1.188.700.000,00
5	03	02	2.03	0002	Pengelolaan Assessment Center												
					-	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	1.171.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	1 Dokumen	945.400.000,00
5	03	02	2.03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN												
					-	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Orang	-	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	12 Orang	216.000.000,00
5	03	02	2.03	0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional												
					-	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	400 Orang	-	25.571.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	400 Orang	27.300.000,00
5	03	02	2.04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur							111.670.000,00					119.452.500,00
5	03	02	2.04	0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur												
					-	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Dokumen	-	31.181.600,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Dokumen	33.964.100,00
5	03	02	2.04	0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur												
					-	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1 Laporan	35.988.000,00

5	03	02	2.04	0007	Pembinaan Disiplin ASN													
					-	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	300 Orang	-	56.488.400,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	300 Orang	40.500.400,00	
5	03	02	2.04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN													
					-	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	9.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1 Laporan	9.000.000,00	
5	04				PENDIDIKAN DAN PELATIHAN							1.944.399.000,00					2.145.154.000,00	
5	04	02			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA							1.944.399.000,00						2.145.154.000,00
5	04	02	2.01		Pengembangan Kompetensi Teknis							115.026.000,00						315.781.000,00
5	04	02	2.01	0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum													
					-	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	400 Orang	-	115.026.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	400 Orang	315.781.000,00	
5	04	02	2.02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional							1.829.373.000,00					1.829.373.000,00	
5	04	02	2.02	0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan													
					-	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	-	Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	5 Laporan	-	1.829.373.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	5 Laporan	1.829.373.000,00	
TOTAL											8.073.770.663,00						8.164.513.197,00	

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2024 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi BKPSDM untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja BKPSDM Tahun 2024 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di BKPSDM itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan BKPSDM dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja BKPSDM Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2022. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja BKPSDM Tahun 2024 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2024 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 82,33 %, realisasi Belanja Modal sebesar 94,79 %, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 18,62 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2024 BKPSDM mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp8.073.770.663,00, yang terdiri dari 3 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Kepegawaian Daerah; dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2024 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran BKPSDM dapat tercapai

sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 03 Juli 2023

Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Temanggung,


UMI LESTARI NURJANAH, S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP/19660608 199603 2 004



BKPSDM Kabupaten Temanggung





DINBUDPAR
KAB. TEMANGGUNG

RENJA

DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA

2024



HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 03 Juli 2023

Koordinator Bidang Ekonomi,
Sumber daya Alam dan
Infrastruktur



ADI WIBOWO, ST
NIP. 19811101 200903 1 003

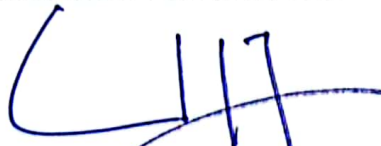
Sub Koordinator Bidang Ekonomi,
Sumber daya Alam dan
Infrastruktur



DWI FATMA A., SE, M.Ec.Dev
NIP.19810619 200501 2 016

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas ijin dan perlindunganNya penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kabupaten Temanggung ini dapat diselesaikan. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengamanatkan perlunya SKPD menyusun Renja Perangkat Daerah dengan mengacu pada rancangan awal RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Rancangan Renja Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memuat Evaluasi Pelaksanaan Renja 2022 dan Capaian Renstra tahun 2019-2023, Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DINBUDPAR, Review rancangan awal RKPD, Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat. Program dan kegiatan yang disusun terkadang merupakan kelanjutan program atau kegiatan sebelumnya, namun ada beberapa yang baru atau sifatnya inovatif.

Setelah melalui proses pembahasan dalam forum Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah yang merupakan Rencana Kerja satu tahun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung

Temanggung,

2023

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG


SALIHONO ATMAJI, S. STP, MM
Perbina Tingkat I
NIP. 19790325 199802 1 001

RENCANA KERJA
TAHUN 2024
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS KESEHATAN

Jalan Jendral Soedirman No. 81 Temanggung

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR



Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 disusun sebagai implementasi dari tahapan kegiatan tahunan Rencana Strategis yang disusun lima tahunan dan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan yang tercantum dalam Permendagri nomor 90 Tahun 2019. Renja Tahun 2024 ini disusun dalam upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak lanjut kegiatan Dinas Kesehatan selama tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan yang telah ditetapkan.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Renja Dinas Kesehatan di masa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 03 Juli 2023

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Temanggung



Dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 200212 2 003

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar	iii
Daftar Tabel	iv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	11
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	45
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Dinas Kesehatan	84
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	85
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	103
2.6 Inovasi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	103
2.7 Penghargaan	103
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	105
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	105
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung	105
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	111
4.1 Program dan Kegiatan	111
BAB V PENUTUP	132



DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan ..	2



DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung s.d Tahun 2022 12
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan s.d Triwulan I Tahun 2023 28
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Triwulan I Tahun 2023 46
Tabel 2.4	Angka Harapan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 59
Tabel 2.5	Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 60
Tabel 2.6	Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 60
Tabel 2.7	Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 61
Tabel 2.8	Prevalensi Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap Jamban sehat Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022. 61
Tabel 2.9	Persentase Puskesmas yang Sarprasnya Sesuai Standar Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 62
Tabel 2.10	Persentase Ketersediaan Obat Sesuai Kebutuhan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 62
Tabel 2.11	Cakupan Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Antenatal Sesuai Standar Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 63
Tabel 2.12	Cakupan Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 63
Tabel 2.13	Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 64
Tabel 2.14	Persentase Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 64
Tabel 2.15	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 65
Tabel 2.16	Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 66
Tabel 2.17	Angka Kematian Neonatal Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 66
Tabel 2.18	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 67

Tabel 2.19	Angka Kematian Balita Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	67
Tabel 2.20	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	68
Tabel 2.21	Persentase Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	68
Tabel 2.22	Persentase Warga Negara Indonesia usia 60 Tahun Keatas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	69
Tabel 2.23	Persentase Kunjungan Baru di Pelayanan Kesehatan Dasar Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	70
Tabel 2.24	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Terakreditasi Utama Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	71
Tabel 2.25	Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	71
Tabel 2.26	Persentase Penderita Diabetes Melitus Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	72
Tabel 2.27	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa berat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	73
Tabel 2.28	Persentase Orang terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	73
Tabel 2.29	Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	74
Tabel 2.30	Persentase Penanganan KLB 1x24 Jam Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	75
Tabel 2.31	Angka Penemuan Penderita Malaria per 1.000 Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	75
Tabel 2.32	Angka Penemuan Penderita Demam Berdarah Dengue (Incident Rate DBD) per 100.000 Penduduk Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	76
Tabel 2.33	Angka Penemuan Kasus Baru Kusta di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	76
Tabel 2.34	Persentase Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	77
Tabel 2.35	Persentase Anak Umur 1 Tahun diimunisasi Campak Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	77
Tabel 2.36	Prevalensi Gizi Kurang (Underweight) pada Anak Balita (0-60 Bulan) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	78

Tabel 2.37	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (0-24 Bulan) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	78
Tabel 2.38	Persentase Bayi Umur 0-6 Bula Mendapatkan ASI EKsklusif Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	78
Tabel 2.39	Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	79
Tabel 2.40	Persentase Desa Bebas Rawan Gizi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	80
Tabel 2.41	Persentase Rumah Sehat Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	80
Tabel 2.42	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memenuhi STandar Kompetensi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	80
Tabel 2.43	Cakupan Puskesmas Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022 ...	81
Tabel 2.44	Cakupan Penggunaan Obat Rasional (POR) di Puskesmas Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	82
Tabel 2.45	Pengawasan Makanan Minuman di Pasar Tradisional Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	82
Tabel 2.46	Persentase Sarana Pelayanan Mendapatkan Ijin Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	83
Tabel 2.47	Cakupan Produksi Industri Rumah Tangga yang Mendapatkan SPP-IRT di Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	83
Tabel 2.48	Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Rumah Tangga Strata Utama dan Paripurna Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2022	84
Tabel 2.49	Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2024	87
Tabel 2.50	Daftar Inovasi Dinas Kesehatan tahun 2020-2022	104
Tabel 2.51	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung tahun 2020-2022	104
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024	106
Tabel 4.1	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024	112
Tabel 4.2	Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan kabupaten Temanggung Tahun 2024	118



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah, serta rencana pendanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

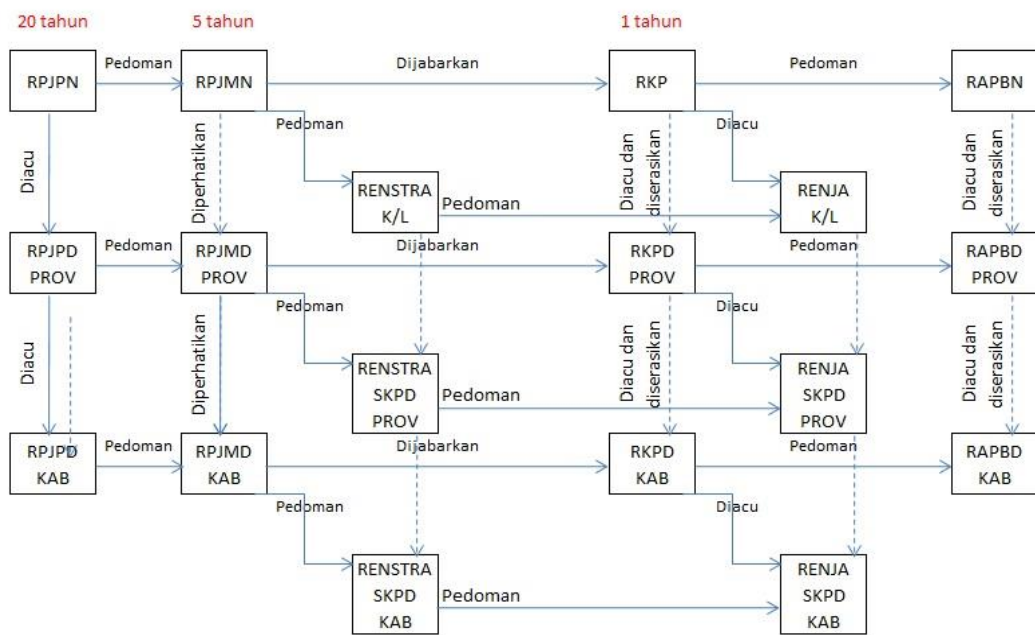
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan jangka waktu RPD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat

yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Kesehatan, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPd. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Kesehatan, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kesehatan;
- 2) Kondisi pelayanan Dinas Kesehatan;

- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan;
- 4) Data Pokok Pembangunan Dinas Kesehatan;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Kesehatan;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Kesehatan.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Kesehatan.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Kesehatan untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2023, dan perkiraan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Kesehatan.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung tahun lalu berdasarkan renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Kesehatan. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Kesehatan dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Dinas Kesehatan;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Dinas Kesehatan;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Dinas Kesehatan sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Kesehatan.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Kesehatan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kesehatan;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan;

- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kesehatan;
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kesehatan.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang

direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan. Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Kesehatan. Namun dalam proses ini Dinas Kesehatan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Kesehatan merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Kesehatan perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Kesehatan dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Kesehatan yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kesehatan untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kesehatan Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN TEMANGGUNG

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2022 terhadap capaian Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2023.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Kesehatan sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023 terhadap target di Tahun 2023.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun ke-empat pelaksanaan Renstra Dinas Kesehatan 2018-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
s.d Tahun 2022

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Target 2022			Realisasi 2022		Capaian 2022		Realisasi s.d 2022		Capaian s.d 2022		K e t
				K	R p	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kematian Ibu	100.00 0 per KH	67,5		71,5			75,32		94,66		75,32		94,66		
		Angka Kematian Bayi (AKB)	1.000 per KH	12		12,2			13,23		91,52		13,23		91,52		
		Prevalensi balita gizi buruk	%	0,5		0,5			0,31		100		0,31		100		
		Persentase rumah tangga yang memiliki jamban	%	83,84		82,8			100		100		100		100		
		Persentase puskesmas yang sarprasnya sesuai standar	%	100		95			100		100		100		100		
		Ketersediaan obat sesuai standar	%	98,00		97,8			98,72		100		98,72		100		
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	%	100		100			100		100		100		100		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100		100			100		100		100		100		
		Persentase pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga	%	100		100			100		100		100		100		

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Target 2022			Realisasi 2022		Capaian 2022		Realisasi s.d 2022		Capaian s.d 2022		Ket
				K	R p	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan															
		Persentase pertolongan persalinan di fasilitas Kesehatan	%	100		100			100		100		100		100		
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100		100			99,09		99,09		99,09		99,09		
		Cakupan neonatal dengan komplikasi ditangani	%	72		70			100		100		100		100		
		Angka Kematian Neonatal (AKN)	1.000/ KH	7		7			9,15		69,35		9,15		69,35		
		Calupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100		100			92,95		92,95		92,95		92,95		
		Angka Kematian Balita	1.000/ KH	13,6		13,8			15,6		86,95		15,6		86,95		
		Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100			82,05		82,05		82,05		82,05		
		Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59	%	100		100			89,07		89,07		89,07		89,07		

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Target 2022			Realisasi 2022		Capaian 2022		Realisasi s.d 2022		Capaian s.d 2022		Ket
				K	R p	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar															
		Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100		100			83,22		83,22		83,22		83,22		
		Persentase kunjungan baru di pelayanan kesehatan dasar (Kunjungan Rawat Jalan di Puskesmas)	%	43,5		43			55,32		100		55,32		100		
		Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah terakreditasi utama	%	53,85		50			40		80		40		80		
		Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100			84,78		84,78		84,78		84,78		
		Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan	%	100		100			123		100		123		100		

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Target 2022			Realisasi 2022		Capaian 2022		Realisasi s.d 2022		Capaian s.d 2022		K e t
				K	R p	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		kesehatan sesuai standar															
		Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan ke kesehatan jiwa sesuai standar	%	100		100			104		100		104		100		
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100		100			95,65		95,65		95,65		95,65		
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100		100			87,03		87,03		87,03		87,03		
		Persentase Penanganan KLB 1x24 jam	%	100		100			100		100		100		100		
		Angka penemuan kasus malaria	Per 1.000 pddk	<1		<1			0,000		100		0,000		100		
		Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	Per 100.00 0 pddk	<20		<20			3,62		100		3,62		100		
		Angka Penemuan Kasus Baru Kusta	Per 100.00 0 pddk	<1		<1			0,13		100		0,13		100		
		Persentase Desa/kel UCI	%	100		100			99,65		99,65		99,65		99,65		
		Persentase anak umur 1	%	95		95			97,05		100		97,05		100		

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Target 2022			Realisasi 2022		Capaian 2022		Realisasi s.d 2022		Capaian s.d 2022		Ket	
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		tahun diimunisasi campak																
		Prevalensi gizi kurang (underweight) pada anak balita (0-60bulan)	%	15,5		15,5			3,41		100		3,41		100			
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	%	27		27,5			13,03		100		13,03		100			
		Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	%	80		80			82,33		100		82,33		100			
		Prevalensi anemia pada ibu hamil	%	<20		<20			13,44		100		13,44		100			
		Persentase desa bebas rawan gizi	%	100		100			100		100		100		100			
		Persentase rumah sehat	%	82		81,5			87,42		100		87,42		100			
1	Kegiatan Penyediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kab/ kota																	
a	Sub kegiatan Pembangunan puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	unit			1	0	2.203.000.000	1	2.013.101.200	100	91,38	1	18.948.132.500	100	91,38		
b	Sub kegiatan Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan SPA dan SDM agar sesuai standar	unit			4	45.000.000.000	6.192.743.870	4	5.298.639.040	100	85,56	4	5.298.639.040	100	85,56		
c	Sub kegiatan Pengembangan fasilitas	Jumlah fasilitas Kesehatan lainnya yang	unit			1	3.900.000.000	3.020.000.000	1	2.744.860.348	100	90,89	1	2.744.860.348	100	90,89		

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Target 2022			Realisasi 2022		Capaian 2022		Realisasi s.d 2022		Capaian s.d 2022		Ket
				K	R p	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	kesehatan lainnya	ditingkatkan SPA dan SDM agar sesuai standar															
d	Sub kegiatan pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan Kesehatan yang disediakan	paket			3	17.695.000.000	4.629.497.400	3	4.078.120.185	100	88,09	3	4.078.120.185	100	88,09	
e	Sub kegiatan Pengadaan alat kesehatan/ alat penunjang pelayanan kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Ala t Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	unit			2	14.382.000.000	9.390.787.600	2	8.933.132.579	100	95,13	2	8.933.132.579	100	95,13	
f	Sub kegiatan pengadaan obat, vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	Paket			1	5.795.000.000	3.161.100.000	1	2.035.670.848	100	64,4	1	2.035.670.848	100	64,4	
g	Sub kegiatan pengadaan bahan habis pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan	Paket			4	9.803.895.500	7.077.037.400	4	5.399.176.343	100	76,29	4	5.399.176.343	100	76,29	
h	Sub kegiatan distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, bahan medis habis pakai (BMHP), makanan dan minuman ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang didistribusika n ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket			312	0	147.634.000	312	106.757.130	100	72,31	312	106.757.130	100	72,31	
2	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota																

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Target 2022			Realisasi 2022		Capaian 2022		Realisasi s.d 2022		Capaian s.d 2022		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
a	Sub kegiatan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	10.374		10.374	150.000.000	62.715.000	10.374	50.596.900	100	80,68	10.374	50.596.900	100	80,68	
b	Sub kegiatan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	9.300		9.300	4.040.000.000	661.579.000	9.300	88.670.000	100	13,40	9.300	88.670.000	100	13,40	
c	Sub kegiatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	9.294		9.294	50.000.000	173.890.000	9.209	143.907.600	99,09	82,76	9.209	143.907.600	99,09	82,76	
d	Sub kegiatan pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	43.250		43.250	100.000.000	91.152.500	40.199	85.640.100	92,95	93,95	40.199	85.640.100	92,95	93,95	
e	Sub kegiatan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	110.336		110.336	50.000.000	24.745.000	91.826	23.511.550	83,22	95,02	91.826	23.511.550	83,22	95,02	
f	Sub kegiatan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang	221.009		221.009	30.000.000	19.987.500	187.378	19.975.525	84,78	99,94	187.378	19.975.525	84,78	99,94	
g	Sub kegiatan pelayanan kesehatan penderita	Jumlah penderita DM yang mendapatkan	Orang	10.584		10.584	75.000.000	17.715.000	13.066	17.702.000	100	99,93	13.066	17.702.000	100	99,93	

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Target 2022			Realisasi 2022		Capaian 2022		Realisasi s.d 2022		Capaian s.d 2022		Ket
				K	R p	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Diabetes Melitus	pelayanan kesehatan sesuai standar															
h	Sub kegiatan pelayanan kesehatan ODGJ berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan Kesehatan ODGJ berat sesuai standar	Orang	1.978		1.978	50.000.000	43.160.000	2.061	41.662.085	100	96,53	2.061	41.662.085	100	96,53	
i	Sub kegiatan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	Orang	8.484		8.484	50.000.000	21.260.000	8.115	21.260.000	95,65	100	8.115	21.260.000	95,65	100	
j	Sub kegiatan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga HIV yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	Orang	12.739		12.738	100.000.000	39.014.000	11.086	38.929.100	87,03	99,78	11.086	38.929.100	87,03	99,78	
k	Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	Doku men			12	70.000.000	8.804.036.600	12	7.469.947.577	100	84,85	12	7.469.947.577	100	84,85	
l	Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Doku men			12	700.000.000	3.375.542.000	12	3.296.352.365	100	97,65	12	3.296.352.365	100	97,65	
m	Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan	Doku men			12	60.000.000	50.127.500	12	48.476.500	100	96,71	12	48.476.500	100	96,71	

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Target 2022			Realisasi 2022		Capaian 2022		Realisasi s.d 2022		Capaian s.d 2022		Ket
				K	R p	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	kerja dan olahraga	Kesehatan kerja dan olahraga															
n	Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lingkungan	Dokumen			12	1.105.000.000	920.358.500	12	525.098.216	100	57,04	12	525.098.216	100	57,04	
o	Sub kegiatan pengelolaan surveilans kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan surveilans Kesehatan	Dokumen			12	100.000.000	5.445.000	12	4.972.000	100	91,31	12	4.972.000	100	91,31	
p	Sub kegiatan pengelolaan upaya pengurangan resiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis Kesehatan dan pasca krisis kesehatan	Dokumen			12	0	10.000.000	12	9.960.000	100	99,60	12	9.960.000	100	99,60	
q	Sub kegiatan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Jumlah dokumen hasil Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen			12	650.000.000	100.565.500	12	97.074.024	100	96,53	12	97.074.024	100	96,53	
r	Sub kegiatan pengelolaan jaminann kesehatan masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan jaminan kesehatan masyarakat	Dokumen			12	15.305.472.000	19.308.472.000	12	19.176.784.600	100	99,32	12	19.176.784.600	100	99,32	
s	Sub kegiatan Penyediaan telemedicine di fasilitas Kesehatan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang melayani konsultasi jarak jauh antar	Unit			26	0	333.600.000	26	294.296.800	100	88,22	26	294.296.800	100	88,22	

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Target 2022			Realisasi 2022		Capaian 2022		Realisasi s.d 2022		Capaian s.d 2022		Ket
				K	R p	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		fasyankes melalui pelayanan telemedicine untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas															
t	Sub kegiatan operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah dokumen hasil Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Doku men			12	75.000.000	50.000.000	12	16.741.230	100	33,48	12	16.741.230	100	33,48	
u	Sub kegiatan pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di Kab/kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kab/Kota	Faskes			12	2.500.000.000	554.585.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
v	Sub kegiatan pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kewaspadaan dini dan respon wabah	Doku men			12	50.000.000	4.515.000	12	4.515.000	100	100	12	4.515.000	100	100	
w	Sub kegiatan penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) tersedia, terkelola dan terintegrasi dengan RS dalam satu penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	Unit	1		1	100.000.000	10.000.000	1	9.959.162	100	99,59	1	9.959.162	100	99,59	
x	Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan	Jumlah keluarga yang sudah	Keluar ga			65.000	0	13.303.250	65.000	13.154.000	100	98,88	65.000	13.154.000	100	98,88	

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Target 2022			Realisasi 2022		Capaian 2022		Realisasi s.d 2022		Capaian s.d 2022		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	Kesehatan dasar melalui pendekatan keluarga	dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga Kesehatan puskesmas															
3	Kegiatan Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
a	Sub kegiatan Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Jumlah fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator Nasional Mutu (INM)	Unit			12	0	154.674.000	12	99.572.950	100	64,38	12	99.572.950	100	64,38	
Rata-rata Capaian kinerja pada Program I											95,32	82,84					
Predikat											Sangat Tinggi						
II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	%	100		97			100		100		100		100		
1	Kegiatan Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kab/kota																
a	Sub kegiatan pemenuhan kebutuhan sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai standar	Jumlah sumber daya manusia Kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	Orang			1.537	0	4.214.900.000	1.537	3.629.820.441	100	86,12	1.537	3.629.820.441	100	86,12	
b	Sub kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi	Jumlah sumber daya manusia Kesehatan tingkat daerah	Orang			150	100.000.000	10.000.000	150	9.748.500	100	97,49	150	9.748.500	100	97,49	

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Target 2022			Realisasi 2022		Capaian 2022		Realisasi s.d 2022		Capaian s.d 2022		Ket	
				K	R p	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	teknis sumber daya manusia Kesehatan tingkat daerah Kab	Kab/kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya																
Rata-rata Capaian kinerja pada Program I											100							
Predikat											Sangat Tinggi							
III	Program sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	%	62		62			100		100		100		100			
		Cakupan Penggunaan Obat Rasional (POR) di puskesmas	%	77		77			96,15		100		96,15		100			
		Pengawasan makanan minuman di pasar tradisional	%	100		100			100		100		100		100			
		Persentase sarana pelayanan mendapatkan ijin Kesehatan	%	100		100			100		100		100		100			
		Cakupan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) yang mendapat SPP-IRT	%	100		100			100		100		100		100			
1	Kegiatan Pemberian izin apotek, Toko obat, Toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)																	
a	Sub kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut	Dokumen			12	340.000.000	38.960.000	12	28.869.600	100	74,10	12	28.869.600	100	74,10		

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Target 2022			Realisasi 2022		Capaian 2022		Realisasi s.d 2022		Capaian s.d 2022		Ket	
				K	R p	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	perijinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	pengawasan perijinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)																
2	Kegiatan Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai ijin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu																	
a	Sub kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga	Dokumen			12	40.000.000	456.876.000	12	346.980.172	100	75,95	12	346.980.172	100	75,95		
Rata-rata Capaian kinerja pada Program III											100							
Predikat											Sangat Tinggi							
IV	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat (PHBS Rumah Tangga) Strata Utama dan Paripurna	%	83,09		83,07			94,96		100		94,96		100			
1	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota																	

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Target 2022			Realisasi 2022		Capaian 2022		Realisasi s.d 2022		Capaian s.d 2022		Ket		
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
a	Sub kegiatan peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah dokumen promosi Kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Dokumen			12	1.500.000.000	291.121.250	12	219.652.315	100	75,45	12	219.652.315	100	75,45			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada program A4											100	75,45							
Predikat											Sangat Tinggi								
B. I	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah kab/kota																		
1	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah																		
a	Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang			947	60.128.441.000	68.338.431.442	947	67.252.918.573	100	98,41	947	67.252.918.573	100	98,41			
2	Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah																		
a	Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket			1	15.000.000	5.000.000	1	4.591.500	100	91,83	1	4.591.500	100	91,83			
b	Sub kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	Paket			1	20.000.000	13.800.000	1	11.794.760	100	85,47	1	11.794.760	100	85,47			
c	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket			2	20.000.000	13.000.000	2	11.809.050	100	90,84	2	11.809.050	100	90,84			
d	Sub kegiatan fasilitasi	Jumlah laporan fasilitas	Laporan			11	40.000.000	4.000.000	11	3.478.750	100	86,97	11	3.478.750	100	86,97			

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Target 2022			Realisasi 2022		Capaian 2022		Realisasi s.d 2022		Capaian s.d 2022		Ket
				K	R p	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	kunjungan tamu	kunjungan tamu															
e	Sub kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Laporan			12	200.000.000	39.200.000	12	36.703.583	100	93,63	12	36.703.583	100	93,63	
3	Kegiatan Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah																
a	Sub kegiatan pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Paket			1	20.000.000	24.000.000	1	23.623.890	100	98,43	1	23.623.890	100	98,43	
4	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah																
a	Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan			12	220.000.000	220.000.000	12	159.911.127	100	72,69	12	159.911.127	100	72,69	
b	Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Laporan			12	2.200.000.000	2.476.784.000	12	2.240.563.806	100	90,46	12	2.240.563.806	100	90,46	
5	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah																
a	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Unit			16	150.000.000	130.000.000	16	129.956.000	100	99,97	16	129.956.000	100	99,97	

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Target 2022			Realisasi 2022		Capaian 2022		Realisasi s.d 2022		Capaian s.d 2022		Ket		
				K	R p	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
b	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit			12	20.000.000	9.000.000	12	9.000.000	100	100	12	9.000.000	100	100			
c	Sub kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Unit			12	20.000.000	5.000.000	12	4.960.000	100	99,20	12	4.960.000	100	99,20			
Rata-rata Capaian kinerja pada Program B1											100	92,32							
Predikat											Sangat Tinggi								
					JUMLAH	187.019.808.500	146.962.315.312			136.332.599.024									
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH											99,06	83,49							
PREDIKAT											Sangat Tinggi								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH											96,27								
PREDIKAT											Akan Tercapai								

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
s.d Triwulan I Tahun 2023

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Target 2023			Realisasi 2023		Capaian 2023		Realisasi s.d 2023		Capaian s.d 2023		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
I	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka kematian Ibu	100.000 per KH	67,5		67,5			9,06		100		9,06		100		
		Angka Kematian Bayi (AKB)	1.000 per KH	12		12			13,10		90,83		13,10		90,83		
		Prevalensi balita gizi buruk	%	0,5		0,5			0,31		100		0,31		100		
		Persentase rumah tangga yang memiliki jamban	%	83,84		83,84			64,90		77,41		64,90		77,41		
		Persentase puskesmas yang sarprasnya sesuai standar	%	100		100			100		100		100		100		
		Ketersediaan obat sesuai standar	%	98,00		98,00			98,37		100		98,37		100		
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	%	100		100			11,96		11,96		11,96		11,96		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100		100			20,50		20,50		20,50		20,50		
		Persentase pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100		100			20,50		20,50		20,50		20,50		

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Target 2023			Realisasi 2023		Capaian 2023		Realisasi s.d 2023		Capaian s.d 2023		K e t
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase pertolongan persalinan di fasilitas Kesehatan	%	100		100			20,50		20,50		20,50		20,50		
		Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	100		100			21,38		21,38		21,38		21,38		
		Cakupan neonatal dengan komplikasi ditangani	%	72		72			100		100		100		100		
		Angka Kematian Neonatal (AKN)	1.000/ KH	7		7			8,13		83,86		8,13		83,86		
		Calupan Pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100		100			23,85		23,85		23,85		23,85		
		Angka Kematian Balita	1.000/ KH	13,6		13,6			16,70		77,21		16,70		77,21		
		Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100			19,72		19,72		19,72		19,72		
		Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100		100			20,31		20,31		20,31		20,31		
		Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining	%	100		100			37,05		37,05		37,05		37,05		

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Target 2023			Realisasi 2023		Capaian 2023		Realisasi s.d 2023		Capaian s.d 2023		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		kesehatan sesuai standar															
		Persentase kunjungan baru di pelayanan kesehatan dasar (Kunjungan Rawat Jalan di Puskesmas)	%	43,5		43,5			16,15		37,13		16,15		37,13		
		Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik pemerintah terakreditasi utama	%	53,85		53,85			40		74,28		40		74,28		
		Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100			14,53		14,53		14,53		14,53		
		Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100		100			39,17		39,17		39,17		39,17		
		Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100		100			50		50		50		50		
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100		100			36,34		36,34		36,34		36,34		

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Target 2023			Realisasi 2023		Capaian 2023		Realisasi s.d 2023		Capaian s.d 2023		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100		100			18,62		18,62		18,62		18,62		
		Persentase Penanganan KLB 1x24 jam	%	100		100			100		100		100		100		
		Angka penemuan kasus malaria	Per 1.000 pddk	<1		<1			0,00		100		0,00		100		
		Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	Per 100.000 pddk	<20		<20			0,87		100		0,87		100		
		Angka Penemuan Kasus Baru Kusta	Per 100.000 pddk	<1		<1			0,00		100		0,00		100		
		Persentase Desa/kel UCI	%	100		100			0,00		0,00		0,00		0,00		
		Persentase anak umur 1 tahun diimunisasi campak	%	95		95			19,26		20,27		19,26		20,27		
		Prevalensi gizi kurang (underweigh) pada anak balita (0-60bulan)	%	15,5		15,5			5,07		100		5,07		100		
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	%	27		27			10		100		10		100		
		Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	%	80		80			82,62		100		82,62		100		
		Prevalensi anemia pada ibu hamil	%	<20		<20			2,82		100		2,82		100		

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Target 2023			Realisasi 2023		Capaian 2023		Realisasi s.d 2023		Capaian s.d 2023		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Persentase desa bebas rawan gizi	%	100		100			100		100		100		100		
		Persentase rumah sehat	%	82		82			26,5		32,32		26,5		32,32		
1	Kegiatan Penyediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kab/ kota																
a	Sub kegiatan Pembangunan puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun	unit			1	0	10.000.000.000	0,02	0	2,00	0,00	2,0	0	2,0	0,00	
b	Sub kegiatan Pembangunan fasilitas Kesehatan lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan yang dibangun	unit			1	0	3.130.885.923	0,02	0	2,00	0,00	2,0	0	2,0	0,00	
c	Sub kegiatan Pengembangan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan SPA dan SDM agar sesuai standar	unit			5	37.000.000.000	8.260.000.000	0,02	0	0,40	0,00	0,02	0	0,4	0,00	
d	Sub kegiatan Pengembangan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah fasilitas kesehatan lainnya yang ditingkatkan SPA dan SDM agar sesuai standar	unit			1	50.000.000	220.000.000	0,03	0	3,00	0,00	0,03	0	3,0	0,00	
e	Sub kegiatan pengadaan prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana fasilitas pelayanan Kesehatan yang disediakan	paket			4	2.825.000.000	3.840.000.000	0,09	0	2,25	0,00	0,09	0	2,25	0,00	
e	Sub kegiatan Pengadaan alat kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan yang disediakan	Jmlah alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan yang disediakan	paket			5	3.965.000.000	8.549.855.600	0,75	0	15,00	0,00	0,75	0	15,0	0,00	
f	Sub kegiatan pengadaan obat, vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang disediakan	Paket			1	2.500.000.000	3.000.000.000	0,03	0	3,00	0,00	0,03	0	3,0	0,00	

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Target 2023			Realisasi 2023		Capaian 2023		Realisasi s.d 2023		Capaian s.d 2023		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
g	Sub kegiatan pengadaan bahan habis pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan	Paket			1	8.329.500.000	4.670.195.000	0,05	0	5,00	0,00	0,05	0	5,0	0,00	
h	Sub kegiatan distribusi alat kesehatan, obat, vaksin, bahan medis habis pakai (BMHP), makanan dan minuman ke puskesmas serta fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Paket			312	120.000.000	49.999.897	78	0	25,00	0,00	78	0	25,00	0,00	
2	Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
a	Sub kegiatan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	orang			12.146	315.940.000	87.722.503	1.453	0	11,96	0,00	1.453	0	11,96	0,00	
b	Sub kegiatan pelayanan kesehatan ibu bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang			11.594	399.800.000	102.050.000	2.377	0	20,50	0,00	2.377	0	20,5	0,00	
c	Sub kegiatan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang			10.804	105.000.000	101.460.000	2.310	0	21,38	0,00	2.310	0	21,38	0,00	
d	Sub kegiatan pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang			43.106	0	27.200.000	10.280	0	23,85	0,00	10.280	0	23,85	0,00	
e	Sub kegiatan pelayanan	Jumlah anak usia pendidikan	Orang			98.847	50.000.000	74.339.600	19.495	0	19,72	0,00	19.495	0	19,72	0,00	

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)			Target 2023			Realisasi 2023		Capaian 2023		Realisasi s.d 2023		Capaian s.d 2023		Ket
				K	Rp		K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	kesehatan pada usia Pendidikan dasar	dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar																
f	Sub kegiatan pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah anak usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang			517.375	50.000.000	50.000.000	105.102	0	20,31	0,00	105.102	0	20,31	0,00		
g	Sub kegiatan pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah anak usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang			123.680	128.000.000	128.000.000	45.827	0	37,05	0,00	45.827	0	37,05	0,00		
h	Sub kegiatan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang			227.575	50.000.000	50.308.800	33.060	0	14,53	0,00	33.060	0	14,53	0,00		
i	Sub kegiatan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang			10.898	20.000.000	884.465.400	4.269	0	39,17	0,00	4.269	0	39,17	0,00		
j	Sub kegiatan pelayanan kesehatan ODGJ berat	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan ODGJ berat sesuai standar	Orang			1.978	30.000.000	79.362.200	998	0	50,00	0,00	998	0	50,00	0,00		
k	Sub kegiatan pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga menderit Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan	Orang			8.709	110.000.000	2.105.000.000	3.165	0	36,34	0,00	3.165	0	36,34	0,00		

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Target 2023			Realisasi 2023		Capaian 2023		Realisasi s.d 2023		Capaian s.d 2023		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		kesehatan sesuai standar															
l	Sub kegiatan pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Orang			12.898	100.000.000	325.000.000	2.401	0	18,62	0,00	2.401	0	18,62	0,00	
m	Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi KLB	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	Doku men			12	5.771.000.000	400.772.500	3	0	25,00	0,00	3	0	25,00	0,00	
n	Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Doku men			12	2.356.547.000	13.915.659.000	3	0	25,00	0,00	3	0	25,00	0,00	
o	Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kerja dan olahraga	Doku men			12	100.000.000	48.985.000	3	0	25,00	0,00	3	0	25,00	0,00	
p	Sub kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lingkungan	Doku men			12	275.000.000	100.503.000	3	0	25,00	0,00	3	0	25,00	0,00	
q	Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan promosi kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Doku men			12	300.000.000	236.259.700	3	0	25,00	0,00	3	0	25,00	0,00	
r	Sub kegiatan pengelolaan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan	Doku men			12	200.000.000	123.741.700	3	0	25,00	0,00	3	0	25,00	0,00	

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Target 2023			Realisasi 2023		Capaian 2023		Realisasi s.d 2023		Capaian s.d 2023		K e t	
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	surveilans kesehatan	surveilans Kesehatan																
s	Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan masalah kesehatan jiwa (ODMK)	Jumlah orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	orang			1.978	0	40.548.400	998	0	50,00	0,00	998	0	50,00	0,00		
t	Sub kegiatan pengelolaan upaya pengurangan resiko krisis kesehatan dan pasca krisis kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis Kesehatan dan pasca krisis Kesehatan	Doku men			12	200.000.000	200.000.000	3	20.291.080	25,00	10,15	3	20.291.080	25,00	10,15		
u	Sub kegiatan pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Jumlah dokumen hasil Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Doku men			12	200.000.000	1.124.515.900	3	0	25,00	0,00	3	0	25,00	0,00		
v	Sub kegiatan pengelolaan jaminann kesehatan masyarakat	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan jaminan Kesehatan masyarakat	Doku men			12	19.305.472.000	19.603.222.000	3	3.997.001.400	25,00	20,39	3	3.997.001.400	25,00	20,39		
w	Sub kegiatan operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Jumlah dokumen hasil Operasional pelayanan fasilitas kesehatan lainnya	Doku men			12	50.000.000	75.000.000	3	0	25,00	0,00	3	0	25,00	0,00		
x	Sub kegiatan pelaksanaan akreditasi fasilitas kesehatan di Kab/kota	Jumlah faskes yang terakreditasi di kabupaten/kota	Unit			15	530.000.000	694.410.800	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Target 2023			Realisasi 2023		Capaian 2023		Realisasi s.d 2023		Capaian s.d 2023		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
y	Sub kegiatan penyediaan dan pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) tersedia, terkelola dan terintegrasi dengan RS dalam satu penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)	Unit			1	30.000.000	50.000.000	1	0	100	0,00	1	0	100	0,00	
z	Sub kegiatan Pengelolaan pelayanan Kesehatan Malaria	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan pelayanan kesehatan malaria	Doku men			1	0	52.000.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
3	Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara terintegrasi																
a	Sub kegiatan Pengelolaan sistem informasi Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan sistem informasi kesehatan	Doku men			12	0	74.440.000	3	0	25,00	0,00	3	0	25,00	0,00	
4	Kegiatan Penerbitan izin Rumah Sakit Kelas C dan D dan fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
a	Sub kegiatan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah RS kelas C, D dan fasyankes yang dikendalikan, diawasi dan ditindaklanjuti perijinannya	Unit			20	25.000.000	20.560.000	5	0	25,00	0,00	5	0	25,00	0,00	
b	Sub kegiatan Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Jumlah fasilitas Kesehatan yang ditingkatkan mutu pelayanannya	Unit			20	0	20.560.000	5	0	25,00	0,00	5	0	25,00	0,00	

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Target 2023			Realisasi 2023		Capaian 2023		Realisasi s.d 2023		Capaian s.d 2023		K e t		
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
Rata-rata Capaian kinerja pada Program I											20,41	2,69							
Predikat											Tinggi								
II	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	%	100		100			100		100		100		100				
1	Kegiatan Perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kab/kota																		
a	Sub kegiatan Pembinaan dan pengawasan sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah dokumen hasil Pembinaan dan pengawasan sumber daya manusia Kesehatan	Dokumen			12		0	107.024.000	3		0	25,00	0,0	3		0	25,00	0,00
2	Kegiatan Pengembangan Mutu dan Peningkatan kompetensi teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan tingkat daerah Kab/kota																		
a	Sub kegiatan pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia Kesehatan tingkat daerah Kab	Jumlah SDMK tingkat Daerah Kabupaten/ Kota yang ditingkatkan mutu dan kompetensinya	Orang			247		10.000.000	1.333.777.000	0		0	0,00	0,00	0		0	0,00	0,00
Rata-rata Capaian kinerja pada Program A2											12,50								
Predikat											Tinggi								
III	Program sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	%	62		62				100		100		100		100			
		Cakupan Penggunaan Obat Rasional (POR) di puskesmas	%	77		77				84,62		100		84,62		100			
		Pengawasan makanan	%	100		100				0,0		0,0		0,0		0,0			

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Target 2023			Realisasi 2023		Capaian 2023		Realisasi s.d 2023		Capaian s.d 2023		Ket	
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		minuman di pasar tradisional																
		Persentase sarana pelayanan mendapatkan ijin Kesehatan	%	100		100			100		100		100		100			
		Cakupan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) yang mendapat SPP-IRT	%	100		100			100		100		100		100			
1	Kegiatan Pemberian izin apotek, Toko obat, Toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)																	
a	Sub kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perijinan apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal, usaha mikro obat tradisional (UMOT)	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat	Dokumen			12	39.000.000	63.730.000	3	0	25,00	0,0	3	0	25,00	0,00		
2	Kegiatan Penerbitan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai ijin produksi, untuk produk makanan minuman tertentu																	
a	Sub kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk produk	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi,	Dokumen			12	125.000.000	230.450.000	3	0	25,00	0,0	3	0	25,00	0,00		

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Target 2023			Realisasi 2023		Capaian 2023		Realisasi s.d 2023		Capaian s.d 2023		K e t	
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
	makanan minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh industri rumah tangga																	
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga																		
a	Sub kegiatan Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan sarana produksi Makanan- Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	Unit			60	286.000.000	158.966.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00		
Rata-rata Capaian kinerja pada Program III											0,00							
Predikat											rendah							
IV	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat (PHBS Rumah Tangga) Strata Utama dan Paripurna	%	83,09		83,07			0,37		0,45		0,37		0,45			
1	Kegiatan Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kab/Kota																	
a	Sub kegiatan peningkatan upaya promosi kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat	Jumlah dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Doku men			12	0	71.450.000	3	0	25,00	0,0	3	0	25,00	0,00		
2	Kegiatan Pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) tingkat daerah kabupaten/Kota																	
a	Sub kegiatan Bimbingan teknis dan supervisi pengembangan dan	Jumlah dokumen hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan	Doku men			12	0	350.028.000	3	0	25,00	0,0	3	0	25,00	0,00		

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Target 2023			Realisasi 2023		Capaian 2023		Realisasi s.d 2023		Capaian s.d 2023		Ket		
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	pelaksanaan upaya kehatan bersumber daya msasyarakat (UKBM)	Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada program A4											25,0	75,45							
Predikat											Sangat Tinggi								
B.I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/ KOTA																		
1	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah																		
a	Sub kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yg menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang		1.300	80.832.740.868	74.037.614.401	1.300	14.635.086.854	100	19,77	1.300	14.138.848.987	100	19,77				
2	Kegiatan Administrasi Umum perangkat Daerah																		
a	Sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/peneran gan bangunan kantor	Jumlah paket komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket		1	5.000.000	5.000.000	0,25	0	25,00	0,00	0,25	0	25,00	0,00				
b	Sub kegiatan penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah paket bahan logistic Kantor yang disediakan	Paket		1	12.000.000	12.000.000	0,25	0	25,00	0,00	0,25	0	25,00	0,00				
c	Sub kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket		1	12.000.000	12.000.000	0,25	0	25,00	0,00	0,25	0	25,00	0,00				
d	Sub kegiatan fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	Laporan		12	15.000.000	60.870.000	3	0	25,00	0,00	3	0	25,00	0,00				
e	Sub kegiatan penyelenggara an rapat	Jumlah laporan Penyelenggara an Rapat	Laporan		12	30.000.000	30.000.000	3	0	25,00	0,00	3	0	25,00	0,00				

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Target 2023			Realisasi 2023		Capaian 2023		Realisasi s.d 2023		Capaian s.d 2023		Ket
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	koordinasi dan konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
3	Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah																
a	Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan			12	220.000.000	220.000.000	3	45.581.335	25,00	20,72	3	45.581.335	25,00	20,72	
b	Sub kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan			12	2.155.784.000	2.267.784.000	3	551.296.386	25,00	24,31	3	551.296.386	25,00	24,31	
5	Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah																
a	Sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/ lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Unit			16	100.000.000	100.000.000	4	0	25,00	0,00	4	0	25,00	0,00	
b	Sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit			20	10.000.000	10.000.000	5	0	25,00	0,00	5	0	25,00	0,00	
c	Sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit			3	20.000.000	25.000.000	0	0	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	
d	Sub kegiatan pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Unit			20	5.000.000	5.000.000	5	0	25,00	0,00	5	0	25,00	0,00	

No	Bidang/ Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Target 2023			Realisasi 2023		Capaian 2023		Realisasi s.d 2023		Capaian s.d 2023		Ket		
				K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	atau bangunan lainnya	dipelihara/direh abilitasi																	
Rata-rata Capaian kinerja pada Program B1											29,17								
Predikat											Sangat Tinggi								
				JUMLAH	169.489.653.868	161.764.686.324		19.369.407.055											
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH											22,42								
PREDIKAT											Tinggi								
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH																			
PREDIKAT																			

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2022 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2018-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kesehatan berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah kabupaten/Kota;
 - b. Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat daerah Kabupaten/Kota;
 - c. Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di wilayah Kabupaten/Kota;
 - d. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
 - f. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga; dan
 - g. Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
2. Tidak ada kegiatan yang realisasinya melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, adalah kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Kesehatan.

Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2022, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan *kategori Sangat Baik yaitu dengan nilai 98,89%*. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per program sebagai berikut:

1. Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
Capaian Kinerja : 95,57 % kategori Sangat Baik
2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
Capaian Kinerja : 100 % kategori Memuaskan
3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; dan
Capaian Kinerja : 100 % kategori Memuaskan
4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
Capaian Kinerja : 100 % kategori Memuaskan

Dari Tabel 2.1. dan Triwulan I tahun 2023 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2022 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Triwulan I Tahun 2023 (**Laporan IKPD**)

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2022 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,45	75,47	75,49	75,51	75,53	75,48	75,58	75,64	75,70	75,70	100	TT
2	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 KH	83,5	79,5	75,5	71,5	67,5	85,27	95,83	174,38	75,32	9,06	94,66	AT
3	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1.000 KH	12,8	12,6	12,4	12,2	12	12,51	12,65	12,72	13,23	13,10	91,52	AT
4	Prevalensi balita gizi buruk	%	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,27	0,18	0,18	0,31	0,31	100	TT
5	Persentase rumah tangga yang memiliki jamban	%	79,84	80,84	81,84	82,84	83,84	89,14	97,72	100	100	64,90	100	TT
6	Persentase puskesmas yang sarprasnya sesuai standar	%	84,62	85	90	95	100	96,15	96,15	100	100	100	100	TT
7	Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	%	97,00	97,20	97,40	97,80	98,00	99,22	98,41	97,73	98,72	98,37	100	TT
8	Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan antenatal sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	11,96	100	TT
9	Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	20,50	100	TT
10	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	20,50	100	TT
11	Persentase pertolongan persalinan di fasilitas Kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	20,50	100	TT
12	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100	100	99,09	21,38	99,09	AT
13	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani	%	65	68	68	70	72	100	100	100	100	100	100	TT
14	Angka Kematian Neonatal	Per 1.000 KH	7	7	7	7	7	9,00	9,77	9,54	9,15	8,13	69,35	UK

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2022 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
15	Cakupan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	99,67	80,40	81,64	92,95	23,85	92,95	AT
16	Angka Kematian Balita	Per 1.000 KH	14	14	13,8	13,8	13,6	14,68	13,90	14,05	15,60	16,70	85,28	AT
17	Persentase anak pada usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	6,19	84,92	82,05	19,72	82,05	AT
18	Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	86,60	51,81	69,25	89,07	20,31	89,07	AT
19	Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	94,25	62,64	89,52	83,22	37,05	83,22	AT
20	Persentase kunjungan baru di pelayanan Kesehatan dasar (kunjungan rawat jalan di puskesmas)	%	41,5	42	42,5	43	43,5	36,06	38,09	33,83	55,32	16,15	100	TT
21	Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah terakreditasi utama	%	19,23	34,62	38,46	50,00	53,85	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	74,28	UK
22	Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	22,63	19,99	30,97	84,78	14,53	84,78	AT
23	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	75,91	77,37	92,50	100	39,17	100	TT
24	Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	88,86	83,06	100	100	50	100	TT
25	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	72,11	38,19	67,88	95,65	36,34	95,65	AT
26	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan	%	100	100	100	100	100	68,41	74,42	73,49	87,03	18,62	87,03	AT

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2022 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
	pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar													
27	Persentase penanganan KLB 1x24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT
28	Angka penemuan kasus Malaria (API)	Maks per 1.000 penddk	1	1	1	1	1	0,008	0,000	0,005	0,003	0,00	100	TT
29	Incident rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	Maks per 100.000 penddk	20	20	20	20	20	37,62	51,13	3,75	3,62	0,87	100	TT
30	Angka penemuan kasus baru Kusta	Maks per 100.000 penddk	1	1	1	1	1	0,13	0,36	0,00	0,125	0,00	100	TT
31	Persentase Desa/kelurahan UCI	%	100	100	100	100	100	98,96	99,31	99,31	99,65	0,00	99,65	AT
32	Persentase anak umur 1 tahun diimunisasi Campak	%	95	95	95	95	95	95,61	95,75	81,61	97,05	19,26	100	TT
33	Prevalensi gizi kurang (<i>underweight</i>) pada anak balita (0-60 bulan)	% maks	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	3,35	2,20	3,10	3,41	5,07	100	TT
34	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-23 bulan)	% maks	29	28,5	28	27,5	27	20,40	14,23	13,13	13,03	10,00	100	TT
35	Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	% min	80	80	80	80	80	86,03	74,01	84,02	82,33	82,6,2	100	TT
36	Prevalensi anemia pada ibu hamil	% maks	20	20	20	20	20	15,72	14,18	13,64	13,44	2,82	100	TT
37	Persentase desa bebas rawan gizi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT
38	Persentase rumah sehat	%	80	80,5	81	81,5	82	80,10	83,75	85,07	87,42	26,50	100	TT
39	Persentase tenaga Kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	%	90	92	95	97	100	97,06	100	100	100	100	100	TT
40	Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	%	-	-	62	62	62	-	-	19,23	100	100	100	TT
41	Cakupan Penggunaan Obat Rasional (POR) di puskesmas	%	-	-	77	77	77	-	-	80,77	96,15	84,62	100	TT

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2022 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
42	Pengawasan makanan minuman di pasar tradisional	%	-	-	100	100	100	-	-	100	100	0	100	TT
43	Persentase sarana pelayanan mendapatkan ijin kesehatan	%	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	100	TT
44	Cakupan Produksi Industri Rumah Tangga (PIRT) yang mendapatkan SPP-IRT	%	-	-	100	100	100	-	-	100	100	100	100	TT
45	Persentase Rumah Tangga Sehat (PHBS Rumah Tangga) strata Utama dan Paripurna	%	83,03	83,03	83,05	83,07	83,09	89,15	92,92	94,42	94,96	0,37	100	TT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 31 (tiga puluh satu) terdiri dari:

a. Angka Harapan Hidup (AHH).

Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya peningkatan derajat Kesehatan masyarakat, dimana lama hidup seseorang tidak terlepas dari tingkat Kesehatan yang bersangkutan. Derajat Kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh peningkatan pelayanan Kesehatan baik akses maupun mutu pelayanan Kesehatan. Keberhasilan pembangunan Kesehatan sangat berdampak kepada Angka Harapan Hidup.

b. Prevalensi balita gizi buruk

Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya kegiatan pemantauan status gizi pada balita secara serentak yang dilakukan setiap tahun untuk mengetahui status gizi balita di Kabupaten Temanggung. Jika ditemukan balita dengan status gizi buruk dilakukan perawatan minimal selama 90 hari dengan pemberian makanan tambahan (PMT) pemulihan sehingga berat badan balita dapat naik dan keluar dari status balita gizi buruk.

c. Prosentase rumah tangga yang memiliki jamban

Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya stimulan jamban keluarga dari pemerintah sehingga masyarakat tidak mampu dapat memiliki jamban keluarga

d. Persentase Puskesmas yang sarprasnya sesuai standar

Faktor pendorong indikator tersebut adalah sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat menyebutkan bahwa Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan serta harus memenuhi persyaratan baik lokasi, bangunan, prasarana dan peralatan Kesehatan, dan berdasarkan standar Rencana Aksi Dirjen Fasilitas Pelayanan Kesehatan bahwa Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama antara lain Puskesmas yang sarprasnya memenuhi standar adalah dengan capaian SPA (Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) lebih dari 60%. Untuk Puskesmas yang ada di Kabupaten

Temanggung, SPA Puskesmas keseluruhan sudah mencapai diatas 60% walaupun belum 100%, dengan adanya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam pemenuhan kebutuhan SPA Puskesmas di Kabupaten Temanggung.

e. Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan

Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya dukungan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam pemenuhan kebutuhan obat Puskesmas di Kabupaten Temanggung. Dan juga adanya perencanaan obat yang disusun oleh pengelola program kefarmasin yang berkoordinasi dengan puskesmas dalam merumuskan kebutuhan obat setiap tahunnya.

Faktor penghambat indicator ini adalah masih adanya obat yang dibutuhkan oleh Puskesmas yang belum masuk dalam etalase e-catalog.

f. Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar

Faktor pendorong indikator tersebut adalah pemberian pelayanan kesehatan kepada seluruh ibu hamil oleh tenaga Kesehatan yang berkompeten seperti dokter SPOG, bidan dan sesuai dengan standar Kesehatan pelayanan ibu hamil dengan kriteria 10T, antara lain pelayanan antenatal minimal 4kali selama masa kehamilan.

g. Cakupan ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar

Faktor pendorong indikator tersebut adalah pemberian pelayanan persalinan kepada seluruh ibu bersalin oleh tenaga Kesehatan yang berkompeten seperti dokter SPOG, bidan, dilayani di fasilitas pelayanan Kesehatan dan sesuai dengan standar pelayanan persalinan.

h. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Faktor pendorong indikator tersebut adalah terpenuhinya tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Temanggung seperti bidan dan dokter spesialis

kebidanan (SPOG) melalui peningkatan kompetensi SDM Kesehatan khususnya tenaga bidan, sehingga semua persalinan ditolong oleh tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan.

- i. Persentase pertolongan persalinan di fasilitas Kesehatan
Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya peraturan dimana Puskesmas merupakan tempat persalinan yang memberikan pelayanan persalinan kepada seluruh ibu bersalin selama 24 jam, sehingga seluruh persalinan bisa ditolong di puskesmas sebagai fasilitas Kesehatan. Dan adanya pemenuhan peralatan Kesehatan guna pertolongan persalinan yang sudah tersedia di Puskesmas.
- j. Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani
Faktor pendorong indikator tersebut adalah tersedianya peralatan Kesehatan di fasilitas Kesehatan yang lengkap dan deteksi dini pada bayi baru lahir, sehingga bayi baru lahir yang memiliki komplikasi dapat segera ditangani.
- k. Persentase kunjungan baru di pelayanan Kesehatan dasar
Faktor pendorong indikator tersebut adalah setelah pencabutan status bebas COVID-19 masyarakat sudah tidak takut untuk datang ke fasilitas Kesehatan dalam mendapatkan pelayanan Kesehatan sehingga kunjungan di Pelayanan Kesehatan Dasar (Puskesmas) meningkat.
- l. Persentase penderita DM mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar
Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya upaya deteksi dini penyakit DM melalui Posbindu sehingga penderita DM dapat segera ditangani dan kesadaran masyarakat penderita Diabetes Melitus datang ke fasilitas pelayanan Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan Kesehatan/pengobatan penyakit DM yang dideritanya.
- m. Persentase ODGJ berat mendapatkan pelayanan Kesehatan jiwa sesuai standar
Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya peningkatan kapasitas SDM Kesehatan jiwa bagi petugas Kesehatan jiwa puskesmas, sehingga dapat segera mendeteksi ODGJ berat dan segera merujuk ke Fasilitas

Kesehatan rujukan untuk penanganan lebih lanjut.

- n. Persentase penanganan KLB 1x24 jsm
Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya Tim Gerak Cepat di semua Puskesmas sehingga jika ada lonjakan kasus atau adanya kematian yang disebabkan penyakit dapat segera di tangani yang dimulai dengan Penyelidikan Epidemiologi dalam waktu 24 jam.
- o. Angka kesakitan kasus Malaria (API)
Faktor pendorong indikator tersebut adalah karena Kabupaten Temanggung bukan merupakan daerah endemis Malaria.
- p. Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)
Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya perubahan standar IR DBD, sehingga Kabupaten Temanggung masih masuk kategori aman (IR DBD < 20 per 100.000 penduduk).
- q. Angka penemuan kasus baru Kusta
Faktor pendorong indikator tersebut adalah karena Kabupaten Temanggung bukan merupakan daerah endemis Kusta.
- r. Persentase anak umur 1 tahun diimunisasi Campak
Faktor pendorong indikator tersebut adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi Campak bagi bayi mereka walaupun sebagian kecil yang menolak.
- s. Prevalensi gizi kurang (underweight) pada anak balita (0-60 bulan)
Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya kegiatan Pemantauan Status Gizi balita yang dilakukan setiap tahunnya untuk skrining status gizi balita di Kabupaten Temanggung, sehingga dapat segera ditangani.
- t. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)
Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya kegiatan pengamatan dan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita secara serentak 2 kali dalam setahun.
- u. Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif
Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya kegiatan

orientasi motivator ASI dan pemberdayaan kader dalam pelaksanaan ASI Eksklusif di desa.

v. Prevalensi anemia pada ibu hamil

Faktor pendorong indikator tersebut adalah karena ketersediaan tablet Fe yang mencukupi dan sosialisasi pentingnya konsumsi tablet Fe bagi ibu hamil.

w. Persentase desa bebas rawan gizi

Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kabupaten Temanggung sudah tidak ada desa yang rawan gizi.

x. Persentase rumah sehat

Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya dukungan program Dinas Kesehatan melalui pendataan rumah yg dikategorikan belum sehat untuk di perbaiki menjadi rumah sehat dan pembinaan kepada masyarakat.

y. Persentase tenaga Kesehatan yang memenuhi standar kompetensi

Faktor pendorong indikator tersebut adalah karena adanya program RPL (Rejognisi Pembelajaran Lampau) dari kementerian Kesehatan untuk penyesuaian Pendidikan tenaga Kesehatan minimal D3.

z. Cakupan Puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar

Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya formasi tenaga Apoteker di 26 Puskesmas yang dipenuhi dari penerimaan ASN tahun 2022 sebagai salah satu syarat pelayanan farmasi sesuai standar yaitu sebagai penanggung jawab Farmasi, sehingga seluruh Puskesmas dapat melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar.

aa. Cakupan Penggunaan Obat Rasional (POR) di Puskesmas

Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya pembinaan, pengawasan, dan monitoring penggunaan obat di Puskesmas oleh Dinas Kesehatan.

bb. Pengawasan makanan minuman di pasar tradisional

Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya keterlibatan dan pemberdayaan lintas sektor dalam pengawasan makanan dan minuman di pasar tradisional.

- cc. Persentase sarana pelayanan mendapatkan ijin Kesehatan
Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya Kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan sarana pelayanan Kesehatan (RS, Klinik dan Puskesmas) dalam update regulasi maupun koordinasi terkait perijinan.
- dd. Cakupan produksi Industri Rumah tangga (PIRT) yang mendapatkan SPP-IRT
Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya Kerjasama antara Dinas Kesehatan dengan Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam pemberian SPP-IRT.
- ee. Persentase rumah tangga sehat (PHBS rumah tangga) strata utama dan paripurna.
Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya Kerjasama antara petugas kesehatan Puskesmas dengan kader Kesehatan desa dalam kegiatan pendataan Rumah Tangga Sehat di Kabupaten Temanggung.
2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 12 (dua belas) terdiri dari:
- a. Angka Kematian Ibu.
Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih adanya kasus kematian ibu di Kabupaten Temanggung.
Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah dengan masih adanya kasus kematian ibu di Kabupaten Temanggung menunjukkan bahwa masih diperlukan program-program inovasi yang berkaitan dengan Kesehatan ibu khususnya ibu hamil, yaitu seperti Gerakan saying ibu, pemberian makanan tambahan ibu hamil, pelayanan Kesehatan pasca persalinan dan deteksi dini ibu hamil resiko tinggi.
- b. Angka Kematian Bayi (AKB).
Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih tingginya kasus kematian bayi di Kabupaten Temanggung yaitu 123 kematian bayi pada tahun 2022.
Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada ibu hamil dan bayi baru lahir dengan kolaborasi dengan tenaga ahli (dokter SPOG dan SPA), pelayanan persalinan kepada ibu

bersalin, pelayanan Kesehatan bayi baru lahir, imunisasi pada bayi 0-11 bulan, dan ASI Eksklusif pada bayi 0-6 bulan.

- c. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar

Faktor penghambat indikator tersebut adalah belum optimalnya pelayanan Kesehatan bayi baru lahir di Kabupaten Temanggung, dimana masih ada bayi baru lahir yang belum mendapatkan pelayanan sesuai standar.

Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah dengan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan khususnya pelayanan Kesehatan pada bayi baru lahir.

- d. Cakupan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar

Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih ada balita yang belum mendapatkan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar salah satunya adalah penimbangan minimal 8x dalam setahun, dimana orangtua yg bekerja tidak dapat membawa balitanya ke posyandu untuk memantau status gizi balitanya melalui penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan.

Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah dengan dilaksanakan sweeping pemantauan status gizi balita yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan dibantu kader Kesehatan di desa dan penyuluhan Kesehatan kepada masyarakat dan pelaksanaan puskesmas ramah anak.

- e. Angka Kematian Balita

Faktor penghambat indikator tersebut adalah factor penyakit penyerta seperti penyakit paru, diare, ISPA yang menyebabkan kematian balita di Kabupaten Temanggung. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah dengan ditingkatkan kolaborasi Puskesmas dengan tenaga ahli dokter SPA dalam penanganan penyakit pada balita dan penyuluhan Kesehatan kepada masyarakat.

- f. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar

Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih adanya anak usia Pendidikan dasar yang belum mendapatkan pelayanan Kesehatan terutama anak yang tidak sekolah, dan

tidak masuk sekolah saat dilaksanakan skrining Kesehatan. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah dengan dilaksanakan sweeping pelaksanaan skrining dengan kunjungan rumah.

- g. Persentase Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih adanya masyarakat Kabupaten Temanggung yang masuk usia produktif tidak mau datang ke fasilitas Kesehatan untuk mendapatkan skrining kesehatan jika mereka tidak sakit, sehingga tidak bisa mencapai target 100%.

Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah dengan dilaksanakan penyuluhan Kesehatan tentang pentingnya mendapat pelayanan Kesehatan agar dapat deteksi dini terhadap penyakit yang mungkin di deritanya melalui Posbindu di wilayah tempat tinggalnya.

- h. Cakupan Warga Negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar

Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih adanya sasaran lansia yang tidak mau datang ke fasilitas Kesehatan misalnya Posyandu lansia untuk mendapatkan skrining Kesehatan dengan alasan mereka tidak sakit.

Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah dengan melibatkan lintas sektor seperti organisasi masyarakat (PKK, majelis taklim) dalam pelaksanaan skrining Kesehatan bagi masyarakat usia diatas 60 tahun melalui Posyandu lansia dan posbindu.

- i. Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Faktor penghambat indikator tersebut adalah pola pikir masyarakat terkait kunjungan ke pelayanan Kesehatan dilakukan jika hanya saat sakit dan data yang diperoleh belum mencakup seluruh fasilitas Kesehatan (lost data).

Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah dengan melibatkan lintas sektor seperti organisasi masyarakat (PKK, majelis taklim) dalam pelaksanaan posbindu dimana tidak hanya masyarakat yang sakit yang mendapatkan pelayanan

kesehatan dan dilakukan koordinasi dalam pengumpulan data dari semua fasilitas pelayanan kesehatan.

- j. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar

Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya kerusakan pada alat Tes Cepat Molekular (TCM) sebagai penegakan diagnose TBC di beberapa puskesmas, sehingga pelaksanaan skrining orang terduga TBC tidak maksimal.

Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah dengan pengajuan alat TCM kepada Pemerintah Daerah.

- k. Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar

Faktor penghambat indikator tersebut adalah belum optimalnya pelayanan orang beresiko terinfeksi HIV di Kabupaten Temanggung yaitu penjangkauan pada kelompok populasi kunci, misalnya ibu hamil dan pasien TB menolak untuk diperiksa HIV.

Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah dengan penyuluhan Kesehatan tentang deteksi dini kasus HIV sehingga dapat segera ditangani.

1. Persentase desa/kelurahan UCI

Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih ada satu desa dimana masyarakatnya menolak imunisasi pada bayinya (Desa Bonjor Kecamatan Tretep).

Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah dengan melibatkan lintas sektor seperti tokoh agama, aparat Kecamatan, kepolisian dalam memberikan penjelasan pentingnya imunisasi sebagai daya tahan tubuh anak dalam melawan penyakit yang menyerang tubuhnya.

3. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 2 (dua) terdiri dari:

- a. Angka Kematian Neonatal

Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih tingginya kasus kematian pada bayi usia 0-28 hari yang salah satu penyebabnya adalah kualitas kunjungan neonatal yang belum optimal serta pengelolaan manajemen laktasi yang belum maksimal.

Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah peningkatan kualitas tenaga Kesehatan dalam penanganan kasus kegawatdaruratan neonatal sehingga kematian neonatal dapat ditekan.

- b. Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah terakreditasi utama

Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih belum dicabutkan aturan Kemenkes RI tentang penundaan penilaian akreditasi pada FKTP.

Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Puskesmas tetap meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, sehingga saat aturan penundaan penilaian akreditasi FKTP dicabut puskesmas telah siap dan derajat Kesehatan tetap meningkat.

3.1.2.Data Pokok

Data Pokok pada Dinas Kesehatan terdiri dari satu jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Data Pokok Bidang Kesehatan

- a. Angka Harapan Hidup

Realisasi Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4

Angka Harapan Hidup Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	AHH	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kab Temanggung	75,43	75,48	75,58	75,64	75,70
2	Jawa Tengah	74,18	74,23	74,37	74,47	74,47
3	Nasional	71,20	71,34	71,47	71,57	71,57

Sumber : Data Pokok DInkes Kab Temanggung Tahun 2022

- b. Angka Kematian Ibu

Realisasi Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran hidup di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah dalam 1 tahun	9	9	10	17	7
2	Jumlah kelahiran hidup	10.272	10.555	10.435	9.749	9.294
3	AKI	87,62	85,27	95,83	174,38	75,32

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung 2022

c. Angka Kematian Bayi

Realisasi Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.6

Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah bayi (berumur <1 tahun) yang meninggal di suatu wilayah pada kurun waktu 1 tahun	132	132	132	124	123
2	Jumlah kelahiran hidup	10.272	10.555	10.435	9.749	9.294
3	AKB	12,85	12,51	12,65	12,72	13,23

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung 2022

d. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Realisasi Prevalensi Balita gizi buruk Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7
Prevalensi Balita Gizi Buruk
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah balita gizi buruk	157	142	93	93	134
2	Jumlah balita	52.303	51.936	50.297	51.545	42.350
3	Prevalensi balita gizi buruk	0,30	0,27	0,18	0,18	0,31

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung 2022

e. Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap Jamban Sehat

Realisasi rumah tangga yang memiliki akses terhadap jamban sehat di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.8
Prevalensi Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap jamban sehat Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah RT yang memiliki akses jamban sehat	202.231	213.133	251.534	291.859	213.791
2	Jumlah RT	233.358	257.391	257.391	291.859	213.791
3	% RT memiliki akses jamban sehat	86,66	82,81	97,72	100	100

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung 2022

f. Persentase Puskesmas yang Sarprasnya Sesuai Standar

Realisasi Puskesmas yang Sarprasnya Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.9

Persentase Puskesmas yang Sarprasnya Sesuai Standar
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Puskesmas sesuai standar	25	25	25	26	26
	a. Puskesmas rawat inap	5	5	5	6	6
	b. Puskesmas non Rawat Inap	20	20	20	20	20
2	Jumlah Puskesmas	25	25	26	26	26
	a. Puskesmas rawat inap	5	6	6	6	6
	b. Puskesmas non Rawat Inap	20	20	20	20	20
3	Persentase Puskesmas sesuai standar (%)	96	96,15	96,15	100	100

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung 2022

g. Persentase Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan

Realisasi Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.10

Persentase Ketersediaan Obat sesuai Kebutuhan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah obat yang tersedia sesuai kebutuhan	144	127	124	129	3.465
2	Jumlah kebutuhan obat	148	128	126	132	3.510
3	% Ketersediaan obat sesuai kebutuhan	97,3	99,2	98,6	97,7	98,7

Sumber : Data Pokok Dinkes | Kab Temanggung Taun 2022

h. Cakupan Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Antenatal Sesuai Standar

Realisasi Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Antenatal Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11

Cakupan Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Antenatal Sesuai Standar Kabupaten Temanggung,
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar	11.690	1.0977	10.677	10.740	10.388
2	Jumlah sasaran ibu hamil	11.731	10.977	10.677	10.740	10.388
3	Cakupan ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar (%)	99,65	100	100	100	100

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung Taun 2022

i. Cakupan Ibu bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar

Realisasi Ibu bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.12

Persentase Ibu bersalin Mendapatkan Pelayanan
Persalinan Sesuai Standar Kabupaten Temanggung,
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	10.280	10.594	10.446	9.792	9.300
2	Jumlah sasaran ibu bersalin	10.280	10.594	10.446	9.792	9.300
3	% ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	100	100	100	100	100

Sumber : Data Pokok Dinkes | Kab Temanggung Taun 2022

- j. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Realisasi Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.13

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah persalinan yang ditolong oleh bidan atau tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	10.277	10.594	10.446	9.792	9.300
2	Jumlah persalinan	10.280	10.594	10.446	9.792	9.300
3	% persalinan yang ditolong oleh bidan atau tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	99,97	100	100	100	100

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung Taun 2022

- k. Persentase Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan

Realisasi Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.14

Persentase Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah persalinan	10.280	10.594	10.446	9.792	9.300

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	yang ditolong di fasilitas kesehatan					
2	Jumlah persalinan	10.280	10.594	10.446	9.792	9.300
3	% Persalinan yang ditolong di fasilitas kesehatan	100	100	100	100	100

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung Taun 2022

1. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Realisasi Bayi Baru Lahir Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.15

Bayi Baru Lahir Mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	10.272	10.555	10.435	9.740	9.209
2	Jumlah Sasaran bayi baru lahir	10.272	10.555	10.435	9.740	9.294
3	% bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100	100	100	100	99,09

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung Taun 2022

m. Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani
Realisasi Neonatal dengan Komplikasi yang Ditangani di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.16

Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang
Ditangani Kabupaten Temanggung,
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah neonatus dengan komplikasi yang ditangani	2.068	2.191	2.337	2.138	2.085
2	Jumlah seluruh Neonatus dengan komplikasi	2.068	2.191	2.337	2.138	2.085
3	Cakupan neonatal dengan komplikasi yang ditangani (%)	100	100	100	100	100

Sumber : Data Pokok Dinkes | Kab Temanggung Taun 2022

n. Angka Kematian Neonatal

Realisasi Angka Kematian Neonatal per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.17

Angka Kematian Neonatal
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah bayi usia 0-28 hari yang meninggal	100	95	102	93	85
2	Jumlah kelahiran hidup	10.272	10.555	10.435	9.749	9.294
3	Angka Kematian Neonatal	9,74	9,00	9,77	9,54	9,15

Sumber : Data Pokok Dinkes | Kab Temanggung Taun 2022

o. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar

Realisasi Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.18

**Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah balita mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	48.654	45.172	40.441	42.083	40.199
2	Jumlah sasaran balita	48.654	45.172	50.297	51.545	43.250
3	% balita mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100	100	80,40	81,64	92,95

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung Taun 2022

p. **Angka Kematian Balita**

Realisasi Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.19

**Angka Kematian Balita
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022**

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah balita yang meninggal	147	155	145	137	145
2	Jumlah kelahiran hidup	10.272	10.555	10.435	9.749	9.294
3	Angka Kematian Balita	14,31	14,68	13,90	14,05	15,60

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung Taun 2022

q. **Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar**

Realisasi Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.20

Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah anak usia Pendidikan dasar mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	12.971	58.335	28.242	96.443	81.813
2	Jumlah semua anak usia Pendidikan dasar	12.971	58.335	91.245	113.569	99.708
3	% anak usia Pendidikan dasar mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	100	100	30,95	84,92	82,05

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung Taun 2022

r. Persentase Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar

Realisasi Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.21

Persentase Warga Negara Indonesia usia 15 s.d 59 Tahun
Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah warga negara usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining	398.395	442.748	280.135	357.786	456.236

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	sesuai standar					
2	Jumlah warga negara usia 15-59 tahun	511.632	511.265	540.662	516.638	512.226
3	% warga negara usia 15-59 tahun yang mendapatkan pelayanan skrining sesuai standar	77,87	86,60	51,81	69,25	89,07

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung Taun 2022

- s. Persentase Warga Negara Indonesia usia 60 Tahun ke atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Realisasi Warga Negara Indonesia usia 60 Tahun ke atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.22

Persentase Warga Negara Indonesia usia 60 Tahun ke atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah warga negara berusia 60 tahun keatas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar	95.094	96.839	72.733	99.987	91.836
2	Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun keatas	100.776	102.744	116.105	111.691	110.336
3	% warga negara berusia 60 tahun keatas mendapatkan skrining Kesehatan	94,36	94,25	62,64	89,52	83,22

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	sesuai standar					

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung Taun 2022

t. Persentase Kunjungan Baru di Pelayanan Kesehatan Dasar (Kunjungan Rawat Jalan di Puskesmas)

Realisasi Kunjungan Baru di Pelayanan Kesehatan Dasar (Kunjungan Rawat Jalan di Puskesmas) di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.23

Persentase Kunjungan Baru di Pelayanan Kesehatan Dasar (Kunjungan Rawat Jalan di Puskesmas) Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kunjungan baru di Pelayanan Kesehatan Dasar	362.994	284.679	302.486	270.756	443.269
2	Jumlah penduduk	780.148	789.508	794.055	800.429	801.267
3	% kunjungan baru di Pelayanan Kesehatan Dasar	46,53	36,06	38,09	33,83	55,35

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung Taun 2022

u. Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Terakreditasi Utama

Realisasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Terakreditasi Utama di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.24

Persentase Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Terakreditasi Utama Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah FKTP terakreditasi Paripurna	0	2	2	2	2
	Jumlah FKTP terakreditasi Utama	2	8	8	8	8
	Jumlah FKTP terakreditasi Madya	16	14	14	14	14
	Jumlah FKTP terakreditasi Dasar	7	1	1	1	1
2	Jumlah FKTP yang akreditasi	25	25	25	25	25
3	% Akreditasi utama	8	40	40	40	40

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung Taun 2022

v. Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Realisasi Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.25

Persentase Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanna Kesehatan sesuai standar	39.166	49.333	43.629	66.107	187.378
2	Jumlah sasaran penderita Hipertensi sesuai estimasi	166.922	217.973	218.228	213.442	221.010
3	% Penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	23,46	22,63	19,99	30,97	84,78

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung Taun 2022

w. Persentase Penderita Diabetes Melitus Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Realisasi Penderita Diabetes Melitus Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.26

Persentase Penderita Diabetes Melitus Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penderita DM mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	7.130	7.923	8.084	9.456	13.066
2	Jumlah sasaran penderita DM sesuai Prevalensi nasional	58.830	10.438	10.448	10.223	10.584
3	% Penderita DM mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	13,25	75,91	77,37	92,50	100

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung Taun 2022

x. Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa berat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar

Realisasi Orang dengan Gangguan Jiwa berat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.27

Persentase Orang dengan Gangguan Jiwa berat Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	1.569	1.754	1.643	2.030	2.061
2	Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang ada	2.262	1.974	1.978	1.978	1.978
3	% ODGJ berat (psikotik) yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	69,36	88,86	83,06	100	100

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung Taun 2022

y. Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar

Realisasi Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.28

Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang	752	5.693	3.070	5.462	8.115
2	Jumlah orang terduga TBC	752	7.895	8.039	8.046	8.484
3	% orang terduga TBC yang mendapatkan	100	72,11	38,19	67,88	95,65

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	pelayanan TB sesuai standar					

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung Taun 2022

z. Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar

Realisasi Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.29

Persentase Orang Beresiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	7.152	8.709	9.352	9.338	11.086
2	Jumlah orang beresiko HIV	7.152	12.731	12.567	12.706	12.738
3	% orang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	68,41	74,42	73,49	87,03

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung Tahun 2022

aa. Persentase Penanganan KLB 1x24 jam

Realisasi Penanganan KLB 1x24 jam di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.30
 Persentase Penanganan KLB 1x24 Jam
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah desa/kel KLB	9	8	4	3	19
2	Jumlah desa/kel KLB yang ditangani <24 jam	9	8	4	3	19
3	% desa/kel KLB yang dilakukan PE <24 jam	100	100	100	100	100

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung Tahun 2022

bb. Angka Penemuan Penderita Malaria per 1.000 Penduduk

Realisasi Angka Penemuan Penderita Malaria per 1.000 Penduduk di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.31

Angka Penemuan Penderita Malaria per 1.000 Penduduk
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kasus Malaria	7	6	0	4	2
2	Jumlah penduduk	780.148	789.508	794.055	800.276	801.267
3	API Malaria	0,009	0,008	0,0	0,0005	0,0002

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung Tahun 2022

cc. Angka Penemuan Penderita Demam Berdarah Dengue (Incident Rate DBD) per 100.000 penduduk

Realisasi Angka Penemuan Penderita Demam Berdarah Dengue (Incident Rate DBD) per 100.000 Penduduk di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.32
Angka Penemuan Penderita Demam Berdarah Dengue
(Incident Rate DBD) per 100.000 Penduduk
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah kasus DBD	150	375	406	30	29
2	Jumlah penduduk	780.148	789.508	794.055	800.276	801.267
3	IR DBD per 100.000 penduduk	19,23	37,62	51,13	3,75	3,62

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung Tahun 2022

dd. Angka Penemuan Kasus Baru Kusta

Realisasi Angka Penemuan Kasus Baru Kusta di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.33
Angka Penemuan Kasus Baru Kusta
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah penderita Kusta yang ditemukan	3	1	3	0	1
2	Jumlah penduduk	780.148	789.508	794.055	800.276	801.267
3	Angka Penemuan Kasus baru per 100.000 penduduk	0,4	0,1	0,38	0	0,0001

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung Tahun 2022

ee. Persentase Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Realisasi Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.34

Persentase Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah desa/kel UCI	288	286	287	287	288
2	Jumlah desa/kel	289	289	289	289	289
3	% Desa/kel UCI	99,65	98,96	99,31	99,31	99,65

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung Tahun 2022

ff. Persentase Anak Umur 1 Tahun diimunisasi Campak
Realisasi Anak Umur 1 Tahun diimunisasi Campak di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.35

Persentase Anak Umur 1 Tahun diimunisasi Campak Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah anak umur 1 tahun yang diimunisasi Campak	10.254	9.672	10.013	8.742	10.392
2	Jumlah seluruh anak usia 1 tahun	10.272	10.116	10.457	10.771	10.708
3	% anak umur 1 tahun yang diimunisasi Campak	99,8	95,6	95,75	81,15	97,05

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung Tahun 2022

gg. Prevalensi Gizi Kurang (Underweight) pada Anak Balita (0-60 bulan)

Realisasi Prevalensi Gizi Kurang (Underweight) pada Anak Balita (0-60 bulan) di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.36

Prevalensi Gizi Kurang (Underweight) pada Anak Balita (0-60 bulan) Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Prevalensi balita gizi buruk	0,30	0,27	0,18	0,18	0,26
2	Prevalensi balita gizi kurang	3,64	3,35	3,79	3,10	4,21
3	Prevalensi balita gizi baik	94,14	94,53	92,98	92,93	79,23
4	Prevalensi balita gizi lebih	1,92	1,85	2,96	3,79	16,30

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung Tahun 2022

hh. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (0-24 bulan)

Realisasi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (0-24 bulan) di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.37

Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Anak Baduta (0-24 bulan) Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Tahun	Capaian Stunting	
		Balita 0-59 bulan	Baduta 0-23 bulan
1	2018	28,5	18,7
2	2019	-	20,40
3	2020	23	14,23
4	2021	13,44	13,13
5	2022	11,50	13,03

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung Tahun 2022

ii. Persentase Bayi Umur 0-6 bulan Mendapatkan ASI Eksklusif

Realisasi Bayi Umur 0-6 bulan Mendapatkan ASI Eksklusif di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.38

Persentase Bayi Umur 0-6 bulan Mendapatkan ASI Eksklusif Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah bayi usia 0-6 bulan	5.037	5.161	4.207	4.937	4.165

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	mendapatkan ASI Eksklusif					
2	Jumlah sasaran bayi usia 0-6 bulan	5.998	5.999	5.674	5.876	5.059
3	% bayi usia 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	84,0	86,03	74,15	84,02	82,33

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung Tahun 2022

jj. Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil

Realisasi Anemia pada Ibu Hamil di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.39
Prevalensi Anemia pada Ibu Hamil
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah ibu hamil anemia yang ditemukan pada kunjungan K1	1.999	1.821	1.514	1.465	1.394
2	Jumlah seluruh ibu hamil yang diperiksa pada kunjungan K1	11.713	11.584	10.677	10.737	10.374
3	Prevalensi anemia pada ibu hamil	17,04	15,72	14,18	13,64	13,44

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung Tahun 2022

kk. Persentase Desa Bebas Rawan Gizi

Realisasi Desa Bebas Rawan Gizi di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.40
Persentase Desa Bebas Rawan Gizi
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah desa bebas rawan gizi	289	289	289	289	289
2	Jumlah seluruh desa	289	289	289	289	289
3	% Desa bebas rawan gizi	100	100	100	100	100

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung Tahun 2022

ll. Persentase Rumah Sehat

Realisasi Rumah Sehat di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.41
Persentase Rumah Sehat Kabupaten Temanggung,
Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah rumah yang dipantau	198.915	196.791	187.560	196.536	154.536
2	Jumlah rumah sehat	147.244	157.636	157.078	161.481	135.094
3	Jumlah rumah tidak sehat	51.671	39.155	30.482	35.055	19.442
4	Jumlah rumah tidak sehat yang dibina	29.632	39.155	30.482	35.055	19.442
5	% rumah sehat	74,02	80,10	83,75	82,16	87,42
6	% rumah tidak sehat yang dibina	60,03	100	100	17,84	100

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung Tahun 2022

mm. Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi Standar Kompetensi

Realisasi Tenaga Kesehatan yang memenuhi Standar Kompetensi di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.42
Persentase Tenaga Kesehatan yang memenuhi Standar Kompetensi Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah tenaga Kesehatan yang	647	825	897	1.507	1.537

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
	memenuhi standar kompetensi					
2	Jumlah tenaga Kesehatan	680	850	891	1.507	1.537
3	% tenaga Kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	95.15	97,06	100	100	100

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung Tahun 2022

nn. Cakupan Puskesmas Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian

Realisasi Puskesmas Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.43

Cakupan Puskesmas Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	n.a	n.a	n.a	5	26
2	Jumlah Puskesmas	n.a	n.a	n.a	26	26
3	Cakupan Puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	n.a	n.a	n.a	19,23	100

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung Tahun 2022

oo. Cakupan Penggunaan Obat Rasional (POR) di Puskesmas

Realisasi Penggunaan Obat Rasional (POR) di Puskesmas di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.44
Cakupan Penggunaan Obat Rasional (POR) di Puskesmas
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Penggunaan Obat Rasional (POR) di Puskesmas	n.a	n.a	n.a	21	25
2	Jumlah Puskesmas	n.a	n.a	n.a	26	26
3	Cakupan Penggunaan Obat Rasional (POR) di Puskesmas	n.a	n.a	n.a	80,77	96,15

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung Tahun 2022

pp. Pengawasan Makanan Minuman di Pasar Tradisional
Realisasi Pengawasan Makanan Minuman di Pasar Tradisional di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.45
Pengawasan Makanan Minuman di Pasar Tradisional di
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah pasar yang mendapatkan pengawasan makanan minuman	n.a	n.a	n.a	6	6
2	Jumlah pasar tradisional	n.a	n.a	n.a	6	6
3	Cakupan pengawasan makanan dan minuman di pasar tradisional	n.a	n.a	n.a	100	100

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung Tahun 2022

qq. Persentase Sarana Pelayanan Mendapatkan Ijin Kesehatan
Realisasi Sarana Pelayanan Mendapatkan Ijin Kesehatan di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.46
 Persentase Sarana Pelayanan Mendapatkan Ijin
 Kesehatan di Kabupaten Temanggung,
 Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah sarana yang mendapat ijin kesehatan	n.a	n.a	n.a	94	49
2	Jumlah sarana pelayanan	n.a	n.a	n.a	94	49
3	% sarana yang mendapat ijin kesehatan	n.a	n.a	n.a	100	100

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung Tahun 2022

rr. Cakupan Produksi Industri Rumah Tangga yang mendapatkan SPP-IRT

Realisasi Produksi Industri Rumah Tangga yang mendapatkan SPP-IRT di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.47
 Cakupan Produksi Industri Rumah Tangga yang
 mendapatkan SPP-IRT di Kabupaten Temanggung,
 Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah IRTP yang mendapatkan SPP-IRT	n.a	n.a	n.a	113	220
2	Jumlah IRTP yang mengikuti penyuluhan keamanan pangan	n.a	n.a	n.a	120	220
3	Cakupan IRTP yang mendapatkan SPP-IRT	n.a	n.a	n.a	93,26	100

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung Tahun 2022

ss. Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Rumah Tangga Strata Utama dan Paripurna

Realisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Rumah Tangga Strata Utama dan Paripurna di Kabupaten Temanggung tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.48
 Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Rumah
 Tangga Strata Utama dan Paripurna di Kabupaten
 Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah RT ber PHBS strata utama dan paripurna	191.828	208.607	197.523	201.477	196.170
2	Jumlah RT yang dipantau	226.640	233.989	212.574	213.410	206586
3	% RT ber PHBS strata utama dan paripurna	84,64	89,15	92,92	94,42	94,96

Sumber : Data Pokok Dinkes Kab Temanggung Tahun 2022

3.2. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinas Kesehatan dari 45 indikator terdapat 14 (empat belas) indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - Indikator Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup
 Hal ini disebabkan masih tingginya kasus kematian bayi usia 0-28 hari karena kualitas kunjungan neonatal yang belum optimal.
 - Indikator Persentase FKTP milik pemerintah terakreditasi utama
 Hal ini disebabkan karena belum dicabutnya peraturan dari Kementerian Kesehatan RI tentang penundaan penilaian

akreditasi FKTP karena Pandemi COVID-19 sehingga tidak ada kegiatan penilaian akreditasi pada puskesmas di Kabupaten Temanggung .

- Indikator Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan karena masih tingginya jumlah kematian ibu di Kabupaten Temanggung karena faktor resiko pada ibu hamil yaitu 4T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu banyak) dan penyakit penyerta sehingga Angka Kematian meningkat.
- Indikator Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup Hal ini disebabkan karena masih tingginya jumlah kematian bayi yang disebabkan BBLR, kelainan kongenital dan asfiksia.
- Indikator Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar
- Cakupan pelayanan Kesehatan balita
- Angka Kematian Balita per 1.000 kelahiran hidup

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, antara lain :

- Masih tingginya Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup
- Masih tingginya Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
- Masih tingginya Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup
- Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar peran serta seluruh lintas sektor dalam penurunan angka kematian yang ada di Kabupaten Temanggung.

3.3. **Review terhadap rancangan awal RKPD**

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Dengan terbitnya Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, ada beberapa sub kegiatan hilang/bergabung.
2. Terdapat penambahan sub kegiatan di luar rancangan awal Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung, yaitu kegiatan:
 - a. Pembangunan fasilitas Kesehatan lainnya
2. Hasil pemutakhiran terdapat penggabungan beberapa kegiatan kedalam satu kegiatan, yaitu:
 - a. Pengadaan Prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan;
 - b. Pengadaan Bahan Habis Pakai;
 - c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan khusus;
 - d. Pengelolaan data dan informasi Kesehatan;
 - e. Pengadaan alat/perangkat system informasi Kesehatan dan jaringan internet.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana table 2.49 berikut:

Tabel 2.49

Review terhadap Rancangan awal RKPd Tahun 2024

RANCANGAN AWAL RKPd 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keteranga n	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
1	KESEHATAN						1	KESEHATAN							
A.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat						A.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat							
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota						42.260.583.000	
a	Pembangunan Puskesmas	Kedu	Jumlah Puskesmas yang dibangun	1	unit	10.000.000.000	a	Pembangunan Puskesmas	Kedu	Jumlah Puskesmas yang dibangun	1	unit	10.000.000.000		
b	Pembangunan fasilitas Kesehatan lainnya						b	Pembangunan fasilitas Kesehatan lainnya	Manding	Jumlah fasilitas Kesehatan lainnya yang dibangun	1	unit	144.000.000		
c	Pengembangan Puskesmas	Pare, Dharma rini	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2	unit	5.000.000.000	c	Pengembangan Puskesmas	Pare, Dharma rini	Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	2	unit	11.225.000.000		
d	Pengadaan Prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan	Dinkes, Puskesmas, Labkesda	Jumlah Prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan Kesehatan yang disediakan	36	Unit	3.575.000.000	d	Pengadaan Prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan						pemutakhiran	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
e	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes, Puskesmas, Labkesda	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	18	unit	4.050.000.000	e	Pengadaan Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes, Puskesmas, Labkesda	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disediakan	26	unit	6.825.000.000	
f	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes, Puskesmas, Labkesda	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpoelihara sesuai standar	130	unit	150.000.000	f	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinkes, Puskesmas, Labkesda	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang terpoelihara sesuai standar	130	unit	150.000.000	
g	Pengadaan Obat, Vaksin	Dinkes, Puskesmas, PSC 119, Labkesda	Jumlah Obat, Vaksin, di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	30	paket	5.500.000.000	g	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dinkes, Puskesmas, PSC 119, Labkesda	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	30	paket	13.806.583.000	
h	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Dinkes, Puskesmas, PSC 119, Labkesda	Jumlah Bahan Habis Pakai, di Fasilitas Kesehatan	48	paket	6.150.000.000	h							

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			yang disediakan											
i	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Dinkes, Puskesmas	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatan nya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	63.500	keluarga	50.000.000	i	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Dinkes, Puskesmas	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatan nya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	63.500	keluarga	50.000.000	
j	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan lainnya	Puskesmas	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Medis Habis Pakai, Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan lainnya	12	Paket	60.000.000	j	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Puskesmas	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	12	Paket	60.000.000	
2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					46.241.385.500	
a	Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu hamil	Kab Temanggung	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	12.146	orang	373.570.000	a	Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu hamil	Kab Temanggung	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	12.146	orang	373.570.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
b	Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Kab Temanggung	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	9.000	orang	41.804.000	b	Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu bersalin	Kab Temanggung	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	9.000	orang	41.804.000	
c	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Kab Temanggung	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	9.000	orang	437.925.000	c	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	Kab Temanggung	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	9.000	orang	437.925.000	
d	Pengelolaan pelayanan Kesehatan balita	Kab Temanggung	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	45.000	orang	70.360.000	d	Pengelolaan pelayanan Kesehatan balita	Kab Temanggung	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	45.000	orang	70.360.000	
e	Pengelolaan pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	Kab Temanggung	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	99.000	orang	161.480.000	e	Pengelolaan pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	Kab Temanggung	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	99.000	orang	161.480.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
f	Pengelolaan pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Kab Temanggung	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	150.000	orang	70.000.000	f	Pengelolaan pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Kab Temanggung	Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	150.000	orang	70.000.000	
g	Pengelolaan pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Kab Temanggung	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	110.000	orang	150.420.000	g	Pengelolaan pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Kab Temanggung	Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	110.000	orang	150.420.000	
h	Pengelolaan pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Kab Temanggung	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	221.000	orang	80.000.000	h	Pengelolaan pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Kab Temanggung	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	221.000	orang	80.000.000	
i	Pengelolaan pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Kab Temanggung	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	10.584	orang	1.000.000.000	i	Pengelolaan pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus	Kab Temanggung	Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	10.584	orang	1.000.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
j	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Kab Temanggung	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	1.978	orang	90.000.000	j	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Kab Temanggung	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	1.978	orang	90.000.000	
k	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Kab Temanggung	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	8.484	orang	110.000.000	k	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis	Kab Temanggung	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	8.484	orang	110.000.000	
l	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Kab Temanggung	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	12	orang	180.000.000	l	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	Kab Temanggung	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	12	orang	180.000.000	
m	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kab Temanggung	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi	12	Dokumen	850.000.000	m	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Kab Temanggung	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi	12	Dokumen	850.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar							Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar				
n	Pengelolaan pelayanan Kesehatan gizi masyarakat	Kab Temanggung	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan pelayanan Kesehatan gizi masyarakat	12	Doku men	13.869.780.000	n	Pengelolaan pelayanan Kesehatan gizi masyarakat	Kab Temanggung	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan pelayanan Kesehatan gizi masyarakat	12	Doku men	13.869.780.000	
o	Pengelolaan pelayanan Kesehatan kerja dan olahraga	Kab Temanggung	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan pelayanan Kesehatan kerja dan olahraga	12	Doku men	308.000.000	o	Pengelolaan pelayanan Kesehatan kerja dan olahraga	Kab Temanggung	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan pelayanan Kesehatan kerja dan olahraga	12	Doku men	308.000.000	
p	Pengelolaan pelayanan Kesehatan lingkungan	Kab Temanggung	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan pelayanan Kesehatan lingkungan	12	Doku men	6.795.000.000	p	Pengelolaan pelayanan Kesehatan lingkungan	Kab Temanggung	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan pelayanan Kesehatan lingkungan	12	Doku men	6.795.000.000	
q	Pengelolaan pelayanan promosi Kesehatan	Kab Temanggung	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan pelayanan promosi Kesehatan	12	Doku men	301.104.500	q	Pengelolaan pelayanan promosi Kesehatan	Kab Temanggung	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan pelayanan promosi Kesehatan	12	Doku men	301.104.500	
r	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan	Kab Temanggung	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan pelayanan Kesehatan	12	Doku men	50.000.000	r	Pengelolaan pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan	Kab Temanggung	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan pelayanan Kesehatan	12	Doku men	50.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya					Mandiri, dan Tradisional Lainnya		Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya				
s	Pengelolaan surveilans Kesehatan	Kab Temanggung	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan surveilans Kesehatan	12	Dokumen	377.200.000	s	Pengelolaan surveilans Kesehatan	Kab Temanggung	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan surveilans Kesehatan	12	Dokumen	377.200.000	
t	Pengelolaan upaya Kesehatan khusus	Kab Temanggung	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Kesehatan khusus	12	Dokumen	252.200.000	t							Hilang/bergabung karena pemutakhiran
u	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Kab Temanggung	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	12	Dokumen	500.000.000	u	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Kab Temanggung	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	12	Dokumen	500.000.000	
v	Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Kab Temanggung	Jumlah dokumen hasil pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12	Dokumen	250.000.000	v	Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Kab Temanggung	Jumlah dokumen hasil pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12	Dokumen	250.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
w	Pengelolaan jaminan Kesehatan msasyarakat	Kab Temanggung	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan jaminan Kesehatan msasyarakat	12	Doku men	19.305.742.000	w	Pengelolaan jaminan Kesehatan msasyarakat	Kab Temanggung	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan jaminan Kesehatan msasyarakat	12	Doku men	19.305.742.000	
x	Operasional pelayanan fasilitas Kesehatan lainnya	Labkesda	Jumlah dokumen Operasional pelayanan fasilitas Kesehatan lainnya	12	Doku men	130.000.000	x	Operasional pelayanan fasilitas Kesehatan lainnya	Labkesda	Jumlah dokumen Operasional pelayanan fasilitas Kesehatan lainnya	12	Doku men	130.000.000	
y	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Puskes mas	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/ Kota	14	unit	664.000.000	y	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/ Kota	Puskes mas	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/ Kota	14	unit	664.000.000	
z	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab Temanggung	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) tersedia, terkelolaan dan terintegrasi dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	Unit	75.000.000	z	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Kab Temanggung	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) tersedia, terkelolaan dan terintegrasi dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	Unit	75.000.000	
3	Penyelengga raan system informasi Kesehatan secara terintegrasi					410.000.000	3	Penyelengga raan system informasi Kesehatan secara terintegrasi					410.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
a	Pengelolaan data dan Informasi Kesehatan	Kab Temanggung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan data dan informasi Kesehatan	12	dokumen	5.000.000	a							Hilang/ bergabung karena pmutakhiran
b	Pengelolaan system informasi Kesehatan	Dinkes, Puskesmas	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan system informasi Kesehatan	1	Dokumen	11.500.000	b	Pengelolaan system informasi Kesehatan	Dinkes, Puskesmas	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan system informasi Kesehatan	1	Dokumen	410.000.000	
c	Pengadaan alat/perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan jaringan internet	Dinkes	Jumlah alat/perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan jaringan internet	1	paket	433.500.000	c							Hilang/ bergabung karena pmutakhiran
4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					250.000.000	4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					250.000.000	
a	Pengendalian dan pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Kab Temanggung	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindak lanjuti Perizinannya	15	unit	30.000.000	a	Pengendalian dan pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Kab Temanggung	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang dikendalikan, diawasi dan ditindak lanjuti Perizinannya	15	unit	30.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
b	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Kab Temanggung	Jumlah fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM) pelayanan kesehatan	40	unit	220.000.000	b	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan	Kab Temanggung	Jumlah fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran indikator nasional mutu (INM) pelayanan kesehatan	40	unit	220.000.000	
B	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan						B	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan						
1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					100.000.000	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2.000.000.000	
a	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab temanggung	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100	orang	100.000.000	a	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Kab temanggung	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100	orang	2.000.000.000	
D	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman						D	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman						
1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					69.000.000	1	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					69.000.000	
a	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko	Kab temanggung	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	12	Doku men	69.000.000	a	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko	Kab temanggung	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut	12	Doku men	69.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)				
2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					230.450.000	2	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga					230.450.000	
a	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab temanggung	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri	12	Dokumen	230.450.000	a	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Kab temanggung	Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri	12	Dokumen	230.450.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keteranga n
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Rumah Tangga							Rumah Tangga				
3	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga					169.810.000	3	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga					172.969.000	
a	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kab Temang gung	Jumlah Produk dan sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	60	Unit	169.810.000	a	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Kab Temang gung	Jumlah Produk dan sarana produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	60	Unit	172.969.000	
E	Program pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan						E	Program pemberdayaan Masyarakat Bidang kesehatan						
1	Advokasi, Pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					434.198.000	1	Advokasi, Pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					467.719.000	
a	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12	Doku men	434.198.000	a	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat		Jumlah dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	12	Doku men	467.719.000	
F	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						F	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						
1	Administrasi Keuangan Perangkat daerah					68.338.431.442	1	Administrasi Keuangan Perangkat daerah					74.352.614.401	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
a	Gaji dan tunjangan ASN	Kab Temanggung	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1300	orang	68.338.431.442	a	Gaji dan tunjangan ASN	Kab Temanggung	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1300	orang	74.352.614.401	
2	Adiministrasi Umum Perangkat daerah					220.000.000	2	Adiministrasi Umum Perangkat daerah					220.000.000	
a	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Dinkes	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	paket	15.000.000	a	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Dinkes	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	paket	15.000.000	
b	Penyediaan bahan logistic kantor	Dinkes	Jumlah Paket Bahan logistik Kantor yang disediakan	1	paket	30.000.000	b	Penyediaan bahan logistic kantor	Dinkes	Jumlah Paket Bahan logistik Kantor yang disediakan	1	paket	30.000.000	
c	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinkes	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	paket	15.000.000	c	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinkes	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1	paket	15.000.000	
d	Fasilitasi kunjungan tamu	Dinkes	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	laporan	60.000.000	d	Fasilitasi kunjungan tamu	Dinkes	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12	laporan	60.000.000	
e	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinkes	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan	12	laporan	100.000.000	e	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinkes	Jumlah laporan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan	12	laporan	100.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			konsultasi SKPD							konsultasi SKPD				
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					252.500.000	3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					152.500.000	
a	Pengadaan mebel	Dinkes	Jumlah mebel yang disediakan	1	paket	100.000.000	a							Hilang/ bergabung karena pemutakhi ran
b	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinkes	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4	unit	152.500.000	b	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinkes	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4	unit	152.500.000	
4	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					2.706.784.000	4	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					2.706.784.000	
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DInkes, PSC 119, Labkesda	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan	12	laporan	230.000.000	a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DInkes, PSC 119, Labkesda	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan	12	laporan	230.000.000	
b	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	DInkes, PSC 119, Puskes mas, Labkesda	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	laporan	2.476.784.000	b	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	DInkes, PSC 119, Puskes mas, Labkesda	Jumlah laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12	laporan	2.476.784.000	
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah					290.000.000	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintahan daerah					290.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinkes, PSC 119, Labkesda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	unit	150.000.000	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinkes, PSC 119, Labkesda	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	unit	150.000.000	
b	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Dinkes	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20	unit	20.000.000	b	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Dinkes	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20	unit	20.000.000	
c	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinkes	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	2	unit	100.000.000	c	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinkes	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	2	unit	100.000.000	
d	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinkes	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	20	unit	20.000.000	d	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinkes	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/di rehabilitasi	20	unit	20.000.000	

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

3.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Kesehatan. Namun dalam proses ini Dinas Kesehatan mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten, dan hasilnya adalah tidak ada.

3.5. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung ada 2 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.50
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2020-2022

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
1	SIPANJUL JITU (Siaga Persalinan Aman Ojo Ucul, jemput Ibu Inpartu)	Bidan, kader Kesehatan, PKK, dokter	BLUD	Kolaborasi dan berkesinambungan dari berbagai disiplin ilmu. Mulai dari mendeteksi bumil resti, asuhan sayang ibu dn bayi, pendampingan bumil sampai nifas.			Puskesmas Kedu / 2021
2	PENTOL TANTRI	Puskesmas Candiroto	BLUD	Optimalisasi pendaftaran pasien dengan metode pendaftaran pasien online melalui wa dan telepon	Pasien tidak antri	Pelayanan Kesehatan berjalan lancar	2022

3.6. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung ada 1 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.51
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2022

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Penghargaan Kabupaten penerimaan STBM award Tahun 2020	Menteri Kesehatan RI	Nasional	DINKES

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM, *SDG's*, maupun Program Prioritas Nasional (PPN) bidang kesehatan. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung harus dilaksanakan untuk peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakat Kabupaten Temanggung.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2024, maka tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Kesehatan dalam rangka akuntabilitas kinerja Dinas Kesehatan.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2024 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

(mengambil dari dokumenn renstra 2024-2026)

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2024	TARGET KONDISI AKHIR 2026
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Kesehatan Keluarga		Indeks Keluarga Sehat	Angka	0,13	0,2
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH	73	71
			Angka Kematian Bayi	Per 1.000 KH	13,5	12
			Cakupan Ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan antenatal sesuai standar	%	100	100
			Prevalensi anemia pada ibu hamil	% Maksimal	15,8	15,6
			Cakupan Ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar	%	100	100
			Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	100

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2024	TARGET KONDISI AKHIR 2026
			Persentase pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan	%	100	100
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100
			Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang ditangani	%	100	100
			Angka Kematian Neonatal	Per 1.000 KH	10,5	10
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100
			Angka Kematian Balita	Per 1.000 KH	16	15
			Prevalensi ballita gizi buruk	%	0,5	0,5
			Prevalensi Stunted (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (0-24 bulan)	% Maksimal	14	14
			Persentase bayi umur 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif	%	82,5	82,7
			Persentase anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100
			Persentase warga negara Indonesia usia 15 s.d 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2024	TARGET KONDISI AKHIR 2026
			Cakupan warga negara Indonesia usia 60 tahun keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100
			Persentase fasyankes yang memenuhi standar mutu	%	62	66
			Persentase penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100
			Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100
			Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100
			Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100
			Incident Rate DBD (Demam Berdarah Dengue)	Maksimal per 100.000 penduduk	8	6

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN/ PROGRAM	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2024	TARGET KONDISI AKHIR 2026
			Presentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan	%	82	87
			Persentase rumah sehat	%	82,3	82,5
			Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan	%	100	100
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Persentase Puskesmas dengan SDM kesehatan yang memenuhi standar	%	23,1	30,7
		Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Cakupan puskesmas melaksanakan pelayanan farmasi sesuai standar	%	85	100
		Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Rumah Tangga Sehat (PHBS Rumah Tangga) Strata Utama dan Paripurna	%	84,01	84,05

Sumber : Renstra Dinas Kesehatan Kab. Temanggung Tahun 2024-2026.

Kebijakan dan strategi Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Tahun 2024-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2024 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2024 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2024.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024

RANCANGAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2024			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	169.824.004.901	A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	169.824.004.901	0
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	89.161.968.500	1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	89.161.968.500	0
a	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	42.260.583.000	a	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	42.260.583.000	0
	Pembangunan Puskesmas	10.000.000.000		Pembangunan Puskesmas	10.000.000.000	0
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	144.000.000		Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	144.000.000	0
	Pengembangan Puskesmas	11.225.000.000		Pengembangan Puskesmas	11.225.000.000	0
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.825.0000.000		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	6.825.0000.000	0
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	150.000.000		Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	150.000.000	0
	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	13.806.583.000		Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	13.806.583.000	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	50.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	50.000.000	0
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	60.000.000		Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	60.000.000	0
b	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.241.385.500	b	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	46.241.385.500	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	373.570.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	373.570.000	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	41.804.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin	41.804.000	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	437.925.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	437.925.000	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	70.360.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	70.360.000	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	161.480.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar	161.480.000	0

RANCANGAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2024			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	70.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	70.000.000	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	150.420.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	150.420.000	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	80.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	80.000.000	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Siabetes Melitus	1.000.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Siabetes Melitus	1.000.000.000	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat	90.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat	90.000.000	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	110.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis	110.000.000	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan resiko terinfeksi HIV	180.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan resiko terinfeksi HIV	180.000.000	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	850.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	850.000.000	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	13.869.780.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	13.869.780.000	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	308.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	308.000.000	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.795.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	6.795.000.000	0
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	301.104.500		Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	301.104.500	0
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	50.000.000		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	50.000.000	0
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	377.200.000		Pengelolaan Surveilans Kesehatan	377.200.000	0
	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	500.000.000		Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	500.000.000	0
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	250.000.000		Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	250.000.000	0
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	19.305.742.000		Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	19.305.742.000	0
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	130.000.000		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	130.000.000	0
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	664.000.000		Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	664.000.000	0
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	75.000.000		Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	75.000.000	0
c	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	410.000.000	c	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	410.000.000	0
	Pengelolaan system informasi kesehatan	410.000.000		Pengelolaan system informasi kesehatan	410.000.000	0

RANCANGAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2024			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
d	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	d	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	0
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	30.000.000		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	30.000.000	0
	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	220.000.000		Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	220.000.000	0
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.000.000.000	2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	2.000.000.000	0
a	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000.000	a	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000.000	0
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000.000		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.000.000.000	0
3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN AMKANAN MINUMAN	472.419.000	3	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN AMKANAN MINUMAN	472.419.000	0
a	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	69.000.000	a	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	69.000.000	0
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	69.000.000		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	69.000.000	0
b	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	230.450.000	b	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	230.450.000	0
	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	230.450.000		Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	230.450.000	0
c	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	172.969.000	c	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	172.969.000	0

RANCANGAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2024			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	172.969.000		Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	172.969.000	0
6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	467.719.000	6	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	467.719.000	0
a	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	467.719.000	a	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	467.719.000	0
	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	467.719.000		Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	467.719.000	0
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	77.721.898.401	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	77.721.898.401	0
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74.352.614.401	a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	74.352.614.401	0
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	74.352.614.401		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	74.352.614.401	0
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	220.000.000	b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	220.000.000	0
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.000.000		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	15.000.000	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	30.000.000	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000	0
	Fasilitas Kunjungan Tamu	60.000.000		Fasilitas Kunjungan Tamu	60.000.000	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.000.000	0
c	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	152.500.000	c	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	152.500.000	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	152.500.000		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	152.500.000	0
d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.706.784.000	d	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.706.784.000	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	230.000.000	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	2.476.784.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Kantor	2.476.784.000	0
e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	290.000.000	e	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	290.000.000	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150.000.000	0

RANCANGAN RENJA DINAS KESEHATAN TAHUN 2024			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.000.000	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100.000.000	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	0
	JUMLAH	169.824.004.901			169.824.004.901	0

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2024

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Tahun 2024 tidak mengalami kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun 2024.

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung
Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebut uhan Dana/ Pagu Indika tif (Rp.)		
						Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Tar get			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN											
1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA											
1	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Ex BAU					
1	02	01	2.02	0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN				Dinkes, Puskesmas, Labkesda, PSC 119		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1300 orang/bulan	74.352.614.401			
1	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah											
1	02	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor				Dinkes, PSC 119, Labkesda		Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	15.000.000			
1	02	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistic kantor				Dinkes		Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 paket	30.000.000			
1	02	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan				Dinkes		Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	15.000.000			
1	02	01	2.06	0008	Fasilitasi kunjungan tamu				Dinkes		Jumlah laporan fasilitasi	12 laporan	60.000.000			

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
											kunjungan tamu							
1	02	01	2.06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				Dinkes		Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	100.000.000					
1	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								152.500.000					
1	02	01	2.07	0011	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya				Dinkes		Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	4 unit	152.500.000					
1	02	01	2.08		Penyediaan jasa penunjang								2.706.784.000					
1	02	01	2.08	0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				Dinkes, PSC 119, Labkes da		Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 laporan	230.000.000					
1	02	01	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor				Dinkes, Puskesmas, Labkes da, PSC 119		Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	2.476.784.000					
1	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								290.000.000					

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	01	2.09	0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan				Dinkes, Labkesda, PSC 119		Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	14 unit	150.000.000					
1	02	01	2.09	0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya				Dinkes		Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	20 unit	20.000.000					
1	02	01	2.09	0009	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya				Dinkes		Jumlah Gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 unit	100.000.000					
1	02	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Dinkes		Jumlah sarana dan prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	20 unit	20.000.000					
1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT							89.161.968.500						
1	02	02	2.01		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota							42.260.583.000						
c	02	02	2.01	0002	Pembangunan Puskesmas				Pkm Kedu		Jumlah Puskesmas yang dibangun	1 unit	10.000.000.000	DBHCHT				

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.01	0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan lainnya				Manding , Tmg		Jumlah fasilitas Kesehatan lainnya yang dibangun	1 unit	144.000.000	DAU Musrenbang				
1	02	02	2.01	0006	Pengembangan Puskesmas						Jumlah Puskesmas yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat Kesehatan dan SDM agar sesuai standar	2 unit	11.225.000.000	DAK , DBHCHT				
1	02	02	2.01	0014	Pengadaan alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan				Pusk		Jumlah alat Kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan yang disediakan	26 unit	6.825.000.000	DAK , DBHCHT				
1	02	02	2.01	0020	Pemeliharaan rutin dan berkala alat Kesehatan/alat penunjang medik fasilitas pelayanan kesehatan				Pusk & Labkes da		Jumlah alat Kesehatan/ alat penunjang medik fasilitas pelayanan Kesehatan yang terpelihara sesuai standar	130 unit	150.000.000	DAU				
1	02	02	2.01	0023	Pengadaan obat, bahan habis pakai, bahan medis habis				Kab Temanggung		Jumlah obat, bahan habis pakai, bahan medis habis		13.806.583.000	DAK, DBHCHT				

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas kesehatan						pakai, vaksin, makanan dan minuman di fasilitas Kesehatan yang disediakan							
1	02	02	2.01	0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga				Kab Temang gung		Jumlah keluarga yang sudah dikunjungi dan diintervensi masalah kesehatannya oleh tenaga Kesehatan puskesmas	63500 keluarga	50.000.000	DAU				
1	02	02	2.01	0026	Distribusi alat Kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan						Jumlah Distribusi alat Kesehatan, obat, bahan habis pakai, bahan medis habis pakai, vaksin, makanan dan minuman ke fasilitas kesehatan	12 paket	60.000.000					
1	02	02	2.02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							46.241.385.500						
1	02	02	2.02	0001	Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu hamil				Kab Temang gung		Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	orang	373.570.000	DAU				

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1	02	02	2.02	0002	Pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu bersalin				Kab Temanggung		Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	9.000 orang	41.804.000	DAU				
1	02	02	2.02	0003	Pengelolaan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir				Kab Temanggung		Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	9.000 orang	437.925.000	DAU				
1	02	02	2.02	0004	Pengelolaan pelayanan Kesehatan balita				Kab Temanggung		Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	45.000 orang	70.360.000	DAU				
1	02	02	2.02	0005	Pengelolaan pelayanan Kesehatan pada usia Pendidikan dasar				Kab Temanggung		Jumlah anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	99.000 orang	161.480.000	DAU				
1	02	02	2.02	0006	Pengelolaan pelayanan Kesehatan pada usia produktif				Kab Temanggung		Jumlah penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	150.000 orang	70.000.000	DAU				

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catat an Pen ting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebut uhan Dana/ Pagu Indika tif (Rp.)
										Progra m	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Tar get	
1	02	02	2.02	0007	Pengelolaan pelayanan Kesehatan pada usia lanjut				Kab Temang gung		Jumlah penduduk usia lanjut yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	110.000 orang	150.420.000	DAU				
1	02	02	2.02	0008	Pengelolaan pelayanan Kesehatan penderita hipertensi				Kab Temang gung		Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	221.000 Orang	80.000.000	DAU				
1	02	02	2.02	0009	Pengelolaan pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus				Kab Temang gung		Jumlah penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar	10.584 orang	1.000.000.000	DAU				
1	02	02	2.02	0010	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat				Kab Temang gung		Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	1.978 orang	90.000.000	DAU				
1	02	02	2.02	0011	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang terduga Tuberkulosis				Kab Temang gung		Jumlah orang terduga menderit Tuberkulosis	8.484 orang	110.000.000	DAU				

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
									yang mendapatkan pelayanan sesuai standar							
1	02	02	2.02	0012	Pengelolaan pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV				Kab Temang gung	Jumlah orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	12 orang	180.000.000	DAU			
1	02	02	2.02	0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)				Kab Temang gung	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) sesuai standar	12 doku men	850.000.000	DBHCHT			
1	02	02	2.02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				Kab Temang gung	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	12 doku men	13.869.780.000	DAU, DBHCHT			
1	02	02	2.02	0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan kerja dan olahraga				Kab Temang gung	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan	12 doku men	308.000.000	DAU, DBHCHT			

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Tar get	
										kerja dan olahraga								
1	02	02	2.02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lingkungan				Kab Temang gung	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan lingkungan	12 doku men	6.795.000.000	DAU, DAK, DBHCHT					
1	02	02	2.02	0018	Pengelolaan Pelayanan promosi Kesehatan				Kab Temang gung	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan promosi Kesehatan	12 doku men	301.104.500	DAU, DAK					
1	02	02	2.02	0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan tradisiional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisiional lainnya				Kab Temang gung	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan tradisiional, akupuntur, asuhan mandiri dan tradisiional lainnya	12 doku men	50.000.000	DAU					
1	02	02	2.02	0020	Pengelolaan surveilans kesehatan				Kab Temang gung	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan surveilans Kesehatan	12 doku men	377.200.000	DAU, DAK					
1	02	02	2.02	0024	Pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis Kesehatan dan pasca krisis Kesehatan				Kab Temang gung	Jumlah dokumen hasil Pengelolaan upaya pengurangan risiko krisis Kesehatan	12 doku men	500.000.000	DAU					

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
										dan pasca krisis Kesehatan								
1	02	02	2.02	0025	Pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular				Kab Temanggung	Jumlah dokumen hasil pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	12 dokumen	250.000.000	DAU					
1	02	02	2.02	0026	Pengelolaan jaminan Kesehatan masyarakat				Kab Temanggung	Jumlah dokumen hasil pengelolaan jaminan Kesehatan masyarakat	12 dokumen	19.305.742.000	PAJAK ROKOK					
1	02	02	2.02	0034	Operasional pelayanan fasilitas Kesehatan lainnya				Labkes da Tmg	Jumlah dokumen operasional pelayanan fasilitas Kesehatan lainnya	12 dokumen	130.000.000	DAU					
1	02	02	2.02	0035	Pelaksanaan akreditasi fasilitas Kesehatan di kabupaten/kota				Kab Temanggung	Jumlah fasilitas Kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/kota	14 unit	664.000.000	DBHCHT					
1	02	02	2.02	0038	Penyediaan dan pengelolaan system penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)				PSC 119 Temanggung	Jumlah Public safety center (PSC 119) tersedia, terkelolaan, dan terintegrasi	12 dokumen	75.000.000						

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
										dengan Rumah sakit dalam satu system penanganan gawat darurat terpadu (SPGDT)								
1	02	02	2.03		Penyelenggaraan system informasi Kesehatan secara integrasi						410.000.000							
1	02	02	2.03	0002	Pengelolaan system informasi Kesehatan				Dinkes	Jumlah dokumen pengelolaan system informasi Kesehatan	1 doku men	410.000.000						
1	02	02	2.04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							250.000.000						
1	02	02	2.04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya				Kab Temang gung	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya yang dikendalikan, diawasi dan ditindak lanjuti perizinannya	15 unit	30.000.000	DAU					
1	02	02	2.04	0003	Peningkatan mutu pelayanan fasilitas kesehatan				Kab Temang gung	Jumlah fasilitas Kesehatan yang dilakukan pengukuran	40 unit	220.000.000	DAK, DAU					

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
										Indikator Nasional Mutu (INM) pelayanan Kesehatan								
1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					2.000.000.000								
1	02	03	2.03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					2.000.000.000								
1	02	03	2.03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				Kab Temanggung		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	100 orang	2.000.000.000	DAK				
1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					472.419.000								
1	02	04	2.01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)					69.000.000								
1	02	04	2.01	0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)						Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro	12 dokumen	69.000.000	DAU				

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Tar get	
										Obat Tradisional (UMOT)								
1	02	04	2.03		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah tangga						230.450.000							
1	02	04	2.03	0001	Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah tangga					Jumlah dokumen hasil Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah tangga	12 dokumen	230.450.000						
1	02	04	2.06		Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga						172.969.000							
1	02	04	2.06	0001	Pemeriksaan post market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang beredar dan					Jumlah Produk dan sarana produksi Makanan Minuman	60 unit	172.969.000						

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
	pengawasan serta tindak lanjut pengawasan						Industri Rumah Tangga yang dilakukan pemeriksaan post market dalam rangka tindak lanjut pengawasan										
1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					467.719.000							
1	02	05	2.01		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					467.719.000							
1	02	05	2.01	0001	Peningkatan upaya promosi Kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat						Jumlah dokumen promosi Kesehatan, advokasi, kemitraan dan pemberdayaa n masyarakat	12 doku men	467.719.000	DAU, DAK			

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2024 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Kesehatan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Kesehatan itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Kesehatan dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2022. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2024 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp.118.489.165.442,- atau 80,63% dengan realisasi belanja sebesar Rp.110.236.109.162,- atau 93,05%, dan Belanja Modal sebesar Rp.28.493.149.870,- atau 19,37% dengan realisasi belanja sebesar Rp.26.074.025.862,- atau 91,58% sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp.119.948.111.201,- atau 74,15% dengan realisasi belanja sebesar Rp.54.446.716.440,- atau 45,39%, dan Belanja Modal sebesar Rp.41.816.575.123,- atau 25,85% dengan realisasi belanja sebesar Rp.498.731.825,- atau 1,19%.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2024 Dinas Kesehatan mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp.157.716.721.901,- yang terdiri dari 5 (lima) program antara lain program Pemenuhan Upaya

Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, program Sediaan Farmasi, Akat Kesehatan dan Makanan Minuman, program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dan program penunjang operasional seperti program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2024 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 03 Juli 2023

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. INTAN PANDANWANGI B, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19680320 200212 2 003



RENCANA KERJA TAHUN 2024

DINAS PERINDUSTRIAN
DAN TENAGA KERJA

RENJA 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

Jalan Gajah Mada No. 76 Temanggung 56221 Telp. (0293) 491949 Fax (0293) 492327

Surat elektronik : disnakertmg@gmail.com

Laman : dinperinaker.temanggungkab.go.id

HALAMAN VERIFIKASI

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

disusun Oleh :

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator,
Pada Tanggal : 03 Juli 2023

Koordinator
Bidang Ekonomi, Sumberdaya
Alam, dan Infrastruktur



ADI WIBOWO, S.T
NIP. 198111012009031003

Petugas Verifikator



DWI FATMA ALMUNAWAROH, SE, M.Ec.Dev.
NIP. 198106192005012016

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dimaksudkan memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam pelaksanaan pemerintahan pembangunan yang dirinci dalam program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan Perubahan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, terutama apabila dilakukan review atas Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dimasa yang akan datang.

Akhirnya kami berharap semoga Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini dapat berguna dan bermanfaat dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 3 Juli 2023

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG



AGUS SARWONO, S.Sos., MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19660411 198607 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN VERIFIKASI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	4
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2022 dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2019 – 2023	4
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	36
2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)	36
2.2.2 Data Pokok	44
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	50
2.4 <i>Review</i> Terhadap Rancangan Awal RKPD	51
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	62
2.6 Inovasi Perangkat Daerah	62
2.7 Penghargaan	63
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	64
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	64
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	64
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	68
4.1 Program dan Kegiatan	68
BAB V PENUTUP	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja s.d Tahun 2022	12
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja s.d Tahun 2022	24
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Triwulan I Tahun 2023 Kabupaten Temanggung	7
Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2022	44
Tabel 2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Temanggung Tahun Tahun 2018 – 2022	44
Tabel 2.6 Persentase Pencari Kerja Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2022	45
Tabel 2.7 Persentase Peserta Pelatihan yang Menjadi Wirausaha Baru Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2022	45
Tabel 2.8 Persentase Peserta Pelatihan Kewirausahaan yang Menjadi Wirausaha Berkembang Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2022	46
Tabel 2.9 Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2022	46
Tabel 2.10 Tingkat Setengah Pengangguran Kabupaten Temanggung Tahun 2018 -2022	46
Tabel 2.11 Persentase Tenaga Kerja Formal Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2022	47
Tabel 2.12 Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2022	47
Tabel 2.13 Persentase Perusahaan yang Membayar Upah Sesuai UMK Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2022	48
Tabel 2.14 Persentase Perusahaan yang Memenuhi Sarana Hubungan Industrial Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2022	48
Tabel 2.15 Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Diluar Pengadilan yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2022	49
Tabel 2.16 Kontribusi Sektor Perindustrian Terhadap PDRB Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2022	49

Tabel 2.17 Persentase IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2022.....	49
Tabel 2.18 Persentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai Kabupaten Temanggung Tahun 2018 – 2022	50
Tabel 2.19 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024	53
Tabel 2.20 Usulan-Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	62
Tabel 2.21 Daftar Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2020 – 2022	62
Tabel 2.22 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 – 2022	63
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2024	65
Tabel 3.2 Perubahan Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2023	20
Tabel 4.1 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung Tahun 2024.....	69
Tabel 4.2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2024	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan 2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

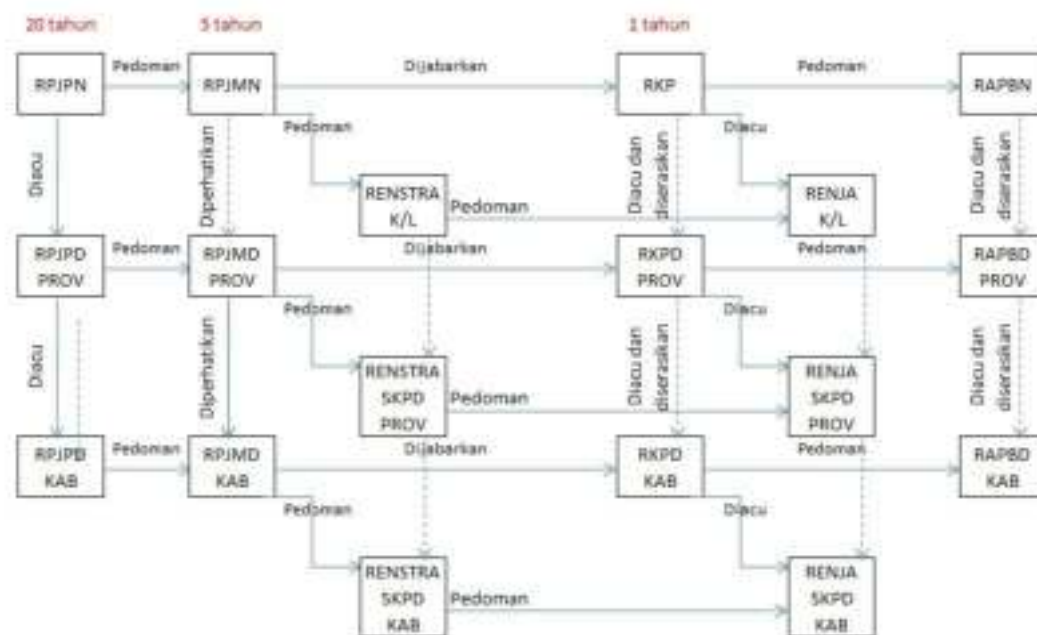
RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah, serta rencana pendanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan jangka waktu RPD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKP. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 2) Kondisi pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 4) Data Pokok Pembangunan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2023, dan perkiraan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Merumuskan suatu kebijakan

atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM

(Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);

- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Namun dalam proses ini Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN TENAGA KERJA

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN TENAGA KERJA****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2022 terhadap capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2023.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023 terhadap target di Tahun 2023.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2018-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun ke-empat pelaksanaan Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 2018-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
s.d Tahun 2022

No	Urusan, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s.d Tahun 2021		Target Tahun 2022			Realisasi Tahun 2022		Capaian Tahun 2022		Capaian s.d Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA																
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, renja, perubahan renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA	Dokumen	17	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan LKjIP, LPPD, RFK dan evaluasi RKPD	Dokumen	17	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																

No	Urusan, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s.d Tahun 2021		Target Tahun 2022			Realisasi Tahun 2022		Capaian Tahun 2022		Capaian s.d Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kegiatan	14	7.154.823.861	14	4.654.750.387	14	6.814.118.861	5.260.580.287	14	5.136.338.761	100	97,64	100	71,79
Administrasi Umum Perangkat Daerah																
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bulan	12	20.000.000	12	10.000.000	12	17.999.000	5.000.000	12	4.999.500	100	99,99	100	25,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan	12	25.000.000	12	9.057.900	12	20.139.000	20.139.000	12	20.049.000	100	99,55	100	80,20
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan	12	20.000.000	12	11.403.700	12	17.991.450	17.991.450	12	16.193.100	100	90	100	80,97
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	30.000.000	12	12.714.900	12	29.998.600	15.000.000	12	14.646.500	100	97,64	100	48,82
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	70.000.000	12	16.554.100	12	50.000.000	30.000.000	12	29.990.452	100	99,97	100	42,84

No	Urusan, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s.d Tahun 2021		Target Tahun 2022			Realisasi Tahun 2022		Capaian Tahun 2022		Capaian s.d Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Paket	1	50.000.000	1	10.000.000	1	80.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	7.000.000	12	2.315.000	12	7.000.000	7.000.000	12	6.995.000	100	99,93	100	99,93
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	89.988.000	12	73.618.597	12	89.988.000	94.488.000	12	82.265.683	100	87,06	100	91,42
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	700.000.000	12	510.839.584	12	649.985.321	632.320.001	12	524.417.134	100	82,94	100	74,92
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																

No	Urusan, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s.d Tahun 2021		Target Tahun 2022			Realisasi Tahun 2022		Capaian Tahun 2022		Capaian s.d Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bulan	12	80.000.000	12	62.144.189	12	80.000.000	78.000.000	12	75.581.444	100	96,9	100	94,48
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bulan	12	50.000.000	12	170.191.500	12	35.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bulan	12	20.000.000	12	17.813.000	12	17.866.400	8.500.000	12	8.398.500	100	98,81	100	41,99
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA															
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi															

No	Urusan, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s.d Tahun 2021		Target Tahun 2022			Realisasi Tahun 2022		Capaian Tahun 2022		Capaian s.d Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	80	400.000.000	80	352.089.057	80	309.999.816	0	0	0	0	0	0	0
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta																
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	LPKS	40	30.000.000	40	10.325.100	40	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil																
	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas	Orang	25	60.000.000	25	36.888.100	25	55.000.000	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA																
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota																

No	Urusan, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s.d Tahun 2021		Target Tahun 2022			Realisasi Tahun 2022		Capaian Tahun 2022		Capaian s.d Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	1000	30.000.000	1000	17.056.800	1000	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	25	40.000.000	25	14.737.400	300	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Pengelolaan Informasi Pasar Kerja																
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Bulan	12	30.000.000	12	18.726.400	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Dokumen	1	0	0	0	1	0	15.000.000	1	14.902.000	100	99,35	100	100
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Bulan	12	0	12	34.904.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Urusan, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s.d Tahun 2021		Target Tahun 2022			Realisasi Tahun 2022		Capaian Tahun 2022		Capaian s.d Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota															
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	40	100.000.000	0	0	16	100.000.000	130.000.000	16	128.139.150	100	98,57	40	100
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL															
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota															
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	PP	12	20.000.000	9	39.895.938	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0

No	Urusan, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s.d Tahun 2021		Target Tahun 2022			Realisasi Tahun 2022		Capaian Tahun 2022		Capaian s.d Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Perusahaan	150	30.000.000	36	27.056.500	150	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0
Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota																
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perusahaan	45	20.000.000	120	18.156.000	45	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0

No	Urusan, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s.d Tahun 2021		Target Tahun 2022			Realisasi Tahun 2022		Capaian Tahun 2022		Capaian s.d Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Bulan	12	25.000.000	12	12.133.000	12	100.000.000	0	0	0	0	0	0	0
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kegiatan	1	80.000.000	12	72.070.070	1	70.000.000	50.000.000	1	49.890.700	100	99,78	100	62
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI																
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Kegiatan	1		1	33.617.908		0	0	0	0	0	0	0	0

No	Urusan, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s.d Tahun 2021		Target Tahun 2022			Realisasi Tahun 2022		Capaian Tahun 2022		Capaian s.d Tahun 2022		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	1	70.000.000	1	19.100.710	1	59.900.000	0	0	0	0	0	0	0	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	60.000.000	2	518.763.485	1	6.134.120.450	0	0	0	0	0	0	0	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	IKM	25	350.000.000	1	36.411.896	25	305.000.000	656.660.000	25	648.516.500	100	98,76	100	100	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA																	
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota																	

No	Urusan, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s.d Tahun 2021		Target Tahun 2022			Realisasi Tahun 2022		Capaian Tahun 2022		Capaian s.d Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	1	0	3	139.309.718	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL																

No	Urusan, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s.d Tahun 2021		Target Tahun 2022			Realisasi Tahun 2022		Capaian Tahun 2022		Capaian s.d Tahun 2022	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Kawasan Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	230.000.000	0	0	1	225.000.000	0		0	0	0	0	0

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
s.d Triwulan I Tahun 2023

No	Urusan, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s.d Tahun 2022		Target Tahun 2023			Realisasi Tahun 2023		Capaian Tahun 2023 (s.d Semester 1)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA													
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, renja, perubahan renja, RKA, DPA, RKPA, DPPA	Dokumen	17	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen evaluasi dan pelaporan LKjIP, LPPD, RFK dan evaluasi RKPD	Dokumen	17	3.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah													
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kegiatan	14	7.154.823.861	14	5.136.338.761	14	5.518.801.896	5.159.466.934	8	2.923.414.208,00	57,14	56,66
	Administrasi Umum Perangkat Daerah													

No	Urusan, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s.d Tahun 2022		Target Tahun 2023			Realisasi Tahun 2023		Capaian Tahun 2023 (s.d Semester 1)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bulan	12	20.000.000	12	4.999.500	12	10.000.000	10.000.000	6	3.899.000	50	38,99
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Bulan	12	25.000.000	12	20.049.000	12	20.139.000	23.639.000	6	9.552.000	50	40,41
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan	12	20.000.000	12	16.193.100	12	17.991.450	19.491.450	6	5.745.200	50	29,48
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12	30.000.000	12	14.646.500	12	42.324.000	22.000.000	6	5.201.000	50	23,64
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12	70.000.000	12	29.990.452	12	70.000.000	70.000.000	6	16.649.000	50	23,78
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah													
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah paket pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Paket	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Urusan, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s.d Tahun 2022		Target Tahun 2023			Realisasi Tahun 2023		Capaian Tahun 2023 (s.d Semester 1)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	7.000.000	12	6.995.000	12	7.000.000	10.000.000	6	0	50	0,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	89.988.000	12	82.265.683	12	110.000.000	110.000.000	6	36.889.086	50	33,54
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	700.000.000	12	524.417.134	12	602.320.001	581.760.950	6	268.954.226	50	46,23
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Bulan	12	80.000.000	12	75.581.444	12	68.000.000	83.884.531	6	33.361.359	50	39,77

No	Urusan, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s.d Tahun 2022		Target Tahun 2023			Realisasi Tahun 2023		Capaian Tahun 2023 (s.d Semester 1)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bulan	12	50.000.000	0	0	12	82.496.050	132.494.570	6	0	50	0,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bulan	12	20.000.000	12	8.398.500	12	10.000.000	27.000.000	6	11.800.000	50	43,70
PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA														
Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi														
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	Orang	80	400.000.000	0	0	288	600.425.000	847.525.500	0	4.670.000	0	0,55
Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta														

No	Urusan, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s.d Tahun 2022		Target Tahun 2023			Realisasi Tahun 2023		Capaian Tahun 2023 (s.d Semester 1)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	LPKS	40	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil														
	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	Orang	25	60.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA														
Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota														
	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	1000	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	Orang	140	0	0	0	140	0	390.191.000	100	178.237.442	71,43	45,68
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	25	40.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Urusan, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s.d Tahun 2022		Target Tahun 2023			Realisasi Tahun 2023		Capaian Tahun 2023 (s.d Semester 1)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja													
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	Bulan	12	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	Dokumen	1	0	1	14.902.000	0	0	0	0	0	0	0
	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Bulan	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota													
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	Orang	40	100.000.000	16	128.139.150	16	115.000.000	0	0	0	0	0
	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL													

No	Urusan, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s.d Tahun 2022		Target Tahun 2023			Realisasi Tahun 2023		Capaian Tahun 2023 (s.d Semester 1)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	PP	12	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Perusahaan	150	30.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota													

No	Urusan, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s.d Tahun 2022		Target Tahun 2023			Realisasi Tahun 2023		Capaian Tahun 2023 (s.d Semester 1)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	Perusahaan	45	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	Bulan	12	25.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	Kegiatan	1	80.000.000	1	49.890.700	1	135.000.000	30.000.000	0,6	9.036.500	60	30,12
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI													

No	Urusan, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s.d Tahun 2022		Target Tahun 2023			Realisasi Tahun 2023		Capaian Tahun 2023 (s.d Semester 1)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota													
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	Kegiatan	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Dokumen	1	70.000.000	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0	0
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Dokumen	1	60.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0

No	Urusan, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s.d Tahun 2022		Target Tahun 2023			Realisasi Tahun 2023		Capaian Tahun 2023 (s.d Semester 1)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	IKM	25	350.000.000	25	648.516.500	560	656.660.000	646.291.800	120	75.213.012	21,43	11,64
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA														
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota														
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah- Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	1	0	0	0	1	900.000.000	150.000.000	0,5	65.600.849	50	43,73

No	Urusan, Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s.d Tahun 2022		Target Tahun 2023			Realisasi Tahun 2023		Capaian Tahun 2023 (s.d Semester 1)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (Renja)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Terintegrasi secara Elektronik													
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL														
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Dokumen	1	230.000.000		0	0	0	0	0	0	0	0

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2022 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2018-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten / Kota;
 - b. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan.
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) / Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2022, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **97,51%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Perluasan Kesempatan Kerja;

Capaian Kinerja : 94,19% kategori Baik
2. Perlindungan dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja; dan

Capaian Kinerja : 98,33% kategori Baik

3. Meningkatkan Investasi Sektor Riil.

Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Baik

Dari Tabel 2.1. dan Triwulan I tahun 2023 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2022 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Triwulan I Tahun 2023 (**Laporan IKPD**)
 Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2022 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB	%	26,83	24,00	25,00	26,00	27,00	27,21	27,47	27,47	27,47	26,19	100	TT
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	73,96	74	74,37	74,5	75	76,09	58,73	74,01	74,01	76,14	98,68	AT
3	Persentase IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah	%	30	31	32	33	35	-	-	18,46	64,62	12,92	100	TT
4	Persentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai	%	-	-	3,18	4,77	5,3	-	-	2,09	9,92	0	100	TT
5	Persentase Pencari Kerja Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi	%	55	57	60	62	65	68,18	58,72	34,78	71,43	60,38	100	TT
6	Persentase Peserta Pelatihan yang Menjadi Wirausaha Baru atau Telah Bekerja	%	40	60	35	40	45	38,75	19,06	52,68	43,75	20	100	TT
7	Persentase Peserta Pelatihan Kewirausahaan yang Menjadi Wirausaha Berkembang	%	25	30	35	40	45	20	20	54	52,08	70	100	TT
8	Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan	%	60	70	60	62	65	69,20	55,33	78,01	53,61	22,79	82,47	AT
9	Tingkat Setengah Pengangguran	%	6,1	6	5,9	5,8	5,7	5,10	5,10	11,66	4,57	4,40	80,23	AT
10	Persentase Tenaga Kerja Formal	%	27	28	29	30	31	31,69	31,69	24,17	29,30	24,98	94,51	AT
11	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,2	3,12	3,1	3,05	2,97	2,98	3,85	2,62	2,62	2,54	85,90	AT
12	Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan	%	75	76	77	78	79	52,13	65,67	61,08	84,89	84,21	100	TT

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2022 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
13	Persentase Perusahaan yang Membayar Upah sesuai UMK	%	80	80	54	56	58	17,88	21,16	68,91	76,47	77,12	100	TT
14	Persentase Perusahaan yang Memenuhi Sarana Hubungan Industrial	%	25	30	35	40	45	3,78	3,78	15,13	55,46	66,10	100	TT
15	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial di luar Pengadilan yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	%	100	100	100	100	100	66,67	92,86	82,35	93,33	100	93,33	AT
16	Persentase Calon Transmigran yang Mendapatkan Pembekalan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 10 (sepuluh) terdiri dari:
 - a. Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kondisi perekonomian yang sudah mulai membaik terutama pada sektor pertanian.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah karena kondisi sektor industri yang masih dalam masa pemulihan akibat pandemic Covid-19.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melakukan pelatihan dan pembinaan terhadap industri kecil menengah agar IKM dapat mengembangkan usahanya.
 - b. Persentase IKM Industri yang Berbasis pada Komoditas Unggulan Daerah.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah tingginya animo masyarakat untuk berwirausaha sehingga memunculkan IKM baru.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adalah produktivitas IKM masih rendah yang disebabkan oleh keterbatasan sarana dan prasarana produksi serta kurangnya pengetahuan pelaku usaha dalam hal pemasaran produk.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan monitoring dan pembinaan IKM yang terfasilitasi.
 - c. Persentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah meningkatnya animo IKM penghasil cukai untuk meningkatkan produktivitasnya.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah keterbatasan informasi masyarakat tentang permasalahan seputar cukai.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melaksanakan fasilitasi pelatihan peningkatan kapasitas

SDM IKM pertembakauan.

- d. Persentase Pencari Kerja Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah meningkatnya jumlah pencari kerja di sektor non formal (mengikuti pelatihan).
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah tidak mendapatkan dukungan anggaran dari APBD.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah memenuhi kebutuhan pencari kerja sesuai dengan kebutuhan pasar.
- e. Persentase Peserta Pelatihan Kewirausahaan yang Menjadi Wirausaha Berkembang
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah masih tingginya animo masyarakat untuk berwirausaha.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja hanya dapat memberikan pelatihan tetapi belum bisa memberikan dukungan berupa bantuan modal dan alat.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melakukan monitoring kepada peserta purna pelatihan.
- f. Proporsi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya sanksi yang diberikan kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara berupa teguran tertulis, denda dan/ atau tidak mendapat pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih banyaknya perusahaan yang menerapkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bagi pekerjanya sehingga tidak diikutsertakan kepesertaan dengan dalih terputusnya hubungan kerja berdasarkan kontrak kerja. Selain itu kondisi ekonomi akibat badai resesi yang menyebabkan penurunan keuangan perusahaan juga menjadi penghambat dalam mencapai indikator ini.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan pembinaan dengan memaksimalkan

komunikasi dengan HRD Perusahaan melalui WAG.

g. Persentase Perusahaan yang Membayar Upah sesuai UMK.

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya upaya peningkatan kesejahteraan pekerja oleh perusahaan serta kesadaran perusahaan terhadap sanksi apabila tidak menerapkan UMK.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kondisi ekonomi akibat badai resesi yang menyebabkan penurunan kondisi keuangan perusahaan serta adanya pengurangan hari kerja dan jam kerja untuk menghindari PHK.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melakukan pembinaan dengan memaksimalkan komunikasi dengan HRD Perusahaan melalui WAG.

h. Persentase Perusahaan yang Memenuhi Sarana Hubungan Industrial.

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah sudah adanya kesadaran sebagian perusahaan dan pekerja tentang pentingnya sarana hubungan industrial untuk membina hubungan kerja yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Belum menjadi prioritas pengusaha.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melakukan pembinaan dengan memaksimalkan komunikasi dengan HRD Perusahaan melalui WAG.

i. Persentase Peserta Pelatihan yang Menjadi Wirausaha Baru atau Telah Bekerja

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah masih tingginya animo masyarakat untuk berwirausaha.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja hanya dapat memberikan pelatihan tetapi belum bisa memberikan dukungan berupa bantuan modal dan alat.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melakukan monitoring kepada peserta purna pelatihan.

j. Persentase Calon Transmigran yang Mendapatkan Pembekalan.

Kabupaten Temanggung tidak mendapatkan kuota pemberangkatan dari Disnakertrans Prov Jateng.

1. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 6 (enam) terdiri dari:
 - a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah penguatan jejaring dengan HRD Perusahaan Retail untuk bersedia rekrutmen di Kabupaten Temanggung.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah karena imbas dari gagal bayar Amerika dan Eropa sehingga tidak ada rekrutmen karyawan.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah meningkatkan wirausaha baru dengan peningkatan kompetensi SDM.
 - b. Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melakukan penguatan jejaring dengan HRD Perusahaan Retail seperti Indomaret, Alfamidi, BTPN Syariah, PNM dan Prima Food untuk bersedia membuka rekrutmen di Kabupaten Temanggung.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah jumlah lowongan pekerjaan di Kabupaten Temanggung lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pencari kerja serta adanya pengurangan jam kerja, PHK di sektor padat karya karena imbas dari gagal bayar Amerika dan Eropa sehingga tidak ada rekrutmen karyawan.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melakukan penyuluhan ke masyarakat, dan dengan melakukan job canvasing.
 - c. Tingkat Setengah Pengangguran.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah banyaknya peluang usaha di sektor non formal.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kondisi perusahaan yang belum stabil sehingga masih banyak karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan dan pengurangan jam kerja.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah

meningkatkan wirausaha baru dengan peningkatan kompetensi SDM.

d. Persentase Tenaga Kerja Formal.

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya keinginan masyarakat untuk bekerja secara formal.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya pengurangan jam kerja dan pekerja yang dirumahkan oleh perusahaan.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah memberikan pelatihan peningkatan kompetensi SDM sesuai dengan kebutuhan kerja formal.

e. Persentase Perselisihan Hubungan Industrial di luar Pengadilan yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama.

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Mediator Hubungan Industrial mempunyai kemampuan menegosiasikan perselisihan mejadi perdamaian.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih besarnya ego dari salah satu pihak yang berselisih sehingga perjanjian bersama sulit tercapai karena Perbedaan kepentingan dan pemahaman pihak pihak yang berselisih.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Mengasah kemampuan Mediator Hubungan Industrial untuk bernegosiasi.

f. Tingkat Pengangguran Terbuka.

- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah penguatan jejaring dengan perusahaan untuk menginformasikan lowongan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten Temanggung.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah jumlah lowongan pekerjaan di Kabupaten Temanggung lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pencari kerja.
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah meningkatkan wirausaha baru dengan peningkatan kompetensi SDM.

2.2.2.Data Pokok

Data Pokok pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Tenaga Kerja dan Data Pokok Bidang Perindustrian dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok Bidang Tenaga Kerja.

a. Tingkat Pengangguran Terbuka

Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.4
Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

No	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	TPT Provinsi Jawa Tengah	4,51	4,59	6,48	5,96	5,95
2	TPT Kab. Temanggung	3,24	2,98	3,85	2,62	2,62

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Realisasi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.5
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

Tahun	TPAK Kab.Tmg	TPAK Prov.Jateng
2018	73,96	68,56
2019	76,09	68,62
2020	58,73	68,62
2021	74,01	69,43
2022	74,01	69,58

c. Persentase Pencari Kerja Mendapatkan Pelatihan Berbasis Kompetensi.

Realisasi Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.6
 Persentase Pencari Kerja Mendapatkan Pelatihan
 Berbasis Kompetensi
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah peserta pelatihan berbasis kompetensi	768	240	320	112	80
Jumlah pendaftar pelatihan	1487	352	545	322	112
Persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	51,65	68,18	58,72	34,78	71,43

d. Persentase Peserta Pelatihan Yang Menjadi Wirausaha Baru.

Realisasi Persentase peserta pelatihan yang menjadi wirausaha baru tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.7
 Persentase Peserta Pelatihan Yang Menjadi Wirausaha Baru
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah peserta pelatihan keterampilan	768	240	320	112	80
Jumlah peserta pelatihan keterampilan yang menjadi wirausaha baru/telah bekerja	347	93	61	59	35
%	45,18	38,75	19,06	52,68	43,75

e. Persentase Peserta Pelatihan Kewirausahaan Yang Menjadi Wirausaha Berkembang.

Realisasi Persentase peserta pelatihan kewirausahaan yang menjadi wirausaha berkembang tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.8
 Persentase Peserta Pelatihan Kewirausahaan Yang
 Menjadi Wirausaha Berkembang
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan yang meningkat produktivitasnya (kuantitas dan kualitas)	Jumlah peserta pelatihan kewirausahaan	%
2018	27	80	33,75
2019	5	25	20
2020	5	25	20
2021	27	50	54
2022	25	48	52,08

f. Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan.

Realisasi Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.9
 Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Pencari Kerja terdaftar yang ditempatkan	1.034	2.357	602	1.749	773
Pencari Kerja terdaftar	2.518	3.406	1.088	2.242	1442
%	41,06	69,2	55,33	78,01	53,61

g. Tingkat Setengah Pengangguran

Realisasi Tingkat Setengah Pengangguran tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.10
 Tingkat Setengah Pengangguran
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Pengangguran setengah menganggur	27.124	23.336	23.236	41.660	20.805
Jumlah Angkatan Kerja	437.295	455.242	455.242	357.156	454.927
Tingkat Setengah Pengangguran	6,20	5,13	5,10	11,66	4,57

h. Persentase Tenaga Kerja formal

Realisasi Persentase Tenaga Kerja formal tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.11
Persentase Tenaga Kerja formal
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah tenaga kerja formal	118.204	139.942	139.942	83.003	129.788
Jumlah tenaga kerja total	423.133	441.632	441.632	343.400	443.009
Persentase Tenaga Kerja Formal(%)	27,94	31,69	31,69	24,17	29,30

i. Proporsi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Realisasi Proporsi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.12
Proporsi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah pekerja peserta BPJS	20.548	14.467	18.223	16.328	24.672
Jumlah pekerja total	27.751	27.751	27.751	26.732	29.062
Persentase kepesertaan BPJS ketenagakerjaan (%)	74,04	52,13	65,67	61,08	84,89

j. Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK

Realisasi Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.13
 Persentase Perusahaan yang Membayar Upah Sesuai
 UMK
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Perusahaan	Jumlah Perusahaan Yang melaksanakan UMK	%
2018	397	45	11,34
2019	397	71	17,88
2020	397	84	21,16
2021	119	82	68,91
2022	119	91	76,47

k. Persentase Perusahaan yang Memenuhi Sarana Hubungan Industrial

Realisasi Persentase Perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.14
 Persentase Perusahaan Yang Memenuhi Sarana
 Hubungan Industrial
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Perusahaan yang memenuhi sarana hubungan industrial	Jumlah Perusahaan	%
2018	62	397	15,62
2019	15	397	3,78
2020	15	397	3,78
2021	18	119	15,13
2022	66	119	55,46

1. Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Diluar Pengadilan Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama.

Realisasi Persentase perselisihan hubungan industrial diluar pengadilan yang diselesaikan Dengan Perjanjian Bersama tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.15
 Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Diluar
 Pengadilan Yang Diselesaikan Dengan Perjanjian
 Bersama
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Perselisihan yang masuk	Jumlah Perselisihan yang terselesaikan dengan PB	%
2018	12	12	100
2019	3	2	66,67
2020	14	13	92,86
2021	17	14	82,35
2022	15	14	93,33

2. Data Pokok Bidang Perindustrian.

a. Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB

Realisasi Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.16
 Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

Tahun	2018	2019	2020	2021	2022
Industri Pengolahan	27,31	27,21	27,47	27,47	27,47

b. Presentase IKM Industri Yang Berbasis Pada Komoditas Unggulan Daerah.

Realisasi Presentase IKM Industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.17
 Presentase IKM Industri Yang Berbasis Pada Komoditas Unggulan Daerah
 Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah IKM Unggulan Daerah yang Terfasilitasi	-	-	-	60	210
Jumlah IKM Unggulan Daerah	-	-	-	325	325
Presentase	-	-	-	18,46	64,62

c. Presentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai.

Realisasi Presentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.18
Presentase Pembinaan Industri Penghasil Cukai
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2022

	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah IKM Tembakau yang Dibina	-	-	-	75	355
Jumlah IKM Tembakau	-	-	-	3.580	3.580
Persentase	-	-	-	2,09	9,92

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dari 16 (enam belas) indikator terdapat 6 (enam) indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK);
Hal ini disebabkan karena imbas dari gagal bayar Amerika dan Eropa sehingga tidak ada rekrutmen karyawan.
 - Persentase Pencari Kerja Terdaftar yang Ditempatkan;
Hal ini disebabkan karena jumlah lowongan pekerjaan di Kabupaten Temanggung lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pencari kerja serta adanya pengurangan jam kerja, PHK di sektor padat karya karena imbas dari gagal bayar Amerika dan Eropa sehingga tidak ada rekrutmen karyawan.
 - Tingkat Setengah Pengangguran;
Hal ini disebabkan karena kondisi perusahaan yang belum stabil sehingga masih banyak karyawan yang dirumahkan oleh perusahaan dan pengurangan jam kerja.

- Persentase Tenaga Kerja Formal;
Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan jam kerja dan pekerja yang dirumahkan oleh perusahaan.
- Persentase Perselisihan Hubungan Industrial di luar Pengadilan yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama;
Hal ini disebabkan karena masih besarnya ego dari salah satu pihak yang berselisih sehingga perjanjian bersama sulit tercapai karena Perbedaan kepentingan dan pemahaman pihak pihak yang berselisih.
- Tingkat Pengangguran Terbuka.
Hal ini disebabkan karena jumlah lowongan pekerjaan di Kabupaten Temanggung lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pencari kerja.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, antara lain :

- Masih kurang optimalnya monitoring pasca kegiatan yang berakibat pada kurang optimalnya juga evaluasi kegiatan.
- Masih kurangnya anggaran untuk peningkatan kompetensi pegawai.

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar :

- a. Membentuk tim monitoring pasca kegiatan di internal Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- b. Mengusulkan pengembangan kompetensi pegawai ke BKPSDM Kabupaten Temanggung.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan kegiatan di luar rancangan awal (Perangkat Daerah), yaitu sejumlah 2 (dua) kegiatan sebagai berikut:

- a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK);
- b. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.19 berikut:

Tabel 2.19
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					7.263.603.435
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.253.603.435
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.159.466.934
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	Orang/bulan	5.159.466.934
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					148.996.450
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	10.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					8.229.542.465	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.629.351.465	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					5.399.466.934	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44	Orang/bulan	5.399.466.934	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah					161.000.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	15.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2024						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	23.639.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	19.491.450
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	22.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	73.866.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						701.760.950

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	26.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	20.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	20.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	80.000.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						735.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	10.000.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	110.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	581.760.950
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						243.379.101

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	10.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	110.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	615.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						333.884.531	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	Unit	83.884.531
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	1	Unit	132.494.570
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	10	Unit	27.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25	Unit	83.884.531	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	1	Unit	200.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir rehabilitasi	10	Unit	50.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					0
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					0
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	Dokumen	0
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					850.000.000
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					850.000.000
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	160	Orang	850.000.000
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					160.000.000
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota					160.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					100.000.000	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)					100.000.000	
	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1	Dokumen	100.000.000	
	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					850.000.000	
	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					850.000.000	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	160	Orang	850.000.000	
	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					500.191.000	
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota					500.191.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Pelayanan antar Kerja	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	200	Orang	50.000.000
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	5	Orang	10.000.000
	Perluasan Kesempatan Kerja	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	140	Orang	100.000.000
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						0

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
	Pelayanan antar Kerja	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	200	Orang	80.000.000	
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	5	Orang	30.000.000	
	Perluasan Kesempatan Kerja	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	140	Orang	390.191.000	
PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						150.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					0
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1	Kegiatan	0
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	Kegiatan	0
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						310.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					150.000.000	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	1	Kegiatan	100.000.000	
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	1	Kegiatan	50.000.000	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						900.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPd 2024						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					310.000.000
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					310.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	Dokumen	100.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	Dokumen	160.000.000

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					900.000.000	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					900.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1	Dokumen	150.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1	Dokumen	650.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	Dokumen	50.000.000
JUMLAH						7.573.603.435

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Ket
1	2	3	4	5	6	7	
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1	Dokumen	100.000.000	
JUMLAH						9.129.542.465	

Sumber : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Namun dalam proses ini Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.20
Usulan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
NIHIL					

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja ada 1 (satu) Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.21
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2020-2022

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1.	Training Anti Gabut	Semua SDM Dinperinaker	APBDes	Pelatihan jempot bola oleh Dinperinaker yang dilaksanakan di desa-desa di wilayah Kabupaten Temanggung, untuk menyiapkan lulusan pelatihan yang terampil guna memasuki dunia kerja maupun merintis usaha	Lulusan Pelatihan yang Terampil	SDM Lulusan pelatihan yang terampil sehingga siap membuka usaha baru maupun masuk ke dunia kerja	Dinperinaker / 2022

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung ada 1 (satu) Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.22
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2022

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Piagam Penghargaan atas pencapaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) terendah ke 2 Tahun 2021	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	DINPERINAKER

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh (Perangkat Daerah) lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2024, maka tujuan dari penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam rangka akuntabilitas kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2024 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

(mengambil dari dokumenn renstra 2024-2026)

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Sasaran	Satuan Target	Target Tahun 2024	Target Kondisi Akhir 2024
Meningkatnya perekonomian daerah	Meningkatnya nilai usaha industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB	%	27,2	27,2
			Persentase IKM industri yang berbasis pada komoditas unggulan daerah	%	71,62	71,62
			Persentase pembinaan IKM tembakau lembutan	%	15,36	15,36
		Program Hubungan Industrial	Persentase kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan	%	82,37	82,37
			Persentase Perusahaan yang membayar upah sesuai UMK	%	69,75	69,75
			Persentase terpenuhinya fasilitas Kesejahteraan Pekerja	%	45	45
			Persentase Perselisihan Hubungan Industrial melalui mediasi	%	100	100
	Meningkatnya kompetensi angkatan kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	%	76,15	76,15
			Persentase pencari kerja mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	%	72	72
			Persentase Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang dibina	%	80	80
Program Penempatan Tenaga Kerja		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	35	35	

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Sasaran	Satuan Target	Target Tahun 2024	Target Kondisi Akhir 2024
			Persentase pencari kerja yang mendapat penyuluhan dan bimbingan jabatan	%	30	30
			Persentase pencari kerja yang dilatih melalui perluasan kesempatan kerja	%	1	1
			Persentase CPMI yang terfasilitasi sesuai prosedur	%	90	90

Sumber : Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung Tahun 2024-2026.

Kebijakan dan strategi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja) Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2024 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2024.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung Tahun 2024

RANCANGAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	7.603.603.435	A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	7.263.603.435	0
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.253.603.435	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.253.603.435	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.159.466.934	a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.159.466.934	0
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.159.466.934		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.159.466.934	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	148.996.450		Administrasi Umum Perangkat Daerah	148.996.450	0
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.639.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	23.639.000	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.491.450		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.491.450	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	22.000.000	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.866.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	73.866.000	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	701.760.950		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	701.760.950	0
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	0
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	110.000.000	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	581.760.950		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	581.760.950	0
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.379.101		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	243.379.101	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.884.531		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	83.884.531	0
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	132.494.570		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	132.494.570	0

RANCANGAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024			RKPd KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024		(+ / -)	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	27.000.000	0
	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	850.000.000		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	850.000.000	0
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	850.000.000		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	850.000.000	0
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	850.000.000		Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	850.000.000	0
	Program Penempatan Tenaga Kerja	400.000.000		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	160.000.000	
	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	190.000.000		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	160.000.000	
	Pelayanan antar Kerja	0		Pelayanan antar Kerja	50.000.000	+ 50.000.000
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	40.000.000		Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	0	- 40.000.000
	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	50.000.000		Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	10.000.000	- 40.000.000
	Perluasan Kesempatan Kerja	100.000.000		Perluasan Kesempatan Kerja	100.000.000	0
	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50.000.000		Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	
	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	50.000.000		Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	0	- 50.000.000
	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	160.000.000		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	0	
	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	60.000.000		Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	0	- 60.000.000
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	100.000.000		Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	0	- 100.000.000
	Program Hubungan Industrial	100.000.000		Program Hubungan Industrial	0	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	0	
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000		Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	- 100.000.000

RANCANGAN RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024			(+ / -)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	810.000.000		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	310.000.000	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	810.000.000		PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	310.000.000	
	Penyusunandan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	810.000.000		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	310.000.000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	400.000.000		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	100.000.000	- 300.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	260.000.000		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	160.000.000	- 100.000.000
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	150.000.000		Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	50.000.000	- 100.000.000
	JUMLAH	8.413.603.435		JUMLAH	7.573.603.435	- 840.000.000

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2024

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan pagu indikatif Tahun 2024 sebesar Rp 840.000.000; (delapan ratus empat puluh juta). Jika dilihat lebih jauh untuk penurunan belanja:

- a. Program Penempatan Tenaga Kerja berkurang Rp. 240.000.000 dikarenakan adanya pengurangan pagu pada kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota dan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Hubungan Industrial berkurang Rp. 100.000.000 dikarenakan adanya pengurangan pagu pada kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota;
- c. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri berkurang Rp. 500.000.000 dikarenakan adanya pengurangan pagu pada kegiatan Penyusunandan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kab. Temanggung
Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025								
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)					
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target						
2																			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														8.519.351.465
2	0				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA														8.109.351.465
2	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														6.629.351.465
2	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah														5.399.466.934
2	0	0	2.0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		44 Orang/bulan		5.159.466.934	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		44 Orang/bulan	5.399.466.934
2	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah														161.000.000
2	0	0	2.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Paket		10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	15.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2071002064	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Paket		23.639.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	26.000.000
20710065	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Paket		19.491.450	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	20.000.000
20710068	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Laporan		22.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	20.000.000
20710069	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Laporan		73.866.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	80.000.000
20718	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								701.760.950					735.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target
20020710081	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Laporan		10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		10.000.000
20020710082	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Laporan		110.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	110.000.000
20020710084	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Laporan		581.760.950	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	615.000.000
20020710084	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								243.379.101					333.884.531

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
20020710092	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya		- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		25 Unit		83.884.531	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	83.884.531
20020710099	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Unit		132.494.570	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	200.000.000
20020710091	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		10 Unit		27.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit	50.000.000

Kode	Urusan / Bidang / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
20073					PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA								950.000.000	
200731		2.0			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi								950.000.000	
200730011	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		160 Orang		850.000.000	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)		Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	160 Orang	950.000.000
20074					PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA								530.000.000	
200741		2.0			Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota								530.000.000	
200740012	Pelayanan antar Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL		- Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		200 Orang		50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	200 Orang	80.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
2074.0014	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD		- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		5 Orang		10.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	15 Orang	50.000.000	
2074.0015	Perluasan Kesempatan Kerja		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja		- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		140 Orang		100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	180 Orang	400.000.000	
3			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							310.000.000					410.000.000
331			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							310.000.000					410.000.000
3312			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI							310.000.000					410.000.000
33121		2.0	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota							310.000.000					410.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024				Catan Pent ing	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan				Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target
3 3 0 2 0 1 2 0 0 1 3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri		- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen		100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen	150.000.000
3 3 0 2 0 1 2 0 0 1 5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat		- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen		160.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen	160.000.000

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Cata tan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
3 3 1 2 0 0 1 6	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri		- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		1 Dokumen		50.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	100.000.000
JUMLAH									7.573.603.435	JUMLAH			8.519.351.465	

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2024 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2022. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2024 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 96,3 %, realisasi Belanja Modal sebesar 99,93 %, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 43,88 %.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2024 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 7.573.603.435,- yang terdiri dari 4 (empat) program antara lain program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; Program Penempatan Tenaga Kerja; dan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun 2024 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 3 Juli 2023


KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN
DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TEMANGGUNG
AGUS SARWONO, S.Sos, MM.
NIP.19660411 198607 1 001

**PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024**

Unit Organisasi : 3.31..2.07.3.32.05.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Sub Unit Org : 3.31..2.07.3.32.05.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

KODE REKENING	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Alokasi Anggaran 2023	Kinerja Anggaran Tahun 2022			Prakiraan Maju Rencana 2025	Sumber Dana				
			Lokasi	Targe t	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Alokasi	Realisasi	%						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13					
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENG				7.573.603.435	8.313.745.735	7.020.678.738	6.761.323.424	96,31	8.519.351.465				
2	07		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				7.263.603.435	7.517.453.935	6.364.018.738	6.112.806.924	96,05	8.109.351.465				
2	07	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABU				6.253.603.435	6.249.737.435	6.169.018.738	5.919.875.074	95,96	6.629.351.465				
2	07	01	2,02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.159.466.934	5.159.466.934	5.260.580.287	5.136.338.761	97,64	5.399.466.934			
2	07	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Dinperinak er	44	Orang/	5.159.466.934	5.159.466.934	5.260.580.287	5.136.338.761	97,64	5.399.466.934	DAU
2	07	01	2,06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				148.996.450	145.130.450	88.130.450	85.878.552	97,44	161.000.000			
2	07	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Dinperinak er	1	Paket	10.000.000	10.000.000	5.000.000	4.999.500	99,99	15.000.000	DAU
2	07	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Dinperinak er	1	Paket	23.639.000	23.639.000	20.139.000	20.049.000	99,55	26.000.000	DAU
2	07	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Dinperinak er	1	Paket	19.491.450	19.491.450	17.991.450	16.193.100	90,00	20.000.000	DAU
2	07	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinperinak er	12	Laporan	22.000.000	22.000.000	15.000.000	14.646.500	97,64	20.000.000	DAU
2	07	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinperinak er	12	Laporan	73.866.000	70.000.000	30.000.000	29.990.452	99,97	80.000.000	DAU
2	07	01	2,08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				701.760.950	701.760.950	733.808.001	613.677.817	83,63	735.000.000			
2	07	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinperinak er	12	Laporan	10.000.000	10.000.000	7.000.000	6.995.000	99,93	10.000.000	DAU

KODE REKENING	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Alokasi Anggaran 2023	Kinerja Anggaran Tahun 2022			Prakiraan Maju Rencana 2025	Sumber Dana
			Lokasi	Targe t	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
2 07 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Dinperinak er	12	Laporan	110.000.000	110.000.000	94.488.000	82.265.683	87,06	110.000.000	DAU
2 07 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Dinperinak er	12	Laporan	581.760.950	581.760.950	632.320.001	524.417.134	82,94	615.000.000	DAU
2 07 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah					243.379.101	243.379.101	86.500.000	83.979.944	97,09	333.884.531	
2 07 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Dinperinak er	25	Unit	83.884.531	83.884.531	78.000.000	75.581.444	96,90	83.884.531	DAU
2 07 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinperinak er	1	Unit	132.494.570	132.494.570	0	0	0	200.000.000	DAU
2 07 01 2.09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Dinperinak er	10	Unit	27.000.000	27.000.000	8.500.000	8.398.500	98,81	50.000.000	DAU
2 07 03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KE					850.000.000	847.525.500	0	0		950.000.000	DAU
2 07 03 2.01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi					850.000.000	847.525.500	0	0		950.000.000	DAU

KODE REKENING	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Alokasi Anggaran 2023	Kinerja Anggaran Tahun 2022			Prakiraan Maju Rencana 2025	Sumber Dana
			Lokasi	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	
2 07 03 2.01 01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan berbasis Kompetensi pada tahun n	Dinperinaker	160	Orang	850.000.000	847.525.500	0	0		950.000.000	DBHCHT
2 07 04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					160.000.000	390.191.000	145.000.000	143.041.150		530.000.000	
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota					160.000.000	390.191.000	15.000.000	14.902.000		530.000.000	
2 07 04 201 02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1000	Orang	50.000.000					80.000.000	
2 07 04 201 04	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5	Orang	10.000.000		15.000.000	14.902.000	99,35	50.000.000	
2 07 04 201 05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	140	Orang	100.000.000	390.191.000				400.000.000	DBHCHT
2 07 04 2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota					0	0	130.000.000	128.139.150		0	
2 07 04 2.04 01	Peringkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	16	Orang	0	0	130000000	128.139.150	98,57	-	DAU
2 07 05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					0	30.000.000	50.000.000	49.890.700		0	DAU
2 07 05 2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota					0	30.000.000	50.000.000	49.890.700		0	DAU

KODE REKENING	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Alokasi Anggaran 2023	Kinerja Anggaran Tahun 2022			Prakiraan Maju Rencans 2025	Sumber Dana
			Lokasi	Targe t	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Alokasi	Realisasi	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 07 05 2.02 04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Lembag	0	30.000.000	50.000.000	49890700	99,78	0	DAU
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN					310.000.000	796.291.800	656.660.000	648.516.500		410.000.000	
3 31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					310.000.000	796.291.800	656.660.000	648.516.500		410.000.000	
3 31 02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					310.000.000	646.291.800	656.660.000	648.516.500		410.000.000	
3 31 02 2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					310.000.000	646.291.800	656.660.000	648.516.500		410.000.000	
3 # 02 201 03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Dokume	100.000.000					150.000.000	
3 # 02 201 05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Dokume	160.000.000	646.291.800	656.660.000	648.516.500	98,76	160.000.000	DBHCHT
3 31 02 2.01 06	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Dokume	50.000.000	0	0	0	0	100.000.000	DAU
3 31 03	PROGRAM PENGENDALIAN IJIN USAHA INDUSTRI					0	150.000.000				0	
3 31 03 2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI),Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota					0	150.000.000				0	

KODE REKENING	Urusan/ Bidang Pemerintahan Daerah/Program/ Kegiatan/Sub	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Alokasi Anggaran 2023	Kinerja Anggaran Tahun 2022			Prakiraan Maju Rencana 2025	Sumber Dana				
			Lokasi	Target	Satuan	Pagu Indikatif (Rp)		Alokasi	Realisasi	%						
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13					
3	31	03	2.01	01	Pasuruan Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Sosialisasi dan Sertifikasi TKDN	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1	Dokumen	0	150.000.000	0	0	0	0	DAU
						7.573.603.435	8.313.745.735	7.020.678.738	6.761.323.424		8.519.351.465					

Kabupaten Temanggung, 3 Juli 2023
Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah, serta rencana pendanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

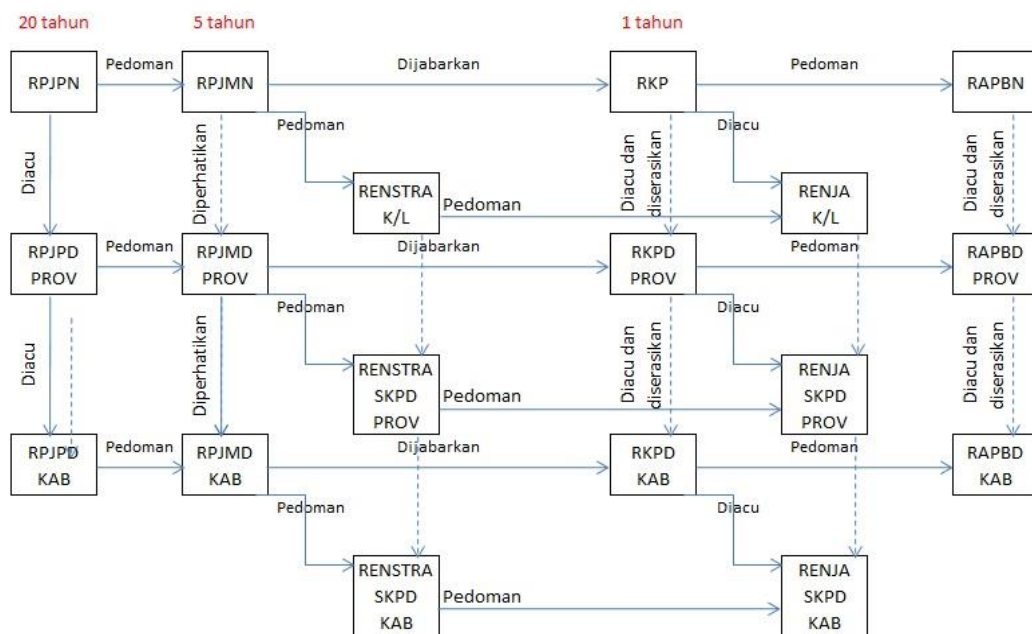
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan jangka waktu RPD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi,

permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 2) Kondisi pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 4) Data Pokok Pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2023, dan perkiraan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun lalu berdasarkan renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program

dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa . Namun dalam proses ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan

data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2022 terhadap capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2023.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023 terhadap target di Tahun 2023.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun ke-empat pelaksanaan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2018-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
s.d Tahun 2022

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2020		Target 2022			Realisasi 2022		Capaian 2022		Realisasi s/d 2022		Capaian s/d 2022		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+13)	18	19	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																			
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji	bulan	60			3.437.712.553,00	14	3.553.900.325	3.209.353.884	12	3.128.561.391	86	97,48	48				
a.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber air dan listrik	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan	60			15.590.945,00	12	15.000.000	17.000.000	12	16.482.182	100	96,95	48				
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan, atk dll	bulan	60			23.012.241,00	12	36.126.000	29.000.000	12	26.875.700	100	92,67	48				
c.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan	bulan	60			5.000.000,00	12	7.000.000	7.500.000	12	7.500.000	100	100	48				
d.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	bulan	60			1.991.800,00	12	4.000.000	2.000.000	12	1.996.500	100	100	48				

		kantor																
e.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya peranko dan materai dan	bulan	60			2.250.000,00	12	1.560.000	1.000.000	12	992.500	100	99	48			
f.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan/snack rapat, minum harian pegawai dan jamuan tamu	bulan	60			14.560.500,00	12	30.000.000	15.000.000	12	14.272.220	100	95,15	48			
g.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	bulan	60			35.189.500,00	12	40.000.000	60.000.000	12	58.495.400	100	97	48			
h.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya service komputer,Lapt printer, AC, fax telepon, LCD, Televisi, soundsystem, jaringan intern dll	bulan	60			116.327.772,00	12	5.000.000	6.377.800	12	6.186.000	100	96,99	48			
i.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya iuran BPJS Satpam, SS dan belanja kebersihan	bulan	60			53.000.000,00	12	350.314.000	347.378.200	12	341.976.020	100	98,44	48			
j.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas	bulan	60			32.327.400,00	12	100.000.000	110.000.000	12	104.585.550	100	95,08	48			

	Operasional atau Lapangan																	
K	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	bulan	60			58.000.000,00	12	50.000.000	0				48				
	Total Program																	
a.	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Terlaksananya kegiatan Upacara Pembukaan dan Penutupan TMMD Sengkuyung I, II, III, Tersalurnya Bankeu Kabupaten dalam Dukungan Pelaksanaan TMMD Sengkuyung I, II, III dan Karya Bakti Kosin 0706	desa	25				3	80.000.000,00	40.000.000,00		39.244.100,00	100	98,11	20			
	Total Program																	
a.	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Terlaksananya Rencana Kerja Pembangunan Kawasan Perdesaan, Terlaksananya Bumtek	Kec	100				3						100	45.278.000,00			

		PRUKADES di kawasan perdesaan Bansari Terpromosikannya produk unggulan desa, Terwujudnya inovasi desa																
	Total Program																	
a	Fasilitasi Penyelenggaraan Asministrasi Pemerintahan Desa	Terlaksananya Fasilitasi Pendamping Desa, Tersusunnya perbub DD, ADD, BHP, BHR Tahun 2022 Terlaksananya pembinaan monitoring dan evaluasi pengelolaan DD, ADD, BHP, BHR; Tersusunnya Juknis APBDes Tahun 2022	Kecamatan	100			1											
b	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Tersusunnya Perbup tentang Pilkades	dokumen				1											
c	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan	Terlaksananya bintek tim fasilitasi penyusunan perencanaan	desa	1330			266	49.999.900,00	49.999.900,00		49.425.550,00	100	98,85	1064				

	Desa	pembangunan desa, Terlaksananya fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes Tersusunnya Rencana Aksi SDGs Desa																	
d	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya bantuan keuangan Gubernur kepada Desa, Terlaksananya bantuan keuangan Kabupaten kepada desa, Terlaksananya bintek dan pendampingan pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes, Terlaksanya bintek dan pendampingan pengelolaan aset desa berbasis SIPADES, Terlaksananya pembinaan aparat pemerintah desa/lembaga desa, administrasi desa,	kecamatan	100			20	435.999.700,00	200.000.000,00		172.701.250,00	100	86,35	80					

		pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan aset desa																
e	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Terlaksananya bintek peningkatan kapasitas pemerintaha desa, BPD dan LPMD;	desa				1											
f	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerjasama Antar Desa	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan BP-SPAM, BKAD eks PNPM dan pengurus DAPM, Terlaksananya bintek pengelola BUMDes dan masyarakat	Kecamatan	100			20	265.359.650,00					80					
g	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya pengisian kekosongan perangkat desa, Terlaksananya Pembekalan tugas perangkat desa, Terbayarnya luran BPJS bagi kepala desa dan perangkat desa	desa	1330			266	3.300.399.900,00	3.400.000.000,00				1064					
	Total Program																	

a.	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya Pencanangan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Bulan Bakti Gotong Royong (BBGRM), Terlaksananya fasilitasi kegiatan dan Operasional TP-PKK Kabupaten, Terlaksananya bimtek LPMD/LPMK, Terlaksananya lomba desa/kelurahan Tingkat Kab/Provinsi/Nasional, Terlaksananya pendataan awal, pembinaan dan evaluasi desa binaan, Tersalurkannya Insentif Ketua RW dan RT di Desa se - Kabupaten Temanggung	Kecamatan	100				20	798.465.000,00	20.000.000,00		19.872.100,00	100	99	80	54.013.700,00			
b.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan	Terlaksananya monev UEDSP UP2K dan BUMDes	kelompok	200				40	20.000.000,00	50.000.000,00		49.732.050,00	100	99,46	160	0			

	Pendapatan Asli Desa																	
c.	Fasilitasi Kegiatan Teknologi Tepat Guna dan Inovasi	Terfasilitasinya Kegiatan TTG	kecamatan	275			20	20.000.000,00	54.000.000,00		53.595.600,00	10 0	99	220	0			
	Total Program																	

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
s.d Triwulan I Tahun 2023

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA		TARGET 2023			REALISASI 2023 s.d Triwulan I		CAPAIAN 2023		KET
				K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							3.608.744.609					
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan tunjangan	bulan			12		2.922.988.609	3	662.039.640	25	22,65	
2.13.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya alat-alat listrik	bulan			12		4.000.000	3	30.000	25	0,75	
2.13.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya almari pendingin dan mesin absensi	bulan			12		20.000.000	0	-	-	0,00	
2.13.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya alat tulis kantor, kertas dan cover, bahan komputer bahan untuk kegiatan kantor lainnya	bulan			12		24.000.000	3	699.100	25	2,91	
2.13.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	bulan			12		5.000.000	3	791.000	25	15,82	
2.13.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya makan/snack rapat, minum harian pegawai dan jamuan tamu	bulan			12		25.000.000	3	4.585.300	25	18,34	
2.13.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya perjalanan dinas luar daerah	bulan			12		50.000.000	3	4.470.000	25	8,94	
2.13.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya perangko dan materai dan Terlaksananya perjalanan dinas dalam daerah	bulan			12		2.000.000	3	400.000	25	20,00	
2.13.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya langganan telepon, air dan listrik	bulan			12		17.000.000	3	3.770.050	25	22,18	

2.13.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya service komputer, Lapt printer, AC, fax telepon, LCD, Televisi, soundsystem, jaringan intern dll	bulan			12		5.000.000	0	-	-	0,00
2.13.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terbayarnya iuran BPJS Satpam, SS dan belanja kebersihan	bulan			12		386.256.000	3	77.747.317	25	20,13
2.13.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan kendaraan dinas	bulan			12		80.000.000	3	16.471.000	25	20,59
2.13.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	bulan			12		67.500.000	3	419.000	25	0,62
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA							20.000.000,00				
2.13.02.2.01.06	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Terlaksananya kegiatan Upacara Pembukaan dan Penutupan TMMD Sengkuyung I, II, III, Tersalurnya Bankeu Kabupaten dalam Dukungan Pelaksanaan TMMD Sengkuyung I, II, III dan Karya Bakti Kosin 0706	desa			5		20.000.000,00	0	-	-	0,00
2.13.4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA							3.545.000.000,00				
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terlaksananya fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa, Terlaksananya fasilitasi penyusunan RPJMDes dan RKPDes	desa			266		25.000.000,00	10	729.500	4	2,92
2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa berbasis siskeudes	kecamatan			20		25.000.000,00	4	4.354.000	20	17,42

2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terlaksananya pengisian kekosongan perangkat desa, Terlaksananya Pembekalan tugas perangkat desa, Terbayarnya luran BPJS bagi kepala desa dan perangkat desa	desa			266		3.465.000.000,00	60	851.038.480	23	24,56		
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan aset desa	desa			266		30.000.000,00	20	3.060.600	8	10,20		
2.13.5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT							330.000.000,00						
2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terlaksananya penyaluran bantuan keuangan Provinsi dan bantuan Keuangan Kabupaten, Terlaksananya fasilitasi LKD, Tersalurkannya Insentif Ketua RW dan RT di Desa se - Kabupaten Temanggung	Kecamatan			20		30.000.000,00	1	5.723.500	5	19,08		
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Pencanangan Hari Kesatuan Gerak PKK, Terlaksananya fasilitasi kegiatan Pembinaan dan Operasional TP-PKK Kabupaten	kecamatan			20		300.000.000,00	2	16.872.500	10	5,62		
JUMLAH								7.503.744.609						

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2022 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2018-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa
 - f. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
 - g. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
 - h. Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
 - i. Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
 - j. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat
 - k. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
 - l. Fasilitasi Kegiatan Teknologi Tepat Guna dan Inovasi
 - m. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2022, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Memuaskan** yaitu dengan nilai **100%**.

Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa;

Capaian Kinerja : 100 % kategori Memuaskan

2. Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga ekonomi masyarakat (LEM); dan

Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Memuaskan

3. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik erah.

Capaian Kinerja : 100,00 % kategori Memuaskan

Dari Tabel 2.1. dan Triwulan I tahun 2023 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2022 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Triwulan I Tahun 2023
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2023 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun	Angka	0,64	0,68	0,69	0,7	0,71	0.67	0.68	0.69	0.72	0,72	100	
2	Persentase Desa yang Berpredikat Mandiri	%	3,38	4,51	5,26	6,02	6,39	0	3.76	5.64	9.77	9,77	100	
3	Persentase Jumlah Desa yang Berklasifikasi Swasembada	%	23	25	30	35	40	20	20.07	30.45	30.45	30,45	76,13	
4	Persentase Desa yang Cepat Berkembang Berdasarkan Indeks Pembangunan Desa	%	27	30	33	35	37	20.07	20.07	35.71	43.61	43,61	100	
5	Persentase pemberdayaan di Kawasan yang Telah ditetapkan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
6	Persentase Jumlah Desa yang Menyelesaikan Penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	50	60	70	80	90	43.98	77.07	96.24	100	96,24	100	
7	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	%	50	60	70	80	90	85.71	85.71	100	100	100	100	
8	Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan	%	55	65	75	80	85	100	100	100	100	100	100	
9	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	%	85	90	95	100	100	100	100	96	100	100	100	
10	Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu	%	75	77	80	83	85	87.97	86.84	100.00	100	100	100	
11	Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa	%	10	10	10	10	10	13,53	6,77	0	0	0	100	
12	Persentase desa yang tertib pengelolaan asset	%	75	77	80	83	85	79.70	86.84	100	100	100	100	
13	Persentase Lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif	%	14	20	25	30	35	96.25	100	100	100	100	100	
14	Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif	%	20	23	26	29	32	61.28	61.28	85.34	96.62	96,62	100	
15	Persentase Lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif	%	10	10	10	10	10	10	100	100	100	100	100	

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 14 terdiri dari:
 - a. Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kenaikan rata-rata IDM Kabupaten Temanggung disebabkan karena kenaikan indeks komposit sosial pada indikator akses pendidikan PAUD dan penyelenggaraan pendidikan non formal serta indeks komposit lingkungan pada indikator pencegahan pencemaran air, tanah dan udara, pada indikator potensi rawan bencana melalui kegiatan penyediaan mitigasi dan penanggulangan bencana.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Faktor penghambat dalam penyusunan IDM adalah masih dalam proses pengisian aplikasi sampai dengan akhir tahun.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Aktif pendampingan pengisian aplikasi di 130 desa yang belum selesai input.
 - b. Persentase desa yang ber predikat mandiri;
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Kenaikan rata-rata IDM Kabupaten Temanggung disebabkan karena kenaikan indeks komposit sosial pada indikator akses pendidikan PAUD dan penyelenggaraan pendidikan non formal serta indeks komposit lingkungan pada indikator pencegahan pencemaran air, tanah dan udara, pada indikator potensi rawan bencana melalui kegiatan penyediaan mitigasi dan penanggulangan bencana.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Faktor penghambat dalam penyusunan IDM adalah masih dalam proses pengisian aplikasi sampai dengan akhir tahun.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Aktif pendampingan pengisian aplikasi di 130 desa yang belum selesai input.

- c. Persentase Desa yang Cepat Berkembang berdasarkan Indek Pembangunan Desa;
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya Permendagri nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah tidak ada.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan pendampingan dalam pengisian aplikasi epdeskel.
- d. Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan;
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Desa yang tergabung dalam kawasan perdesaan memiliki potensi yang sama sehingga perlu pengelolaan yang lebih maksimal, Adanya semangat dan kreativitas pengurus BUMDesa Bersama.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah tidak ada.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Untuk dilakukan kajian lebih lanjut untuk pengembangan kawasan perdesaan.
- e. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya Perbub nomor 46 Tahun 2018 tentang pedoman perencanaan pembangunan desa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah tidak ada.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan koordinasi awal dengan desa dan PD terkait dalam rangka penyusunan program dan kegiatan pada RKPDes.
- f. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya perbup nomor 50 Tahun 2018 tentang PKD, Adanya informasi pagu indikatif ke desa yang lebih awal.

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Informasi pagu indikatif dana desa, bankeu, belum tersampaikan secara pasti pada rentang waktu penyusunan APBDes.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Melakukan koordinasi secara aktif ke Kementerian Desa PDTT dan provinsi.
- g. Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Desa sudah menerapkan Aplikasi Siskeudes, Personil desa / kaur keuangan yang terampil IT, kesesuai kegiatan dengan perencanaannya sehingga memudahkan desa dalam pengelolaan keaungan desa, semua desa sampai sudah menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah tidak ada.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Pendampingan untuk lebih tertib dalam pengelolaan keuangan sesuai peraturan yang ada dan pemberian penghargaan terhadap 10 desa dengan pengelolaan keuangan terbaik.
- h. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya perbup nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa dan Perbup Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman pengadaan barang dan Jasa di Desa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah tidak ada.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Menyampaikan surat dan melakukan monitoring evaluasi secara intensif ke desa untuk kegiatan yang kemungkinan dapat terselesaikan direncanakan tahun berikutnya.

- i. Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya aturan yang memadai yaitu Perbup nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa, Adanya Kegiatan Bimbingan teknis bagi Perangkat Desa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah tidak ada.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Dilakukan sosialisasi kepada perangkat desa tentang pengisian administrasi desa.
- j. Persentase Pelanggaran disiplin kepala desa
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya aturan yang menjadi pedoman yaitu Perbup nomor 40 Tahun 2022 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa, Adanya kegiatan Penegakan Disiplin Kades dan perangkat Desa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Masih kurangnya pemahaman terhadap administrasi dan aturan hukum yang berlaku bagi desa.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa.
- k. Persentase desa yang tertib pengelolaan asset
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya Perbup No. 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa, Adanya Aplikasi SIPADES (Aplikasi Sistem Pengelolaan Aset Desa).
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Pengelola aset belum memahami alur tentang pencatatan, Ketidاكلancaran dalam pembuatan laporan akhir tahun, Laporan Aset belum rutin dilakukan tiap bulan.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Perlu adanya pendampingan dan sosialisasi pada saat input aplikasi Siskeudes, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan asset.

1. Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya dukungan penganggaran dari APBD dan APBDes.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Belum adanya aturan yang menjelaskan secara rinci terkait LKD.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Penyusunan Perbup tentang LKD.
- m. Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya PERDA nomor 3 Tahun 2016 tentang BUMDes, Adanya Perbup nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman pendirian dan pengelolaan BUMDes dan BUMDesa Bersama, Adanya Forum BUMDesa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah tidak ada.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Penyusunan Perda BUMDes.
- n. Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU no 6 Tahun 2014, Permendagri no 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah tidak ada.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Penyusunan Perda BUMDes, monitoring dan pendataan Lembaga Ekonomi Desa (LED).
2. Capaian indikator dengan status akan tercapai tidak ada.
3. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 1 terdiri dari:
 - a. Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya Permendagri nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman penyusunan dan pendayagunaan data profil Desa dan Kelurahan.

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Aplikasi prodeskel dibuka mulai bulan Agustus sampai November berdasarkan Permendagri No. 12 Tahun 2007, untuk saat ini ada perbaikan aplikasi di pusat (Kemendagri).
- 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melakukan pendampingan dan identifikasi desa potensi swasembada dan berkoordinasi secara aktif dengan Kemendagri

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok pada Dinpermades terdiri dari 15 jenis data dari Bidang Pmdes, PMD dan P3KD, dengan rincian sebagai berikut:

1. Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun

UU no 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan keharusan menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera dilaksanakan melalui perlindungan dan pemberdayaan desa, sehingga desa menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Perlindungan dan pemberdayaan desa menjadi langkah utama sehingga desa (dan masyarakatnya) mampu mengelola, memanfaatkan serta mempertahankan jati diri dan kemajuan yang dicapainya. Langkah utama membutuhkan strategi dan program yang terencana untuk menjawab isu-isu strategis yang dihadapi oleh desa.

Terhadap isu-isu strategis di atas, maka pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan (sebagai dampak) melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 disebutkan bahwa Indeks Desa Membangun adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) dimaksudkan antara lain untuk:

- a. Menjadi instrumen dalam menempatkan status/posisi desa dan menilai perkembangan desa;
- b. Menjadi bahan penyusunan target lokasi (lokus) berbasis desa;
- c. Menjadi instrumen koordinasi baik tingkat kabupaten, kecamatan maupun dengan desa dan lembaga yang ada.

Berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) status atau perkembangan desa ada 5 Klasifikasi Status Desa yaitu :

- a. Desa Mandiri
- b. Desa Maju
- c. Desa Berkembang
- d. Desa Tertinggal
- e. Desa Sangat Tertinggal

Pengertian Desa menurut Klasifikasi satu Desa tersebut antara lain

➤ Desa Mandiri

Desa Mandiri atau bisa juga disebut sebagai Desa Sembada Yaitu Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

➤ Desa Maju

Desa Maju atau bisa juga disebut sebagai Desa Pra Sembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

➤ Desa Berkembang

Desa Berkembang atau bisa juga disebut dengan Desa Madya adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.

➤ Desa Tertinggal

Desa Tertinggal atau bisa juga disebut dengan Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

➤ Desa Sangat Tertinggal

Desa Sangat Tertinggal atau bisa juga disebut sebagai Desa Pratama, adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

✚ **Rata-rata Nilai IDM**

Indeks Desa Membangun (IDM) disusun dengan landasan bahwa pembangunan merupakan proses akumulasi dari dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi ekologi. Ketiganya menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan.

Indikator Indeks Desa Membangun (IDM) antara lain :

- a. **Ketahanan Sosial** : Modal Sosial, Kesehatan, Pendidikan, Permukiman
- b. **Ketahanan Ekologi** : Kualitas lingkungan, Potensi rawan bencana, Tanggap bencana
- c. **Ketahanan Ekonomi** : Keberagaman produksi masyarakat desa, Tersedian pusat pelayanan perdagangan, Akses distribusi/logistik, Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan, Lembaga Ekonomi, Keterbukaan wilayah.

Sedangkan untuk Klasifikasi Status Desa berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) yaitu :

STATUS DESA	RENTANG NILAI
MANDIRI	IDM > 0,8155
MAJU	0,7072 < IDM ≤ 0,8155
BERKEMBANG	0,5989 < IDM ≤ 0,7072

TERTINGGAL	0,4907 < IDM <= 0,5989
SANGAT TERTINGGAL	IDM <= 0,4907

Rumus Rata-rata nilai IDM adalah akumulasi nilai IDM seluruh desa dibagi jumlah desa. Adapun Rata-rata nilai IDM di Kabupaten Temanggung selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 1
Rata-rata Nilai Indeks Desa Membangun
Tahun 2018 – 2023 (Triwulan I)

No	Kondisi Desa	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rata-rata nilai IDM	0,65	0,67	0,68	0,69	0,72	0,720

Sumber data: Dinpermades 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai rata-rata IDM di Kabupaten Temanggung sampai dengan Triwulan I tahun 2023 yaitu 0,72% data tersebut masih sama dengan data Triwulan IV Tahun 2022 karena olahan data dilakukan pada akhir Tahun.

Tabel. 1.1.

Rekap Nilai Indeks Desa Membangun per Kecamatan
Tahun 2023 (**Triwulan I**)

No	Kecamatan	Nilai IDM
1	Temanggung	4.43
2	Tlogomulyo	8.10
3	Kranggan	8.46
4	Tembarak	9.15
5	Selopampang	8.73
6	Pringsurat	10.31
7	Kaloran	10.09
8	Parakan	10.20
9	Bansari	10.43
10	Kledung	9.40
11	Kedu	9.79
12	Bulu	14.29
13	Kandangan	11.60
14	Candiroto	10.74
15	Bejen	10.03
16	Jumo	9.24
17	Gemawang	6.69
18	Tretep	7.43
19	Wonoboyo	8.82
20	Ngadirejo	13.85
JUMLAH		192

Sumber data: Dinpermades 2023

Untuk mempercepat capaian di tahun 2023 diperlukan pendampingan secara intensif di 130 desa yang belum selesai

input pada aplikasi IDM.

2. Persentase desa yang ber predikat Mandiri

Definisi Desa Mandiri atau bisa disebut sebagai Desa Swasembada adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

Desa Maju, atau bisa disebut sebagai Desa Pra Swasembada adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

Adapun Kriteria Desa Mandiri :

- a. Sarana dan prasarana yang memadai : (Pedidikan ; Perkantoran ; Kesehatan ; Tempat ibadah ; Akses jalan dan komunikasi)
- b. Peningkatan pendapatan dan kesejahteraan
- c. Pemanfaatan sumber daya alam berkelanjutan
- d. Kemampuan untuk menunjang pembangunan sendiri
- e. Kemampuan untuk memenuhi kebutuhan sendiri
- f. Tidak tergantung pada bantuan dari luar
- g. Punya sumber pendapatan sendiri
- h. Masyarakat mampu dan bergotong royong untuk membangun desa
- i. Sudah punya hak yang jelas dan bisa memanfaatkan hasil-hasil
- j. Peningkatan ketrampilan
- k. Kemandirian dan pemberdayaan
- l. Terbuka dengan pemerintah
- m. Adanya aturan-aturan desa
- n. Harus bisa membiayai aparat desa

Beberapa faktor yang akan mempengaruhi terbentuknya desa mandiri:

- Potensi Sumber Daya Manusia :
 - a) Masyarakat Desa mempunyai motivasi dan budaya yang tinggi.
 - b) Mempunyai jiwa wirausaha yang kuat.
 - c) Mempunyai kemampuan dan keterampilan tertentu yang mendukung pengembangan potensi local

- Potensi Sumber Daya Alam :
 - a) Potensi desa mempunyai daya saing untuk dikembangkan.
 - b) Pengelolaan potensi desa secara berkelompok oleh masyarakat.
 - c) Skala usahanya berbasis sentra yang dilakukan oleh masyarakat
 - Pasar :
 - a) Produk yang dikembangkan masyarakat dibutuhkan pasar.
 - b) Produk masyarakat mempunyai daya saing pasar
 - Kelembagaan dan Budaya lokal, pelaksanaan program didukung oleh kelembagaan desa yang menjunjung tinggi kearifan lokal.
- Sedangkan Persentase desa yang berpredikat Mandiri di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2
Persentase Desa yang berpredikat Mandiri (%)
Tahun 2018 – 2023 (Triwulan I)

No	Kondisi Desa	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Desa Mandiri	1	0	10	15	26	26
2	Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
	Persentase	0,37	0	3,76	5,63	9,77	16,16

Sumber data: Dinpermades 2023

Pada Tabel diatas sampai dengan Triwulan I 2023 masih menggunakan data pada Triwulan IV Tahun 2022 karena dalam penyusunan IDM masih dalam proses pengisian aplikasi.

Tabel. 2.1
Jumlah desa berdasarkan klasifikasi IDM
Tahun 2018 – 2023 (Triwulan I)

No	Kondisi Desa	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Desa Mandiri	1	0	10	15	26	26
2	Desa Maju	27	48	61	76	111	111
3	Desa Berkembang	212	211	195	175	129	129
4	Desa Tertinggal	25	7	0	0	0	0
5	Desa Sangat Tertinggal	1	0	0	0	0	0

Sumber data : Dinpermades 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penilaian perkembangan desa melalui pengukuran Indeks Desa Mandiri baru dilaksanakan

mulai tahun 2018. Pada tahun 2018 ada 1 desa dengan status Desa Mandiri, namun pada tahun 2019 desa tersebut berubah menjadi Desa Maju. Pada tahun 2020 ada sejumlah 10 desa dengan status Desa Mandiri. Pada tahun 2021 ada sejumlah 15 desa dengan status Desa Mandiri dan tahun 2022 ini sejumlah 26 desa, Kenaikan status desa tersebut disebabkan karena terdapat kenaikan pada beberapa indikator perbaikan akses pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup, sedangkan pada Tahun 2023 masih dalam proses input aplikasi, Adapun nama desa Mandiri tersebut antara lain :

Tabel. 2.1
Nama desa berdasarkan status Desa Mandiri

No	Desa	Kecamatan	Status
1	Bulu	Bulu	Mandiri
2	Tegalurung	Bulu	Mandiri
3	Campursari	Bulu	Mandiri
4	Menggoro	Tembarak	Mandiri
5	Kebumen	Pringsurat	Mandiri
6	Rejosari	Pringsurat	Mandiri
7	Pingit	Pringsurat	Mandiri
8	Kaloran	Kaloran	Mandiri
9	Kandangan	Kandangan	Mandiri
10	Kedungumpul	Kandangan	Mandiri
11	Tegalroso	Parakan	Mandiri
12	Traji	Parakan	Mandiri
13	Ngadirejo	Ngadirejo	Mandiri
14	Purbosari	Ngadirejo	Mandiri
15	Jumo	Jumo	Mandiri
16	Candiroto	Candiroto	Mandiri
17	Lempuyang	Candiroto	Mandiri
18	Selopampang	Selopampang	Mandiri
19	Bansari	Bansari	Mandiri
20	Mojosari	Bansari	Mandiri
21	Rejosari	Bansari	Mandiri
22	Gunungsari	Bansari	Mandiri
23	Gentingsari	Bansari	Mandiri
24	Tanurejo	Bansari	Mandiri
25	Canggal	Kledung	Mandiri
26	Bejen	Bejen	Mandiri

Sumber data : Dinpermades 2023

Faktor penghambat dalam penyusunan IDM adalah masih dalam proses pengisian aplikasi sampai dengan akhir tahun, oleh karena itu masih dibutuhkan Aktif pendampingan pengisian aplikasi di 130 desa yang belum selesai input.

3. Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada

Status desa swasembada diperoleh dari olahan data Profil Desa dan Kelurahan. Profil Desa dan Kelurahan adalah gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi data dasar keluarga, potensi desa dan kelurahan serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi desa dan kelurahan.

Profil desa dan kelurahan dapat dimanfaatkan sebagai data dasar dalam mendukung perencanaan, pengorganisasian pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelestarian kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Selain itu data profil desa dan kelurahan dapat digunakan untuk mengukur status kemajuan dan kategori tingkat perkembangan desa dan kelurahan swadaya ke swakarya menuju ke swasembada.

Kategori tingkat perkembangan desa dan kelurahan terdiri dari :

Desa Swadaya

Adalah desa yang masih memiliki berbagai situasi yang terbatas seperti eduduk yang jarang, peri kehidupan yang masih terikat dengan adat-istiadat, lembaga-lembaga masyarakatnya masih sangat sederhana dan tingkat pendidikan warganya masih sangat rendah. Kegiatan ekonomi penduduknya masih bergantung dengan alam seperti bertani. Biasanya desa seperti ini berada di lokasi terpencil dank arena berbagai keterbatasannya sistem mata pencaharian masih berpusat pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja. Lokasinya yang jauh dan kurangnya sarana seperti jalan raya membuat warga desa Swadaya masih.

Ciri-ciri desa swadaya adalah:

- 1) penduduknya jarang,
- 2) pendidikan masyarakat rendah,
- 3) sebagian besar penduduk hidup bertani,
- 4) daerahnya bergunung-gunung atau daerah perbukitan,
- 5) lembaga-lembaga yang ada masih sederhana,
- 6) kegiatan penduduk dipengaruhi alam,
- 7) kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sendiri,
- 8) lokasi terpencil,
- 9) masyarakat cenderung tertutup.

Desa Swakarya

Desa Swakarya sering juga disebut desa peralihan antara desa swadaya dan dan desa swasembada. Desa Swakarya memiliki ciri seperti adat-istiadatnya masih dijalankan tetapi sudah tidak mengikat lagi, sudah mulai beradaptasi dengan teknologi dan peralatan canggih dan tidak tersiolasi seperti halnya desa swadaya. Letak desa Swakarya tidak terlalu jauh dari pusat ekonomi atau kota sehingga lebih mudah mendapatkan berbagai akses untuk mendukung aktivitas ekonomi warga. Mata pencaharian warga juga mulai beraneka-ragam, tida lagi hanya mengandalkan sektor agraris. Di desa ini warga juga roda pemerintahan desa sudah berjalan cukup efektif dan masyarakat punya semangat gotong-royong yang sangat baik.

Warga desa swakarya sudah memiliki tingkat pendidikan yang cukup memadai dan desa ini juga sudah memiliki sarana transportasi seperti jalan untuk menciptakan pergerakan ekonomi dan sosial. Sehingga, jarak sudah tidak lagi menjadi penghalang bagi warganya untuk menciptakan aktivitas sosial lainnya. Masyarakat desa seperti ini sudah mulai mampu meningkatkan taraf kehidupannya dengan hasil kerjanya sendiri.

Ciri-ciri desa swakarya adalah:

- 1) mata pencaharian beragam jenisnya,
- 2) adat istiadat sedang mengalami perubahan,
- 3) gotong royong untuk membangun desa sudah meningkat,
- 4) pengaruh dari luar sudah masuk sehingga terjadi perubahan cara berpikir,
- 5) pemerintahan desa mulai berkembang,
- 6) bantuan pemerintah hanya sebagai perangsang,
- 7) lapangan kerja bertambah,
- 8) masyarakat telah mampu meningkatkan kehidupannya.

Desa Swasembada

Desa Swasembada adalah desa yang paling maju di antara ketiga desa sebelumnya. Desa seperti ini biasanya berada di kota kecamatan atau dekat dengan kota tapi bukan kelurahan. Perikehidupan waga desa ini sudah sangat maju dan bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sudah menguasai teknologi dan memiliki berbagai alat untuk mendukung aktivitas ekonomi mereka karena warga desa ini memiliki

pendidikan tinggi, pekerjaan yang beragam dan pola berpikir yang udah sangat rasional. Warga desa Swasembada sudah tidak terikat adat-istiadat dan tidak lagi terisolir. Lokasinya yang dekat dengan kota membuat desa ini memiliki berbagai pilihan bagi warga untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ciri-ciri desa swasembada:

- 1) keperluan hidup pokok desa telah tersedia;
- 2) ikatan adat yang berhubungan dengan perekonomian tidak berpengaruh lagi, sedangkan lembaga-lembaga ekonomi dianggap lebih modern;
- 3) biasanya terletak di sekitar ibu kota kecamatan, ibu kota kabupaten, atau ibu kota provinsi;
- 4) alat-alat teknis sudah modern;
- 5) mata pencaharian beraneka ragam;
- 6) tingkat pendidikan dan keterampilan tinggi;
- 7) lembaga ekonomi, sosial, dan kebudayaan sudah dapat menjaga kelangsungan hidupnya;
- 8) hubungan dengan kota sekitarnya berjalan lancar;
- 9) kondisi perhubungan, produksi, pemasaran, dan kegiatan sosial sudah baik.

Rumus persentase desa yang berklasifikasi swasembada adalah jumlah desa/kelurahan Swasembada dibagi jumlah desa/kelurahan.

Angka kemajuan dan tingkat perkembangan desa dan kelurahan di Kabupaten Temanggung pada tahun 2017 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 3
Persentase desa yang berklasifikasi swasembada (%)
Tahun 2018 – 2023 (Triwulan I)

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa Swasembada	46	58	58	81	81	81
Jumlah Desa	289	289	266	266	266	266
Persentase desa yang berklasifikasi swasembada	15,91	20,06	20,02	30,45	30,45	30,45

Sumber data : Dinpermades 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sampai dengan Triwulan I 2023 masih menggunakan data Triwulan IV Tahun 2022, Karena isian aplikasi prodeskel dibuka mulai bulan Agustus sampai

dengan November berdasarkan Permendagri no. 12 Tahun 2007, dan untuk saat ini ada perbaikan aplikasi di Pusat (Kemendagri).

Tabel. 3.1

Rekap Jumlah Desa Swadaya, Swakarya, Swasembada Tahun 2023 (Triwulan I)

No	Kecamatan	Swadaya	Swakarya	Swasembada
1	Temanggung	2	2	2
2	Tlogomulyo	1	7	4
3	Kranggan	1	6	5
4	Tembarak	0	9	4
5	Selopampang	0	7	5
6	Pringsurat	5	6	3
7	Kaloran	1	7	6
8	Parakan	1	9	4
9	Bansari	2	6	5
10	Kledung	6	6	1
11	Kedu	0	8	6
12	Bulu	0	15	4
13	Kandangan	1	8	7
14	Candiroto	3	8	3
15	Bejen	0	12	2
16	Jumo	0	10	3
17	Gemawang	0	6	4
18	Tretep	3	6	2
19	Wonobojo	0	9	4
20	Ngadirejo	3	9	7
	JUMLAH	29	156	81

Sumber data : Dinpermades 2023

Upaya untuk mencapai target pada akhir tahun 2023 dengan melakukan pendampingan dan identifikasi desa potensi swasembada dan berkoordinasi secara aktif dengan Kemendagri.

4. Persentase Desa yang cepat Berkembang berdasarkan Indeks Pembangunan Desa

Dasar penentuan tingkat perkembangan desa dan kelurahan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan. Tingkat perkembangan desa dan kelurahan adalah status tertentu dari capaian hasil dari desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah serta Pemerintah Desa.

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang didasarkan pada Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa dan kelurahan.

Instrumen Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai serta menentukan status tertentu dari capaian hasil tingkat perkembangan desa dan kelurahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan. Instrumen evaluasi tersebut digunakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan untuk mengetahui tingkat perkembangan desa dan kelurahan masing-masing atau disebut dengan tahap evaluasi diri.

Evaluasi diri adalah upaya untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan, Kewilayahan dan Kemasyarakatan yang secara internal dilakukan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan terhadap hasil evaluasi diri oleh Pemerintah Desa selanjutnya dilakukan penilaian validasi dan klarifikasi oleh Tim Evaluasi Pengertian Status desa dapat kita jabarkan sebagai berikut :

➤ **Desa Cepat Berkembang**

Desa cepat berkembang, yaitu desa yang dekat atau mudah berhubungan dengan kota. Kegiatan ekonominya tidak tergantung pada sektor primer atau agraris saja. Masyarakatnya menunjukkan perubahan dalam adat dan kebudayaannya. Desa cepat berkembang biasanya telah mencapai desa swasembada.

➤ **Desa Berkembang**

Desa berkembang, yaitu desa yang mempunyai potensi untuk dikembangkan. Kegiatan utama masyarakatnya pada sektor primer, yaitu pertanian atau pertambangan. Keegiatannya masih terbatas, masyarakatnya masih homogen dalam adat dan kebudayaan. Lokasi desa relatif jauh dari kota atau bubungan dengan kota tidak mudah. Tingkat perkembangan desa adalah swakarya.

➤ **Desa Kurang Berkembang**

Desa Kurang Berkembang, yaitu desa yang mempunyai masalah khusus atau keterbatasan tertentu. Misalnya, keterbatasan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan hubungannya hanya terbatas pada pusat-pusat permukiman lainnya. Biasanya, desanya miskin, kondisinya tertinggal dari desa lain dalam pembangunan nasional dan daerah.

Berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi diri terhadap tingkat perkembangan desa dan kelurahan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 4
Persentase Desa yang Cepat berkembang
berdasarkan Indeks Pembangunan Desa (%)
Tahun 2018 – 2023 (Triwulan I)

No	Kondisi Desa	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Desa Cepat Berkembang	n.a	58	40	95	116	116
2	Jumlah Desa	n.a	289	266	266	266	266
3	Persentase	n.a	20,06	15,03	35,71	43,61	43,61

Sumber data : Dinpermades 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 masih sama dengan data Triwulan IV tahun 2022.

Tabel. 4.1
Persentase Desa yang Cepat berkembang
berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa (%)

No	Kondisi Desa	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Desa Cepat Berkembang	n.a	n.a	58	40	95	116	116
2	Desa Berkembang	n.a	n.a	201	135	163	150	150
3	Desa Kurang Berkembang	n.a	n.a	30	91	8	0	0
	Jumlah desa dan kelurahan	n.a	n.a	289	266	266	266	266

Sumber data : Dinpermades 2023

5. Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan

Pembangunan kawasan perdesaan dilaksanakan dalam batas wilayah fungsional dan atau wilayah administrasi. Isu-isu yang diangkat dalam pembangunan kawasan perdesaan antara lain *rural-urban linkage*; pertumbuhan; lapangan pekerjaan; infrastruktur; serta sinergisme antar sektor, 'pasar', dan masyarakat; dengan dukungan dana dari APBN berupa dana perimbangan dan APBD yang dialokasikan pada masing-masing sektor. Berbeda dengan pendekatan desa membangun, pemegang kewenangan pembangunan kawasan perdesaan adalah Pemerintah Daerah yang bersinergi dengan masyarakat dan komponen lainnya kecuali yang berskala lokal Desa. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 85 ayat (1) mengatur bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui satuan kerja perangkat daerah, Pemerintah Desa, dan/atau BUMDesa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. (2) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ketiga wajib mendayagunakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia serta mengikutsertakan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa. (3) Pembangunan Kawasan Perdesaan yang berskala lokal Desa wajib diserahkan pelaksanaannya kepada Desa dan/atau kerja sama antar-Desa.

Kawasan pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa, pemerintahan, pelayanan sosial, kegiatan ekonomi, kepariwisataan dan sosial budaya.

Maksud dan Tujuan pembangunan kawasan perdesaan tertuang dalam Pasal 83 (ayat 2) Undang-Undang No 6 tahun 2014; bahwa Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

Adapun Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 11
Persentase pemberdayaan di kawasan yang telah ditetapkan (%)
Tahun 2018 – 2023 (Triwulan I)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
jumlah kawasan yang dikembangkan	1	1	1	1	1	1
jumlah kawasan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati	1	1	1	1	1	1
persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Dinpermades 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa sampai dengan Triwulan I tahun 2023 jumlah pemberdayaan kawasan masih melanjutkan tahun 2022 yaitu Kawasan Kranggan

Tabel. 11.1
Data Pemberdayaan di kawasan Perdesaan (%)

Tahun 2018 – 2023

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kawasan Perdesaan	Pembangunan Kawasan Pedesaan Agropolitan Kecamatan Candiroto yang meliputi 4 (empat) Desa: - Desa Muntung - Desa Muneng - Desa Mento -Desa Batarsari	Pembangunan Lokasi Kawasan Perdesaan Eduwisata di Kecamatan Bansari yang meliputi seluruh desa sejumlah 13 desa : - Mranggen Kidul - Bansari - Mojosari - Rejosari - Gunungsari - Balesari - Purborejo - Tlogowero - Mranggen tengah - Candisari - Campuranom - Gentingsari - Tanurejo	Pembangunan Kawasan Perdesaan Agropolitan Kecamatan Kranggan yang meliputi 5 (lima) Desa: Desa Ngropoh Desa Kramat Desa Sanggrahan Desa Purwosari Desa Pendowo	Pembangunan Lokasi Kawasan Perdesaan Eduwisata di Kecamatan Bansari yang meliputi seluruh desa sejumlah 13 desa : - Mranggen Kidul - Bansari - Mojosari - Rejosari - Gunungsari - Balesari - Purborejo - Tlogowero - Mranggen tengah - Candisari -Campuranom - Gentingsari - Tanurejo	Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Eduwisata Pertanian di Kecamatan Kranggan yang meliputi 5 desa yaitu : - Ngropoh - Kramat - Sanggarahan - Purwosari - Pendowo	Pemberdayaan Kawasan Perdesaan Eduwisata Pertanian di Kecamatan Kranggan yang meliputi 5 desa yaitu : - Ngropoh - Kramat - Sanggarahan - Purwosari - Pendowo

Sumber data : Dinpermades 2023

6. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Desa disebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Perencanaan Pembangunan Desa adalah Proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

Perencanaan pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan

b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP DESA), merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa, ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pemerintah Desa menyusun RKP Desa sebagai penjabaran RPJM Desa. RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. RKP Desa mulai disusun oleh pemerintah Desa pada bulan Juli tahun berjalan. RKP Desa ditetapkan dengan peraturan Desa paling lambat akhir bulan September tahun berjalan. RKP Desa menjadi dasar dan syarat mutlak bagi desa untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa.

Dalam penyusunan RKPDesa, Pemerintah Desa harus melibatkan semua unsur penting yang ada dalam masyarakat seperti lembaga desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok miskin, kelompok disabilitas dan lain-lain. Dengan demikian diharapkan RKPDesa dapat menampung aspirasi dari semua kelompok maupun golongan dan masuk menjadi program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun kedepan. Oleh karena itu agar program dan kegiatan di desa dapat dilaksanakan secara optimal maka penyusunan RKP Desa harus dilaksanakan tepat waktu sehingga proses penyusunan APBDesa juga dapat dilaksanakan tepat waktu.

Yang dimaksud RKP Desa yang disusun tepat waktu adalah ditetapkan selambat - lambatnya tanggal 30 September.

RKPDesa yang sesuai aturan adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Adanya berita acara perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa;

- b. Adanya tim penyusun RKP Desa (SK Kepala Desa);
- c. Adanya pencermatan pagu indikatif Desa, penyesuaian program/kegiatan masuk ke Desa, dan dokumen RPJM Desa (Rekomendasi Camat)
- d. Adanya rancangan RKP Desa;
- e. Adanya penetapan RKP Desa (peraturan desa tentang RKPDesa);
- f. pengajuan Daftar Usulan RKP Desa.

Rumus penghitungan adalah jumlah desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu dan sesuai aturan dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel. 5
Persentase desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan (%)
Tahun 2018 – 2023 (Triwulan I)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa yang menetapkan RKPDesa	56	117	205	256	266	266
Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
Persentase	21,5	43,98	77,07	96,24	100	100

Sumber data : Dinpermades 2023

Dilihat dari tabel diatas bahwa persentase desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu dan sesuai aturan sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sudah 100% data masih sama dengan Triwulan IV tahun 2022.

Tabel. 5.1
Rekap Desa yang menyelesaikan penyusunan RPKDes
tepat waktu dan sesuai aturan dan yang Terlambat
Tahun 2023 (Triwulan I)

No	Kecamatan	Jumlah Desa	RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan	RKPDes yang terlambat
1	Kecamatan Temanggung	6	6	0
2	Kecamatan Tlogomulyo	12	12	0
3	Kecamatan Kranggan	12	12	0
4	Kecamatan Tembarak	13	13	0
5	Kecamatan selopampang	12	12	0
6	Kecamatan Pringsurat	14	14	0
7	Kecamatan Kaloran	14	14	0
8	Kecamatan Parakan	14	14	0
9	Kecamatan Bansari	13	13	0
10	Kecamatan Kledung	13	13	0
11	Kecamatan Kedu	14	14	0
12	Kecamatan Bulu	19	19	0
13	Kecamatan Kandangan	16	16	0
14	Kecamatan Candiroto	14	14	0
15	Kecamatan Bejen	14	14	0
16	Kecamatan Jumo	13	13	0
17	Kecamatan Gemawang	10	10	0
18	Kecamatan Tretep	11	11	0
19	Kecamatan Wonobojo	13	13	0
20	Kecamatan Ngadirejo	19	19	0
	JUMLAH	266	266	0

Sumber data : Dinpermades 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa desa yang menetapkan RKPDesa tepat waktu dan sesuai aturan baru masih 100% masih sama dengan data Triwulan IV tahun 2022 sedangkan untuk tahun 2023 ini penetapan RKPDes dilakukan paling lambat bulan September.

7. Persentase desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa setelah [RKP Desa](#) ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APB Desa. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam [RKP Desa](#) dijadikan pedoman dalam proses penganggarannya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Rancangan APBDesa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APBDesa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

Yang dimaksud tepat waktu adalah ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember. APBDesa harus sudah ditetapkan pada bulan Desember tahun sebelumnya agar pelaksanaan kegiatannya sudah dapat dimulai pada bulan Januari tahun berjalan.

Yang dimaksud APBDesa yang sesuai aturan adalah apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Tersusunnya usulan anggaran kegiatan untuk disampaikan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKPDes yang telah ditetapkan;
- b. Tersusunnya rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa (RAPB Desa) oleh Sekretaris Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa;
- c. Terlaksanakannya pembahasan rancangan peraturan desa tentang APBDesa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Kesepakatan hasil pembahasan paling lambat **bulan 31 Desember**;

- d. Rancangan Peraturan Desa tersebut selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
- e. Bupati menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa. Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya;

Rumus penghitungan adalah jumlah desa yang menetapkan APB Desa tepat waktu dan sesuai aturan dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel. 6
Persentase desa yang menyelesaikan penyusunan APB Desa tepat waktu dan sesuai aturan Tahun 2018 – 2023 (Triwulan I)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa yang menetapkan APBDesa	62	228	228	266	266	266
Jumlah desa	266	266	266	266	266	266
Persentase	23,7	85,71	85,71	100	100	100

Sumber data : Dinpermades 2023

Dilihat dari tabel diatas bahwa persentase desa yang menetapkan APBDesa tepat waktu dan sesuai aturan masih sama dengan data Triwulan IV tahun 2022 karena penetapan APBDes Tahun 2023 ditetapkan sebelum tanggal 31 Desember.

Tabel. 6.1
Rekap Desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan dan yang Terlambat Tahun 2023(Triwulan I)

No	Kecamatan	Jumlah Desa	APBDes tepat waktu dan sesuai aturan	APBDes yang terlambat	%
1	Kecamatan Temanggung	6	6	0	0
2	Kecamatan Tlogomulyo	12	12	0	0
3	Kecamatan Kranggan	12	12	0	0
4	Kecamatan Tembarak	13	13	0	0
5	Kecamatan selopampang	12	12	0	0
6	Kecamatan Pringsurat	14	14	0	0
7	Kecamatan Kaloran	14	14	0	0
8	Kecamatan Parakan	14	14	0	0
9	Kecamatan Bansari	13	13	0	0
10	Kecamatan Kledung	13	13	0	0
11	Kecamatan Kedu	14	14	0	0
12	Kecamatan Bulu	19	19	0	0
13	Kecamatan Kandangan	16	16	0	0
14	Kecamatan Candiroto	14	14	0	0
15	Kecamatan Bejen	14	14	0	0
16	Kecamatan Jumo	13	13	0	0
17	Kecamatan Gemawang	10	10	0	0
18	Kecamatan Tretep	11	11	0	0
19	Kecamatan Wonobojo	13	13	0	0
20	Kecamatan Ngadirejo	19	19	0	0
	JUMLAH	266	266	0	0

Sumber data : Dinpermades 2023

Data capaian Triwulan I tahun 2023 persentase desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu masih sama dengan data Triwulan IV tahun 2022.

8. **Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan.**

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Definisi Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APB Desa, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Siskeudes adalah sebuah aplikasi pengelolaan keuangan desa yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bekerjasama dengan BPKP Republik Indonesia.

Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan dalam APB Desa. Pencairan dana dalam rekening kas Desa ditandatangani oleh kepala Desa dan Bendahara Desa. Ada 5 siklus **Pengelolaan Keuangan Desa** sebagai berikut:

a. Perencanaan

Perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota. Rekening kas Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dengan

spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan. Dalam kondisi Desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya, rekening kas Desa dibuka di wilayah terdekat.

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendahaan. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan pengeluaran dalam buku kas umum (BKU) yang ditutup setiap akhir bulan. Dalam penatausahaan Keuangan Desa diwajibkan membuat Buku Pembantu Kas Umum yang terdiri dari :

- Buku pembantu bank merupakan buku catatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas Desa.
- Buku pembantu pajak merupakan buku catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak, dan
- Buku pembantu panjar merupakan catatan pemberian dan pertanggungjawaban uang panjar.

d. Pelaporan

Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksana APBDes semester pertama kepada Bupati/Walikota melalui camat, yang terdiri dari laporan pelaksanaan APBDes dan laporan realisasi kegiatan. Kepala Desa menyusun laporan dengan cara menggabungkan seluruh laporan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan.

e. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan, laporan realisasi dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Selain laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Walikota, pemerintah Desa berkewajiban menginformasikan kepada masyarakat melalui media informasi.

Adapun informasi kepada masyarakat paling sedikit harus memuat laporan realisasi APBDesa, laporan realisasi kegiatan,

laporan kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksanakan, laporan sisa anggaran dan alamat pengaduan.

Untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang baik dibutuhkan sebuah sistem keuangan yang dapat membantu kinerja keuangan desa sehingga dapat berjalan sesuai dengan aturan. Untuk itu Kabupaten Temanggung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menjalin kerjasama dengan Badan Pemeriksa Pembangunan dan Keuangan Provinsi Jawa Tengah untuk menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diterapkan mulai Tahun 2018. Penerapan Siskeudes ini dilaksanakan di 266 desa se Kabupaten Temanggung.

Siskeudes merupakan sebuah aplikasi untuk menjalankan tata kelola keuangan desa mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Diharapkan dengan penggunaan aplikasi ini akan mempermudah kinerja perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa dan sekaligus akan lebih tertib dan mudah dipertanggungjawabkan.

Rumus penghitungan adalah jumlah desa yang menerapkan siskeudes dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel. 7
Persentase desa yang menerapkan pengelolaan
keuangan desa yang sesuai aturan (%)
Tahun 2018 – 2023 (Triwulan I)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa yang menerapkan siskeudes	266	266	266	266	266	266
Jumlah desa	266	266	266	266	266	266
Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Dinpermades 2023

Dilihat dari tabel diatas bahwa persentase desa yang menerapkan siskeudes sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sudah 100%, hal tersebut didukung dengan adanya pengadaan server dan aplikasi yang sudah digunakan untuk mendukung penerapan pengelolaan keuangan desa secara online.

Tabel. 7.1
Jumlah Desa yang menerapkan Siskeudes

No	Kecamatan	Jumlah
1	Kecamatan Temanggung	6
2	Kecamatan Tlogomulyo	12
3	Kecamatan Kranggan	12
4	Kecamatan Tembarak	13
5	Kecamatan Selopampang	12
6	Kecamatan Pringsurat	14
7	Kecamatan Kaloran	14
8	Kecamatan Parakan	14
9	Kecamatan Bansari	13
10	Kecamatan Kledung	13
11	Kecamatan Kedu	14
12	Kecamatan Bulu	19
13	Kecamatan Kandangan	16
14	Kecamatan Candiroto	14
15	Kecamatan Bejen	14
16	Kecamatan Jumo	13
17	Kecamatan Gemawang	10
18	Kecamatan Tretep	11
19	Kecamatan Wonobojo	13
20	Kecamatan Ngadirejo	19
	JUMLAH	266

Sumber data : Dinpermades 2023

Data 10 desa terbaik dalam tata kelola keuangan desa periode tahun 2021-2022 (Semester I):

1. Desa Nampirejo Kec. Temanggung
2. Desa Traji Kec. Parakan
3. Desa pesantren Kec. Wonobojo
4. Desa Selosabrang Kec. Bejen
5. Desa Tretep Kec. Tretep
6. Desa Sucen Kec. Gemawang
7. Desa Pandemulyo Kec. Bulu
8. Desa Sukomarto Kec. Jumo
9. Desa Canggal kec. Kledung
10. Desa Ngadirejo kec Ngadirejo

9. Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu dan sesuai aturan

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangan cukup luas kepada Desa untuk membangun sarana dan prasarana desa sesuai kebutuhan masyarakat Desa. Dengan demikian, pemerintah desa, dan masyarakat perlu memikirkan

manfaat dan keberlanjutan dari pembangunan sarana dan prasarana desa.

Untuk memperoleh manfaat dari sarana dan prasarana, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan pemerintah desa dan masyarakat dalam membangun desa.

1. Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dipilih dengan baik oleh masyarakat secara umum dan terbuka.

- Penentuan pembangunan prasarana dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah desa.
- Penentuan pilihan pembangunan prasarana desa didasarkan pada besarnya manfaat untuk masyarakat desa.
- Prasarana yang dibangun akan membantu seluruh masyarakat desa, terutama masyarakat miskin.
- Prasarana yang dibangun harus bermanfaat langsung kepada pengembangan ekonomi desa, peningkatan kualitas hidup, penambahan kegiatan pendidikan, dan peningkatan kesehatan masyarakat.

2. Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dibangun dengan Baik.

- Jika masyarakat berkeinginan membangun dengan baik, mempunyai keterampilan membangun, sering dilatih dan dibimbing, dan selalu diberikan umpan balik yang tepat, hasil pembangunan prasarana akan baik. Jika masyarakat tidak mampu, tidak berkeinginan membangun dengan baik, dan tidak diberikan umpan balik, manfaatnya berkurang.
- Prasarana yang dibangun dengan memperhatikan kualitas fisik yang baik akan berfungsi dan bertahan lama sehingga bermanfaat dalam jangka panjang. Jika dibangun dengan kualitas kurang baik, prasarana kurang berfungsi dan tidak akan bertahan.

3. Manfaat akan lebih banyak jika prasarana dipelihara dengan baik.

- Desa mempunyai tim pemeliharaan yang aktif melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana desa.

- Dana pemeliharaan cukup tersedia, yang bersumber dari dana desa, iuran warga swakelola, atau sumbangan masyarakat.
- Dana pemeliharaan cukup tersedia, yang bersumber dari Dana Desa, iuran warga swakelola, atau sumbangan masyarakat.
- Masyarakat desa harus terlibat dalam pemeliharaan sarana dan prasarana desa supaya kualitas lebih baik.

Semua kegiatan yang menyangkut sarana dan prasarana harus masuk terlebih dahulu dalam APBDesa sebelum kegiatan dimaksud dapat dilaksanakan. Kegiatan sarana prasarana ini masuk dalam bidang pembangunan dari empat bidang yang ada dalam APBDesa. Oleh karena kegiatan ini masuk dalam APBDesa maka pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dilakukan dalam satu tahun anggaran.

Yang dimaksud tepat waktu adalah diselesaikan paling lambat tanggal 31 Desember.

Rumus Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu adalah jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%.

Tabel. 8

Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu (%) Tahun 2018 – 2023 (Triwulan I)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu	217	266	266	256	266	266
Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
Persentase	81,8	100	100	96,24	100	100

Sumber data : Dinpermades 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 masihsama dengan data Triwulan IV Tahun 2022, hal tersebut karena penyelesaian semua kegiatan di akhir tahun.

Tabel. 8.1
Jumlah Desa yang menyelesaikan semua kegiatan
di APBDes tepat waktu

No	Kecamatan	Jumlah
1	Kecamatan Temanggung	6
2	Kecamatan Tlogomulyo	12
3	Kecamatan Kranggan	12
4	Kecamatan Tembarak	13
5	Kecamatan selopampang	12
6	Kecamatan Pringsurat	14
7	Kecamatan Kaloran	14
8	Kecamatan Parakan	14
9	Kecamatan Bansari	13
10	Kecamatan Kledung	13
11	Kecamatan Kedu	14
12	Kecamatan Bulu	19
13	Kecamatan Kandangan	16
14	Kecamatan Candiroto	14
15	Kecamatan Bejen	14
16	Kecamatan Jumo	13
17	Kecamatan Gemawang	10
18	Kecamatan Tretep	11
19	Kecamatan Wonobojo	13
20	Kecamatan Ngadirejo	19
	JUMLAH	266

Sumber data : Dinpermades 2023

10. Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wewenang mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya sendiri. Dalam mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri tersebut, desa diurus oleh sekelompok orang yang diberi wewenang untuk itu, yang disebut sebagai pemerintah desa. Pemerintah desa bertanggungjawab memenuhi kebutuhan masyarakat desa dengan berpedoman pada asas pemerintahan yang baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU No.6 tahun 2014, desa berkedudukan dalam wilayah kabupaten/kota. Administrasi pemerintah desa memegang peranan yang penting karena keterlibatannya yang besar pada proses pembangunan pemerintah dan Tertib administrasi sangat didambakan oleh instansi termasuk pemerintahan desa, karena pekerjaan dalam suatu pemerintahan membutuhkan ketepatan waktu, kejelasan kerja, keterbukaan dan kesederhanaan agar mereka yang dilayani menjadi puas.

Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kegiatan administrasi desa harus dilakukan secara tertib demi terselenggaranya administrasi pemerintahan desa yang baik. Tertib administrasi desa berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Administrasi desa memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanpa adanya administrasi desa, pemerintah desa tidak dapat melakukan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa, sebab administrasi desa merupakan instrumen pemenuhan kebutuhan masyarakat desa. Dengan melakukan tertib administrasi desa, pemerintah desa berarti telah mampu menyediakan sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Telah menjadi kewajiban bagi pemerintah desa melaksanakan tertib administrasi sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Pada dasarnya administrasi terdiri dari 5 (lima) macam yaitu:

1. administrasi umum (daftar hadir, agenda surat masuk/keluar, Ekspedisi, data data pemerintah desa, notulen rapat)
2. administrasi keuangan (Buku APBDes, Buku Kas Umum, Buku Pajak, Buku Bank, Buku bantu penerimaan, dan Buku bantu pengeluaran)
3. administrasi pembangunan (LKPJ, Buku kegiatan pemerintah desa, Buku Hasil – hasil pembangunan)
4. administrasi penduduk (register penduduk, jumlah penduduk sementara, jumlah penduduk mutasi/ jumlah penduduk datang dan lahir mati)
5. administrasi lainnya (Buku data aset desa, data kelembagaan, data non kelembagaan)

Agar tujuan untuk menertibkan administrasi desa benar-benar dapat tercapai seperti yang yang diharapkan, maka yang harus diperhatikan adalah adanya kepala desa dan perangkat

desa yang memiliki kapasitas yang memadai atau optimal, sehingga dalam merealisasikan penyelenggaraan tertib administrasi desa tidak terlalu bergantung pada perintah ataupun bantuan dari pemerintah kecamatan atau pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan tertib administrasi adalah mengerjakan buku – buku administrasi sesuai dengan tupoksi masing masing perangkat desa dan menyimpan semua dokumen tersebut. Rumus perhitungan adalah jumlah desa yang tertib administrasi dibagi jumlah desa dikali 100%.

Dalam penyajian data terkait persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu yaitu terkait laporan administrasi pelaksanaan pembangunan yang ada di desa seperti LPPD dan LKPD.

Adapun Persentase desa yang tertib administrasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 13.
Persentase laporan administrasi desa yang tepat waktu
Tahun 2018 – 2023 (Triwulan I)

No	Kondisi Desa	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah desa yang tertib administrasi	213	234	264	266	266	266
2	Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
	Persentase	80	87,97	99,24	100	100	100

Sumber data : Dinpermades 2023

Data capaian sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 masih sama dengan data Triwulan IV tahun 2022 karena belum ada Laporan LPPD dan LKPD yang telah dikirim oleh desa karena pelaporan dilakukan pada akhir tahun.

Tabel. 13.1
Data desa Tertib Administrasi per Kecamatan
Tahun 2023 (Triwulan I)

No	Kecamatan	Jumlah kepala desa	Yang tertib	Yang tidak tertib	%
1	Kecamatan Temanggung	6	6	0	0
2	Kecamatan Tlogomulyo	12	12	0	0
3	Kecamatan Kranggan	12	12	0	0
4	Kecamatan Tembarak	13	13	0	0
5	Kecamatan selopampang	12	12	0	0
6	Kecamatan Pringsurat	14	14	0	0
7	Kecamatan Kaloran	14	14	0	0
8	Kecamatan Parakan	14	14	0	0
9	Kecamatan Bansari	13	13	0	0
10	Kecamatan Kledung	13	13	0	0
11	Kecamatan Kedu	14	14	0	0
12	Kecamatan Bulu	19	19	0	0
13	Kecamatan Kandangan	16	16	0	0
14	Kecamatan Candiroto	14	14	0	0
15	Kecamatan Bejen	14	14	0	0
16	Kecamatan Jumo	13	13	0	0
17	Kecamatan Gemawang	10	10	0	0
18	Kecamatan Tretep	11	11	0	0
19	Kecamatan Wonobojo	13	13	0	0
20	Kecamatan Ngadirejo	19	19	0	0
	JUMLAH	266	266	0	0

Sumber data : Dinpermades 2023

11. Persentase pelanggaran disiplin kepala desa

Berdasarkan UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain, dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa.

Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten).

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadai dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.

Perangkat desa meliputi:

- Sekretaris Desa
- Kaur keuangan
- Kaur Umum
- Kaur Perencanaan
- Kasi Kesra
- Kasi Pelayanan
- Kasi pemerintahan
- Kepala Dusun

Ruang lingkup dan pengertian disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Disiplin adalah perasaan taat dan patuh yang telah disanggupi ataupun telah dinyatakan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Selanjutnya pengertian Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan Kepala Desa dan Perangkat Desa baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Dengan pengertian diatas maka batasan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah adanya perbuatan ketidak patuhan terhadap **kewajiban dan larangan** yang dilakukan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Kewajiban dan larangan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam peraturan Bupati yang mengatur tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dalam ketentuan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa. Peraturan ini memberikan batasan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa baik dalam jam kerja maupun diluar jam kerja dengan maksud agar kinerja Pemerintah Desa dapat terjaga dengan baik.

Implementasi karakter disiplin pada Kepala desa dan perangkat desa dalam menjalankan tugas dan fungsi dapat diukur dengan menggunakan indikator tertib dengan aturan-aturan yang ada, melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab, melakukan sesuatu tanpa ada paksaan dari siapapun, dan taat untuk menjalankan tugas dan fungsi.

Rumus perhitungan adalah jumlah kepala desa dan perangkat desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah kepala desa dan perangkat desa dikali 100%.

Adapun Jumlah aparatur desa yang melanggar disiplin dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 14.
Persentase pelanggaran disiplin kepala desa
Tahun 2018 – 2023 (Triwulan I)

No	Kondisi Desa	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	jumlah kepala desa yang melanggar disiplin	n.a	36	18	0	0	1
2	jumlah kepala desa	266	266	266	266	266	266
	Persentase	0	13,53	6,77	0	0	0,37

Sumber data : Dinpermades 2023

Persentase pelanggaran disiplin Kepala Desa dari Tahun 2023 sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 menunjukkan ada 1 Kepala Desa yang melanggar disiplin yang dikasuskan sampai ke Ranah Hukum, Kepala Desa Ngaimulyo Kecamatan Kedu terjerat kasus pada kegiatan Tahun 2022 dan keputusan vonis jatuh pada tahun ini.

Tabel. 14.1
Persebaran angka pelanggaran disiplin per Kecamatan
Tahun 2023 (Triwulan I)

No	Kecamatan	Jumlah kepala desa	Yang disiplin	Yang melanggar disiplin
1	Kecamatan Temanggung	6	6	-
2	Kecamatan Tlogomulyo	12	12	-
3	Kecamatan Kranggan	12	12	-
4	Kecamatan Tembarak	13	13	-
5	Kecamatan selopampang	12	12	-
6	Kecamatan Pringsurat	14	14	-
7	Kecamatan Kaloran	14	14	-
8	Kecamatan Parakan	14	14	-
9	Kecamatan Bansari	13	13	-
10	Kecamatan Kledung	13	13	-
11	Kecamatan Kedu	14	13	1
12	Kecamatan Bulu	19	19	-
13	Kecamatan Kandangan	16	16	-
14	Kecamatan Candirotto	14	14	-
15	Kecamatan Bejen	14	14	-
16	Kecamatan Jumo	13	13	-
17	Kecamatan Gemawang	10	10	-
18	Kecamatan Tretep	11	11	-
19	Kecamatan Wonobojo	13	13	-
20	Kecamatan Ngadirejo	19	19	-

Sumber data : Dinpermades 2023

12. Persentase desa yang tertib pengelolaan aset

Pengertian aset desa sama maknanya dengan konsep kekayaan Aset desa sama pengertiannya dengan kekayaan desa sebagai mana disebut dalam berbagai regulasi pemerintah yang mengatur tentang desa, meskipun tidak terbatas pada kekayaan yang bersifat fisik.¹³ Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

menyebutkan bahwa “Aset Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Dari beberapa pengertian diatas bahwa aset desa merupakan segala sesuatu yang dimiliki oleh desa, dikelola oleh desa, dan digunakan untuk desa demi yang tercapainya tujuan Negara yaitu menyejahterakan masyarakat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri no 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa dalam pasal 2 menyebutkan bahwa jenis jenis aset desa terdiri atas : Kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis, kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan/atau diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang, hasil kerja sama desa dan, kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat desa.¹⁵ Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa. Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan kekayaan milik Desa, kepala desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa lainnya. Pengelolaan kekayaan milik desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kekayaan milik desa.

Tanah Kas Desa adalah tanah-tanah yang dikuasai desa baik yang berasal dari pemerintah tingkat atasnya maupun yang diperoleh melalui swadaya masyarakat desa untuk dikelola yang hasilnya merupakan sumber pendapatan asli desa dan dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa. Tanah Kas desa terdiri dari Tanah Bondho Deso dan Tanah Bengkok. Tanah Kas Desa berfungsi sebagai sumber pendapatan desa untuk menyelenggarakan pemerintahan desa, sedangkan Tanah Bengkok atau hak keuntungan jabatan berfungsi sebagai tambahan tunjangan bagi Kepala Desa dan

perangkat desanya. Tanah Kas Desa merupakan salah satu sumber pendapatan asli desa, Konsekuensi bagi desa yang berhak menyelenggarakan rumah tangganya, baik perencanaan, pelaksanaan maupun pembiayaan ditentukan sendiri oleh desa yang bersangkutan, sedangkan pemerintah yang ada di atasnya hanya melakukan pembinaan dan pengawasan saja.

Rumus perhitungan adalah jumlah desa yang tertib mengelola aset dibagi jumlah desa dikali 100%.

Adapun Desa yang administrasi pengelolaan asetnya benar dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 15.
Persentase desa yang tertib mengelola aset desa
Tahun 2018 – 2023 (Triwulan I)

No	Kondisi Desa	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah desa yang tertib mengelola aset	191	212	264	266	266	266
2	Jumlah Desa	266	266	266	266	266	266
	Persentase	71,80	79,69	99,24	100	100	100

Sumber data : Dinpermades 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa data Triwulan I Tahun 2023 belum ada laporan in put aplikasi SIPADES secara online, dalam pengelolaan asset belum semua pengelola memahami alur tentang pencatatan, ketidaklancaran dalam pembuatan laporan akhir tahun dan laporan asset belum rutin dilakukan tiap bulan, namun telah dilakukan upaya adanya pendampingan dan sosialisasi pada saat in put aplikasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan asset dan pelaporannya.

13. Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), disebutkan bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. LKD

dapat dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa dan Masyarakat dengan memperhatikan sendiri sosial budaya masyarakat. LKD terdiri dari Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), TP.PKK, Karang Taruna, LPMD, Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Lembaga Kemasyarakatan desa lainnya. Maksud dibentuknya LKD adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dalam rangka membantu Pemerintah Desa menyelenggarakan Pemerintahan Desa melaksanakan pembangunan desa, melakukan pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Kriteria LKD yang aktif adalah :

- Kepengurusan (SK Kepala Desa)
- Administrasi (Buku kegiatan, Buku kas, struktur organisasi, papan nama, dan stempel)
- ketersediaan anggaran (dukungan dana dari APBDes)

Rumus penghitungan didapat dari jumlah LKD aktif dibagi jumlah LKD dikali 100%.

Data Lembaga Kemasyarakatan Desa dari tahun 2017 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 12
Persentase lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan yang aktif (%)
Tahun 2018 - 2023 (Triwulan I)

No	Lembaga Kemasyarakatan desa/kel	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	jumlah LKD aktif				8.639	8.639	8.639
	Rukun Tetangga (RT) Desa	n.a	5.178	5.201	5.201	5.201	5.201
	Rukun Warga (RW) Desa	n.a	1.348	1.350	1.350	1.350	1.350
	TP. PKK	310	310	310	310	310	310
	LPMD/K	289	289	289	289	289	289
	Posyandu	n.a	289	578	1489	1489	1489
2	jumlah LKD					8.639	8.639
	Rukun Tetangga (RT) Desa	n.a	5.178	5.201	5.201	5.201	5.201
	Rukun Warga (RW) Desa	n.a	1.348	1.350	1.350	1.350	1.350
	TP. PKK	310	310	310	310	310	310
	LPMD/K	289	289	289	289	289	289
	Posyandu	n.a	289	578	1489	1489	1489
3	Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Dinpermades 2023

Data capaian sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 semua LKD aktif dan ada tambahan data Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa. Adanya kenaikan data yang posyandu yang cukup signifikan pada tahun 2019 dibandingkan dengan data tahun 2020 yaitu pada tahun 2019 jumlah posyandu berdasarkan jumlah Desa/Kelurahan sedangkan pada tahun 2020 keatas data yang ditampilkan adalah jumlah kelompok posyandu yang ada di Desa/Kelurahan.

Tabel. 12.1
Rekap Data TP.PKK DESA/KEL/KEC/KAB
Tahun 2023 (Triwulan I)

No	Lokasi	Jumlah	PKK aktif	PKK Tdk Aktif
1	Kabupaten Temanggung	1	1	-
2	Kecamatan	20	20	-
3	Desa/kel Kec Temanggung	25	25	-
4	Desa Kec. Tlogomulyo	12	12	-
5	Desa/kel Kec Kranggan	13	13	-
6	Desa Kec Tembarak	13	13	-
7	Desa Kec selopampang	12	12	-
8	Desa Kec Pringsurat	14	14	-
9	Desa Kec Kaloran	14	14	-
10	Desa/kel Kec Parakan	16	16	-
11	Desa Kec Bansari	13	13	-
12	Desa Kec Kledung	13	13	-
13	Desa Kec Kedu	14	14	-
14	Desa Kec Bulu	19	19	-
15	Desa Kec Kandangan	16	16	-
16	Desa Kec Candiroto	14	14	-
17	Desa Kec Bejen	14	14	-
18	Desa Kec Jumo	13	13	-
19	Desa Kec Gemawang	10	10	-
20	Desa Kec Tretep	11	11	-
21	Desa Kec Wonoboyo	13	13	-
22	Desa/kel Kec Ngadirejo	20	20	-
	JUMLAH	310	310	-

Sumber data : Dinpermades 2023

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa Tim Penggerak PKK di tingkat Desa sejumlah 266 desa, Tim Penggerak PKK tingkat Kecamatan sejumlah 20 Kecamatan dan 1 Tim Penggerak PKK tingkat Kabupaten semua aktif, hal tersebut dikarenakan adanya pembinaan secara berjejang baik dari tingkat desa sampai dengan TP PKK tingkat Pusat.

Tabel. 12.2
Rekap Data RW dan RT di Tingkat Desa
Tahun 2023 (Triwulan I)

No	KECAMATAN	Jumlah RW	Jumlah RT	Keterangan
1	Temanggung	20	87	-
2	Tlogomulyo	47	156	-
3	Kranggan	97	358	-
4	Tembarak	67	224	-
5	Selopampang	46	128	-
6	Pringsurat	113	364	-
7	Kaloran	111	416	-
8	Parakan	50	239	-
9	Bansari	46	189	-
10	Kledung	38	160	-
11	Kedu	108	424	-
12	Bulu	84	302	-
13	Kandangan	101	378	-
14	Candiroto	74	275	-
15	Bejen	51	170	-
16	Jumo	60	273	-
17	Gemawang	62	312	-
18	Tretep	25	141	-
19	Wonobojo	53	209	-
20	Ngadirejo	97	396	-
	JUMLAH	1.350	5.201	-

Sumber data : Dinpermades 2023

Dilihat dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah RW ada 1.350 dan jumlah RT ada 5.201 yang tersebar di desa-desa yang ada di kabupaten Temanggung, data per tahun 2022.

14. Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif

Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa.

Tujuan Pendirian BUMDes

(Perda Kab. Temanggung no 3 tahun 2016 pasal 6)

1. Meningkatkan perekonomian desa;
2. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
6. Membuka lapangan kerja;
7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

Rumus perhitungan adalah jumlah BUMDes yang aktif dibagi jumlah BUMDes dikali 100%

Adapun persentase BUMDes yang aktif di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel. 9
Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif
Tahun 2018-2023 (Triwulan I)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah BUMDes yang aktif	154	163	227	227	257	257
Jumlah BUMDes	154	266	266	266	266	266
Persentase BUMDes yang aktif	100	61,28	85,34	85,34	96,62	96,62

Sumber data : Dinpermades 2023

Persentase BUMDes yang aktif Triwulan I Tahun 2023 Dengan klasifikasi tingkat Dasar ada 61 desa, tingkat Tumbuh 156 desa, tingkat Berkembang 37 desa dan Tingkat Maju 3 desa.

Tabel. 9.1
Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif
Se Kabupaten Temanggung Tahun 2023 (Triwulan I)

No	Kecamatan	Jumlah BUMDes
1	Kecamatan Temanggung	6
2	Kecamatan Tlogomulyo	11
3	Kecamatan Kranggan	12
4	Kecamatan Tembarak	10
5	Kecamatan selopampang	12
6	Kecamatan Pringsurat	12
7	Kecamatan Kaloran	10
8	Kecamatan Parakan	14
9	Kecamatan Bansari	12
10	Kecamatan Kledung	9
11	Kecamatan Kedu	9
12	Kecamatan Bulu	18
13	Kecamatan Kandangan	16
14	Kecamatan Candiroto	13
15	Kecamatan Bejen	10
16	Kecamatan Jumo	12
17	Kecamatan Gemawang	9
18	Kecamatan Tretep	11
19	Kecamatan Wonobojo	9
20	Kecamatan Ngadirejo	12
	JUMLAH	257

Sumber data : Dinpermades 2023

15. Persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif

Ekonomi Indonesia pada dasarnya merupakan ekonomi yang berbasis mekanisme pasar dengan intervensi pemerintah yang memainkan peranan penting didalamnya. UUD 1945 Bab XIV, Pasal 33, memandatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sumber daya alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan

kesatuan ekonomi nasional. Maka, demokrasi ekonomi Indonesia akan ditopang oleh 3 pelaku utama yaitu BUMN/D (Badan Usaha Milik Negara/Daerah), Koperasi dan Swasta.

UU 6/2014 menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarus-utamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Lebih lanjut, Pasal 87 UU tersebut menyatakan bahwa BUM Desa dapat dibentuk oleh Pemerintah Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Di kabupaten Temanggung lembaga ekonomi masyarakat desa yang ada antara lain BUMDes, UP2K-PKK, UED-SP, Pasar Desa, dan CPPD.

Definisi dari masing-masing lembaga ekonomi tersebut antara lain:

➤ **UP2K-PKK**

UP2K-PKK merupakan segala kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh keluarga, baik, secara perorangan maupun kelompok, yang modalnya bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pemerintah, bantuan luar negeri, swasta, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Memperkuat kelompok-kelompok PKK dalam mengelola dan menumbuh-kembangkan usaha ekonomi untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Tujuan

Tujuan Tercapainya peningkatan usaha ekonomi keluarga melalui usaha kelompok/ perorangan UP2K-PKK sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga.

➤ **UED-SP (Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam)**

Usaha Ekonomi Desa Simpan-Pinjam (UED-SP) menurut Permendagri No.06 Tahun 1998 adalah suatu lembaga yang bergerak di bidang simpan pinjam dan merupakan milik masyarakat desa/kelurahan yang diusahakan serta dikelola oleh masyarakat desa/kelurahan.

Tujuan di bentuknya UED Tujuan di bentuknya UED SP adalah

1. Mendorong kegiatan perekonomian masyarakat Desa/ Kelurahan.
2. Meningkatkan kreatifitas berwirausaha anggota masyarakat desa/kelurahan yang berpenghasilan rendah.
3. Mendorong usaha sector informal untuk penerapan tenaga kerja bagi masyarakat Desa/Kelurahan.
4. Menghindari anggota masyarakat Desa/Kelurahan dari pengaruh pelepas uang dengan bunga tinggi yang merugikan masyarakat.
5. Meningkatkan peranan masyarakat Desa/Kelurahan dalam rangka menampung dan mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintah atau sumber-sumber lain yang sah.
6. Memelihara dan meningkatkan adat kebiasaan gotong royong untuk gemar menabung secara tertib, teratur, bermanfaat dan berkelanjutan.

➤ **Pasar Desa**

Pasar Desa adalah **pasar tradisional** yang berkedudukan di desa dan dikelola serta dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa (Permendagri 42/2007).

Pasar desa adalah pasar tradisional yang berkedudukan dan berlokasi di desa, menempati lahan milik pemerintah desa (lahan kas desa) maupun masyarakat (wakaf), dikelola dan dikembangkan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam

pembiayaannya (Pedoman Pelaksanaan Permendagri No. 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa).

Peran Pemerintah Desa:

1. Mengorganisir pengelolaan pasar desa untuk penguatan kelembagaan pasar desa.
2. Melakukan tindakan-tindakan investasi untuk meningkatkan hasil, melalui penyusunan perencanaan pengelolaan aset dan keuangan desa secara akuntabel yg berorientasi pd pertumbuhan ekonomi desa dan pelayanan kepada masyarakat.

Peran Pemerintah Daerah:

1. Menetapkan kebijakan/regulasi dan alokasi anggaran utk mendukung perkembangan pasar desa dan pertumbuhan ekonomi desa;
2. Meningkatkan kapasitas sistem pengelolaan dan sdm pengelola pasar desa;

Memonitor dan mengevaluasi perkembangan pasar desa sebagai bahan dalam menyusun kebijakan pengembangan pasar desa di tingkat regional.

➤ **CPPD**

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai oleh pemerintah desa untuk konsumsi masyarakat dan untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan di tingkat masyarakat. Adapun pengertian secara lebih luas antara lain :

- a. CPPD merupakan lembaga yang menyediakan pangan yang dikuasai dan dikelola untuk pemerintah desa untuk konsumsi masyarakat, bahan baku/industri untuk menghadapi keadaan darurat, rawan pangan dan gejolak harga pangan di masyarakat.
- b. Secara kelembagaan, cadangan pangan pemerintah telah ada seperti Bulog untuk rasional, Divisi Regional untuk Provinsi dan Sub Divisi Regional untuk Kabupaten. Tetapi untuk tingkatan pemerintahan desa secara kelembagaan belum jelas, dalam arti keberadaan dan eksistensi lumbung desa sebagai lumbung pangan yang dikelola oleh pemerintah desa belum secara optimal dapat menjalankan

fungsi ketahanan pangan di desa sehingga dalam bergantinya kebijakan yang ada tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan desa di bidang pangan. Berkaitan dengan kondisi tersebut, perlu dikembangkan suatu konsepsi baru dalam penanganan cadangan pangan yang melekat pada fungsi utama pemerintahan desa, dengan pertimbangan: a. Mayoritas penduduk berada di desa, b. Pemerintah desa yang mengetahui kebutuhan pangan di wilayahnya termasuk jumlah orang miskin yang harus dibantu/ditangani.

- c. Sementara pengertian makanan itu sendiri adalah Pangan adalah segala sesuatu yang dimaksudkan dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perikanan, perikanan, dan udara, baik yang diolah dan tidak dapat diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan / atau pembuatan makanan atau minuman.
- d. Struktur keanggotaan CPPD terdiri dari unsur-unsur kelembagaan terkait di desa antarlain : Kades, BPD, Unit usaha pangan desa dan lembaga kemasyarakatan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

Kegiatan dan pengembangan CPPD meliputi : Perencanaan, Pengadaan dan penyaluran.

Rumus penghitungan adalah Jumlah Lembaga Ekonomi Masyarakat desa yang aktif dibagi jumlah Lembaga Ekonomi masyarakat desa dikali 100%.

Adapun persentase lembaga ekonomi masyarakat desa yang aktif di kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel. 10
Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa yang aktif (%)
Tahun 2018 – 2023 (Triwulan I)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah LEM desa yang aktif	109	118	118	118	118	118
- UP2K-PKK	21	30	30	30	30	30
- UED-SP	35	35	35	35	35	35
- Pasar Desa	24	24	24	24	24	24
- CPPD/Lumbung Desa	29	29	29	29	29	29
jumlah LEM desa	109	118	118	118	118	118
- UP2K-PKK	21	30	30	30	30	30
- UED-SP	35	35	35	35	35	35
- Pasar Desa	24	24	24	24	24	24
- CPPD	29	29	29	29	29	29
Persentase	100	100	100	100	100	100

Sumber data : Dinpermades 2023

Dari tabel diatas sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 data lembaga ekonomi masyarakat desa masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel. 10.1
Data Keberadaan alat TTG yang ada Tahun 2023

No	Kecamatan	Desa	Jenis Alat
1	Bulu	Bulu	1. Peralatan Pembuatan Abon Nangka
		Malangasari	2. Peralatan Pembuatan Keripik Ketela
2	Tembarak	Tembarak	3. Alat Pembuatan Ceriping Getuk Ketela
		Tawangasari	4. Alat Perontok Padi
		Krajan	5. Alat Pembuat ceriping
3	Pringsurat	Klepu	6. Pengolahan makanan
		Pagergunung	7. Peralatan keripik talas dan ketela
		Pringsurat	8. Peralatan peyek peron
4	Kaloran	Kwarakan	9. Pembuat ceriping/renggenek
5	Kandangan	Tlogopucang	10. Pembuat ceriping tela
		Samiranan	Peralatan pembuat sarang tawon madu
		Kembangasari	11. Peralatan pembuatan emping melinjo
6	Kedu	Danurejo	12. Peralatan pembuatan emping melinjo
		Candimulyo	13. Petani Bio energi (kel Sido Ngerdo)
		Kedu	14. Peralatan pangsit dan peyek
		Mojotengah	Peralatan pembuatan sirup jahe
7	Parakan	Sungsingsari	15. Peralatan makanan kecil dan rengginang
		Campursalam	16. Petani Bio Energi (kel Angulir Hasto)
8	Ngadirejo	Gondangwinangun	17. Alat Pembuat ceriping
		Ngaren	18. Alat pembuat ceriping singkong
		Campursari	19. Alat Pembuat ceriping
9	Jumo	Morobongo	20. Peralatan jamu tradisional
		Sukomarto	21. Peralatan pembuat kerupuk ikan
		Barang	22. Alat perajang tembakau
		Ketitang	23. Peralatan
		Jombor	24. Mesin jahit tas (Heri colnnection)
		Kertosari	25. Alat pemecah emping melinjo
		Gedongsari	26. Mesin pengolah opi (kel Mukti Widodo)
10	Tretep	Tlogo	27. Pembuatan kopi bubuk
11	Candiroto	Batursari	28. Peralatan mesin bubut
			29. Pembuat opak samiyer ketela
			30. Pengolahan makanan
			Peralatan pengolah kopi

12	Kranggan	Bantir	Penggilingan bubuk kopi
		Mento	31. Peralatan pembuatan kerupuk pati
13	Tlogomulyo	Bengkal	32. Peralatan ceriping getuk singkong
		Ngropoh	33. Alat Pemb makanan ringan (pangsit)
		Kramat	34. Alat Pemb makanan ringan dari durian
14	Selopampang	Klepu	35. Peralatan pemb gula aren
		Purwosari	36. Perlatan pemb ceriping ketela
		Gedegan	37. Kelompok Raliya (mesin gula semut)
		Langgeng	38. Alat perbengkelan
15	Bansari	Candisari	39. Alat pemecah Batu
		Tanjungsari	40. Pembuat wingko babat
16	Kledung	Ngaditirto	41. Pembuat Balok ketela pohon
		Selopampang	42. Peralatan Pembuatan ceriping puyur
17	Bejen	Gentingsari	43. Peralatan kripik tempe dan ketela
		Purborejo	44. Peralatan
18	Gemawang	Jambu	45. Bio energi (kel wijaya purborejo)
		Kwadungangunung	Bio energi (kel Berkah tani)
		Congkrang	46. Perlatan pembuatan ceriping
18	Gemawang	Lowungu	47. Peralatan
		Larangan luwok	48. Mesin jahit
		Jlegong	49. Pembuat ceriping ketela
		Karang seneng	50. Pembuat ceriping ketela
		Krempong	51. Pembuat ceriping pisang dan talas
18	Gemawang	Banaran	52. Mesin jahit
		Gemawang	53. Peralatan pembuat sapu ijuk
		Gemawang	54. Peralatan pembuat sapu ijuk
			55. Peralatan Pembuat ceriping talas

Sumber data : Dinpermades 2023

➤ Teknologi Tepat Guna

Selain lembaga ekonomi masyarakat desa yang disebutkan di desa ada lembaga kemasyarakatan yang juga mendukung peningkatan ekonomi di desa yaitu lembaga pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG).

Teknologi Tepat Guna adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.

Lembaga Pelayanan TTG terdiri atas:

- a. Posyantek yang berkedudukan di kecamatan; dan
- b. Posyantekdes yang berkedudukan di desa/kelurahan.

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disebut Posyantek adalah lembagakemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi danorientasi berbagai jenis TTG.

Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna Desa selanjutnya disebut Posyantekdes adalah lembaga kemasyarakatan di

desa/kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG.

Sasaran pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG meliputi:

- a. Masyarakat pengangur, putus sekolah, dan keluarga miskin;
- b. Masyarakat yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. Posyantek dan Wartek.

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Meningkatkan usaha ekonomi;
- b. Mengembangkan kewirasusahaan;
- c. Memberikan manfaat secara berkelanjutan; dan
- d. Sederhana.

Regulasi

- a. Inpres 3/2001 tentang penerapan dan pengembangan teknologi tepat guna.
- b. Permendagri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
- c. Pergub Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 10.2.

**Jumlah Kelompok yang menerapkan TTG
Tahun 2018 – 2023 (Triwulan I)**

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kelompok	55	55	55	55	55	55

Sumber data : Dinpermades 2023

Jumlah kelompok yang menerapkan Teknologi Tepat Guna di desa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 masih sama, namun dari semua kelompok TTG yang ada di desa tersebut dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi peningkatan ekonomi khususnya ekonomi rumah tangga.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dari 15 indikator terdapat 1 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - Indikator persentase Persentase jumlah desa yang berklasifikasi swasembada.
Hal ini disebabkan karena Aplikasi prodeskel dibuka mulai bulan Agustus sampai November berdasarkan Permendagri No. 12 Tahun 2007, dan untuk saat ini ada perbaikan aplikasi di pusat (Kemendagri) sehingga input data masih terkendala.
 - Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah melakukan pendampingan dan identifikasi desa potensi swasembada dan berkoordinasi secara aktif dengan Kemendagri
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, antara lain :
 - Lemahnya peran Kelembagaan dan SDM dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan
 - Kurangnya dukungan stakeholder
 - Minimnya dukungan anggaran
 - Kurang maksimalnya pemanfaatan sumber daya yang ada
 - Kurang optimalnya penggunaan Teknologi Informasi

Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar

 1. Memperkuat peran kelembagaan dan sumber daya manusia pada Dinpermades Kabupaten Temanggung sehingga dapat lebih efektif dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan.

2. Memperkuat komitmen dan dukungan semua pemangku kepentingan pembangunan pada pelaksanaan pemberdayaan baik di tingkat Kabupaten, Kecamatan maupun di tingkat desa.
3. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
4. Meningkatkan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada;
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi melalui aplikasi yang ada.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD sebagaia besar sudah sesuai namun ada satu kegiatan yang tidak sesuai Karen adanya pengurangan pagu anggaran yaitu kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KO TA					3,653,362,609	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A					3,653,362,609	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2,922,988,609	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2,922,988,609	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Temanggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	orang	2,922,988,609		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Temanggung	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27	orang	2,922,988,609	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah					128,000,000	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah					128,000,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	4,000,000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	paket	4,000,000	

RANCANGAN AWAL RKPД 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	20,000,000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	paket	50,000,000	-30,000,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	24,000,000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	paket	24,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	5,000,000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	paket	5,000,000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	laporan	25,000,000		Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	laporan	25,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	50,000,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	50,000,000	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					410,256,000	3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					410,256,000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	2,000,000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	2,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	laporan	17,000,000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	laporan	17,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	5,000,000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	5,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	laporan	386,256,000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12	laporan	386,256,000	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					147,500,000	4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					147,500,000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	unit	80,000,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	unit	80,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan yang Dipelihara/Di rehabilitasi	2	unit	67,500,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan yang Dipelihara/Di rehabilitasi	2	unit	67,500,000	
B	PROGRAM PENATAAN DESA					25,000,000	B	PROGRAM PENATAAN DESA					25,000,000	
	Penyelenggaraan Penataan Desa							Penyelenggaraan Penataan Desa						
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	15	desa	10,000,000		Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewenangannya	15	desa	10,000,000	
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	5	unit	15,000,000		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	5	unit	15,000,000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	- Dana Desa			266	desa	235,340,840,000		- Dana Desa			266	desa	235,340,840,000	
	- Alokasi dana Desa			266	desa	112,210,058,000		- Alokasi dana Desa			266	desa	112,210,058,000	
	- Dana Insentif daerah					280,002,807		- Dana Insentif daerah					280,002,807	
	- TMMD Bankeu Provinsi			5	Unit	750,000,000		- TMMD Bankeu Provinsi			5	Unit	750,000,000	
	- TMMD dan Karya Bhakti APBD Kab			7	Unit	2,000,000,000		- TMMD dan Karya Bhakti APBD Kab			7	Unit	2,000,000,000	
C	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA					25,000,000	C	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA					25,000,000	
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa							Fasilitasi Kerja Sama antar Desa						
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/K ota	22	dokumen	25,000,000		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/K ota	22	dokume n	25,000,000	
D	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					4,095,000,000	D	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					4,095,000,000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa							Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa						
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	266	dokumen	20,000,000		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	266	dokumen	20,000,000	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	266	dokumen	22,000,000		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	266	dokumen	22,000,000	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	266	dokumen	20,000,000		Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	266	dokumen	20,000,000	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	125	orang	30,000,000		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	125	orang	30,000,000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			peningkatan kapasitas perangkat desa se kecamatan kaloran (M)	1	kegiatan	30,000,000				peningkatan kapasitas perangkat desa se kecamatan kaloran (M)	1	kegiatan	30,000,000	
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	28	Desa	25,000,000		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	28	Desa	25,000,000	
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	14	laporan	30,000,000		Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	14	laporan	30,000,000	
			Banque Pilkades untuk 14 desa (masing-masing desa Rp30.000.000)	14	laporan	420,000,000				Banque Pilkades untuk 14 desa (masing-masing desa Rp30.000.000)	14	laporan	420,000,000	
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	55	laporan	3,363,000,000		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa		Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	55	laporan	3,363,000,000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	266	dokumen	10,000,000		Fasilitasi Penyusunan Profil Desa		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	266	dokumen	10,000,000	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	50	orang	10,000,000		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	50	orang	10,000,000	
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	266	dokumen	110,000,000		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	266	dokumen	110,000,000	
	PROGRMAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					8,378,200,000		PROGRMAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					8,378,200,000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota							Pemberdayaan Lembaga Masyarakat yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota						
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelambagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),	10	dokumen	30,000,000		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelambagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Masyarakat Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna),	10	dokumen	30,000,000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Hukum Adat		Lembaga Adat Desa/Kelurah an dan Masyarakat Hukum Adat							Lembaga Adat Desa/Kelura han dan Masyarakat Hukum Adat				
	- Insnetisf RT RW			266	desa	7,861,200,000		- Insnetisf RT RW			266	desa	7,861,200,000	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan an Desa/Kelurah an (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurah an dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6	lembaga	40,000,000		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		Jumlah Lembaga Kemasyaraka tan Desa/Kelura han (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelura han dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6	lembaga	40,000,000	
			Peningkatan kapasitas LKD se Kec Wonobojo (M)	1	kegiatan	60,000,000				Peningkatan kapasitas LKD se Kec Wonobojo (M)	1	kegiatan	60,000,000	
			Peningkatan kapasitas KPMD se Kec Kandangan (M)	1	Kegiatan	50,000,000				Peningkatan kapasitas KPMD se Kec Kandangan (M)	1	Kegiatan	50,000,000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	50	dokumen	30,000,000		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	50	dokumen	30,000,000	
			Peningkatan kapasitas pengurus BUMDES se Kecamatan Pringsurat (M)	1	kegiatan	77,000,000				Peningkatan kapasitas pengurus BUMDES se Kecamatan Pringsurat (M)	1	kegiatan	77,000,000	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	55	laporan	30,000,000		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	55	laporan	30,000,000	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan	20	dokumen	200,000,000		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan	20	dokumen	200,000,000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
	Keluarga		n Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga					Keluarga		n Masyarakat dan Kesejahteraa n Keluarga				

Sumber : Dinpermades Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Namun dalam proses ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.5

Usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
			NIHIL		

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ada 7 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6

Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2020-2022

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Simpedes	- Dinpermades - Desa	-	Database perangkat desa dan Kepala Desa	- Data perangkat desa dan Kepala Desa - Data Bengkulu desa	Tersedianya data perangkat desa dan Kepala Desa	2017- sekarang
2	Siskeudes	Desa	APBN	Update data setiap tahun	LRA APBDes	Terciptanya keuangan desa yang tertib	2018
3	Simodis	Desa, Kecamatan	APBD Prov	Monitoring keuangan dan aset desa	Laporan monitoring kecamatan dan	Terpantaunya keuangan dan aset desa	2022

					kabupaten		
4	Sivero	Desa	APBN	Anggaran untuk pelaksanaan TMMMD	Banque untuk melaksanakan TMMMD	Terlaksananya kegiatan TMMMD	2017
5	Simbangda	Dinpermades	APBN	Laporan anggaran TMMMD	Laporan realisasi Banque TMMMD	Tersajikannya laporan realisasi anggaran TMMMD	2017
6	Sipades	Desa, Dinpermades	APBN	Pencatatan Aset yang akuntabel	Laporan Aset Realtime dan online	Penyajian data cepat dan akurat	2018
7	Omspam	Desa, BPKPAD, Dinpermades	APBN	Monitoring penyaluran dana desa dan BLT DD	Laporan SP2D dan kertas kerja Dana Desa dan BLT DD	Terpantaunya proses penyaluran DD dan BLT DD	2017
8	Sibad (Sistem bantuan keuangan desa)	Dinpermadesd ukcapil provinsi, Dinpermades kabupaten, Kecamatan, Desa	APBD prov	Fasilitasi penyaluran bantuan keuangan kepada pemerintah desa di provinsi Jawa Tengah untuk peningkatan sarana prasarana perdesaan	Dokumen penyaluran Bankeudes	Mempermudah proses penyaluran Bankeudes	2022
9	PAK BEJO (Pelaporan Kinerja Bankeudes Jateng Online)	Dinpermadesd ukcapil provinsi, Dinpermades kabupaten, Kecamatan, Desa	APBD Prov	Pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara online dengan menggunakan system aplikasi	Rekap data	Membantu pelaporan kegiatan Bankeudes	2021

2.7. Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ada 1 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2020-2022

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Perangkat daerah pengampu
1	Juara I Kategori Desa Pelaksana Terbaik Gotong Royong Masyarakat Tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2020	Gubernur Jawa Tengah	Provinsi	Dinpermades

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mendorong pemerintah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Kesesuaian Agenda prioritas pembangunan RPJMN Tahun 2020-2024 yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkelanjutan selaras dengan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 yaitu Meningkatnya Perekonomian Daerah, dengan dukungan banyaknya Alokasi Dana Desa, Strategi Meningkatnya pemberdayaan ekonomi berbasis masyarakat dan Arah Kebijakan Penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui pemberdayaan BUMDES menjadi program prioritas pemerintah yang harus ditindaklanjuti sampai ke tingkat pemerintah daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2024, maka tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 adalah:

1. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintah desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tertib administrasi desa;
2. Meningkatnya penguatan Lembaga Kemasyarakatan dan lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) ;
3. Meningkatnya kapasitas SDM aparatur desa dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa untuk mendukung pelayanan serta penyelenggaraan pemerintah desa yang baik.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2024 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Temanggung pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2024	TARGET KONDISI AKHIR 2024
Meningkatnya Perekonomian Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Berbasis Masyarakat	Persentase peningkatan Status Desa Mandiri	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100
			Program Penataan Desa	Persentase Peraturan Desa Tentang Pungutan yang sesuai dengan Kewenangan Desa	%	50	50
			Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase Desa yang melakukan kerjasama desa dengan telah ditetapkan PERMAKADES	%	8	8
			Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Kepatuhan Pelaporan Aset Desa dalam Aplikasi Sipades	%	50	50
				Persentase laporan pengawasan pengelolaan keuangan desa oleh BPD	%	70	70
				Persentase penyelenggaraan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa	%	100	100
				Persentase pengisian	%	37	37

			kekosongan Perangkat Desa			
			Persentase Desa Cepat Berkembang berdasarkan Evaluasi Perkembangan Desa	%	38,34	38,34
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Desa yang menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	%	3,7	3,7
			Persentase Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang berbadan hukum	%	50	50

Sumber : Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Temanggung Tahun 2024-2026.

Kebijakan dan strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2024 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2024.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Temanggung Tahun 2024

RANCANGAN RENJA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa TAHUN 2024			RKPd KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,653,362,609	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,653,362,609	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,922,988,609	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,922,988,609	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,922,988,609		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,922,988,609	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	172,618,000	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	128,000,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,000,000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,000,000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50,000,000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20,000,000	-30,000,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24,000,000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,000,000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	5,000,000	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	25,000,000		Fasilitas Kunjungan Tamu	25,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64,618,000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50,000,000	-14,618,000
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	410,256,000	3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	410,256,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17,000,000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5,000,000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	386,256,000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	386,256,000	

4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	147,500,000	4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	147,500,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	80,000,000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	80,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	175,000,000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	67,500,000	-107,500,000
B	PROGRAM PENATAAN DESA	25,000,000	B	PROGRAM PENATAAN DESA	25,000,000	
	Penyelenggaraan Penataan Desa			Penyelenggaraan Penataan Desa		
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	10,000,000		Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	10,000,000	
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	15,000,000		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	15,000,000	
	- Dana Desa	235,340,840,000		- Dana Desa	235,340,840,000	
	- Alokasi dana Desa	112,210,058,000		- Alokasi dana Desa	112,210,058,000	
	- Dana Insentif daerah	280,002,807		- Dana Insentif daerah	280,002,807	
	- TMMD Bankeu Provinsi	750,000,000		- TMMD Bankeu Provinsi	750,000,000	
	- TMMD dan Karya Bhakti APBD Kab	2,000,000,000		- TMMD dan Karya Bhakti APBD Kab	2,000,000,000	
C	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	25,000,000	C	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	25,000,000	
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa			Fasilitasi Kerja Sama antar Desa		
	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	25,000,000		Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	25,000,000	
D	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4,095,000,000	D	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	4,095,000,000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa		

Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	20,000,000	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	20,000,000
Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	22,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	22,000,000
Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	20,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	20,000,000
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	30,000,000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	30,000,000
- peningkatan kapasitas perangkat desa se kecamatan kaloran (M)	30,000,000	- peningkatan kapasitas perangkat desa se kecamatan kaloran (M)	30,000,000
Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	25,000,000	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	25,000,000
Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa	30,000,000	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa	30,000,000
- Bankeu Pilkades untuk 14 desa (masing-masing desa Rp30.000.000)	420,000,000	- Bankeu Pilkades untuk 14 desa (masing-masing desa Rp30.000.000)	420,000,000
Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3,363,000,000	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3,363,000,000
Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	10,000,000	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	10,000,000
Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	15,000,000	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	15,000,000
Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	110,000,000	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	110,000,000
PROGRMAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	8,378,200,000	PROGRMAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	8,378,200,000
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	
Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelambagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	30,000,000	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelambagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat	30,000,000

Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat		
- Insentif RT RW	7,861,200,000			7,861,200,000	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	40,000,000			40,000,000	
- Peningkatan kapasitas LKD se Kec Wonobojo (M)	60,000,000			60,000,000	
- Peningkatan kapasitas KPMD se Kec Kandangan (M)	50,000,000			50,000,000	
Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	30,000,000			30,000,000	
- Peningkatan kapasitas pengurus BUMDES se Kecamatan Pringsurat (M)	77,000,000			77,000,000	
Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	30,000,000			30,000,000	
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	200,000,000			200,000,000	

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2024

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi penurunan pagu indikatif Tahun 2024 sebesar Rp.152.118.000,- Jika dilihat lebih jauh untuk penurunan Belanja kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dikarenakan efisiensi dan efektifitas anggaran.

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Temanggung
Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana /Pagu Indikatif (Rp.)
			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	UNSUR PENUNJANG URUSAN						DAU				
2.13	PEMBERDAYAAN						DAU				
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100%			3.653.362.609	DAU			3.653.362.609	
2.13.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					2.922.988.609	DAU			2.922.988.609	
2.13.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	2.922.988.609	DAU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	27 Orang/bulan	2.922.988.609	
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					172.618.000				172.618.000	
5.03.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.000.000	DAU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	4.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tersediaannya peralatan dan perlengkapan kantor	50.000.000	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	50.000.000	
5.03.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24.000.000	DAU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	24.000.000	
5.03.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Temanggung		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5.000.000	DAU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	5.000.000	

5.03.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Terfasilitasinya Kunjungan Tamu	25.000.000	DAU	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	25.000.000
5.03.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.618.000	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	64.618.000
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					410.256.000	DAU			410.256.000
5.03.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	2.000.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	2.000.000
5.03.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	17.000.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	17.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tersediaannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.000.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.000.000
5.03.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	386.256.000	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	386.256.000
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					147.500.000	DAU			147.500.000
5.03.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Kab. Temanggung		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	80.000.000	DAU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit	80.000.000
5.03.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya/terrehabilitasinya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	67.500.000	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Kantor atau Bangunan yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	67.500.000
2.13.02	PROGRAM PENATAAN		100%			25.000.000	DAU			25.125.000

	DESA									
2.13.02.2.01	Penyelenggaraan Penataan Desa						DAU			
2.13.02.2.01	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Kab. Temanggung		Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewengannya	Terfasilitasinya Penataan Kewenangan Desa	10.000.000	DAU	Jumlah Desa yang Terfasilitasi Penataan Kewengannya	15 Desa	10.050.000
2.13.02.2.01	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Kab. Temanggung		Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	15.000.000	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	5 Unit	15.075.000
	- Dana Desa					235,340,840,000	APBN		266 desa	235,340,840,000
	- Alokasi dana Desa					112,210,058,000	APBD		266 desa	112,210,058,000
	- Dana Insentif daerah					280,002,807				280,002,807
	- TMMD Bankeu Provinsi					750,000,000	PROV		5 unit	750,000,000
	- TMMD dan Karya Bhakti APBD Kab					2,000,000,000	APBD		7 unit	2,000,000,000
2.13.03	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA					25.000.000	DAU			25.125.000
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa									
2.13.03.2.01	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung		Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Terfasilitasinya Kerja Sama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	25.000.000	DAU	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	22 Dokumen	25.125.000
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					4.203.000.000	DAU			3.662.725.000
2.13.04.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa									
2.13.04.2.01.03	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Kab. Temanggung		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Terfasilitasinya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	20.000.000	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	266 Dokumen	20.100.000

2.13.04.2.01.04	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Kab. Temanggung		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desa	22.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	266 Dokumen	22.110.000
2.13.04.2.01.13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Kab. Temanggung		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Terfasilitasinya Pengelolaan Aset Desa	20.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	266 Dokumen	20.100.000
2.13.04.2.01.11	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Kab. Temanggung		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	30.000.000	DAU		Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	125 Orang	30.150.000
					peningkatan kapasitas perangkat desa se kecamatan kaloran (M)	30.000.000					
2.13.04.2.01	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Kab. Temanggung		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	Terfasilitasinya Penetapan dan Penegasan Batas Desa	25.000.000	DAU		Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam Penetapan Dan Penegasan Batas Desa	28 Desa	25.125.000
2.13.04.2.01	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Terseleenggarannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala desa	30.000.000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	14 Laporan	30.150.000
					Banque Pilkades untuk 14 desa (masing-masing desa Rp30.000.000)	420.000.000	APBD				
2.13.04.2.01.10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Terfasilitasinya Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.363.000.000	DAU		Jumlah Laporan Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	55 Laporan	3.379.815.000
2.13.04.2.01	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Kab. Temanggung		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	Terfasilitasinya Penyusunan Profil Desa	10.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	266 Dokumen	10.050.000

2.13.04.2.01	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Kab. Temanggung		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	15.000.000	DAU		Jumlah Anggota BPD yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	50 Orang	15.075.000
2.13.04.2.01	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Kab. Temanggung		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Terfasilitasinya Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	110.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	266 Dokumen	110.050.000
2.13.05	PROGRMAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					507.000.000					8.192.850.000
2.13.05.2.01	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota										
2.13.05.2.01.09	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelambagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Temanggung		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelambagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Terfasilitasinya Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelambagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	30.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelambagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	10 Dokumen	30.150.000
					insentif ketua RT RW	7.861.200.000				266 desa	7.861.200.000

2.13.05.2.01.03	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Temanggung		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Meningkatkannya Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	40.000.000	DAU		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6 Lembaga	40.200.000
					Peningkatan kapasitas LKD se Kec Wonoboyo (M)	60.000.000					
					Peningkatan kapasitas KPMD se Kec Kandangan (M)	50.000.000					
2.13.05.2.01	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Kab. Temanggung		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Terfasilitasinya Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	30.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	50 Dokumen	30.150.000
					Peningkatan kapasitas pengurus BUMDES se Kecamatan Pringsurat (M)	77.000.000					
2.13.05.2.01	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Temanggung		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Terfasilitasinya Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	30.000.000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	55 Laporan	30.150.000

2.13.05.2.01	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Temanggung		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Terfasilitasinya Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	200.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	20 dokumen	201.000.000
TOTAL						367,375,463,416					

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2024 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2024. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2024 nanti. Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar 97,48 %, realisasi Belanja Barang/Jasa sebesar 98,48 %, belanja Pegawai dan Belanja Barang/jasa Sebesar Rp. 8.128.829.953,- sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Pegawai sebesar 54,75 %, realisasi Belanja Barang/Jasa sebesar 46,63 %, belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa Sebesar Rp. 3,755,132,515,- .

Dalam Renja Tahun Anggaran 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 16,176,562,609,- yang terdiri dari 5 program antara lain program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program penataan desa, program peningkatan kerjasama desa, program administrasi pemerintahan desa, program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Juli 2023

KEPALA DINPERMADES
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dra. GEMA ARTISTI W, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19700730 199001 2 002

**RENCANA KERJA
SEKRETARIAT DPRD
TAHUN 2024**



**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah, serta rencana pendanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

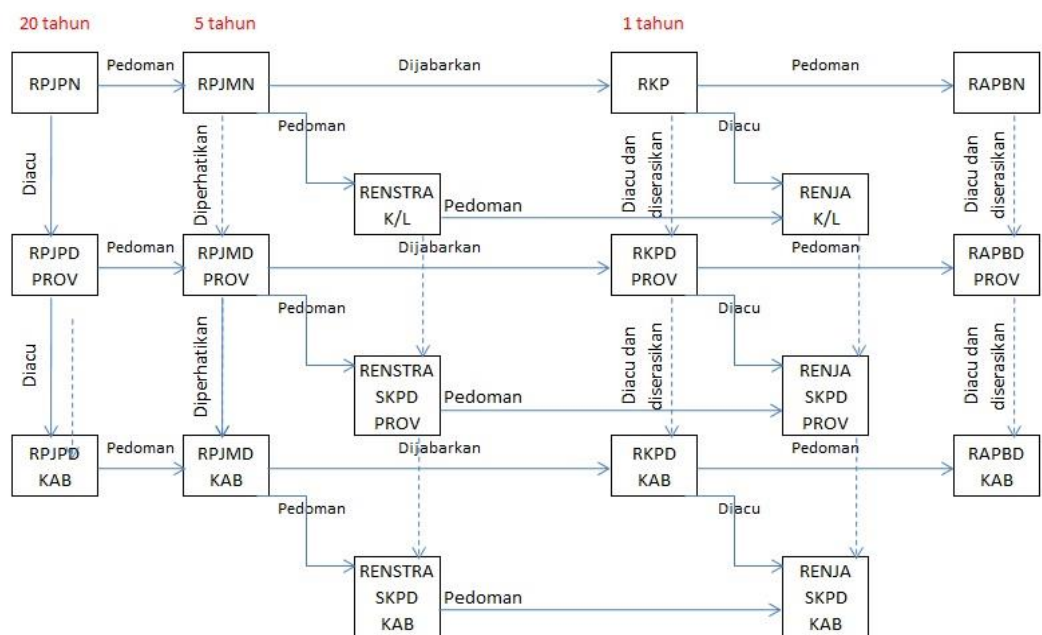
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan jangka waktu RPD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok

fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;
- 2) Kondisi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;
- 4) Data Pokok Pembangunan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

b. Analisis gambaran pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis

indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;

- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2023, dan perkiraan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun lalu berdasarkan renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam

menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;

- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung. Namun dalam proses ini Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung merupakan kegiatan penulisan

dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;

Penyempurnaan rancangan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
- BAB V PENUTU

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN
2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2022 dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023

Dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2022 terhadap capaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu tahun 2023.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Rencana Kerja Sekretariat DPRD sampai dengan tahun berjalan yaitu tahun 2023 terhadap target di tahun 2024.

Evaluasi terhadap capaian Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2019-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja tahun 2022 sebagai tahun ke-empat pelaksanaan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung 2019-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET 2022 Rp(DPPA)	REALISASI 2022 Rp	CAPAIAN 2022		KET
				K	Rp	
1	2	11	21	22	23	28
4.02.02	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	17.570.598.793	13.738.491.252	100,00	78,19	
				100,00		
				100,00		
4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD					
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.164.733.300	1.957.210.085	100,00	90,41	
4.02.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	965.302.500	500.518.550	100,00	51,85	

4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	1.359.226.000	1.015.972.377	100,00	74,75	
4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran					
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	206.505.000	191.370.600	100,00	92,67	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	206.509.000	171.740.050	100,00	83,16	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	112.986.000	103.316.300	100,00	91,44	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	112.986.000	98.492.800	100,00	87,17	
4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan					
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	40.000.000	12.100.000	63,33	30,25	
4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	44.000.000	10.000.000	50,00	22,73	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	44.000.000	5.200.000	56,67	11,82	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	52.000.000	11.300.000	70,00	21,73	
4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD					
4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	2.625.044.500	2.489.643.350	100,00	94,84	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	350.142.151	326.180.000	100,00	93,16	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	219.744.000	215.621.860	100,00	98,12	
4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					
4.02.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	252.166.000	229.433.300	100,00	90,99	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	1.418.387.000	1.330.441.000	100,00	93,80	
4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD					
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	7.396.867.342	5.069.950.980	100,00	68,54	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program A1				90,59		
				Predikat Sangat Tinggi		
4.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30.895.534.220	29.021.571.919	100	93,93	
4.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
4.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.053.701.052	2.878.311.934	100,00	94,26	
4.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
4.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.500.000	25.596.500	100,00	86,77	

4.02.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.093.000	22.115.000	100,00	88,13	
4.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	20.500.000	20.314.000	100,00	99,09	
4.02.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	33.720.000	30.492.000	100,00	90,43	
4.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100.000.000	67.255.000	100,00	67,26	
4.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	782.236.000	779.242.453	100,00	99,62	
4.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
4.02.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13.000.000	9.310.000	100,00	71,62	
4.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	135.000.000	100.289.524	100,00	74,29	
4.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	641.521.358	598.076.690	100,00	93,23	
4.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
4.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	884.963.400	547.255.438	100,00	61,84	
4.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	139.500.000	122.042.000	100,00	87,49	
4.02.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	95.542.000	66.090.000	100,00	69,17	
4.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.200.000	20.129.500	100,00	83,18	
4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					
4.02.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	23.916.457.910	22.814.646.880	100,00	95,39	
4.02.01.2.15.02	Penyelenggaraan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	561.000.000	535.873.000	100,00	95,52	
4.02.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	57.431.000	29.918.500	100,00	52,09	
4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD					
4.02.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	100.168.500	72.613.500	100,00	72,49	
4.02.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	282.000.000	282.000.000	100,00	100,00	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program A2				100,00		
				Predikat	Sangat Tinggi	
Jumlah		48.466.133.013	42.760.063.171			
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan				95,29	88,23	

	Predikat	Sangat Tinggi	
	Rata-rata Capaian Kinerja Program	100,00	
	Predikat	Telah Tercapai	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Perencanaan dilakukan dengan cermat dan pelaksanaan tugas dilakukan penuh tanggung jawab.			
Faktor penghambat pencapaian kinerja : Beberapa kegiatan yang telah direncanakan, terutama yang melibatkan pihak ketiga, untuk dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Perlu dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh kegiatan yang sudah direncanakan dalam rangka tercapainya target kinerja. Terhadap kegiatan pengadaan barang dan jasa agar segera dilaksanakan.			
Tindak lanjut yang dilakukan dalam RKPD berikutnya : Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan agar dilakukan secara lebih cermat dan matang dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada.			

Dari Tabel 2.1 diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2022 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja kegiatan (100%)

- 1) Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, meliputi:
 - a) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - b) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - c) Penyediaan bahan logistic kantor
 - d) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - e) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - f) Fasilitas kunjungan tamu
 - g) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - h) Penyediaan jasa surat menyurat

- i) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - j) Penyediaan jasa layanan umum kantor
 - k) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - l) Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
 - m) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya
 - n) Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya
 - o) Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
 - p) Penyelenggaraan pakaian dinas dan atribut DPRD
 - q) Pelaksanaan medical check up DPRD
 - r) Fasilitas rapat koordinasi dan konsultasi DPRD
 - s) Penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD
- 2) Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, meliputi:
- a) Pembahasan rancangan peraturan daerah
 - b) Penyelenggaraan kajian perundang-undangan
 - c) Fasilitas penyusunan penjelasan/keterangan dan/atau naskah akademik
 - d) Pembahasan KUA dan PPAS
 - e) Pembahasan perubahan KUA dan perubahan PPAS
 - f) Pembahasan APBD
 - g) Pembahasan APBD perubahan
 - h) Pendalaman tugas DPRD
 - i) Publikasi dan dokumentasi dewan
 - j) Penyediaan tenaga ahli fraksi
 - k) Penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD
 - l) Pelaksanaan reses
 - m) Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD

Capaian kinerja kegiatan yang tidak memenuhi target (kurang dari 100%)

- 1) Program pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, meliputi:
 - a) Pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum
 - b) Pengawasan urusan pemerintahan bidang infrastruktur
 - c) Pengawasan urusan pemerintahan bidang kesejahteraan rakyat
 - d) Pengawasan urusan pemerintahan bidang perekonomian

Rumusan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah:

- a) Perencanaan kegiatan harus mempertimbangkan waktu yang ada, sehingga tidak ada lagi kegiatan yang tidak teragendakan (dibuat *time schedule*).
- b) Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan dan langkah percepatan pelaksanaan pada awal tahun anggaran.
- c) Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung akan ditingkatkan untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Sekretariat DPRD
Kabupaten Temanggung

No.	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2022 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu	%	50	60	70	80	90	73,08	90,48	80,00	88,89	33,33	88,89	AT
2	Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda	%	26,67	26,67	26,67	26,67	26,67	15,38	14,28	10,00	37,50	0	37,50	UK
3	Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	%	100	100	100	100	100	99,82	100	100,00	100	30,93	100	TT
4	Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	54	55	56	57	58	74,83	78,86	82,16	100	85,41	100	TT

Adapun penjelasan untuk masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 2_[AEV1], terdiri dari:
 - 1) Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana.
 - 2) Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan.
2. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 1_[AEV2], terdiri dari yaitu persentase raperda yang disahkan tepat waktu.
3. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 1_[AEV3], terdiri dari:
 - a. Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya penyusunan naskah akademik rancangan Peraturan Daerah Inisiatif dilakukan satu tahun sebelum masuk kedalam Propemperda dan Raperda inisiatif merupakan konsep rancangan Peraturan Daerah yang bersumber dari aspirasi masyarakat melalui anggota DPRD.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah substansi materi Raperda yang belum terfasilitasi oleh Provinsi yang menangani bidang hukum menjadikan terhambat pembahasannya.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah untuk difasilitasi atau diharmonisasi dan disinkronasi oleh lembaga yang menangani bidang peraturan perundangan di tingkat Provinsi.

2.2.2. Data Pokok

Data Pokok Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

1. Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa Peraturan Daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung dengan persetujuan bersama Bupati. Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau Bupati. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD. Rancangan Perda yang berasal dari Bupati merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.

Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Bupati disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD dan Bupati ditetapkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Bupati untuk jangka waktu satu tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda. Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD berdasarkan Propemperda atau di luar

Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RAPERDA yang disahkan tepat waktu adalah jumlah RAPERDA yang dibahas dan disahkan tepat waktu di DPRD dibandingkan/dibagi dengan RAPERDA yang disiapkan dan disampaikan oleh eksekutif kepada DPRD.

Persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu dihitung dengan rumus : jumlah PERDA yang ditetapkan dibagi jumlah RAPERDA yang diajukan dikali 100%. Realisasi persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu di Kabupaten Temanggung dari tahun 2019 s/d 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1.
 Persentase RAPERDA yang Disahkan Tepat Waktu^[AEV4]
 Tahun 2018 s/d 2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah PERDA yang ditetapkan	18	15	19	19	16
2.	Jumlah RAPERDA yang diajukan	18	16	26	21	18
	% RAPERDA yang disahkan tepat waktu	100	93,75	73,08	90,48	88,89

Sumber: Bagian Rapat dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD, 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa persentase RAPERDA yang disahkan tepat waktu tahun 2022 adalah sebesar 88,89%, karena sampai dengan triwulan IV tahun 2022 jumlah PERDA yang ditetapkan adalah sebanyak 16 PERDA dari jumlah RAPERDA yang diajukan sebanyak 18 RAPERDA.

Pada tahun 2022 terdapat 2 RAPERDA yang belum ditetapkan menjadi PERDA padahal sudah diajukan ke DPRD.

Adapun daftar RAPERDA yang disahkan tepat waktu pada tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.2.
 Daftar PERDA yang Disahkan Tepat Waktu Tahun 2022

NO.	NAMA RAPERDA
1.	Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2022-2042
2.	Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin
3.	Restribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
4.	Penyelenggaraan Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Penanganan Kawasan Kumuh
5.	Keterbukaan Informasi Publik
6.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

7.	Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
8.	Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
9.	Pencegahaan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran Serta Penyelamatan Lainnya
10.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome di Kabupaten Temanggung
11.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung nomor 12 Tahun 2017 Tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Temanggung TV Kabupaten Temanggung
12.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 2009 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung
13.	Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren
14.	Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021
15.	Perubahan APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022
16.	APBD Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2023
17.	Bangunan Gedung
18.	Sewa Rumah Susun Sederhana

2. Persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah Raperda

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD mempunyai tugas dan wewenang yang salah satunya yaitu membentuk Perda yang dibahas dengan Bupati untuk mendapat persetujuan bersama. Perda Inisiatif adalah Peraturan Daerah yang yang berasal dari DPRD yang diajukan oleh Anggota DPRD, Komisi, Gabungan Komisi, atau Bapemperda, dengan persetujuan bersama Bupati yang merupakan hasil dari aspirasi masyarakat yang tertuang dalam pokok-pokok pikiran DPRD bersumber dari kunjungan kerja, rapat dengar pendapat maupun rapat

dengar pendapat umum. Setiap aspirasi masyarakat harus mampu diserap oleh DPRD yang selanjutnya dapat diolah menjadi suatu rancangan peraturan daerah.

Definisi jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda yaitu perbandingan antara jumlah perda inisiatif dengan jumlah raperda yang dibahas di DPRD.

Rumus penghitungan dari persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda adalah : jumlah peraturan daerah inisiatif dibagi jumlah raperda dikali 100%.

Salah satu fungsi DPRD yaitu pembentukan Peraturan Daerah, maka perumusan angka tersebut bertujuan untuk mengetahui seberapa tinggi pelaksanaan fungsi tersebut dilakukan oleh DPRD dengan mengajukan rancangan perda inisiatif di dalam Propemperda.

Realisasi persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda dari tahun 2018 s/d 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3.
Persentase Jumlah Peraturan Daerah Inisiatif Terhadap Jumlah Raperda
Tahun 2018 s/d 2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah peraturan daerah inisiatif	3	4	3	2	5
2.	Jumlah raperda	16	26	21	20	18
	%	18,75	15,38	14,28	10,00	27,78

Sumber: Bagian Rapat dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun 2022, terdapat 5 Peraturan Daerah Inisiatif (usulan Komisi A DPRD, Komisi B DPRD, Komisi C DPRD, dan Komisi D DPRD) dari jumlah Raperda sebanyak 18 Raperda, sehingga persentase jumlah peraturan daerah inisiatif terhadap jumlah raperda tahun 2022 sebesar 27,78%.

3. Persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, anggota DPRD mempunyai kewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala serta menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Aspirasi masyarakat ini diperoleh antara lain ketika masa reses dengan bentuk dialog-dialog dengan berbagai elemen masyarakat, kunjungan ke lapangan, dan mengumpulkan pendapat umum.

Aspirasi merupakan harapan dan tujuan untuk keberhasilan pada masa yang akan datang. Aspirasi dapat didefinisikan sebagai keinginan individu atau kelompok masyarakat akan suatu keberhasilan atau prestasi tertentu dan merupakan usaha yang dilakukan untuk meraih sesuatu yang lebih tinggi dari keadaan sekarang. Kegiatan aspirasi adalah kegiatan yang berasal dari harapan dan

keinginan masyarakat yang diserap dan dihimpun melalui Anggota DPRD.

Pengertian kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana yaitu membandingkan antara kegiatan aspirasi yang dilaksanakan dengan kegiatan aspirasi yang direncanakan.

Rumus penghitungan dari persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana adalah jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan dibagi jumlah kegiatan aspirasi yang direncanakan dikali 100%.

Realisasi persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana tahun 2018 s/d 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4.
Persentase Kegiatan Aspirasi yang Dilaksanakan Sesuai Rencana Tahun 2018 s/d 2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan	937	568	978	893	1332
2.	Jumlah kegiatan aspirasi yang direncanakan	997	569	978	893	1332
	% kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana	93,98	99,82	100	100	10

Sumber: Bagian Rapat dan Perundang-Undangan Sekretariat DPRD, 2022

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa sampai dengan tahun 2022, persentase kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sesuai rencana tercapai sebesar 100%. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2022 jumlah kegiatan aspirasi yang dilaksanakan sebanyak 1332 kegiatan, sedangkan jumlah kegiatan aspirasi yang direncanakan sebanyak 1332 kegiatan.

4. Persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan

Publikasi adalah kegiatan untuk menceritakan kepada masyarakat luas tentang hasil produksi atau jasa perusahaan/lembaga karena setiap warga negara memiliki hak untuk mengetahui setiap kebijakan suatu Lembaga Negara/Daerah. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah termasuk DPRD. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dijelaskan bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk: 1) menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; 2) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; 3) meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik; 4) mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; 5) mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak; 6) mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau 7) meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Kegiatan DPRD yang dipublikasikan adalah jumlah kegiatan DPRD yang diantaranya meliputi rapat paripurna, rapat pansus, rapat alat kelengkapan dewan, dan kunjungan kerja dalam daerah, penyerapan aspirasi/reses yang dipublikasi melalui majalah/buletin DPRD, koran, website, dan media lainnya. Dengan publikasi yang akurat dan mudah diakses, maka kebijakan-kebijakan yang diambil ataupun kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh lembaga Pemerintah khususnya DPRD

Kabupaten Temanggung dapat diterima dengan baik dan memperoleh respon yang baik pula oleh masyarakat.

Rumus penghitungan dari persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan adalah jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan dibagi jumlah kegiatan DPRD dikali 100%. Realisasi persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan tahun 2018 s/d 2022 (sampai dengan tahun 2022) dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5.
Persentase Kegiatan DPRD yang Dipublikasikan
Tahun 2018 s/d 2022

No.	Uraian	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1.	Jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan	164	220	373	304	357
	- Rapat Paripurna	20	27	30	26	26
	- Rapat Komisi	64	50	35	44	44
	- Rapat Pansus	10	50	44	35	35
	- Rapat Badan Kehormatan	1	1	1	1	1
	- Rapat Badan Anggaran	8	10	15	9	9
	- Rapat Badan Musyawarah	7	5	9	8	8
	- Rapat Badan Pembentukan Perda	2	2	5	2	2
	- Kunjungan kerja DPRD dalam daerah	52	75	144	44	44
	- Penyerapan aspirasi/reeses			90	135	135
2.	Jumlah kegiatan DPRD	389	294	473	370	405
	- Rapat Paripurna	31	27	30	26	26
	- Rapat Komisi	93	60	66	76	76
	- Rapat Pansus	64	66	57	44	44
	- Rapat Badan Kehormatan	2	2	1	2	2
	- Rapat Badan Anggaran	13	11	19	12	12
	- Rapat Badan Musyawarah	13	9	12	11	11
	- Rapat Badan Pembentukan Perda	4	4	5	2	2
	- Kunjungan kerja DPRD dalam daerah	169	115	193	62	62
	- Penyerapan aspirasi/reeses			90	135	135
3.	% Kegiatan DPRD yang dipublikasikan	42,16	74,82	78,86	82,16	88,14

Sumber: Bagian Umum dan Humas Sekretariat DPRD, 2022

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan pada tahun 2022 adalah sebesar 88,15% dikarenakan jumlah kegiatan DPRD yang dipublikasikan sampai dengan triwulan IV tahun 2022 sebanyak 357 kegiatan dari jumlah kegiatan DPRD sebanyak 405 kegiatan. Hal ini didukung dengan adanya publikasi

kegiatan DPRD di Temanggung TV dan Instagram Humas DPRD Kabupaten Temanggung.

Berdasarkan tabel 2.8. dapat dilihat bahwa dari tahun 2019 – 2022 persentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini dilandasi kesadaran pentingnya publikasi, serta berorientasi kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, jujur, dan transparan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan adanya publikasi maka hak masyarakat untuk memperoleh informasi dapat terpenuhi.

Kendala dalam pengelolaan publikasi adalah kurangnya SDM yang khusus mengelola publikasi, mengingat banyaknya kegiatan kedewanan yang intensitasnya tinggi dan tempat yang berbeda-beda dalam waktu yang sama.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung

Perumusan isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung, didasarkan pada indikator kinerja daerah dengan status upaya keras dan permasalahan/hambatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut :

1. Besarnya Raperda menjadi Perda jumlahnya belum sesuai dengan yang diajukan dalam Propemperda pada setiap tahunnya.
2. Masih rendahnya konsistensi penganggaran dari hasil aspirasi terhadap perencanaan.
3. Penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi dan informasi masih belum optimal.

Adapun saran yang diperlukan guna mengatasi kendala/hambatan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal penyusunan produk hukum daerah.

2. Meningkatkan kerjasama dengan akademisi dalam hal penyusunan naskah akademik dan kajian.
3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia.
4. Meningkatkan optimalisasi penggunaan anggaran dengan mengacu pada pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
5. Meningkatkan dan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan nomenklatur kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 2.11
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024

RANCANGAN AWAL RKPD 2022						HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Keterangan
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan ASN	14	3.096.673.900		Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan ASN	14	3.096.673.900	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah						Administrasi Umum Perangkat Daerah					
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya jasa instalasi listrik	12	10.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya jasa instalasi listrik	12	10.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya ATK kantor	12	27.602.300		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya ATK kantor	12	27.602.300	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	22.550.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	22.550.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Kab. Temanggung	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	12	37.092.000		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Kab. Temanggung	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	12	37.092.000	
	Fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Temanggung	Tersedianya makan minum tamu	12	110.000.000		Fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Temanggung	Tersedianya makan minum tamu	12	110.000.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Terpenuhinya perjalanan dinas	12	714.959.300		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Terpenuhinya perjalanan dinas	12	714.959.300	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Pengadaan Peralatan Kantor	12	0		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Pengadaan Peralatan Kantor	12	0	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengadaan gedung kantor	12	0		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengadaan gedung kantor	12	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Temanggung	Tersedianya materai dan perangko	12	8.800.000		Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Temanggung	Tersedianya materai dan perangko	12	8.800.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	Kab. Temanggung	Terbayarnya tagihan listrik, air dan telpon	12	121.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	Kab. Temanggung	Terbayarnya tagihan listrik, air dan telpon	12	121.000.000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Temanggung	Terbayarnya gaji cleaning service dan satpam	12	689.173.494		Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Temanggung	Terbayarnya gaji cleaning service dan satpam	12	689.173.494	
							Pengadaan Pakaian Dinas Sekretariat DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya pakaian dinas Sekretariat DPRD	28	15.000.000	Perlunya pengadaan pakaian dinas Setwan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Kab. Temanggung	Tersedianya bbm, pajak, service kendaraan	12	659.959.740		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Kab. Temanggung	Tersedianya bbm, pajak, service kendaraan	12	659.959.740	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya rehabilitasi kantor DPRD	12	85.000.000		Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya rehabilitasi kantor DPRD	12	85.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Tersedianya perawatan gedung kantor	12	194.813.849		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Tersedianya perawatan gedung kantor	12	194.813.849	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Tersedianya biaya perawatan peralatan gedung kantor	12	30.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Tersedianya biaya perawatan peralatan gedung kantor	12	30.000.000	

	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD					
	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya gaji DPRD	12	27.727.605.301		Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya gaji DPRD	12	27.727.605.301	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kabupaten Temanggung	Tersedianya seragam DPRD	45	452.100.000		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kabupaten Temanggung	Tersedianya seragam DPRD	45	452.100.000	
	Pelaksanaan Medichal Check Up DPRD	Kab. Temanggung	Terkesananya medical check up untuk DPRD	45	99.000.000		Pelaksanaan Medichal Check Up DPRD	Kab. Temanggung	Terkesananya medical check up untuk DPRD	45	99.000.000	Adanya keanikan Anggaran Medical Checkup
	Pelayanan Administrasi DPRD						Pelayanan Administrasi DPRD					
	Fasilitasi Rapat Koodinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Temanggung	Tersedia jamuan rapat	100	110.185.350		Fasilitasi Rapat Koodinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Temanggung	Tersedia jamuan rapat	100	110.185.350	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD	12	310.200.000		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD	12	310.200.000	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD						PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD						Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD					
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur	Terlaksananya pembahasan raperda	12	2.139.206.630		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur	Terlaksananya pembahasan raperda	12	2.139.206.630	
	Hearing	Kab. Temanggung	Terlaksananya hearing	5	250.000.000		Hearing	Kab. Temanggung	Terlaksananya hearing	5	250.000.000	
	Penyelenggaraan Kajian Perundang – Undangan	Kab. Temanggung	Terlaksananya kajian	12	525.302.500		Penyelenggaraan Kajian Perundang – Undangan	Kab. Temanggung	Terlaksananya kajian	12	525.302.500	
	Survey Kepuasan Publik Terhadap Kinerja DPRD	Kab. Temanggung	Terlaksananya survey kepuasan publik	1	400.000.000		Survey Kepuasan Publik Terhadap Kinerja DPRD	Kab. Temanggung	Terlaksananya survey kepuasan publik	1	500.000.000	Perlunya penambahan anggaran survey publik
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan Keterangan dan atau Naskah Akademik	Kab. Temanggung	Tersedianya naskah akademik	12	1.099.148.600		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan Keterangan dan atau Naskah Akademik	Kab. Temanggung	Tersedianya naskah akademik	12	1.099.148.600	
	Pembahasan Kebijakan Anggaran						Pembahasan Kebijakan Anggaran					

	Pembahasan KUA dan PPAS	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	1	206.505.000		Pembahasan KUA dan PPAS	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	1	206.505.000	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	206.505.000		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	206.505.000	
	Pembahasan APBD	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan APBD	1	112.986.000		Pembahasan APBD	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan APBD	1	112.986.000	
	Pembahasan APBD Perubahan	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan APBD Perubahan	1	112.986.000		Pembahasan APBD Perubahan	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan APBD Perubahan	1	112.986.000	
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah						Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah					
	Pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintah dan hukum	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengawasan bidang pemerintahan dan hukum	40	44.000.000		Pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintah dan hukum	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengawasan bidang pemerintahan dan hukum	40	44.000.000	
	Pengawasan urusan pemerintah bidang infrastruktur		Terlaksananya pengawasan bidang infrastruktur	40	44.000.000		Pengawasan urusan pemerintah bidang infrastruktur		Terlaksananya pengawasan bidang infrastruktur	40	44.000.000	
	Pengawasan urusan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengawasan bidang kesejahteraan rakyat	40	44.000.000		Pengawasan urusan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengawasan bidang kesejahteraan rakyat	40	44.000.000	
	Penawasan urusan bidang perekonomian	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengawasan bidang perekonomian	40	52.000.000		Penawasan urusan bidang perekonomian	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengawasan bidang perekonomian	40	52.000.000	
	Peningkatan Kapasitas DPRD						Peningkatan Kapasitas DPRD					
	Bimbingan Teknis DPRD	Jakarta, Jateng, DIY	Terlaksananya bimtek DPRD	6	3.275.044.500		Bimbingan Teknis DPRD	Jakarta, Jateng, DIY	Terlaksananya bimtek DPRD	6	3.275.044.500	
	Publikasi dan dokumentasi dewan	Kab. Temanggung	Tersedianya dokumentasi dewan	12	208.142.151		Publikasi dan dokumentasi dewan	Kab. Temanggung	Tersedianya dokumentasi dewan	12	208.142.151	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Temanggung	Terbayarnya honor tenaga ahli fraksi	12	222.171.600		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Temanggung	Terbayarnya honor tenaga ahli fraksi	12	222.171.600	

	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat					
	Penyusunan Pokok – Pokok Pikiran DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya pokir DPRD	2	142.673.300		Penyusunan Pokok – Pokok Pikiran DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya pokir DPRD	2	142.673.300	
	Pelaksanaan Reses	Kab. Temanggung	Terlaksananya reses	3	1.560.225.700		Pelaksanaan Reses	Kab. Temanggung	Terlaksananya reses	3	1.560.225.700	
	Fasilitasi tugas DPRD						Fasilitasi tugas DPRD					
	Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jateng, DIY, Jabar, Luar Jawa	Terlaksananya kunjungan kerja	12	7.244.867.342		Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jateng, DIY, Jabar, Luar Jawa	Terlaksananya kunjungan kerja	12	7.244.867.342	Perlunya kenaikan anggaran
					46.986.332.625						47.418.901.625	

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten Temanggung

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah lain dan bukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung. Namun dalam proses ini Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.12
Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
	NIHIL				

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Beberapa inovasi yang dilakukan dalam rangka mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Sekretariat DPRD antara lain :

1. Dioptimalkannya website DPRD Kabupaten Temanggung sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat terkait regulasi dan kegiatan kedewanan lebih cepat.
2. Dibuatnya Instagram Humas DPRD Temanggung, yang sangat bermanfaat untuk mempublikasikan kegiatan anggota DPRD Kabupaten Temanggung kepada masyarakat, sehingga menjadikan Sekretariat DPRD Temanggung dan DPRD Temanggung semakin membumi dimata masyarakat Temanggung. Harapannya masyarakat bisa ikut memanfaatkan akun tersebut, sebagai bentuk interaksi langsung antara masyarakat dengan wakil-wakil mereka yang ada di lembaga DPRD.

2.7. Penghargaan

Penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dari Tahun 2019 s/d 2021, disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.13
Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung
Tahun 2019 - 2021

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Skala	Peringkat Daerah Pengampu
	NIHIL			

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Tidak berbeda dengan Lembaga di atasnya dalam hal ini Sekretariat Jenderal DPR RI dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berpegang pada Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka sesuai dengan pasal 420 ayat 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014 tersebut, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas DPRD kabupaten/kota, dibentuk sekretariat DPRD kabupaten/kota yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur kelembagaan kurang lebih sama dengan Pusat dan Provinsi. Tipe Sekretariat DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Adapun nomenklatur Sekretariat DPRD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/ Kota.

Struktur kelembagaan yang ada pada prinsipnya hampir sama dengan DPR RI maupun DPRD Provinsi Jawa Tengah, demikian juga tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat DPRD. Tugas pokok tersebut adalah memberkan fasilitasi terhadap agenda yang dibuat oleh Alat Kelengkapan DPRD. Organisasi Sekretariat DPRD Kabupaten/ Kota dibentuk dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas dan kinerja Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Adapun tugas dari Sekretariat DPRD adalah :

1. Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan.
2. Menyiapkan administrasi keuangan.
3. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

4. Menyediakan serta mengkoordinasikan kelompok pakar atau tim ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2024, maka tujuan dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam rangka akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2024 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan Target	Target Tahun 2024	Target Tahun 2025	Target Tahun 2026
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih, dan melayani	Meningkatnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	Presentase jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas	%	90	90	90
			Presentase kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang dilaksanakan sesuai rencana	%	95	95	95
			Presentase kegiatan DPRD yang dipublikasikan	%	100	100	100
			Presentase kegiatan Peningkatan Kapasitas Anggota DPRD	%	100	100	100

Kebijakan dan strategi Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2024 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2024.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Sekretariat DPRD Kab. Temanggung Tahun 2024

RANCANGAN RENJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	2.933.016.539		Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	3.096.673.900	163.657.361
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.992.630		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	992.630
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	28.190.690		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.000.000	3.190.690
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	32.998.900		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.500.000	12.498.900
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	37.092.000		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	15.000.000	22.092.000
	Fasilitasi kunjungan tamu	110.000.000		Fasilitasi kunjungan tamu	110.000.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	714.959.300		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	449.963.000	264.996.300
	Pakaian Dinas ASN	20.000.000		Pakaian Dinas ASN	0	20.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	203.929.220		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	850.000.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	95.146.920		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	
	Penyediaan jasa surat menyurat	8.800.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	121.000.000		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.000.000	800.000
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	667.920.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	110.000.000	11.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	689.173.494	21.253.494
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		

	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	660.212.190			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	659.959.740	252.450
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	105.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	85.000.000	20.000.000
	Pembangunan Gedung Arsip	0					
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasana gedung kantor dan bangunan lainnya	35.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	5.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	15.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.000.000	5.000.000
	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD				Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		
	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	24.302.291.519			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	27.727.605.301	3.425.313.782
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	432.410.440			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	452.100.000	19.689.560
	Pelaksanaan Medichal Check Up DPRD	90.000.000			Pelaksanaan Medichal Check Up DPRD	99.000.000	9.000.000
	Layanan Administrasi DPRD				Layanan Administrasi DPRD		
					Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	710.000000	710.000.000
	Fasilitasi Rapat Koodinasi dan Konsultasi DPRD	110.004.070			Fasilitasi Rapat Koodinasi dan Konsultasi DPRD	110.185.350	181.280
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	310.000.000			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	310.200.000	200.000
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		
	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		
	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	2.766.453.910			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	750.000.000	2.016.453.910
	Hearing	350.000.000					
	Penyelenggaraan Kajian Perundang – Undangan	357.832.750			Penyelenggaraan Kajian Perundang – Undangan	325.302.500	32.530.250
	Survey Kepuasan Publik Terhadap Kinerja DPRD	0			Survey Kepuasan Publik Terhadap Kinerja DPRD	400.000.000	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan Keterangan dan atau Naskah Akademik	1.108.140.532			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	700.000.000	408.140.532
	Pembahasan Kebijakan Anggaran				Pembahasan Kebijakan Anggaran		
	Pembahasan KUA dan PPAS	252.200.408			Pembahasan KUA dan PPAS	206.505.000	45.695.408
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	252.200.408			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	206.509.000	45.691.408
	Pembahasan APBD	126.100.253			Pembahasan APBD	112.986.000	13.114.253
	Pembahasan APBD Perubahan	126.100.253			Pembahasan APBD Perubahan	112.986.000	13.114.253
	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah		
	Pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintah dan hukum	44.000.000			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	22.000.000	22.000.000
	Pengawasan urusan pemerintah bidang infrastruktur	48.400.000			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	22.000.000	26.400.000

Pengawasan urusan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat	48.400.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	22.000.000	26.400.000
Penawasan urusan bidang perekonomian	57.200.000	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	30.000.000	27.200.000
Peningkatan Kapasitas DPRD		Peningkatan Kapasitas DPRD		
		Orientasi DPRD	435.037.500	
Bimbingan Teknis DPRD	2.777.548.952	Pendalaman Tugas DPRD	2.125.007.000	652.541.952
Publikasi dan dokumentasi dewan	228.956.336	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	208.142.151	20.814.185
Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	241.487.400	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	222.171.700	19.315.700
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		
Penyusunan Pokok – Pokok Pikiran DPRD	142.673.000	Penyusunan Pokok – Pokok Pikiran DPRD	75.000.000	67.673.000
Pelaksanaan Reses	1.560.241.100	Pelaksanaan Reses	1.418.387.000	141.854.100
Fasilitasi tugas DPRD		Fasilitasi Tugas DPRD		
Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	7.639.354.089	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	5.860.411.342	1.778.942.747
JUMLAH	54.446.493.570	JUMLAH	48.442.805.978	10.051.000.145

Sumber : RKPD Kab. Temanggung Tahun 2024

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2024 sebesar Rp 10.051.000.145,-

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Temanggung
Tahun 2024

Kode Rekening					Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana 2025	Sumber Dana
Ursn	Bid. Ursn	Prog.	Keg.	Sub. Keg.			Indikator	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							
					Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Terpenuhinya belanja gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	2.512.628.761	2.933.016.539	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah							
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya jasa instalasi listrik	12	Bulan	10.000.000	10.992.630	
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Tersedianya ATK kantor	12	Bulan	27.602.300	28.190.690	
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	22.550.000	32.998.900	
					Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	Kab. Temanggung	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	12	Bulan	15.000.000	37.092.000	
					Fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Temanggung	Tersedianya makan minum tamu	12	Bulan	110.000.000	110.000.000	
					Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Terpenuhinya perjalanan dinas	12	Bulan	449.963.000	714.959.300	
					Pengadaan Barang Milik Daerah							

Kode Rekening					Urusan/Bidang Pemerintah Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana 2025	Sumber Dana
Ursn	Bid. Ursn	Prog.	Keg.	Sub. Keg.			Indikator	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Pengadaan Peralatan Kantor	12	Paket		203.929.220[AEV5]	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengadaan gedung kantor	12	Paket		95.146.920	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
					Penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Temanggung	Tersedianya materai dan perangko	12	Bulan	8.000.000	8.800.000	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik	Kab. Temanggung	Terbayarnya tagihan listrik, air dan telpon	12	Bulan	110.000.000	121.000.000	
					Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Temanggung	Terbayarnya gaji cleaning service dan satpam	12	Bulan	689.173.494	667.920.000	
					Pakaian Dinas ASN	Kab. Temanggung	Pakaian dinas ASN	28	Stel	0	20.000.000	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							
					Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional/lapangan	Kab. Temanggung	Tersedianya bbm, pajak, service kendaraan	12	Bulan	659.959.740	660.212.190	
					Pembangunan Gedung Arsip	Kab. Temanggung	Tersedianya Gedung arsip	12	Bulan	0		
					Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Terlaksananya rehabilitasi kantor DPRD	12	Bulan	85.000.000	105.000.000	

Kode Rekenig					Urusan/Bidang Pemerintah Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana 2025	Sumber Dana
Ursn	Bid. Ursn	Prog.	Keg.	Sub. Keg.			Indikator	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasana gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Tersedianya perawatan gedung kantor	12	Bulan	125.000.000	35.000.000	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor dan bangunan lainnya	Kab. Temanggung	Tersedianya biaya perawatan peralatan gedung kantor	12	Bulan	25.000.000	15.000.000	
					Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD							
					Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya gaji DPRD	12	Bulan	25.332.948.480	24.302.291.519	
					Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kabupaten Temanggung	Tersedianya seragam DPRD	45	orang	590.999.900	432.410.440	
					Pelaksanaan Medichal Check Up DPRD	Kab. Temanggung	Terksananya medical check	45	Orang	90.000.000	90.000.000	
					Pelayanan Administrasi DPRD							
					Fasilitasi Rapat Koodinasi dan Konsultasi DPRD	Kab. Temanggung	Tersedia jamuan rapat	100	Hari	100.068.500	110.004.070	
					Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya kebutuhan rumah tangga Ketua DPRD	12	Bulan	282.000.000	310.000.000	
					PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD							
					Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD							

					Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur	Terlaksananya pembahasan raperda	12	Bulan	2.194.634.800	2.766.453.910	
Kode Rekening					Urusab/Bidang Pemerintah Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana 2025	Sumber Dana
Ursn	Bid. Ursn	Prog.	Keg.	Sub. Keg.			Indikator	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					Hearing	Kab. Temanggung	Terlaksananya hearing DPRD	5	Kali	0	350.000.000	
					Penyelenggaraan Kajian Perundang – Undangan	Kab. Temanggung	Terlaksananya kajian	12	Paket	325.302.500	357.832.750	
					Survey Kepuasan Terhadap Kinerja DPRD	Kab. Temanggung	Terlaksananya survey kinerja DPRD	1	Paket	0	0	
					Fasilitasi Penyusunan Penjelasan Keterangan dan atau Naskah Akademik	Kab. Temanggung	Tersedianya naskah akademik	12	Paket	700.000.000	1.108.140.532	
					Pembahasan Kebijakan Anggaran							
					Pembahasan KUA dan PPAS	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan KUA dan PPAS	1	Kegiatan	206.505.000	252.200.408	
					Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1	Kegiatan	206.505.000	252.200.408	
					Pembahasan APBD	Jateng - DIY	Terlaksananya pembahasan APBD	1	Kegiatan	112.986.000	126.100.253	
					Pembahasan APBD Perubahan	Jateng – DIY	Terlaksananya pembahasan APBD Perubahan	1	Kegiatan	112.986.000	126.100.253	
					Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah							
					Pengawasan urusan pemerintah bidang pemerintahan dan hukum	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengawasan bidang pemerintahan dan hukum	40	Hari	44.000.000	44.000.000	

					Pengawasan urusan pemerintah bidang infrastruktur		Terlaksananya pengawasan bidang infrastruktur	40	Hari	44.000.000	48.400.000	
Kode Rekening					Urusan/Bidang Pemerintah Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Rencana Kerja Tahun 2024				Prakiraan Maju Rencana 2025	Sumber Dana
Urs	Bid. Ursn	Prog.	Keg.	Sub. Keg.			Indikator	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif		
1					2	3	4	5	6	7	8	9
					Pengawasan urusan pemerintah bidang kesejahteraan rakyat	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengawasan bidang kesejahteraan rakyat	40	Hari	44.000.000	48.400.000	
					Penawasan urusan bidang perekonomian	Kab. Temanggung	Terlaksananya pengawasan bidang perekonomian	40	Hari	52.000.000	57.200.000	
					Peningkatan Kapasitas DPRD							
					Bimbingan Teknis DPRD	Jakarta, Jateng, DIY	Terlaksananya bimtek DPRD	6	Kali	2.625.044.500	2.777.548.952	
					Orientasi DPRD			1	Kali	435.037.500		
					Publikasi dan dokumentasi dewan	Kab. Temanggung	Tersedianya dokumentasi dewan	12	Bulan	166.337.151	228.956.336	
					Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kab. Temanggung	Terbayarnya honor tenaga ahli fraksi	12	Bulan	222.171.700	241.487.400	
					Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat							
					Penyusunan Pokok – Pokok Pikiran DPRD	Kab. Temanggung	Tersedianya pokok pikir DPRD	2	Kali	125.000.000	142.673.000	
					Pelaksanaan Reses	Kab. Temanggung	Terlaksananya reses	3	Kali	1.472.211.000	1.560.241.100	
					Fasilitasi tugas DPRD							
					Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD	Jateng, DIY, Jabar, Luar Jawa	Terlaksananya kunjungan kerja	12	Bulan	10.905.768.000	7.639.354.089	
										51.717.637.326	54.446.493.570	

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2024 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Sekretariat DPRD untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Sekretariat DPRD itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Sekretariat DPRD dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2021. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2024 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 42.760.063.171,- (83,62%), belanja Modal sebesar Rp. 105.000.000,- (93,88%), sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2024 Sekretariat DPRD mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 48.442.805.978,- yang terdiri dari 2 program antara lain program penunjang urusan pemerintah daerah dan program pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan Visi dan Misi Sekretariat DPRD dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika

menungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, Juni 2022
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN TEMANGGUNG

AGUS MUNADI, S Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19681210 199001 1 001

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024

Berikut link download/unduh filenya:

<https://drive.google.com/file/d/16PWLsewOUVz7B9DDizJ8j61SarI2HRzu/view?usp=sharing>



**RENCANA KERJA
(RENJA)
INSPEKTORAT
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2024**

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
INSPEKTORAT**

Jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung Kode Pos Nomor 56216 Telepon (0293) 492422
Faksimile (0293) 491040 Surat Elektronik . temanggunginspektorat@gmail.com
Laman . www.inspektorat.temanggungkab.go.id

HALAMAN VERIFIKASI

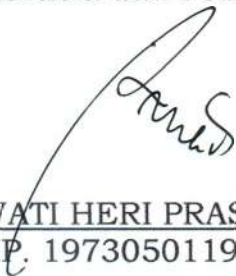
**RENCANA KERJA (RENJA)
INSPEKTORAT
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024**

Disusun Oleh :

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
INSPEKTORAT**


Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator
Pada Tanggal : 03 Juli 2023

Koordinator
Bidang Pembangunan
Manusia dan Pemerintahan



RINAWATI HERI PRASTUTI, SE, MM
NIP. 197305011996032004

Petugas Verifikator



EKO BUDI MULYANTO, S.E., M.M
NIP. 196811171990031002

Mengetahui,

KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 19740508 200312 1 008

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini dapat diselesaikan. Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja ini, untuk itu kami sangat mengharapkan masukan-masukan positif dari semua pihak. Sedangkan keberhasilan pelaksanaan dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) akan sangat bergantung pada komitmen semua pihak yang secara tidak langsung terlibat dalam penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan, termasuk ketersediaan Sumber Daya Pendukung dalam pelaksanaan kegiatan. Akhirnya kami berharap semoga Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) ini dapat bermanfaat, khususnya bagi Inspektorat.

Temanggung, Juli 2023



INSPEKTUR
KABUPATEN TEMANGGUNG

EKO SUPRAPTO, S.H., M.M. *AS*

Pembina Utama Muda
NIP. 19650425 199803 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I : PENDAHULUAN.	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	10
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung	30
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung	42
2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD	43
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat	50
2.6 Inovasi Perangkat Daerah	50
2.7 Penghargaan / Prestasi	50
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	51
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	51
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat	51
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	55
4.1 Program dan Kegiatan	55
BAB V PENUTUP	65

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat	11
Tabel 2.2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat s.d Triwulan I Tahun 2023	19
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Inspektorat Triwulan I Tahun 2023 Kabupaten Temanggung	31
Tabel 2.4 Nomenklatur Indikator pada Data Pokok Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	41
Tabel 2.5 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022	44
Tabel 2.6 Daftar Inovasi Inspektorat Kabupaten Temanggung tahun 2019 - 2023	50
Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024	52
Tabel 4.1. Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2024	56
Tabel 4.2 Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2024	59

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan	2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

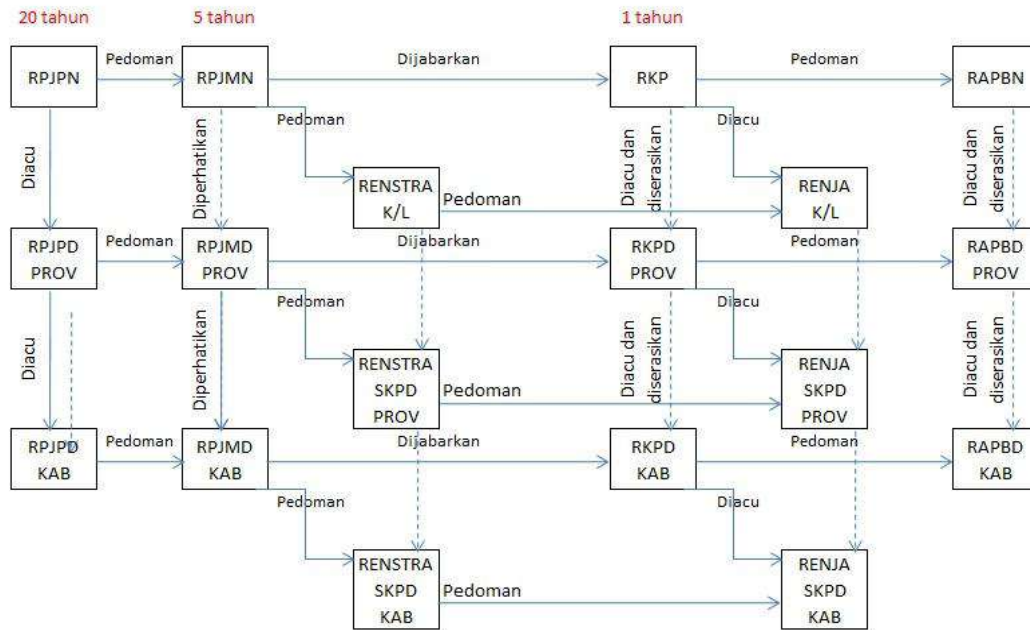
RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah, serta rencana pendanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan jangka waktu RPD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Inspektorat Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Renja Inspektorat Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Inspektorat Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Inspektorat, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Inspektorat, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Inspektorat;
- 2) Kondisi pelayanan Inspektorat;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat;
- 4) Data Pokok Pembangunan Inspektorat;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Inspektorat;

- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Inspektorat

b. Analisis gambaran pelayanan Inspektorat;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Inspektorat adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Inspektorat.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Inspektorat untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2023, dan perkiraan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Inspektorat.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun lalu berdasarkan renstra Inspektorat;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Inspektorat. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Inspektorat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Inspektorat tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Inspektorat;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Inspektorat;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Inspektorat sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Inspektorat tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Inspektorat

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Inspektorat dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Inspektorat;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Inspektorat;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Inspektorat;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Inspektorat.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Inspektorat .

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Inspektorat. Namun dalam proses ini Inspektorat mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting

terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Inspektorat:

Penyusunan dokumen rancangan Renja Inspektorat merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Inspektorat :

Penyempurnaan rancangan Renja Inspektorat perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Inspektorat dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Inspektorat dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Inspektorat yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Inspektorat Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Inspektorat untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Inspektorat Tahun 2024 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Inspektorat Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Inspektorat Tahun 2024; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Inspektorat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA Inspektorat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2022 dan Capaian Renstra Inspektorat Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2022 terhadap capaian Renstra Inspektorat Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2023.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Inspektorat sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023 terhadap target di Tahun 2023.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Inspektorat Tahun 2018-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun ke-empat pelaksanaan Renstra Inspektorat 2018-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat

Indikator Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD : Indeks Persepsi Anti Korupsi

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2021		TARGET 2022			REALISASI 2022		CAPAIAN 2022		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
6.01	PENGAWASAN				5.279.387.681				4.642.388.000	6.209.389.998		6.002.199.265	99,41		
60101	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)		-	4.460.887.681	-	-	100	4.434.388.000	5.405.202.648	100	5.190.322.100	100	96,02	
601012.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	4.152.387.681	-	-	12	4.147.388.000	5.112.359.249	12	4.955.091.933	100	96,92	
601012.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Bulan	-	4.137.387.681	-	-	12	4.137.388.000	5.102.359.249	12	4.491.209.726	100	96,92	
		Terpenuhinya Penyediaan Gaji PNS	Bulan	-	-	-	-	12		2.798.759.249	12	2.732.930.708	100	97,65	
		Terpenuhinya Tambahan Penghasilan PNS	Bulan	-	-	-	-	12		2.303.600.000	12	2.212.164.225	100	96,03	
601012.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya fasilitas lembur	Bulan	-	15.000.000	-	-	12	10.000.000	10.000.000	12	9.997.000	100	99,97	
601012.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	30.000.000	-	-	6	150.000.000	22.559.900	6	21.047.682		93,30	
601012.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Bimtek, Workshop, Seminar dan PKS di Inspektorat Kabupaten Temanggung	Kegiatan	-	30.000.000	-	-	6	150.000.000	22.559.900	6	21.047.682	100	93,30	

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2021		TARGET 2022			REALISASI 2022		CAPAIAN 2022		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
601012.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	191.000.000	-	-	12	143.000.000	154.950.000	12	139.734.249		90,18	
601012.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	-	3.000.000	-	-	12	2.000.000	1.992.100	12	1.977.500	100	99,27	
601012.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bulan	-	30.000.000	-	-	12	25.000.000	25.000.000	12	23185500	100	92,74	
601012.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Bulan	-	45.000.000	-	-	12	40.000.000	40.000.000	12	33.393.600	100	83,48	
601012.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Harian, Rapat, Tamu dan Kegiatan	Bulan	-	50.000.000	-	-	12	50.000.000	9.828.000	12	9.212.400	100	93,74	
601012.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Telaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bulan	-	60.000.000	-	-	12	60.000.000	77.131.000	12	73.130.018	100	94,81	
601012.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Unit					22	-	38.327.500	22	38300.000	100	99,93	
601012.07.05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor(2 meja telepon, 9 meja staff)	Unit					21	131.125.000	33.327.500	21	33.300.000	100	99,92	
601012.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Papan Nama Identitas kantor	Unit	-	-	-	-	1	65.550.000	5.000.000	1	5.000.000	100	100	

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISA SI		TARGET 2022			REALISASI 2022		CAPAIAN 2022		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
601012.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Bulan	-	10.000.000	-	-	12	10.000.000	7.993.400	12	6.310.600	100	78.95	
601012.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Bulan	-	5.000.000	-	-	12	5.000.000	5.000.000	12	3.352.000	100	67.04	
601012.08.0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa Kebersihan kantor	Bulan	-	5.000.000	-	-	12	5.000.000	2.993.400	12	2.958.600	100	98.84	
601012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Bulan	-	77.500.000	-	-	12	75.000.000	75.999.999	12	71.522.255	100	94.11	
601012.09.0 1	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	Bulan	-	70.000.000	-	-	12	70.000.000	69.999.999	12	65.528.255	100	93.61	
601012.09.1 0	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor	Bulan	-	7.500.000	-	-	12	5.000.000	6.000.000	12	5.994.000	100	99,90	
	Rata -rata capaian kinerja Program												100		
	Predikat												Sangat Tinggi		
60102	Program Penyelenggaraan Pengawasan				475.000.000					214.347.097	27	196.529.539			
		Persentase tindak lanjut hasil temuan	%	100				100			100		100		

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2021		TARGET 2022			REALISASI 2022		CAPAIAN 2022		KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	46				42				80.28		100		
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	23				17				38.17		100		
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	%	48				31				15,46		91.17		
601022.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				380.000.000				557.000.000	411.790.250	-	400.870.086				
601022.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan hasil Kegiatan Audit Kinerja	OPD	-	30.000.000	-	-	3	27.000.000	7.499.650	5	7.353.500	100	98.05		
601022.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Bimtek dan penyusunan LKJIP, SAKIP 46 Perangkat daerah, evaluasi SAKIP kabupaten, reviu RKPD Perubahan, reviu renja PD		-	110.000.000	-	-	47	110.000.000	104.790.600	114	104.724.600	100	99.94		

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2021		TARGET 2022			REALISASI 2022		CAPAIAN 2022		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
601022.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu RKA, DAK, LKPJ	Dokumen	-	80.000.000	-	-	25	80.000.000	80.000.000	144	79.692.200	100	99.62	
601022.01.05	Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan pada Desa	LHP	-	80.000.000	-	-	45	110.000.000	84.500.000	280	83.848.921	100	99	
6010220106	Kerjasama Pengawasan Internal	Terlaksananya Kegiatan Gelar Pengawasan Daerah	Kegiatan					1	60.000.000	60.000.000	1	58.051.000	100	97	
601022.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP			-	-	-	-		230.000.000	75.000.000	-	67.199.865	100	89.60	
		Jumlah Obyek pemeriksaan yang menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK, BPKP, dan Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten Temanggung	Obrik	-	-	-	-	115	-	-	132	-	100		
		Tersedianya data hasil pemeriksaan yang akurat dan akuntabel	Bulan	-	-	-	-	12	-	-	12	-	100		
601022.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									49.413.500	-	48.761.577		98.68	
601022.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Tertanganinya aduan masyarakat, limpahan pengawasan APH dan Inspektorat Provinsi	Persen	-	-	-	-	100	15.000.000	10.813.500	100	10.757.777	100	99.48	

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI		TARGET 2022			REALISASI 2022		CAPAIAN 2022		KET
				K	Rp	s/d 2021		K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	
						K	Rp								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
601022.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya kegiatan probity audit, Reviu ASB, Reviu HSPK/ SSH, Reviu BMD, Pengawasan Dana Bos, Pemeriksaan Kas	OPD	-	-	-	-	60	80.000.000	38.600.000	144	38.003.800	100	98.46	
Rata -rata capaian kinerja Program													100		
Predikat													Sangat Tinggi		
60103	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi								208.000.000	342.983.600	-	323.945.496		94.45	
		Nilai Maturitas SPIP	Angka	2				3,15			3.008		95,49		
		Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	60				40			100		100		
		Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100				100			100		100		
		Nilai Survey Penilaian Integritas	%	81,97				81,77			77.37		95		
		Persentase penanganan aduan masyarakat	%	100				100			100		100		

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI s/d 2021		TARGET 2022			REALISASI 2022		CAPAIAN 2022		KET	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16
601032.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan										40.478.100		39.445.660	100	97.45	
601032.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan															
		Terlaksananya kegiatan rakor pengawasan nasional regional, larwasda, desk PKPT	Kegiatan	-	-	-	-	8	-	-	-	10	-	100	-	
		Tersusunnya Perubahan Perencanaan Pengawasan dan SK Program Pengawasan Tahunan	Buku	-	-	-	-	20	-	-	-	20	-	100	-	
601032.02	Pendampingan dan Asistensi							-	208.000.000	302.505.500	-	284.499.836		94.05		
601032.02.03	Koordinasi, Monitoring dan evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi			-	-	-	-	-	300.000.000	270.000.000	-	252.399.136	100	93.48		
		Prosentase terlaksananya survey penilaian integritas pada obyek yang ditentukan KPK dan pelaporan ke Pusat	Persen	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	
		Terfasilitasinya pengaduan gratifikasi	Persen	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	100		

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI		TARGET 2022			REALISASI 2022		CAPAIAN 2022		KET	
				K	Rp	s/d 2021		K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp		
						K	Rp									K
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		Terlaksanya laporan pajak-pajak pribadi (4000) dan kekayaan melalui aplikasi SIKARKA (500)	Laporan	-	-	-	-	4.500		-	4.616	-	100			
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan audiensi saber pungli	Kegiatan	-	-	-	-	5	-	-	5	-	100			
		Terlaksanya pemenuhan elemen ZI	OPD	-	-	-	-	5	-	-	7	-	100			
601032.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Terlaksananya Bimtek SPIP OPD dan pendampingan Penyusunan RTP Tahun 2021	Kegiatan	-	-	-	-	1	50.000.000	32.505.500	1	32.100.700	100	98.75		
													Rata -rata capaian kinerja Program		100	
													Predikat		Tinggi	
	JUMLAH INDIKASI BELANJA LANGSUNG								4.642.388.000	6.209.389.998		5.963.899.265				
													Rata -rata capaian kinerja Program Kegiatan		100	96.05
													Predikat		Sangat tinggi	
													rata-rata capaian kinerja Program		98.90	
													Predikat		Telah Tercapai	

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Inspektorat
s.d Triwulan I Tahun 2023

Indikator Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD : Indeks Persepsi Anti Korupsi

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISAS I		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		KET
						s/d 2021					K	Rp	K	Rp	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6.01	PENGAWASAN				5.279.387.681				6.018.210.827	6.618.139.197	86	1.288.653.526			
60101	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)		-	4.460.887.681	-	-	100	5.718.494.827	5.849.707.597	78	1.216.463.530	78,40	20,80	
601012.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	4.152.387.681	-	-	24	5.449.664.827	5.465.382.704	35	1.125.255.674	63	10,31	
601012.02.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Bulan	-	4.137.387.681	-	-	35	5.449.664.827	5.455.382.704	35	1.125.255.674	100	20,63	
		Terpenuhinya Penyediaan Gaji PNS	Bulan	-	-	-	-	35		2.840.926.704	35	579.825.396	100	20,41	
		Terpenuhinya Tambahannya Penghasilan PNS	Bulan	-	-	-	-	35		2.614.456.000	35	545.430.278	100	20,86	
601012.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	tersedianya fasilitas lembur	Bulan	-	15.000.000	-	-	37	20.000.000	20.000.000	37	18.841.800	25	0,00	
601012.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	30.000.000	-	-	37	20.000.000	20.000.000	37	18.841.800	100	94,21	
601012.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Bimtek, Workshop, Seminar dan PKS di Inspektorat Kabupaten Temanggung	Kegiatan	-	30.000.000	-	-	37	20.000.000	20.000.000	37	18.841.800	100	94,21	

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISAS I		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		KET
						s/d 2021									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
601012.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			-	191.000.000	-	-	10,6	172.830.000	172.830.000	2	55.247.186	20	19	
601012.06.01	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Bulan	-	3.000.000	-	-	5	2.000.000	2.000.000	-	89.000	-	4,45	
601012.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Bulan	-	30.000.000	-	-	12	25.000.000	25.000.000	3	1.640.000	25	6,56	
601012.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Bulan	-	45.000.000	-	-	12	35.000.000	35.000.000	3	2.439.750	25	6,97	
601012.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman Harian, Rapat, Tamu dan Kegiatan	Bulan	-	50.000.000	-	-	12	42.830.000	42.830.000	3	1.658.250	25	3,87	
601012.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Telaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Bulan	-	60.000.000	-	-	12	68.000.000	68.000.000	3	49.420.186	25	72,68	
601012.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Unit					10	135.000.000	119.999.893	-	-	-	-	
601012.07.05	Pengadaan Mebel	Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor(2 meja telepon, 9 meja staff)	Unit					10	35.000.000	29.999.893	-	-	-	-	
601012.07.10	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Tersedianya Papan Nama Identitas kantor	Unit	-	-	-	-	10	100.000.000	90.000.000	-	-	-	-	

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISAS I		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		KET
						s/d 2021					K	Rp	K	Rp	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
601012.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Bulan	-	10.000.000	-	-	12	9.000.000	8.999.000	3	872.300	25	10	
601012.08.0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Bulan	-	5.000.000	-	-	12	5.000.000	5.000.000	3	212.500	25	4,25	
601012.08.0 3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa Kebersihan kantor	Bulan	-	5.000.000	-	-	12	4.000.000	3.999.000	3	659.800	25	16,50	
601012.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			-	77.500.000	-	-	44	67.000.000	62.496.000	1	16 246 570	2,22	26,00	
601012.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	-	70.000.000	-	-	15	60.000.000	60.000.000	1	15.781.570	7	26,30	
601012.09.5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	-	7.500.000	-	-	6	2.500.000	2.496.000	-	-	-	0,00	
601012.09.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit					23	4.500.000	4.500.000		465.000	-	10,33	
Rata -rata capaian kinerja Program												35,9 7			
Predikat												Sangat rendah			

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI I		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		KET
						s/d 2021									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60102	Program Penyelenggaraan Pengawasan				475.000.000			-		468.715.600	6	49.131.981		10,48	
		Persentase tindak lanjut hasil temuan	%	100				100			100		100		
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	46				46			95.77		95.77		
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	23				23			41.40		41.40		
		Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	%	48				48			93.06		93.06		
601022.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				380.000.000				418.716.000	418.715.600	4	41.653.891	6,75	14,60	
601022.01.01	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya Laporan hasil Kegiatan Audit Kinerja	OPD	-	30.000.000	-	-	4	8.000.000	7.999.900	-	3.073.750	-	38,42	
601022.01.03	Reviu Laporan Kinerja	Terlaksananya Bimtek dan penyusunan LKJIP, SAKIP 46 Perangkat daerah, evaluasi SAKIP		-	110.000.000	-	-	54	110.000.000	110.000.000	12	16.411.500	22	14,92	

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI I		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		KET	
						s/d 2021										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		kabupaten, reviu RKPD Perubahan, reviu renja PD														
601022.01.04	Reviu Laporan Keuangan	Terlaksananya Reviu RKA, DAK, LKPJ	Dokumen	-	80.000.000	-	-	64	80.000.000	80.000.000		3.968.000	-	4,96		
601022.01.05	Pengawasan Desa	Terlaksananya Pengawasan pada Desa	LHP	-	80.000.000	-	-	52	85.000.000	85.000.000	6	2.914.550	12	3,43		
601022.01.07	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	-	-	-	-	180	135.716.000	135.715.700		15.286.091	-	11,26		
601022.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu									50.000.000	2	7.478.090	100	25,78		
601022.02.01	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah	Tertanganinya aduan masyarakat, limpahan pengawasan APH dan Inspektorat Provinsi	Persen	-	-	-	-	5	11.000.000	11.000.000	1	4.961.500	100	45,10		
601022.02.02	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terlaksananya kegiatan probity audit, Reviu ASEB, Reviu HSPK/SSH, Reviu BMD, Pengawasan Dana Bos, Pemeriksaan Kas	OPD	-	-	-	-	3	39.000.000	39.000.000	3	2.516.590	100	6,45		
																Rata -rata capaian kinerja Program
																41,72
																Predikat rendah

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATU AN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISAS I		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		KET
						s/d 2021									
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
60103	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi								299.716.000	299.716.000	2	23.058.015		7,69	
		Nilai Maturitas SPIIP	Level	3.3				3,30			3.008		91,15		
		Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	60				20			100		100		
		Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100				100			100		100		
		Nilai Survey Penilaian Integritas	angka	81,97				81,9 7			77,37		94,39		
		Persentase penanganan aduan masyarakat	%	100				100			100		100		
601032.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan							1	36.000.000	36.000.000	-	1.544.000	0	4,28	
601032.01.0 1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan							1	36.000.000	36.000.000	-	1.544.000	0	4,28	
601032.02	Pendampingan dan Asistensi							-	263.716.000	263.716.000	2	21.514.015		8,16	

KODE	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)		REALISASI I s/d 2021		TARGET 2023			REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		KET
				K	Rp	K	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
601032.02.03	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	-	-	-	-	15	230.716.000	230.716.000	4	21.514.015	26,67	9,32	
601032.02.04	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Perangkat Daerah	-	-	-	-	10	33.000.000	33.000.000	-	-	0	0	
Rata -rata capaian kinerja Program												7			
Predikat												Sangat Rendah			
	JUMLAH INDIKASI BELANJA LANGSUNG								6.018.210.827	6.618.139.197		1.288.653.526			
Rata -rata capaian kinerja Program Kegiatan												28,12			
Predikat												Sangat Rendah			
rata-rata capaian kinerja Program												65,06			
Predikat												Sangat Rendah			

Dari Tabel 2.1. diatas diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2022 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung berupa :

- 1) Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN target tercapai 100%;
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN target sudah tercapai 100 %;
 - c. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi target sudah tercapai 100%;
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor target tercapai 100 %;
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor target tercapai 100%;
 - f. Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan target tercapai 100%;
 - g. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu target tercapai 100%;
 - h. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD target tercapai 100%;
 - i. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel target tercapai 100%;
 - j. Sub Kegiatan Pengadaan sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya target tercapai 100%;

- k. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat target tercapai 100%;
 - l. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor target tercapai 100%;
 - m. Sub Kegiatan Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan tercapai 100%;
 - n. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya target tercapai 100%;
 - o. Sub Kegiatan Tersusunnya Laporan hasil Kegiatan Audit Kinerja target tercapai 100%;
 - p. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja target tercapai 100%;
 - q. Sub Kegiatan Reviu Laporan Keuangan target tercapai 100%;
 - r. Sub Kegiatan Pengawasan Desa target tercapai 100%;
 - s. Sub Kegiatan Kerjasama Pengawasan Internal target tercapai 100%;
 - t. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIPSub Kegiatan target tercapai 100%;
 - u. Sub Kegiatan Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/ Daerah target tercapai 100%;
 - v. Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu target tercapai 100%;
 - w. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan target tercapai 100%;
 - x. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas target tercapai 100%;
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sebagai berikut ;
- a. Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah daerah target tercapai 167%;

- b. Sub Kegiatan Reviu Laporan Kinerja target tercapai 576%;
- c. Sub Kegiatan Pengawasan Desa target tercapai 622% ;
- d. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIPSub Kegiatan target tercapai 115%;
- a. Sub Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu target tercapai 250%;
- e. Sub Kegiatan Terlaksananya Kegiatan Rakor Pengawasan nasional regional, Larwasda desk PKPT target tercapai 125%
- f. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi target tercapai 108.52%.

3) Pada tahun 2022 tidak ada Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan .

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Inspektorat. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022, maka dapat dikatakan bahwa Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Telah Tercapai** yaitu dengan nilai **98.90%,**.

Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Indikator Tujuan :
 - a. Indeks Persepsi Anti Korupsi, tercapai 100,3% dari target yang ditentukan yaitu nilai 3,93 tercapai 4,061

2. Indikator Sasaran :
 - a. Persentase tindak lanjut hasil temuan, mencapai 100 %;
 - b. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi mencapai 191 %;
 - c. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara mencapai 225%;
 - d. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa mencapai 294%;
 - e. Nilai Maturitas SPIP mencapai 95.49 %;
 - f. Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) mencapai 100%;
 - g. Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi mencapai 100%;
 - h. Nilai Survey Penilaian Integritas mencapai 95%; dan
 - i. Persentase penanganan aduan masyarakat mencapai 100%;

Dari Tabel 2.1. dan Triwulan I tahun 2023 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2022 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung

2.2.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Data Pokok Perencanaan Inspektorat Kabupaten Temanggung terdapat 1 (satu) Indikator yaitu:

1. Indeks Persepsi Anti Korupsi.

Adapun hasil capaian kinerja pada Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 sebagaimana tabel 2.3 berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Inspektorat Triwulan I Tahun 2023
Kabupaten Temanggung

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIA N s.d 2021 (%)	STATUS			
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	AT	UK	
A	INDIKATOR SASARAN																
1	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Angka	3,4	3,5	3,6	3,93	3,95	3,92	3,92	3,61	4,061	4,061	100	TT			
B	INDIKATOR PROGRAM																
1	Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT			
2	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	n.a	n.a	35	42	46	n.a	n.a	35,21	80.28	92.96	100	TT			
3	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%			10	17	23	n.a	n.a	12,37	38.17	43.01	100	TT			

N O	INDIKATOR KINERJA	SATUA N	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIA N s.d 2021 (%)	STATUS		
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	A T	U K
4	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	%			15	31	48	n.a	n.a	15,46	91,17	98.11	100	TT		
5	Nilai Maturitas SPIP	Level	3,045	3,045	3,15	3,15	3,3	3,045	3,045	3,045	3,008	3,008	91,15		AT	
6	Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	n.a	0	20	40	60	n.a	n.a	40	100	100	100	TT		
7	Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	n.a	n.a	100	100	100	n.a	n.a	100	100	100	100	TT		
8	Nilai Survey Penilaian Integritas	Angka	n.a	81,47	81,57	81,77	81,97	n.a	n.a	78,70	77,37	77,37	94,39		AT	
9	Persentase penanganan aduan masyarakat	%	n. a	100	100	100	100	n. a	n.a	100	100	100	100	TT		
			Capaian Kinerja Sasaran										100	1	0	0
			Capaian Kinerja Program										98,90	7	2	0
			Rata-rata capaian kinerja perangkat daerah										99,45	8	2	0

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

I. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 8 terdiri dari:

1. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

a. Faktor pendorong Indikator tersebut adalah :

- Pengadaan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien;
- Dukungan peraturan yang mengatur tentang pencegahan korupsi;
- Penerapan teknologi informasi yang baik (e planning budgeting, laporan pengaduan, laporan spam, sms gateway);
- nilai kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan public yang memadai sesuai survey yang telah di lakukan

b. Faktor Penghambat Indikator tersebut :

- Pengendalian risiko organisasi belum memadai;
- Belum sepenuhnya menerapkan reward dan punishment dalam organisasi;
- Organisasi belum sepenuhnya melaksanakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM);

c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut :

- Melaksanakan penyusunan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi, meningkatkan upaya pendidikan dan budaya anti korupsi, dan penguatan regulasi dan kelembagaan pencegahan korupsi;
- Perbaiki tata kelola birokrasi yang semakin transparan dan bebas korupsi sehingga pungli layanan masyarakat semakin berkurang;
- Mendorong dikembangkannya berbagai bentuk pemberian reward bagi pegawai yang berprestasi, dan penegakan disiplin serta kode etik bagi pegawai dari pimpinan sampai bawahan;
- Mendorong dan memonitor OPD dalam pemenuhan 8 indikator hasil dan 20 indikator proses sebagai syarat ditetapkan WBK/WBBM.

2. Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan
 - a. Faktor pendorong Indikator tersebut adalah :
 - Tuntutan peraturan terhadap proses tindak lanjut temuan yang harus dilaksanakan;
 - Keinginan PD untuk segera menyelesaikan Tindak Lanjut temuan untuk perbaikan organisasi;
 - Adanya Tim Pemantauan Tindak Lanjut yang bertugas memonitor progres penyelesaian tindak lanjut pada Obrik;
 - Tersedianya anggaran untuk melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan;
 - Adanya klinik konsultasi yang membuka pelayanan konsultasi dari Obyek yang diperiksa.
 - b. Faktor penghambat Indikator tersebut adalah :
 - Kurangnya komitmen pimpinan obyek pemeriksaan untuk melakukan Tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan;
 - Temuan pemeriksaa terkait kebijakan lama ditidakklanjuti dikarenakan proses perubahan kebijakan yang memerlukan waktu;
 - Progres hasil pemantauan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan belum didukung aplikasi;
 - SDM APIP kurang/terbatas.
 - c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut :
 - Perlu dilaksanakan LARWASDA yang isinya memaparkan hasil temuan dan tindaklanjuti dari obrik kepada Bupati dengan mengundang Obyek yang diperiksa;
 - Dilakukan Desk kepada Obrik yang penyelesaian tindak lanjutnya lama;
 - Diperlukan Aplikasi yang mengcover Progres Tindak Lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan
3. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi
 - a. Faktor pendorong Indikator tersebut adalah
 - Peraturan menteri dalam negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
 - Permendagri Nomor 86 tahun 2017;

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem AKIP

b. Faktor Penghambat Indikator tersebut:

- kurang pahamnya auditor dalam melaksanakan evaluasi SAKIP.,
- Kurang Pahamnya Perangkat daerah terhadap implementasi SAKIP,
- Dokumen LPPD dikirim ke Inspektorat setelah disusun oleh tim(terlambat) sehingga waktu reviu terbatas
- Pelaksanaan reviu renja terbatas, dilaksanakan oleh 1 tim.

c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut:

- Melaksanakan peningkatan kompetensi terhadap evaluator/Auditor.;
- Melaksanakan bimtek SAKIP untuk OPD;
- Reviu LPPD dilaksanakan secara pararael, bersamaan dengan penyusunan dokumen LPPD untuk mengurangi temuan yang harus di tindaklanjuti;
- Pelaksanaan Reviu renja dilaksanakan dengan 1 tim besar dengan penambahan anggota tim dari Tim Irban lain

4. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara

a. Faktor Pendorong Indikator Kinerja tersebut :

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/Pmk.07/2021 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan Dampaknya,
- Permendikbud Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

b. Faktor Penghambat Indikator Kinerja tersebut :

- Pelaksanaan reviu dengan waktu yang mendesak;
- banyaknya tugas mandatori yang mengharuskan Inspektorat untuk mereviu dokumen SECARA mendadak dan dalam

waktu yang singkat (reviu DAK fisik, non fisik dan reviu Inakes) diluar dokumen PKPT, menjadikan tumpang tindih penugasan;

- Jumlah Personil terbatas

c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut:

- Pelaksanaan reviu dilaksanakan secara karantina agar selesai tepat waktu;
- Personil melaksanakan tugas tambahan dengan dobel penugasan

5. Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD sekolah dan pengadaan barang/jasa

a. Faktor pendorong Indikator tersebut adalah :

- Peraturan Kementrian dalam Negeri Nomor 73 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
- Perpres no 12 th 2021 tentang perubahan perpres no 16 th 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- Mandatori dari KPK yang mengharuskan Inspektorat untuk melaksanakan Monev semua Aset Desa

b. Faktor penghambat indikator tersebut adalah :

- Belum sepenuhnya auditor telah mengikuti pelatihan Pengadaan barang dan Jasa
- Jumlah personil yang terbatas
- Belum semuanya dapat dilakukan pengawasan
- Adanya penugasan mandatori diluar PKPT yang mengakibatkan pelaksanaan tugas berbenturan

c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut :

- Auditor diusulkan untuk mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa
- Personil melaksanakan tugas tambahan
- Pemilihan obrik dilakukan dengan pemetaan risiko
- Memasukkan tugas mandatori ke dalam Dokumen PKPT selanjutnya

6. Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

- a. Faktor pendorong Indikator tersebut adalah :
- Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ;
 - Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan;
 - Adanya pendampingan dari Tim penilai internal Kabupaten Temanggung
- b. Faktor penghambat indikator tersebut adalah :
- Kurangnya komitmen OPD untuk melaksanakan pembangunan Zona Integritas;
 - Zona Integritas merupakan kegiatan baru, sehingga masih dibutuhkan pendalaman dan pengembangan informasi ;
 - Adanya mutasi pegawai
- c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut :
- Dilakukan pendampingan yang lebih intensif kepada OPD yang telah dicanangkan sebagai Zona Integritas;
 - Berkoordinasi dengan Kemenpan dan TPI dalam rangka Sinkronisasi kegiatan ZI
 - Dilaksanakan sosialisasi kepada OPD yang dicanangkan sebagai Zona Integritas

7. Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi

- a. Faktor pendorong Indikator tersebut adalah :
- Perbup 74 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistle Blowing System) Kabupaten Temanggung;
 - Adanya penugasan untuk melaksanakan pemeriksaan investigasi terkait WBS;
 - Perbup 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Kabupaten Temanggung;
 - Perbup 72 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Kabupaten Temanggung,
 - Dukungan KPK dalam memberikan arahan teknis pelaksanaan;
 - Tersedianya anggaran untuk mendukung kegiatan

- b. Faktor penghambat Indikator tersebut adalah:
- Kurangnya informasi sebagai bahan pemeriksaan investigasi dan komitmen atasan pengadu;
 - Kurangnya SDM auditor;
 - Kurang pemahamannya OPD mengenai benturan kepentingan;
 - Kurangnya pemahaman penyelenggara negara/swasta tentang gratifikasi;
 - Belum memasyarakatnya UPG di Kabupaten Temanggung.
- c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut :
- Memprioritaskan penugasan pemeriksaan investigasi;
 - Sosialisasi benturan kepentingan;
 - Perlu dilaksanakan sosialisasi pengendalian gratifikasi;

8. Persentase penanganan aduan masyarakat

- a. Faktor Pendorong Indikator tersebut adalah :
- Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
 - SOP Pengaduan Masyarakat;
 - Adanya anggaran pendukung kegiatan
- b. Faktor Penghambat Indikator tersebut adalah :
- Masyarakat belum semuanya paham tentang tata cara pengaduan, sehingga aduan tidak jelas;
 - Belum semua auditor mengikuti diklat Investigasi dan PPKN;
 - Belum ada tenaga ahli bidang konstruksi bangunan sehingga belum bisa mandiri dalam perhitungan kerugian negara
- c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut:
- Sosialisasi tentang tata cara pengaduan masyarakat;
 - Pelaksanaan Diklat Investigasi dan PPKN;
 - Dalam hal kerugian negara terkait konstruksi bangunan gedung bekerjasama dengan Dpu dalam perhitungannya;
 - Dialokasikan SDM bidang konstruksi dan bangunan

II. Capaian indikator dengan status akan tercapai ada 2 terdiri dari :

1. Nilai Maturitas SPIP

a. Faktor pendorong Indikator tersebut adalah :

- Perbup Nomor 59 Tahun 2010, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemkab Temanggung;
- Perbup Nomor 053 Tahun 2015 tentang Petunjuk pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (JUKLAK SPIP) di Lingkungan Pemkab Temanggung;
- Perbup Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Resiko Pemda;
- Adanya pendampingan atas pelaksanaan SPIP oleh APIP dan BPKP Perwakilan Provinsi Jateng

b. Faktor Penghambat Indikator tersebut adalah :

- Belum semua OPD dan personil mengerti akan pentingnya SPIP;
- Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah;
- APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan terbatasnya sumber daya manusia
- Terbitnya regulasi baru PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah "SPI adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dimana SPIP Terintegrasi merupakan gabungan antara Manajemen Risiko, Pencegahan Korupsi dan Kapabilitas APIP sehingga parameter penilaiannya bertambah/ berkembang

- c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut:
 - Perlu diadakan Bimtek dan pendampingan penyusunan rencana Tindak Pengendalian secara rutin kepada Perangkat daerah, mengingat belum semua perangkat daerah memahami penyusunan Risk Register dan RTP;
 - Perlu dilakukan evaluasi oleh APIP atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian;
 - Perlu dilakukan Self Assesment atas pelaksanaan maturitas SPIP di Kabupaten Temanggung secara rutin (2x setahun)
 - Perlu dilaksanakan sosialisasi, pendampingan dan Bimtek tentang Maturitas Penyelenggaraan SPIP kepada OPD

2. Nilai Survey Penilaian Integritas

- a. Faktor pendorong Indikator kinerja tersebut :
 - Dukungan KPK dalam memberikan arahan teknis pelaksanaan;
 - Adanya anggaran untuk melaksanakan kegiatan
- b. Faktor penghambat indikator kinerja tersebut :
 - Adanya mutasi pegawai sesaat sebelum survei dilaksanakan
- c. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut:
 - Berkoordinasi dengan BKPSDM mengenai informasi kepegawaian yang paling update sesaat sebelum survei dilaksanakan agar populasi sample tepat

III. Capaian indikator dengan status upaya keras pada tahun 2022 telah tercapai.

2.2.2 Data Pokok

Data Pokok pada Inspektorat Daerah Kabupaten Temanggung terdiri dari 1 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Pengawasan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Nomenklatur Indikator pada Data Pokok
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2019	2020	2021	2022	2023
A	INDIKATOR SASARAN						
1	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Angka	3,4	3,5	3,6	3,93	3,95
B	INDIKATOR PROGRAM						
1	Persentase tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan	Persen	100	100	100	100	100
2	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	n.a	n.a	35	42	46
3	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	n.a	n.a	10	17	23
4	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	%	n.a	n.a	15	31	48
5	Nilai Maturitas SPIP	Level	3,045	3,045	3,15	3,15	3,3
6	Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	n.a	0	20	40	60
7	Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	n.a	n.a	100	100	100
8	Nilai Survey Penilaian Integritas	Angka	n.a	81,47	81,57	81,77	81,97
9	Persentase penanganan aduan masyarakat	%	n. a	n.a	100	100	100

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Inspektorat Kabupaten Temanggung dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung dari 10 indikator kinerja kegiatan terdapat 2 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain :
 - a. Nilai Maturitas SPIP

Hal ini disebabkan antara lain :

Belum semua OPD dan personil mengerti akan pentingnya SPIP;

 - Pergeseran/ mutasi pegawai menghambat penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Perangkat Daerah (RTP) sehingga diperlukan refresh atas informasi terkait SPIP kepada Perangkat Daerah;
 - APIP belum dapat mengevaluasi atas pelaksanaan SPIP secara menyeluruh, terbentur dengan terbatasnya sumber daya manusia
 - b. Nilai Survey Penilaian Integritas

Hal ini disebabkan antara lain :

 - Adanya mutasi pegawai sesaat sebelum survei dilaksanakan
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Temanggung antara lain :
 - a. Upaya mempertahankan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Temanggung (terkait dengan penanganan tindak lanjut hasil temuan BPK RI);
 - b. Upaya peningkatkan Nilai Survei Penilaian Integritas;

- c. Peningkatan Pendampingan Perangkat Daerah yang diusukan menuju ZI;
- d. Upaya Peningkatan Nilai MCP Kabupaten Temanggung;
- e. Pergeseran paradigma pengawasan APIP;
- f. Keterbatasan sumberdaya dan regulasi yang melemahkan peran dan fungsi Inspektorat dalam *quality assurance*;
- g. Peningkatan Kapabilitas APIP; dan
- h. Maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Kabupaten Temanggung.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.5

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2022

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
	INSPEKTORAT DAERAH					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
A	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kab Temanggung	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		buku	300
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Temanggung	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	10.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN					
	INSPEKTORAT DAERAH					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
A	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kab Temanggung	Terlaksananya Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah		buku	300
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Temanggung	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	Dokumen	10.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					20.000.000	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					20.000.000
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Temanggung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	37	Orang	20.000.000	a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Temanggung	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	37	Orang	20.000.000
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah					145.000.000	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah					145.000.000
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5	Paket	2.000.000	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5	Paket	2.000.000
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	25.000.000	b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	25.000.000
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	35.000.000	c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	35.000.000
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	15.000.000	d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	15.000.000
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	68.000.000	e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	68.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					135.000.000
a	Pengadaan Mebel	Temanggung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	Unit	35.000.000
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Temanggung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	100.000.000
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Temanggung				-
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					9.000.000
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5.000.000
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	4.000.000
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					67.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					135.000.000
a	Pengadaan Mebel	Temanggung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10	Unit	35.000.000
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Temanggung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	Unit	100.000.000
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Temanggung				-
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					9.000.000
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	5.000.000
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Laporan	4.000.000
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					67.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Temanggung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	Unit	60.000.000
b	Pemeliharaan Mebel	Temanggung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6	Unit	2.500.000
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Temanggung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23	Unit	4.500.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					468.716.000
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					418.716.000
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	4	Laporan	8.000.000
b	Reviu Laporan Kinerja	Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	54	Laporan	110.000.000
c	Reviu Laporan Keuangan	Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	64	Laporan	80.000.000
d	Pengawasan Desa	Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	52	Laporan	85.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Temanggung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15	Unit	60.000.000
b	Pemeliharaan Mebel	Temanggung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6	Unit	2.500.000
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Temanggung	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23	Unit	4.500.000
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					468.716.000
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal					418.716.000
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	4	Laporan	8.000.000
b	Reviu Laporan Kinerja	Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	54	Laporan	110.000.000
c	Reviu Laporan Keuangan	Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	64	Laporan	80.000.000
d	Pengawasan Desa	Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	52	Laporan	85.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1	Kejasama Pengawasan Internal	Temanggung	Terlaksananya Kegiatan LARWASDA	1	Kegiatan	60.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	180	Dokumen	75.716.000
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					50.000.000
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Temanggung	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5	Laporan	11.000.000
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3	Laporan	39.000.000
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					299.716.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					36.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1	Kejasama Pengawasan Internal	Temanggung	Terlaksananya Kegiatan LARWASDA	1	Kegiatan	60.000.000
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	180	Dokumen	75.716.000
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu					50.000.000
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Temanggung	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5	Laporan	11.000.000
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3	Laporan	39.000.000
	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					299.716.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan					36.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Temanggung	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	Rekomendasi	36.000.000
	Pendampingan dan Asistensi					263.716.000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Temanggung	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	15	Kegiatan	230.716.000
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10	Perangkat Daerah	33.000.000

No	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Temanggung	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	Rekomendasi	36.000.000
	Pendampingan dan Asistensi					263.716.000
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Temanggung	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	15	Kegiatan	230.716.000
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10	Perangkat Daerah	33.000.000

Sumber : Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2021 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Temanggung tidak mengampu program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Dalam rangka menunjang kegiatan pengawasan yang lebih efektif, pada Tahun 2024 Inspektorat Kabupaten Temanggung mulai melaksanakan program Pendampingan dan Asistensi dengan kegiatan pembuatan “Pondok Baca Anti Korupsi” yang bertujuan untuk meningkatkan pencegahan anti korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung Sebagaimana disajikan pada table berikut :

Tabel 2.6
Daftar Inovasi Inspektorat Kabupaten Temanggung
2019-2023

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Pondok Baca Anti Korupsi	Seluruh masyarakat	APBD	Menyediakan ruang baca dan bahan bacaan tentang Anti Korupsi	Pondok baca	Masyarakat anti korupsi	Inspektorat - 2024

2.7 Penghargaan / Prestasi

Prestasi Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam mendukung fungsi penunjang pengawasan masih kepada mempertahankan nilai Kapabilitas APIP dan Maturitas SPIP Kabupaten Temanggung pada Level 3.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Inspektorat Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional dan kegiatan yang bersumber dari APBN lainnya. Kebijakan nasional yang diampu oleh Inspektorat lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan Renja PD yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Temanggung seperti, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Saber Pungli, Unit Pengendalian Gratifikasi, Survey Penilaian Integritas, Zona Integritas, Monitoring Centre for Prevention (MCP) dan Peningkatan Kapabilitas APIP.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2023, maka tujuan dari penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah:

1. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik melalui fungsi pengawasan untuk meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan;
2. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Kabupaten Temanggung dalam rangka akuntabilitas kinerja Inspektorat Kabupaten Temanggung.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini adalah dalam rangka:

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen pemerintahan;
2. Mengoptimalkan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
3. Meningkatkan kualitas implementasi pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, penanganan benturan kepentingan, pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System (WBS) serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya.

Adapun keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Inspektorat Kab. Temanggung pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Inspektorat Kabupaten Temanggung Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2024	TARGET KONDISI AKHIR 2024
Meningkatnya kualitas kinerja pemerintahan yang akuntabel, efektif, bersih dan melayani			Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	nilai	B	B
	Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah		Persentase capaian Monitoring Center For Prevention (MCP) KPK	%	93,70	93,70
			Nilai Maturitas SPIP	Level	3,009	3,009
			Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi	angka	2,92	2,92
			Kapabilitas APIP	angka	3	3
			Persentase tindak lanjut hasil temuan	%	100	100
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	%	61	61
			Prosentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	%	48	48
			Prosentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD, sekolah dan pengadaan barang/jasa	%	63	63
	Persentase penanganan aduan masyarakat	%	100	100		

		Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Prosentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	%	100	100
			Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	%	100	100
			Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	%	20	20
			Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	Level	3	3

Sumber : Renstra Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2024-2026.

Kebijakan dan strategi Inspektorat Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Inspektorat Tahun 2024-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Inspektorat Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Inspektorat Tahun 2024 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2024 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pergeseran antar sub kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan di Tahun 2024.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Inspektorat Tahun 2024 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Inspektorat Kab. Temanggung Tahun 2024

RANCANGAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2024			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH	6.524.492.597		UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN INSPEKTORAT DAERAH	6.524.492.597	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.593.356.597	A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.593.356.597	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.138.106.597	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.133.106.597	
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.118.106.597	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.118.106.597	
b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	20.000.000	b	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.000.000	5000000
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	40.000.000	
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000	a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	180.250.000	3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	161.511.200	
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.500.000	
b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	b	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	
c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	c	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	30.000.000	
d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.000.000	d	Fasilitasi Kunjungan Tamu	45.000.000	
e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.750.000	e	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.011.200	18.738.800
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	150.000.000	4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	210.000.000	(60.000.000)
a	Pemeliharaan Mebel	30.000.000	a	Pengadaan Mebel	90.000.000	(60.000.000)
b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.000.000	b	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	90.000.000	
c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	c	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30.000.000	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.000.000	5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.000.000	(1.000.000)
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000	(1.000.000)
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.000.000	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.000.000	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	78.000.000	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	70.000.000	a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	70.000.000	

	Jabatan	
b	Pemeliharaan Mebel	3.000.000
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	550.215.000
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	490.215.000
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10.000.000
b	Reviu Laporan Kinerja	147.215.000
c	Reviu Laporan Keuangan	80.000.000
d	Pengawasan Desa	90.000.000
e	Kerjasama Pengawasan Internal	
f	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	163.000.000
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	60.000.000
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	15.000.000
b	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	45.000.000
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	380.921.000
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	67.921.000
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	67.921.000
2	Pendampingan dan Asistensi	313.000.000
a	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	70.000.000
b	Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	205.000.000
c	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	38.000.000
	JUMLAH	6.524.492.597

	Jabatan	
b	Pemeliharaan Mebel	3.000.000
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000
B	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	550.215.000
1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	490.215.000
a	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10.000.000
b	Reviu Laporan Kinerja	147.215.000
c	Reviu Laporan Keuangan	80.000.000
d	Pengawasan Desa	90.000.000
e	Kerjasama Pengawasan Internal	
f	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	163.000.000
2	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	60.000.000
a	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	15.000.000
b	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	45.000.000
C	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	380.921.000
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	67.921.000
a	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	67.921.000
2	Pendampingan dan Asistensi	313.000.000
a	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	70.000.000
b	Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	205.000.000
c	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	38.000.000
	JUMLAH	6.524.492.597

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa tidak terjadi kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun 2024 hanya terdapat pergeseran antar sub kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Kab. Temanggung
Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)		
			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN												
6	01	INSPEKTORAT DAERAH				6.524.492.597					6.515.194.060		
6	01	01				5.593.356.597			Prosentase Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	100 %	5.647.323.380		
6	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.133.106.597		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dan Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52 Orang 12 Dokumen	5.139.573.380
6	01	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Temanggung		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.118.106.597	DAU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	52 orang/ bulan	5.124.573.380
6	01	01	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Temanggung		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15.000.000	DAU	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	15.000.000
6	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	40.000.000		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 Orang	60.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Temanggung		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		40.000.000	DAU		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	44 Orang	60.000.000
6	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan serta Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu, Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		161.511.200			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Bahan Logistik Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan serta Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu, Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27 Paket 24 Laporan	168.011.200
6	01	01	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Temanggung		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan		2.500.000	DAU		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	3 Paket	3.000.000
6	01	01	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Temanggung		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		20.000.000	DAU		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	20.000.000
6	01	01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Temanggung		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		30.000.000	DAU		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.000.000
6	01	01	2.06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Temanggung		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		45.000.000	DAU		Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	45.000.000
6	01	01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Temanggung		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		64.011.200	DAU		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	70.011.200

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Jumlah Paket Mebel, Unit Peralatan dan Sarana Prasarana	150.000.000			Jumlah Paket Mebel, Unit Peralatan dan Sarana Prasarana	20 Unit	160.000.000
6	01	01	2.07	5	Pengadaan Mebel	Temanggung		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		30.000.000	DAU		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	30.000.000
6	01	01	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Temanggung		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		90.000.000	DAU		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit	100.000.000
6	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Temanggung		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		30.000.000	DAU		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		30.000.000
6	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	30.738.800			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24 Laporan	30.738.800
6	01	01	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Temanggung		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		3.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	3.000.000
6	01	01	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Temanggung		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.000.000
6	01	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Temanggung		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		22.738.800	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	22.738.800

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas , Mebel, Peralatan dan Mesin yang dipelihara	78.000.000			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas , Mebel, Peralatan dan Mesin yang dipelihara	57 Unit	89.000.000	
6	01	01	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Temanggung		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	70.000.000	DAU		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	80.000.000	
6	01	01	2,09	5	Pemeliharaan Mebel	Temanggung		Jumlah Mebel yang Dipelihara	3.000.000	DAU		Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit	4.000.000	
6	01	01	2,09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Temanggung		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5.000.000	DAU		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	33 Unit	5.000.000	
6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				550.215.000					552.966.075	
							Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi					Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi	72 %		
							Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara					Persentase pelaksanaan pengawasan atas perencanaan, akuntabilitas keuangan daerah dan tuntutan atas kerugian negara	33 %		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)			
			Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
						Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa					Persentase pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan dan kinerja pada desa, BUMD dan pengadaan barang/jasa	79 %		
						Persentase penanganan aduan masyarakat					Persentase penanganan aduan masyarakat	100 %		
						Persentase tindak lanjut hasil temuan					Persentase tindak lanjut hasil temuan	100 %		
6	01	02	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal			Jumlah laporan hasil Pengawasan Internal	490.215.000			Jumlah laporan hasil Pengawasan Internal	231 Laporan 85 Dokumen	491.966.075
6	01	02	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Temanggung		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	10.000.000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja	2 Laporan	10.000.000
6	01	02	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Temanggung		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	147.215.000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	120 Laporan	147.215.000
6	01	02	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Temanggung		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	80.000.000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	61 Laporan	80.000.000
6	01	02	2.01	5	Pengawasan Desa	Temanggung		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	90.000.000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	45 Laporan	90.000.000
6	01	02	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Temanggung		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	163.000.000	DAU		Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	85 Dokumen	164.751.075
6	01	02	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu			Jumlah laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	60.000.000			Jumlah laporan hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	13 Laporan	61.000.000
6	01	02	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Temanggung		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	15.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	1 Laporan	16.000.000

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	02	2.02	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Temanggung		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu		45.000.000	DAU		Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	12 Laporan	45.000.000
6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI					380.921.000					314.904.605
							Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)						Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)	100 %	
							Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi						Persentase tindak lanjut aduan Whistle Blowing, Benturan Kepentingan, dan Unit Pengendalian Gratifikasi	100 %	
							Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya						Persentase Perangkat Daerah yang dievaluasi Pengelolaan Risikonya	54 %	
							Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan						Kompilasi level komponen dukungan pengawasan dan komponen aktifitas pengawasan serta kualitas pengawasan	3 Level	
6	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan				Jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun	67.921.000			Jumlah rekomendasi kebijakan yang disusun	1 Rekomendasi	
6	01	03	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Temanggung		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun		67.921.000	DAU		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1 Rekomendasi	0

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)
							Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
6	01	03	2.02		Pendampingan dan Asistensi				Jumlah Pendampingan dan asistensi	313.000.000			Jumlah Pendampingan dan asistensi	7 Kegiatan Perangkat Daerah	314.904.605
6	01	03	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Temanggung		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		150.000.000	DAU		Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	5 Kegiatan	150.000.000
					Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	Temanggung		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi		125.000.000	DAU		Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi	48 Perangkat Daerah	126.904.605
6	01	03	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Temanggung		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penegakkan Integritas		38.000.000	DAU		Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penegakkan Integritas	1 Perangkat Daerah	38.000.000

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2024 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Inspektorat untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Inspektorat Tahun 2024 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Inspektorat itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Inspektorat dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Inspektorat Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2022. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Inspektorat Tahun 2024 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2024 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 96,66 %. sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2024 Inspektorat Kabupaten Temanggung mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 6.524.492.597,- yang terdiri dari 3 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan dan Asistensi.

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2024 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Inspektorat untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Inspektorat Tahun 2024 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Inspektorat itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Inspektorat dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Inspektorat Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2022. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Inspektorat Tahun 2024 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2024 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 96,66 %. sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2024 Inspektorat Kabupaten Temanggung mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 6.524.492.597,- yang terdiri dari 3 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Penyelenggaraan Pengawasan dan Program Perumusan Kebijakan dan Asistensi.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Inspektorat Tahun 2024 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Inspektorat dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 3 Juli 2023

INSPEKTUR

KABUPATEN TEMANGGUNG



EKO SUPRAPTO, S.H., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650425 199803 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG



**RENCANA KERJA
(RENJA)
2024**

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL SETIABUDI NOMOR 1 TEMANGGUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk, kemudahan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

Rencana kerja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk satu tahun kedepan sebagai tindak lanjut pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dimulai tahun 2019 sampai tahun 2023.

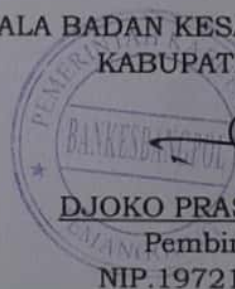
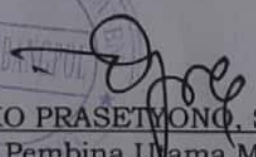
Dengan memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu satu tahun di tahun 2024.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 ini.

Akhirnya kami berharap semoga Rencana Kerja ini dapat berguna dan bermanfaat untuk mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Temanggung.

Temanggung, 3 Juli 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG



DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM
Pembina Utama Muda
NIP.19721126 199203 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	7
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BANKESBANGPOL TH 2023	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Bankesbangpol Temanggung Tahun 2023...	11
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Bankesbangpol Kab. Temanggung.....	26
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi.....	37
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	38
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	44
2.6 Inovasi Bankesbangpol Kabupaten Temanggung	44
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	46
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Bankesbangpol Kab. Temanggung.....	46
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	49
4.1 Program dan kegiatan Bankesbangpol Kab. Temanggung	49
BAB V PENUTUP	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

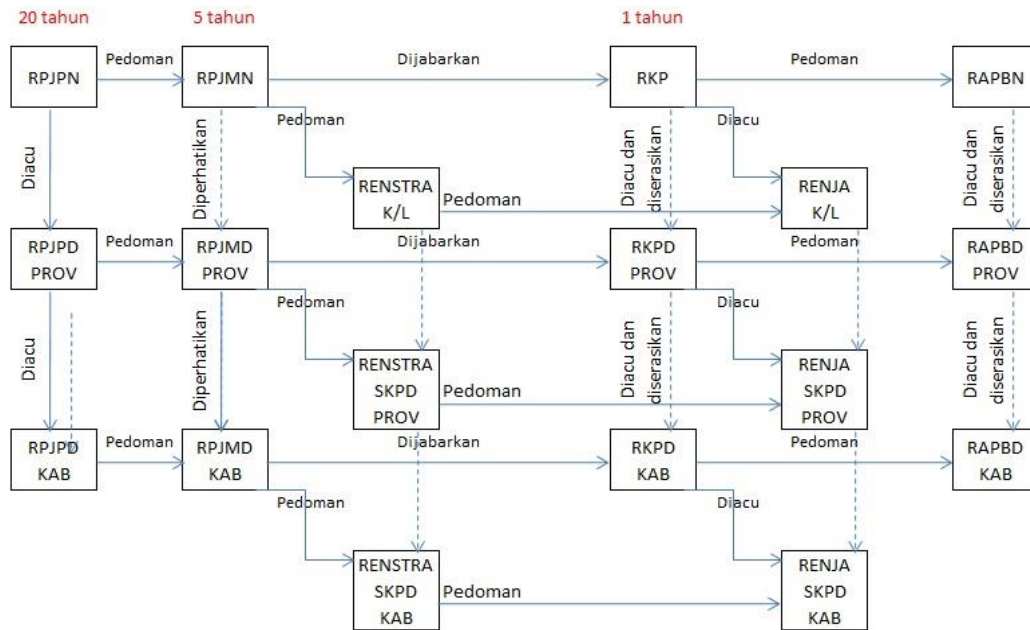
RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah, serta rencana pendanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan jangka waktu RPD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 2) Kondisi pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 4) Data Pokok Pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

b. Analisis gambaran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2023, dan perkiraan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun lalu berdasarkan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah;

- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Namun dalam proses ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan

dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Penyempurnaan rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 dan Capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2022 terhadap capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2023.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023 terhadap target di Tahun 2023.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun ke-empat pelaksanaan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2018-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

																Predikat	Sangat Tinggi			
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK				97.576.700	100	1.411.687.750	1.365.387.250		84.277.500		1.178.236.250		88.830.950		9.133.300	0	1.360.478.000	0	99,64
		Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya	%	87,00		87			87,21		87,21		87,21		87,21		87,21		100	
		Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik	%	30,00		30		25,00		32,73		32,73		32,73		32,73		32,73		100
		Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	%	30,00		30		33,33		33,33		33,33		33,33		33,33		33,33		100
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	kegiatan		97.576.700	20	1.411.687.750	1.365.387.250	10	84.277.500	8	1.178.236.250	1	88.830.950	1	9.133.300	20	1.360.478.000	100	99,64

		Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah																
														Rata-rata capaian kinerja kegiatan		100		
														Predikat		Sangat Tinggi		
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKAT AN			0	19.200.000	21.999.748		13.309.500		1.462.500		4.259.750		2.875.800		21.907.550		99,58
		Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan	%	100			0		0		0		100		100		100	
8.01.04.2. 01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	kegiatan	3	19.200.000	21.999.748	1	13.309.500	1	1.462.500	1	4.259.750		2.875.800	3	21.907.550	100	99,58
														Rata-rata capaian kinerja kegiatan		100		
														Predikat		Sangat Tinggi		
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			706.100.000	2.514.045.640	538.045.640		15.919.500		217.886.500		206.163.300		46.739.200		486.708.500		90,46

RENJA 2024 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		Presentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi	%	100		100		100		100		100		100		100		100			
8.01.05.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, budaya	kegiatan			8	2.514.045.640	538.045.640	1	15.919.500	3	217.886.500	2	206.163.300	2	46.739.200	8	486.708.500	100	90,46	
																			Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100	
																				Predikat	Sangat Tinggi
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				2.244.400.000		756.000.000	1.016.999.998		197.391.500		227.716.500		86.498.500		438.810.270		950.416.770		93,45	
		Presentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah	%	100		100			100		100		100		100		100		100		
		Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%			10			0		10,4		11,1		11,10		11,10		100		

		Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%		35		0	35	36	38	38	100							
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		kegiatan		14	736.000.000	1.006.999.998	2	195.535.000	4	223.724.500	2	84.597.500	6	436.570.270	14	940.427.270	100,00	93,39
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penganan Konflik di Daerah		kegiatan		12	20.000.000	10.000.000	2	1.856.500	4	3.992.000	2	1.901.000	4	2.240.000	12	9.989.500	100,00	99,90
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan		100		
																	Predikat	Sangat Tinggi	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat			1.177.394.000	100	282.250.000	308.950.000	25	44.401.452	25	51.197.783	25	354.235.596	149.646.675	25	269.148.806	100	87,12

RENJA 2024 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

		daerah (ex BAU)																		
8.01.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		bul an		1	0	0	0	0	0	0	1	292.130.200	0	4.202.500	1	296.332.700	100,00		
8010120602	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		uni t		6		34.200.000						6	34.000.000	6	34.000.000	100,00			
8.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor		bul an		12	1.250.000	1.250.000	3	477.500	3	225.000	3	536.500	3	0	12	1.239.000	100,00	99,12	
8.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		bul an		12	5.000.000	5.000.000	3	1.848.400	3	1.023.100	3	105.000	3	2.017.000	12	4.993.500	100,00	99,87	
8.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		bul an		12	40.000.000	4.314.000	3	613.000	3	1.119.000	3	1.904.050	3	674.200	12	4.310.250	100,00	99,91	
8.01.01.2.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu		bul an		12	6.500.000	6.500.000	3	661.000	3	985.300	3	1.817.150	3	3.342.000	12	6.805.450	100,00	104,70	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		bul an		12	15.000.000	15.000.000	3	2.600.500	3	3.087.500	3	7.288.000	3	10.807.243	12	23.783.243	100,00	158,55	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik		bul an		12	24.750.000	18.300.000	3	3.934.024	3	3.477.399	3	3.669.570	3	3.249.414	12	14.330.407	100,00	78,31	
8.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		bul an		12	2.500.000	2.500.000	3	0	3	420.000	3	1.410.000	3	600.000	12	2.430.000	100,00	97,20	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		bul an		12	126.000.000	133.636.000	3	29.268.811	3	33.042.732	3	33.042.729	3	34.877.692	12	130.231.964	100,00	97,45	
8.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		bul an		12	55.000.000	67.000.000	3	4.623.717	3	5.592.952	3	10.582.397	3	39.236.626	12	60.035.692	100,00	89,61	
8.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		bul an		12	3.250.000	18.250.000	3	274.500	3	1.220.000	3	1.750.000	3	14.795.000	12	18.039.500	100,00	98,85	

RENJA 2024 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		bul an		12	3.000.000	3.000.000	3	100.000	3	1.004.800	3	0	3	1.845.000	12	2.949.800	100,00	98,33			
																		Rata-rata capaian kinerja kegiatan	100,00			
																		Predikat	Sangat Tinggi			
Jumlah						5.079.670.700	5.051.183.390	3.399.763.736		365.330.452		1.679.054.533		739.988.096				3.236.319.126				
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH		100,00	95,19	
																		PREDIKAT		Sangat Tinggi		
																		RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH		100,00		
																		PREDIKAT		Telah Tercapai		

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
s.d Triwulan I Tahun 2023

KODE	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGI ATAN	SAT UAN	TARGET 2023			REALISASI PER TRIWULAN								REALISASI 2023		CAPAIAN 2023		KET
							I		II		III		IV						
				K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	28
01.02	PRGOGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN				48.381.100	415.000.000		14.096.000		0		0		0		14.096.000		3,40	
		Presentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	%	62			100		0,00		0,00				0,00		0		
		Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkn pembinaan wawasan kebangsaan	%	10			10,38		0,00		0,00				0,00		0		
01.02.2. 01.02	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	doku men	2	48.381.100		0		0		0		0		0	0	0	0,00	
8.1.2.20 1.4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal	Oran g	90		415.000.000	8	14.096.000							8	14.096.000	8,8888 89	3,40	

	Ika dan Sejarah Kebangsaan	Ika dan Sejarah Kebangsaan																	
																		Rata-rata capaian kinerja kegiatan	8,888889
																		Predikat	Sangat rendah
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			100	1.736.687.850	1.486.687.850		11.115.950		0		0		0	11.115.950		0	0,75	
		Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya	%	87			87,21		0,00		0,00		0,00		87,21		100		
		Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik	%	30			32,73		0,00		0,00		0,00		32,73		100		
		Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	%	30			33,33		0,00		0,00		0,00		33,33		100		
8.01.03.2.01.02	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan	dokumen	5	1.736.687.850	1.486.687.850	1	11.115.950	0	0	0	0	0	0	1	11.115.950	20,00	0,75	

	Situasi Politik di Daerah																	
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan	20,00		
															Predikat	Tinggi		
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			100.000.000	215.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
		Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan	%	100		100	0	0	0	0	0	0	0	100		100		
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	laporan	11	100.000.000	215.000.000	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan	0,00		
															Predikat	Sangat Rendah		
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			836.597.640	300.000.000	966.000	0	0	0	0	0	0	0	966.000		0,32		
		Presentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi	%	100		100	0	0	0	0	0	0	0	100				

RENJA 2024 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.05. 2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	orang	300	836.597.640	300.000.000	7	966.000	0	0	0	0	0	7	966.000	2,33	0,32
															Rata-rata capaian kinerja kegiatan	2,33	
															Predikat	Sangat Rendah	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL				1.135.000.000	560.000.000		89.784.000		0		0		0	89.784.000		16,03
		Presentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah	%	100			100		0		0			100		100	
		Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	10			1,04		0		0			1,04		10	
		Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	35			70		0		0			70		100	

RENJA 2024 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.06. 2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	orang	100	1.125.000.000	550.000.000	18	86.079.500	0	0	0	0	0	18	86.079.500	18,00	15,65
8.01.06. 2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	laporan	12	10.000.000	10.000.000	3	3.704.500	0	0	0	0	3	3.704.500	25,00	37,05	
														Rata-rata capaian kinerja kegiatan		21,50	
														Predikat	Tinggi		
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tersedianya administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah (ex BAU)		100	730.886.000	453.863.900		64.381.411	0	0	0	0	0	62.166.411	100	13,70	

RENJA 2024 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.01. 2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		bulan	12	327.000.000	175.000.000	2	2.215.000	0		0		0		2	2.215.000	16,67	1,27
8.01.01. 2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		bulan	12	2.500.000	2.500.000	3	543.500	0		0		0		3	543.500	25,00	21,74
8.01.01. 2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		bulan	12	7.000.000	7.000.000	3	2.293.000	0		0		0		3	2.293.000	25,00	32,76
8.01.01. 2.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		bulan	12	6.750.000	6.750.000	3	1.013.800	0		0		0		3	1.013.800	25,00	15,02
8.01.01. 2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu		bulan	12	12.000.000	12.000.000	3	2.847.300	0		0		0		3	2.847.300	25,00	23,73
8.01.01. 2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		bulan	12	30.000.000	29.979.000	3	3.017.500	0		0		0		3	3.017.500	25,00	10,07
8.01.01. 2.08.02	Penyediaan jasa Komunikasi Sumber Daya Air, dan Listrik		bulan	12	20.000.000	20.000.000	3	4.444.045	0		0		0		3	4.444.045	25,00	22,22
8.01.01. 2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		bulan	12	5.000.000	5.000.000	0	0	0		0		0		0	0	0,00	0,00
8.01.01. 2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		bulan	12	133.636.000	133.636.000	3	38.565.696	0		0		0		3	38.565.696	25,00	28,86
8.01.01. 2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		bulan	12	32.000.000	32.000.000	3	6.339.570	0		0		0		3	6.339.570	25,00	19,81
8.01.01. 2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		bulan	12	150.000.000	24.998.900	0	0	0		0		0		0	0	0,00	0,00

RENJA 2024 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.01. 2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		bulan	12	5.000.000	5.000.000	3	3.102.000	0		0			3	3.102.000	25,00	62,04		
																Rata-rata capaian kinerja kegiatan		20,14	
																	Predikat	Tinggi	
					Jumlah	4.587.552.590	3.430.551.750		180.343.361		0		0			178.128.361			
																RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH		12,14	5,19
																PREDIKAT		Sangat Rendah	
																RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH		71,06	
																PREDIKAT		Upaya Keras	

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2022 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2018-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb:
 - a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - e. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - f. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah
 - g. Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
 - h. Pelaksanaan Koordinasi Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
 - i. Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah
 - j. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan

2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.
3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2022, maka dapat dikatakan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **sangat memuaskan** yaitu dengan nilai **100%**. Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya indeks gotong royong;
Capaian Kinerja : 100 % kategori sangat memuaskan.
2. Meningkatnya indeks toleransi
Capaian Kinerja : 100,00 % kategori sangat memuaskan.

Dari Tabel 2.1 dan Triwulan I tahun 2023 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2022 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Triwulan I Tahun 2023 (**Laporan IKPD**)
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d TW I 23 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Indek Toleransi	%	3,15	0,64	4,15	4,17	4,19	0,8	4	4,5	4,5	4,5	100	TT
2	Indeks Gotong Royong	%	3,15	0,64	4,2	4,21	4,22	4,15	0,83	4,33	4,33	4,33	100	TT
3	Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	%	60	60	62	62	62	0	0	0	65	70	100	TT
4	Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pemahaman kebangsaan	%	10	10	10	10	10	30,7	0	4,84	58,48	9,34	93,4	UK
5	Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya	%	87	87	87	87	87	87,20	87,21	87,21	87,21	87,21	100	TT
6	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik	%	30	30	30	30	30	25	25	25	32,73	32,73	100	TT
7	Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	%	30	30	30	30	30	31,11	33,33	33,33	33,33	33,33	100	TT
8	Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	0	0	0	100	100	100	TT
9	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT
10	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT
11	Persentase desa/ kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	5	10	10	10	10	0	68,60	36,68	11,07	9,34	93,4	UK

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d TW I 23 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
12	Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba	%	30,3	35	35	35	35	75	0	0	38	70	100	TT

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 10 indikator terdiri dari :
 - a. **Indek Toleransi**
 Capaian indeks toleransi di triwulan I tahun 2023 masih menggunakan capaian tahun 2022 karena perhitungan untuk tahun 2023 belum selesai. Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya program kegiatan di Badan Kesbangpol mendukung tercapainya indeks toleransi. Adat istiadat, budaya, dan tingginya rasa tepo seliro juga mendorong indeks toleransi yang tercipta. Upaya Badan Kesbangpol dalam meningkatkan indeks toleransi adalah dengan penguatan forum kerukunan umat beragama (fkub) dan penguatan peran aktor lokal untuk meningkatkan toleransi dan kerukunan masyarakat.
 - b. **Indeks Gotong Royong**
 Capaian indeks gotong royong di triwulan I tahun 2023 masih menggunakan capaian tahun 2022 karena perhitungan tahun 2023 belum selesai. Faktor pendorong tercapainya indeks gotong royong adalah budaya masyarakat Temanggung yang masih kental dengan tolong menolong dan percaya terhadap sesama. Upaya Badan Kesbangpol dalam menjaga budaya gotong royong adalah dengan melaksanakan kegiatan yang dapat menjaga budaya gotong royong di masyarakat seperti bakti sosial
 - c. **Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan**
 Faktor pendorong tercapainya indikator tersebut adalah adanya program kegiatan Badan Kesbangpol yang mendukung penyebaran wawasan kebangsaan. Upaya yang dilakukan adalah dengan tetap memberikan sosialisasi melalui event/ kegiatan baik yang dilakukan mandiri oleh Badan Kesbangpol ataupun melalui kegiatan oleh instansi lain.
 - d. **Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya**
 Faktor pendorong indikator tersebut adalah keinginan

masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya kesadaran demokrasi pada masyarakat Temanggung. Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Kegiatan sosialisasi atau penyebar luasan informasi pemilu bagi masyarakat.

- e. Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik
Faktor pendorong indikator tersebut adalah Adanya kesetaraan gender, mengangkat kaum perempuan untuk sejajar dengan pria. Faktor penghambat indikator tersebut adalah anggapan masyarakat yang menganggap perempuan lemah dan lebih memosisikan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Upaya Badan Kesbangpol dalam pencapaian perempuan yang menjadi pengurus di partai politik adalah dengan pengembangan demokratisasi politik bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya perempuan melalui pendidikan politik bagi perempuan.
- f. Persentase keterwakilan perempuan di DPRD
Faktor pendorong indikator tersebut adalah masyarakat khususnya perempuan mulai paham dengan politik dan memiliki keinginan untuk menjadi anggota dewan. Faktor penghambat indikator tersebut adalah sudut pandang pemikiran masyarakat desa bahwa perempuan bukan sebagai pemimpin. Upaya Badan Kesbangpol dalam pencapaian Prosentase Perempuan yang menjadi anggota DPRD adalah dengan pengembangan demokratisasi politik bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya perempuan melalui pendidikan politik bagi perempuan.
- g. Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan
Faktor pendukung presentase cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan adalah tingginya kesadaran masyarakat untuk menciptakan kerukunan umat beragama. Rekomendasi untuk indikator ini adalah dengan melakukan pembinaan berkala bagi FKUB di kecamatan agar tercipta koordinasi dengan FKUB Kabupaten
- h. Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi
Faktor pendukung indikator tersebut adalah adanya tim

untuk pengawasan daerah sehingga sebelum konflik terjadi telah diadakan mediasi dan musyawarah. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan menjalin kerjasama dan koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat.

- i. Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah

Faktor pendukung indikator tersebut adalah adanya tim khusus untuk pengawasan daerah sehingga sebelum konflik terjadi telah diadakan mediasi dan musyawarah. Upaya yang dilakukan diantaranya dengan menjalin kerjasama dan koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat.

- j. Persentase sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba

Faktor pendukung tercapainya indikator tersebut adalah adanya program kegiatan Badan Kesbangpol yang mendukung penyebarluasan pencegahan narkoba. Upaya yang dilakukan adalah dengan tetap memberikan sosialisasi melalui event/ kegiatan baik yang dilakukan mandiri oleh Badan Kesbangpol ataupun melalui kegiatan oleh instansi lain.

2. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 2 indikator terdiri dari :

- a. Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pemahaman

Faktor pendorong tercapainya persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pemahaman kebangsaan adalah adanya program kegiatan Badan Kesbangpol yang mendukung penyebarluasan wawasan kebangsaan. Upaya yang dilakukan adalah dengan tetap memberikan sosialisasi melalui event/ kegiatan baik yang dilakukan mandiri oleh Badan Kesbangpol ataupun melalui kegiatan oleh instansi lain.

- b. Persentase desa/ kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba

Faktor pendukung tercapainya presentase desa/ kelurahan yang mendapat sosialisasi pencegahan penyalahgunaan

narkoba adalah adanya program kegiatan Badan Kesbangpol yang mendukung penyebarluasan pencegahan narkoba. Upaya yang dilakukan adalah dengan tetap memberikan sosialisasi melalui event/ kegiatan baik yang dilakukan mandiri oleh Badan Kesbangpol ataupun melalui kegiatan oleh instansi lain.

2.2.2.Data Pokok

Data Pokok pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari Indikator Strategis dan Indikator Program. Indikator program terdiri dari Data Pokok Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan dan Data Pokok Bidang Kesatuan Bangsa, dengan rincian sebagai berikut:

1. Indikator Strategis

a. Indeks Toleransi

Realisasi Indeks Toleransi tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Target	Na	3,15	0,64	4,15	4,17
Realisasi	Na	0,828	4	4,5	4,5

b. Indeks Gotong Royong

Uraian	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Target	Na	3,15	0,64	4,21	4,21
Realisasi	Na	4,15	0,83	4,33	4,33

2. Indikator Program

2.1 Bidang Politik dan Organisasi Kemasyarakatan

1) Presentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya

Untuk mengetahui hal tersebut digunakan rumus Jumlah pemilih yang hadir di TPS yang menggunakan hak pilihnya dibagi Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara Keseluruhan, dikalikan 100%.

Prosentase Pemilih yang menggunakan hak pilihnya

dalam pemilu legislatif dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Presentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam PILEG Tahun 2018 s.d 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pemilih keseluruhan yang hadir di TPS	485.608	529.859	529.859	529.859	529.859	529.859
2	Jumlah Pemilih tetap secara Keseluruhan	582.486	607.598	607.598	607.598	607.598	607.598
3	Prosentase Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilihnya	83,36 %	87.20 %	87.20 %	87.20 %	87.20 %	87.20 %

Sumber : Diambil dari Sertifikat hasil perhitungan suara (DB) pada pelaksanaan pemilu / KPUD Temanggung dan hasil Monitoring Kesbangpol Temanggung Tahun 2021

2) Prosentase Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Politik

Keterwakilan perempuan di lembaga politik adalah jumlah perempuan yang berperan serta aktif di lembaga Politik.

Untuk mengetahui persentasenya dapat digunakan rumus sebagai berikut: Jumlah pengurus partai politik perempuan dibagi jumlah seluruh pengurus partai politik dikali 100, Maka dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Prosentase perempuan yang menjadi pengurus di partai politik yang memiliki kursi keterwakilan di DPRD Tahun 2018 sd 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah pengurus partai politik perempuan	88	98	98	98	91	91
2	Jumlah seluruh pengurus partai politik	388	392	392	392	278	278
3	Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik	22,68	25	25,00	25,00	32,73	32,73

Sumber: Badan Kesbangpol Temanggung 2022

Jumlah Perempuan menjadi Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten yang mempunyai wakil di DPRD Hasil Pemilu 2019, sbb:

No	Nama Partai	Laki laki	Perempuan	Jumlah
1	PDIP	12	7	19
2	PKB	19	8	27
3	Golkar	57	13	70
4	Gerindra	10	7	17
5	PAN	15	10	25
6	PPP	17	8	25
7	PKS	6	4	10
8	Hanura	14	10	24
9	Nasdem	15	12	27

10	Demokrat	22	12	34
	TOTAL	187	91	278

Sumber : Bidang Politik dan Ormas Bankesbangpol 2023

3) Prosentase Keterwakilan Perempuan Di DPRD

Untuk memperoleh angka prosentase keterwakilan perempuan di DPRD digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah perempuan yang menduduki kursi anggota DPRD dibagi jumlah total kursi anggota DPRD dikalikan 100% . Diperoleh hasil sebagai berikut :

Prosentase keterwakilan perempuan di DPRD Th 2018 s.d 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Kursi DPRD yang diduduki Perempuan	14	15	15	15	15
2	Jumlah kursi Total keanggotaan di DPRD	45	45	45	45	45
3	Prosentase Perempuan yang menjadi anggota DPRD	31%	33%	33%	33%	33%

Sumber: DPRD Kabupaten Temanggung

Jumlah Partisipasi perempuan yang menjadi anggota DPRD Tahun 2019 -2024 sebanyak 15 orang dari total kursi anggota DPRD sebanyak 45 orang. Hal ini telah diatur dalam regulasi Undang-undang Pemilu mengenai 30% unsur keterwakilan perempuan pada keanggotaan DPRD. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Politik di Kabupaten Temanggung sbb:

NO	NAMA	PARTAI
1	IKA RIZKIWATI,SE	PDIP
2	DWI LINDA WATI, SH, MH	GOLKAR
3	UMI FADHILAH	NASDEM
4	SITI MARGO LESTARI	HANURA
5	HERNANDIA HAPPY SAFITRI	PDIP
6	PERMATRIYDANI W, S.HI	PKS
7	TRI EKO WASTI	PKB
8	E. INTAN KURNIASARI,SE, M.Acc	PDIP
9	INDAH CAHYANI,S.Sos	GERINDRA
10	YENI KUSNITA	GERINDRA
11	ELYNAWATI .S.Pd	PKS
12	Dra.TITIK WINARTI	PDIP
13	Hj. SITI KUSTIJAH, S.Ag	NASDEM
14	Hj.UMI TSUWAIBAH ,S.Ag.M.Si	PKB
15	DWI SULISTYOWATI	PDIP

4) Cakupan Terbentuknya FKUB di Kecamatan

FKUB adalah Forum Kerukunan Umat beragama di Kabupaten Temanggung. Untuk menghitung prosentase

cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan digunakan rumus sebagai berikut : Jumlah FKUB di kecamatan dibagi jumlah Kecamatan yang ada, di kali 100%. Persentase Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Persentase Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan Tahun 2018 s.d 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah FKUB di kecamatan	0	0	0	0	20
2	Jumlah kecamatan di kab. Temanggung	20	20	20	20	20
3	Persentase Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan (%)	0	0	0	0	100

Sumber :Kesbangpol Kab. Temanggung, 2023

Pembentukan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di kecamatan hanya dilakukan 1 kali di masing-masing kecamatan pada tahun 2022.

2.2 Bidang Kesatuan Bangsa

1. Persentase Sekolah Yang Mendapatkan Pemahaman Kebangsaan

Pemberian sosialisasi wawasan kebangsaan pada sekolah yang ada di Kabupaten Temanggung adalah salah satu upaya yang dilakukan Bankesbangpol dalam memberikan pemahaman wawasan kebangsaan pada generasi muda yang masih berada di bangku sekolah. Jenjang sekolah yang mendapatkan sosialisasi wawasan kebangsaan adalah sekolah baik negeri maupun swasta di Kabupaten Temanggung.

Adapun untuk mengetahui berapa sekolah yang telah mendapatkan pemahaman tentang wawasan kebangsaan dapat dihitung dengan rumus berikut: jumlah sekolah yang telah mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan di bagi jumlah sekolah yang ada, dikalikan 100%.

Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan Tahun 2018- 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah sekolah yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	Na	0	0	0	52
2	Jumlah keseluruhan sekolah yang ada	Na	80	80	80	80
3	Prosentase sekolah yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	Na	0	0	0	65

Pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan di sekolah dengan daftar sekolah sbb:

1.	SMA Bhakti Karya Kaloran	29	SMK Muh 1 Temanggung
2.	SMA Harapan Bangsa Kaloran	30	SMK Mutiara Mandiri Tmg
3	SMA Islam Kandangan	31	SMK NU Temanggung
4	SMA Islam Sudirman	32	SMK N 1 Temanggung
5	SMA IT Istiqomah Tembarak	33	SMK N 2 Temanggung
6	SMA Kristen Shekinah Temanggung	34	SMK N Bansari
7	SMA Miftakhul Muhtadin Montessori Kaloran	35	SMK N Jumo
8	SMA Muhammadiyah 1 Tmg	36	SMK N Pringsurat
9	SMA N 1 Candiroto	37	SMK N Tembarak
10	SMA N 1 Parakan	38	SMK PGRI Kedu
11	SMA N 1 Pringsurat	39	SMK Swadaya
12	SMA N 1 Temanggung	40	MA Al Maliki Temanggung
13	SMA N 2 Temanggung	41	MA Assalaam Kranggan
14	SMA N 3 Temanggung	42	MAN Temanggung
15	SMA Nur Lintang Kedu	43	MAS Al Huda
16	SMA PGRI Temanggung	44	MAS Al Mu'min Muhammadiyah
17	SMK 17 Parakan	45	MAS Darul Falah Pringsurat
18	SMK 17 Temanggung	46	MAS Darul Muttaqin
19	SMK Al Mumin Muhammadiyah	47	MAS D-Baito Sunan Plumbon
20	SMK Anwarus Solichin Kranggan	48	MAS Hidayatullah
21	SMK Bhumi Phala Parakan	49	MAS Ma'arif Darul Aman
22	SMK Darul Falach Candiroto	50	MAS Ma'arif Gemawang
23	SMK DR Sutomo Temanggung	51	MAS Miftahul Huda
24	SMK Eyyzul Moslem Bulu	52	MAS Mu'allimin Kandangan
25	SMK Ganesa Satria 4 Kedu		
26	SMK HKTi Temanggung		
27	SMK Jenderal Bambang Sugeng		
28	SMK Muhammadiyah Ngadirejo		

2. Cakupan Desa/ Kelurahan Yang Mendapatkan Pemahaman Wawasan Kebangsaan

Pemberian sosialisasi wawasan kebangsaan pada desa/kelurahan yang ada di Kabupaten Temanggung adalah salah satu upaya yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam memberikan pemahaman wawasan kebangsaan pada elemen masyarakat di tingkat desa/kelurahan.

Adapun untuk mengetahui berapa Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan dapat dihitung dengan rumus berikut:

Jumlah Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan sosialisasi wawasan kebangsaan di bagi jumlah Desa yang ada dikali 100%.

Persentase Desa/Kelurahan yang telah mendapatkan sosialisasi wawasan kebangsaan dapat dilihat dalam table berikut ini:

Persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan Tahun 2018 s.d 2022

No	Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
1	Jumlah Desa/Kel yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	23	3	0	14	169
2	Jumlah keseluruhan Desa/Kel yang ada	289	289	289	289	289
3	Prosentase Desa/Kel yang telah mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan	7,95	1,03	0	4,8	58,48

Sumber :Kesbangpol Kab. Temanggung, 2023

Faktor pendorong tercapainya persentase desa/kelurahan yang mendapatkan pemahaman kebangsaan adalah adanya program kegiatan Badan Kesbangpol yang mendukung penyebarluasan wawasan kebangsaan. Upaya yang dilakukan adalah dengan tetap memberikan sosialisasi melalui event/ kegiatan baik yang dilakukan mandiri oleh Badan Kesbangpol ataupun melalui kegiatan oleh instansi lain.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari 12 indikator terdapat 2 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:
 - a. Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pemahaman wawasan kebangsaan.

Hal ini disebabkan karena sub kegiatan yang mewadahi kegiatan tersebut tidak ada dalam DPA tahun 2022, sehingga sosialisasi wawasan kebangsaan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan lain baik yang dilakukan secara mandiri oleh Badan Kesbangpol ataupun melalui kegiatan instansi lain.

- b. Persentase desa/ kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba

Hal ini disebabkan karena kegiatan sosialisai di desa/kelurahan akan dilaksanakan pada triwulan ke tiga tahun 2023.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, antara lain :

- Adanya sub kegiatan yang tidak dimunculkan dalam DPA tahun 2023 menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak bisa dilakukan dengan maksimal
- Berdasarkan hal tersebut di diharapkan agar sub kegiatan yang menaungi kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan dapat dimunculkan kembali.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat penambahan sub kegiatan di luar rancangan awal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu sejumlah 2 (dua) sub kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (memunculkan kembali karena pada tahun 2022 sub kegiatan ini tidak ada)

2. Terdapat penambahan anggaran sub kegiatan di luar rancangan awal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu:
 - a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
 - b. Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana table 2.1 berikut:

Tabel 2.1

Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7
						5.889.980.875							56.312.325.525
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.984.980.875		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.048.655.875
	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>					2.643.480.875		<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>					2.643.480.875
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24	Orang	2.643.480.875		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			24	orang	2.643.480.875
	<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>					73.000.000		<i>Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>					136.675.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Temanggung	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	Bulan	3.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10	paket	3.000.000
								Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Temanggung	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	8	paket	63.675.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Temanggung	Tersedianya bahan logistik kantor	12	Bulan	8.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya bahan logistik kantor	12	paket	8.000.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Temanggung	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	Bulan	7.500.000		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	12	paket	7.500.000
	Fasilitasi Kunjungan Tamuh	Temanggung	Terfasilitasinya kunjungan tamu	12	Bulan	12.500.000		Fasilitasi Kunjungan Tamuh		Terfasilitasinya kunjungan tamu	12	laporan	12.500.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Temanggung	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	Bulan	42.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12	laporan	42.000.000
	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					215.000.000		<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>					215.000.000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Temanggung	Tersedianya jasa surat menyurat	12	Bulan	-		Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Tersedianya jasa surat menyurat	12	Bulan	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Temanggung	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Bulan	23.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	laporan	30.910.400
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Temanggung	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	Bulan	6.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor	12	laporan	6.000.000

	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Temanggung	Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	12	Bulan	186.000.000			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Terbayarnya jasa pelayanan umum kantor	12	laporan	178.089.600
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					53.500.000			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					53.500.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Temanggung	Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	12	Bulan	40.000.000			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional	12	unit	40.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Temanggung	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	12	Bulan	6.000.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	2	unit	6.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Temanggung	Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	12	Bulan	7.500.000			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpeliharanya sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	12	unit	7.500.000
	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					460.000.000			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				-	850.000.000
	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					460.000.000			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan					850.000.000
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Temanggung	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun			0			Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	2	dokumen	100.000.000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Temanggung	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan			460.000.000			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	90	orang	750.000.000
	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik					1.500.000.000			PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik				-	51.486.669.650

	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik					1.500.000.000			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			-	51.486.669.650	
	Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah	Temanggung	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah			1.500.000.000			Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah			12	dokumen	51.486.669.650
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						30.000.000			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN			-	30.000.000	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						30.000.000			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			-	30.000.000	
	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Temanggung	Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			30.000.000			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			11	laporan	30.000.000
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						320.000.000			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			-	320.000.000	
Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						320.000.000			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			-	320.000.000	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Temanggung				320.000.000			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			300	orang	320.000.000
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						595.000.000			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			-	595.000.000	

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial							
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				585.000.000		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				100	orang	585.000.000
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				10.000.000		Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				12	laporan	10.000.000

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Namun dalam proses ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.2

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA / Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Desa Mudal	Meningkatnya pengetahuan masyarakat akan bahaya narkoba	1 paket	Rp. 20.000.000
2	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL/ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Desa Ngeplak	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam menangani konflik di masyarakat	1 paket	Rp. 35.000.000

2.6. Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ada 2 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2 .3

Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2020-2022

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Pembaharuan data ormas door to door.	Kesbangpol, ormas	APBD	Jemput bola pembaruan data ormas	Data ormas	Tersedianya informasi keberadaan dan kepengurusan ormas yang up to date.	Kesbangpol - 2021

2	Desk pembuatan LPJ Banpol dari partai ke partai	Kesbangpol, parpol	APBD	Bankesbangpol sebagai fasilitator bantuan keuangan parpol memiliki inisiatif untuk melakukan desk dari partai ke partai.	LPJ yang sesuai	Tersusunnya LPJ banpol yang sesuai dengan aturan	Kesbangpol - 2021
---	---	--------------------	------	--	-----------------	--	-------------------

BAB III**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh (Perangkat Daerah) lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh (Perangkat Daerah) Kabupaten Temanggung.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2024, maka tujuan dari penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2024 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

(mengambil dari dokumenn renstra 2024-2026)

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Tujuan / Sasaran/ Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun			Kondisi akhir 2024
				2024	2025	2026	
1.	Tujuan: Meningkatnya toleransi masyarakat	Indeks Toleransi	%	4,2	4,21	4,22	4,2
2.	Sasaran: Tertanganinya konflik di masyarakat	Persentase tertanganinya konflik di masyarakat	%	100	100	100	100
3	Program:						
	1.Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	%	80	90	100	80
	2.Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase pelaksanaan pendidikan politik	%	80	90	100	80
	3.Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan	%	13,33	13,33	13,33	13,33
	4.Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Pembinaan dan pengembangan ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	100	100	100	100
	5.Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik dan keamanan daerah	%	100	100	100	100

Sumber : Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung Tahun 2024-2026.

Kebijakan dan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2024 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2024.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung Tahun 2024

RANCANGAN RENJA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik TAHUN 2024			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA	56.312.325.525	A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESATUAN BANGSA	56.312.325.525	0
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.048.655.875		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.048.655.875	0
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.643.480.875		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.643.480.875	0
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.643.480.875		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.643.480.875	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			Administrasi Umum Perangkat Daerah		0
		136.675.000			136.675.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.000.000	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.675.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	63.675.000	0
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	8.000.000	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.500.000	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.500.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.500.000	0
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	42.000.000	0
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.000.000		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	215.000.000	0
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.910.400		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	30.910.400	0
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.000.000	0
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	178.809.600		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	178.809.600	0
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.500.000		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	53.500.000	0

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.000.000	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6.000.000	0
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.500.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.500.000	0
PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	850.000.000		PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	850.000.000	0
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	850.000.000		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i>	850.000.000	0
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100.000.000		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100.000.000	0
Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	750.000.000		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	750.000.000	0
PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	51.486.669.650		PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	51.486.669.650	0
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	51.486.669.650		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</i>	51.486.669.650	0
Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah	51.486.669.650		Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan di Bidang Pendidikan Bidang Politik, Etika, Budaya, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Daerah	51.486.669.650	0
PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	30.000.000		PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	30.000.000	0
<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	30.000.000		<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i>	30.000.000	0

	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30.000.000			Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	30.000.000	0
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	320.000.000			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	320.000.000	0
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	320.000.000			<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i>	320.000.000	0
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	320.000.000			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	320.000.000	0
	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	595.000.000			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	595.000.000	0
	<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	595.000.000			<i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</i>	595.000.000	0
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	585.000.000			Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	585.000.000	0
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10.000.000			Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	10.000.000	0

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2024

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah disesuaikan berdasarkan program, sub kegiatan dan pagu indikatif RKPD.

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Temanggung
Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK K SASA	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB		
							TA R G E T	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											NASIONAL					DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						56.312.325.525,00								7.143.281.625,00	
	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						56.312.325.525,00							7.143.281.625,00		
	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						56.312.325.525,00							7.143.281.625,00		
1.	8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	<i>Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	-			-	3.048.655.875,00						-	2.847.980.875,00		
	8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN</i>	-			-	2.643.480.875,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemantauan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-	-	2.643.480.875,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
	8.01.01.2.02.001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				24 Orang/ bulan	2.643.480.875,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemantauan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-		2.643.480.875,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPO	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Terpenuhinya administrasi umum perangkat daerah</i>	-			-	136.675.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemantauan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-	-	115.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>				10 Paket	3.000.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemantauan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-		3.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				8 Paket	63.675.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemantauan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-		40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPO	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				12 Paket	8.000.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-		8.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12 Paket	7.500.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-		8.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	12.500.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-		13.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPO	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>				12 Laporan	42.000.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-		42.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	-			-	215.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	-	36.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				12 Laporan	30.910.400,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-		30.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPO	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	6.000.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-		6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	178.089.600,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-		0,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Terpenuhinya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</i>	-			-	53.500.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	-	53.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPO	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				12 Unit	40.000.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-		40.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				2 Unit	6.000.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-		6.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				12 Unit	7.500.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintah an yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-		7.500.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
2.	8.01.02	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	<i>Persentase sekolah yang mendapatkan pemahaman kebangsaan</i>	-			-	850.000.000,00						-	850.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPO	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	- Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	-			-	850.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-	-	850.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				2 Dokumen	100.000.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-		100.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.02.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				90 Orang	750.000.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-		750.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
3.	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	- Persentase pemilih yang menggunakan hak pilihnya - Persentase keterwakilan perempuan di lembaga politik - Persentase keterwakilan perempuan di DPRD	-			-	51.468.669.650,00						-	2.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KEL OM	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	-	-			-	51.468.669.650,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	-	2.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.03.2.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														
			<i>Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun</i>				12 Dokumen	51.468.669.650,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-		2.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
4.	8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	- Cakupan terbentuknya FKUB di Kecamatan	-			-	30.000.000,00						-	30.300.750,00	
	8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	<i>Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan</i>	-			-	30.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas	-	-	30.300.750,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.04.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KEL OM	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGK AT
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, dan</i>				11 Laporan	30.000.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen	-		30.300.750,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
5.	8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	<i>Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi</i>	-			-	320.000.000,00					-		320.000.000,00	
	8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	<i>Terpenuhinya pelaksanaan kekgiatan pemantapan pelaksanaan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya</i>	-			-	320.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-	-	320.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.05.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>				300 Orang	320.000.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemanta pan reformasi birokrasi melalui pen ingkatan kualitas pelayanan publik	-		320.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6.	8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	<i>- Persentase terdeteksi dan tertanganinya konflik politik dan keamanan daerah - Cakupan desa/kelurahan yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan narkoba - Cakupan sekolah yang mendapatkan pembinaan pencegahan penyalahgunaan</i>	-			-	595.000.000,00						-	595.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KEL OM	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGK AT
							TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	<i>Terpenuhinya pelaksanaan kegiatan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial</i>	-			-	595.000.000,00			-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-	-	595.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				100 Orang	585.000.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-		585.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8.01.06.2.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>				12 Laporan	10.000.000,00	- Kab. Temanggung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	4. Perbaikan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif 3. Pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik	-		10.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H								56.312.325.525,00						7.143.281.625,00	

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2024 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2022. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2024 nanti.

Capaian realisasi anggaran di setiap program/ kegiatan menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Pada tahun 2022 anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebesar Rp. 6.281.305.240,00 dengan realisasi sebesar Rp. 6.053.753.527,00 atau terealisasi sebesar 96,58 %. Terjadi **efisiensi anggaran pada tahun 2022 sebesar 3,62%**.

Dalam Renja Tahun Anggaran 2024 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 56.312.325.525,- yang terdiri dari 6 program antara lain Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Program Penguatan Ideologi

Pancasila dan Karakter Kebangsaan; Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik; Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial..

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 3 Juli 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN TEMANGGUNG




DJOKO PRASETYONO, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19721126 199203 1 002

x x x x



RSUD
KABUPATEN TEMANGGUNG

+

REN CANA KER JA 2024

+



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan hidayah-Nya maka Rencana Kerja (Renja) RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini dapat tersusun.

Renja RSUD Kabupaten Temanggung disusun dalam rangka mendukung perwujudan tujuan dan sasaran RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2024 dan berpedoman pada Renstra RSUD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Semoga Renja RSUD Kabupaten Temanggung tahun 2024 ini dapat menghantarkan RSUD Kabupaten Temanggung menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Temanggung.

Temanggung, Juli 2023

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, M.Kes., Sp.S.

Pembina Tk.I

NIP. 19760401 200312 2 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG.....	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan Capaian Renstra RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.....	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Kabupaten Temanggung	40
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	40
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	42
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	43
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	43
3.2 Tujuan dan sasaran Renja RSUD Kabupaten Temanggung	45
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	46
4.1 Program dan Kegiatan.....	46
BAB V PENUTUP.....	49

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung & Capaian Renstra s.d Tahun 2022	12
Tabel II.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung Triwulan II Tahun 2023	17
Tabel II.3	Indeks kinerja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2023 TW II.....	19
Tabel II.4	Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	19
Tabel II.5	Nilai Akreditasi Rumah Sakit Di Kabupaten Temanggung tahun 2018 s.d 2023 TW II	21
Tabel II.6	Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 RSUD Kabupaten Temanggung	41
Tabel II.7	Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	42
Tabel III.1	Telaah Terhadap Prioritas Kebijakan Nasional dan Kabupaten Temanggung.....	45
Tabel III.2	Tujuan dan Sasaran RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2024	45
Tabel IV.1	Rencana Program Dan Kegiatan RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2024.....	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan.....	2
Gambar II.1 Cakupan Nilai Akreditasi	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah telah diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Tahunan atau disingkat Renja.

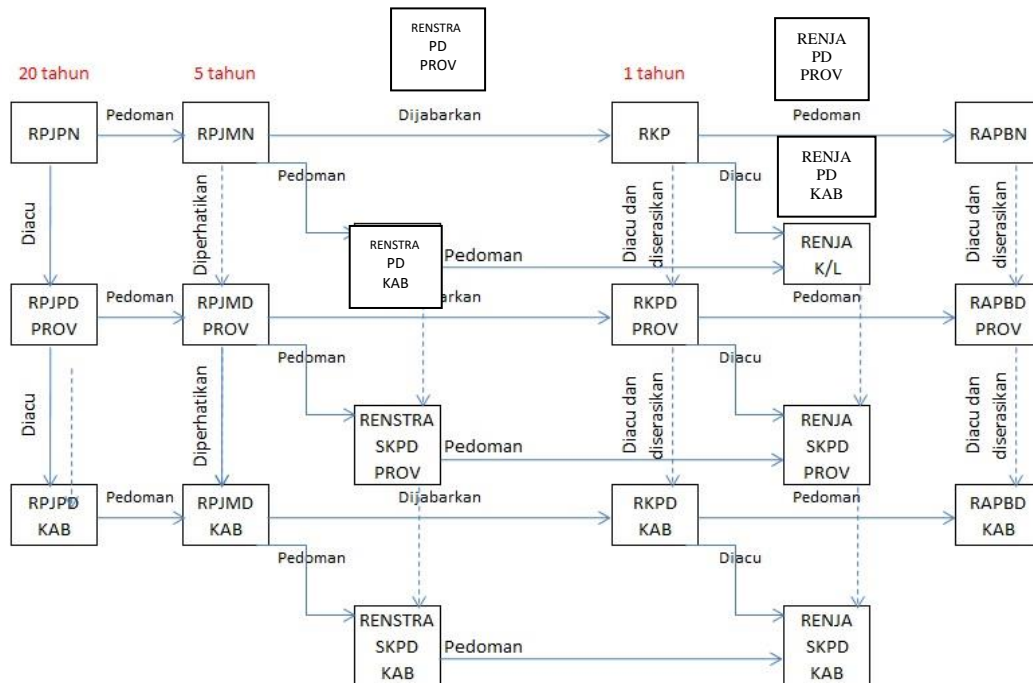
Penyusunan Renja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 berpedoman pada RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Tahapan Penyusunan Renja RSUD Kabupaten Temanggung dilaksanakan melalui penyusunan rancangan awal Renja. Tahap berikutnya adalah penyempurnaan rancangan awal Renja berdasarkan rancangan awal RKPD 2024. Penyempurnaan rancangan awal Renja menjadi rancangan Renja melalui tahapan forum perangkat daerah dan verifikasi Renja RSUD Kabupaten Temanggung.

Renja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan RSUD Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di RSUD Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Renja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah. Adapun keterkaitan

hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

Gambar I.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan



Renja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja RSUD Kabupaten Temanggung pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKP, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan RSUD Temanggung
- 2) Kondisi pelayanan RSUD Temanggung
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Temanggung;
- 4) Data Pokok Pembangunan RSUD Temanggung;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan pembangunan
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung.

b. Analisis Gambaran Pelayanan RSUD Temanggung

Langkah-langkah untuk menganalisis kinerja pelayanan RSUD Temanggung adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan RSUD Temanggung.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra RSUD Temanggung untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2023, dan perkiraan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada RSUD Temanggung.

c. Melakukan *review* atas hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung tahun lalu berdasarkan Renstra RSUD Kabupaten Temanggung:

Review hasil evaluasi mencakup :

- 1) Realisasi kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan RSUD Temanggung. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra RSUD Temanggung dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra RSUD Temanggung

tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja Renstra RSUD Temanggung;

- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan Renstra RSUD Temanggung;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja Renstra RSUD Temanggung sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Temanggung;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Temanggung dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Temanggung berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra RSUD Kabupaten Temanggung. Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Temanggung;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung;
- 5) Rumusan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian indikator kinerja daerah kegiatan Renstra RSUD Kabupaten Temanggung;
- 6) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan RSUD Temanggung.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Temanggung yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra RSUD Kabupaten Temanggung.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjangkaran aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan. Usulan masyarakat untuk peningkatan pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung tertuang dari hasil survey kepuasan pelanggan yang disampaikan sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Temanggung.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan adalah berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD Kabupaten Temanggung dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian dokumen rancangan Renja RSUD Kabupaten Temanggung;

Penyusunan dokumen rancangan Renja RSUD Kabupaten Temanggung merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja RSUD Kabupaten Temanggung;

Penyempurnaan rancangan Renja RSUD Kabupaten Temanggung perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan Renja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah.

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja RSUD Kabupaten Temanggung dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja RSUD Kabupaten Temanggung dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja RSUD Kabupaten Temanggung yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja RSUD Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2024;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran, dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja RSUD Kabupaten Temanggung untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD Kabupaten Temanggung terutama di bidang kesehatan pada Tahun Anggaran 2024.

Adapun tujuan disusunnya dokumen Rancangan Rencana Kerja (Renja) RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah :

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Kabupaten Temanggung selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2024; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2024.
6. Sebagai dokumen perencanaan kerja tahunan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang tercantum dalam Rencana Strategi RSUD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026.
7. Menetapkan prioritas program dan kegiatan tahun 2024 dalam rangka pencapaian target RPD, yang akan diusulkan ke APBD Kabupaten Temanggung tahun 2024 melalui RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang.
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023.

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan Capaian Renstra.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung.
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Kabupaten Temanggung.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG

- 3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja RSUD Kabupaten Temanggung.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG

- 4.1 Program Dan Kegiatan RSUD Kabupaten Temanggung

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan Capaian Renstra RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023.

Renja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 merupakan tahun pertama penjabaran RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026 khususnya yang dijabarkan lebih lanjut melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 dan juga merupakan penjabaran tahun pertama Renstra RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja RSUD Kabupaten Temanggung sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2022 dan Triwulan II tahun 2023 terhadap target di Tahun 2023. Evaluasi terhadap capaian Renstra RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun ke-empat pelaksanaan Renstra RSUD Kabupaten temanggung tahun 2018-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung & Capaian Renstra s.d Tahun 2022

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra (2023)		Target 2022			Realisasi 2022		Capaian 2022		Realisasi Renstra s/d 2022		Capaian Renstra s/d 2022		Ket.
				K	Rp.	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3	4	5	6	9	10	11	20	21	22	23	24	25	26	27	16
A	KESEHATAN																
1	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Prosentase Pelayanan Kesehatan penduduk miskin di RSUD	%	100	1.633.855.400	0	0	0	0	0	0	0	100	999.393.000	100	61	
	Jaminan kesehatan Temanggung	Terlayannya penduduk miskin yang tidak ditanggung Jamkesmas	%	100	1.633.855.400	0	0	0	0	0	-	-	100	999.393.000	100	61,17	Pelayanan JKT berhenti pada 2018 TW II
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	%	54	135.165.819.900	3	39.183.000.000	38.183.189.276		35.267.325.323	100	0,98		71.779.398.824		32,09	
a	Pelayanan rujukan (DAK Kesehatan)	Tersedianya sarana dan prasarana rumah sakit	paket	5	63.891.342.000	1	20.000.000.000	38.183.189.276	1	35.267.325.323	100	0,98	3	67.724.878.803	60	50,8	
b	Pendampingan Pelayanan Rujukan (Pendampingan DAK Kesehatan)	tersedianya fasilitasi kegiatan pelayanan rujukan (DAK Kesehatan)	kegiatan	5	647.181.900	1	18.000.000	0	1	0	0	0	2	294.897.276	40	44,22	
c	Pengadaan Alat Kesehatan (Bantuan Keuangan APBD Prov. Jateng)	Tersedianya alat kesehatan	paket	4	40.000.000.000	1	10.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d	Pendampingan Pengadaan Alat Kesehatan RSUD	Tersedianya fasilitasi pendampingan pengadaan alat kesehatan (Ban-Keu)	kegiatan	4	615.000.000	1	165.000.000	0	1	0	0	0	1		25	1,41	
e	Pengadaan Alat Kesehatan (DBHCHT)	Tersedianya alat kesehatan	paket	4	26.100.000.000	1	9.000.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f	Penyediaan instalasi pengolahan air limbah rumah sakit	Terlaksananya penyediaan instalasi pengolahan air limbah rumah sakit	kegiatan	1	3.912.296.000	0		0	0	0	0	0	1	3.759.622.745	100	96,1	
3	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit		%		653.848.184.900		127.000.000.000	257.826.388.210		192.042.326.733		0,93		611.071.669.112		63,94	
		Indeks Kinerja Rumah Sakit	%	80		79,4			70,7		70,7	-	70,7		88,38		
		Cakupan Nilai Akreditasi Rumah Sakit	%	100		100			100		100	-	100		100		
	Kegiatan Pelayanan (BLUD)	Terlaksananya kegiatan pelayanan BLUD	kegiatan	375	653.848.184.900	75	127.000.000.000	257.826.388.210	75	192.042.326.733	100	0,79	225	611.071.669.112	60	63,94	
B	PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH																
1	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen Perencanaan, Evaluasi, Data pokok, dan Pelaporan Perangkat Daerah	%	100	24.891.500	100	5.000.000	0	51,52	0	51,52	-	51,52	4.891.500	51,52	19,65	
	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan OPD	dokumen	167	24.891.500	33	5.000.000	0	17	0	51,52	-	41	4.891.500	24,55	19,65	

Tabel II.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Kabupaten Temanggung & Capaian Renstra s.d Triwulan II tahun 2023

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2023			Realisasi per Triwulan Th. 2023								Realisasi 2023		Capaian 2023		Ket.
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	16
A	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				29.461.004.230	28.379.358.452		5.760.413.259		9.926.802.999		0		0		15.687.216.258		55,28	
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Bulan	12	29.461.004.230	28.379.358.452	3	5.760.413.259	3	9.926.802.999	0		0		6	15.687.216.258	50,00	55,28	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program																	50,00		
Predikat																	Sangat Tinggi		
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																		
1	Program pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat				175.000.000.000	155.610.237.903	0	22.307.793.284	0	32.998.717.712	0	-		0		55.306.510.996	100,00	35,54	
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit	%	52,00			56,26								56,26		100		
		Cakupan nilai akreditasi RSUD	%	100			100								100		100		
a	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2023			Realisasi per Triwulan Th. 2023								Realisasi 2023		Capaian 2023		Ket.
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	
							K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.					
1	2	3		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	16
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya alat kesehatan	Unit	15		5.738.646.113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
				1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan	Paket	36		5.023.804.770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	Pendampingan Pelayanan Rujukan														0				
	Pengembangan Rumah Sakit	Terlaksananya pembangunan unit gedung layanan dan sarpras pendukungnya					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Bankeu Gub)	Tersedianya alat kesehatan					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan	Paket	24		2.847.787.020	0	0	6	166.231.345	0	-	0	0	6	166.231.345			
b	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota														0				
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Terlaksananya pengembangan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit	Kegiatan	75	175.000.000.000	142.000.000.000	18	22.307.793.284	20	32.832.486.367	0		0		38	55.140.279.651	51	38,83	
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program																50,67			
Predikat																Sangat Tinggi			

No	Bidang / Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Satuan	Target 2023			Realisasi per Triwulan Th. 2023								Realisasi 2023		Capaian 2023		Ket.
							I		II		III		IV						
				K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	2	3		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	16
	PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH																		
1	Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah				0	0		0		0		0		0		0			-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelaporan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan pelaporan OPD	Dokumen	24		0	0	0		0		0		0		0			-
Rata-rata Capaian Kinerja Kegiatan pada Program																0			
Predikat																SANGAT RENDAH			
				204.461.004.230	183.989.596.355	0	28.068.206.543	0	42.925.520.711	0	0	0	0	0	0	70.993.727.254			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH																50,33	38,59		
PREDIKAT																Sangat Tinggi			
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA PROGRAM PERANGKAT DAERAH																100,00			
PREDIKAT																TELAH TERCAPAI			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :																			
Faktor penghambat pencapaian kinerja :																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :																			
Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja PD berikutnya :																			

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung

Indikator kinerja RSUD Kabupaten Temanggung pada periode Renstra 2019-2023 adalah sesuai dengan apa yang menjadi Indikator Kinerja Daerah yang tertuang pada RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023. Adapun Indikator Kinerja Program RSUD Kabupaten Temanggung beserta target kinerjanya dapat dilihat pada Tabel II.3 berikut:

Tabel II.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung Triwulan II Tahun 2023

No	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2023	STATUS		FAKTOR PEN-DORONG	FAKTOR PENG-HAMBAT	UPAYA PEN-CAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2023
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	UK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																				
RSUD																				
INDIKATOR SASARAN																				
1		Indeks kinerja RSUD		73,45	n.a	79,4	79,6	79,8	80	70,7	69,05	93	93	95	100	TT	<p>1. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan di rumah sakit.</p> <p>2. Penambahan jumlah SDM dr. Spesialis sehingga menambah jenis layanan di RSUD</p> <p>3. SIMRS yang terintegrasi yang mendukung akses dan kecepatan pelayanan</p> <p>4. Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), yang berakibat meningkatnya kepercayaan masyarakat untuk berkunjung ke rumah sakit</p>			
				<i>Indikator kinerja keuangan</i>					14,6	14,9										
				<i>Indikator kinerja pelayanan</i>					22,85	21,15										
				<i>Indikator kinerja mutu pelayanan</i>					33,25	33										
				<i>Pertumbuhan dan Pembelajaran (mulai 2021)</i>							28	28	28							
				<i>Proses Pelayanan Internal (mulai 2021)</i>							18	18	20							
				<i>Pelanggan (mulai 2021)</i>							27	27	27							
												20	20	20						
INDIKATOR PROGRAM																				

No	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA DAERAH	SATUAN	KONDISI	TARGET KINERJA					REALISASI KINERJA					CAPAIAN s.d 2023	STATUS		FAKTOR PEN-DORONG	FAKTOR PENG-HAMBAT	UPAYA PEN-CAPAIAN TARGET KINERJA TAHUN 2023
				2018	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		TT	UK			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan nilai akreditasi RSUD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT		Komitmen Seluruh Karyawan dan Manajerial RSUD Kabupaten Temanggung menjadikan pelayanan berfokus pada pasien menjadi hal utama dan dilakukan peningkatan mutu dan keselamatan pasien.	Belum optimalnya monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di RSUD	Peningkatan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di RSUD dengan pengembangan modul monitoring dan evaluasi sesuai dengan kebutuhan pengembangan layanan
			<i>Jumlah bab yang mendapatkan nilai > 80</i>					16	16	16	16	16								
			<i>jumlah bab</i>					16	16	16	16	16								
		Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit	%	94,72	46	48	50	52	54	51,13	50,73	55,9	56,35	56,99	100	TT		RSUD Kabupaten Temanggung pada tahun 2023 mendapatkan dana DAK, Earmark dan APBD untuk pengadaan alat kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan sesuai standart RS Tipe B	Belum optimalnya pemutahiran data sarpras di rumah sakit	Pemuktahiran data Sarpras RS sesuai standar Kemenkes (PMK NO.3 / 2022) tetang klasifikasi dan Perijinan RS
			<i>Jumlah sarana dan prasarana yang ada</i>					1045	1170	1483	1517	1610								
			<i>Jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan</i>					2044	2306	2649	2692	2825								
JML INDIKATOR SASARAN				1	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN					100	1	0								
JML INDIKATOR PROGRAM				2	RATA-RATA CAPAIAN PROGRAM					100	2	0								
JML SEMUA INDIKATOR				3	RATA-RATA CAPAIAN PERANGKAT DAERAH					100	3	0								

Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Kabupaten Temanggung Triwulan II Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II.3
Indeks kinerja RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2018 - 2023 TW II

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Indikator Kinerja Keuangan	15,5	14,60	14,90	Menggunakan perhitungan Indeks Kinerja versi baru		
2	Indikator Kinerja Pelayanan	24,7	22,85	21.15			
3	Indikator Kinerja Mutu Pelayanan	33.25	33,25	33			
	Indeks kinerja RSUD	73,45	70,70	69,05			
1	Pertumbuhan dan Pembelajaran	Menggunakan perhitungan Indeks Kinerja versi lama			28	28	28
2	Proses Pelayanan Internal				18	18	20
3	Pelanggan				27	27	27
4	Keuangan				20	20	20
	Total Skor				93	93	95

- * Angka tahun 2023 menggunakan perhitungan tahun 2021 TW IV dikarenakan perhitungan T.A. 2022 masih menunggu audit laporan keuangan BPK
- * Indeks Kinerja RSUD dinilai menggunakan 3 unsur pada tahun 2018-2020 yaitu mutu pelayanan, pelayanan, dan keuangan. Namun pada 2021-2023 Indikator berubah menjadi Pertumbuhan dan Pembelajaran, proses Pelayanan Internal, Pelanggan dan Keuangan

Tabel II.4
Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

INDIKATOR KINERJA DAE-RAH	REALISASI KINERJA					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah alat kesehatan yang dimiliki	9.052	1.045	1.170	1.483	1.517	1.610
Jumlah alat kesehatan sesuai standar RS Tipe B	9.514	2.044	2.306	2.649	2.692	2.825
Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (%)	95,14	51,13	50,73	55,90	56,35	56,99

Sumber: Aset

Capaian Penyediaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit pada tahun 2015 s.d 2018 penghitungannya meliputi seluruh sarana dan prasarana yang ada di Rumah Sakit. Dalam rangka memenuhi Standar RSUD Kabupaten Temanggung sebagai rumah sakit tipe B, maka penghitungan

Pemenuhan Sarana dan Prasarana RS tahun 2019-2023 difokuskan pada pemenuhan kebutuhan alat kedokteran. Capaiannya sampai dengan triwulan II tahun 2023 adalah sebesar 56,99% sesuai standart RS tipe B yang terdapat dalam Aplikasi ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan) Kementerian Kesehatan RI. Terdapat kekurangan alat kesehatan sebesar 43,01%, dalam pemenuhan tersebut perencanaannya difokuskan kepada peralatan medis prioritas yang disesuaikan dengan kriteria sebagai berikut:

1. Tingkat utilitas

Merupakan tingkat penggunaan atau pemakaian peralatan medis pada pelayanan. Hal ini terkait dengan terhadap banyaknya kebutuhan peralatan tersebut sehingga akan berpengaruh pada tingkat pelayanan dan penghasilan dari rumah sakit.

2. Pelayanan unggulan.

Pelayanan unggulan merupakan suatu kelebihan dibanding dengan rumah sakit lainnya. Pelayanan unggulan tersebut haruslah didukung dengan ketersediaan peralatan medis yang sesuai dengan tuntutan pelayanan unggulan.

3. Peralatan Life support.

Merupakan peralatan yang menopang hidup pasien, tanpa peralatan ini pasien akan berdampak pada kematian misalnya peralatan bantu pernapasan (alat resusitasi, ventilator, Mesin Anaesthesi), baby incubator, Peralatan kriteria ini haruslah selalu tersedia oleh rumah sakit karena sangat terkait dengan keselamatan pasien.

4. Kesiapan bangunan/ruangan dan prasarana.

Beberapa peralatan medis di rumah sakit memerlukan ruangan/tempat khusus dalam operasionalnya. Bangunan/ruangan tempat peralatan medis berada harus sudah dipersiapkan dan didesain sedemikian rupa serta dilengkapi dengan prasarana seperti listrik, air, gas medik, pbumian, sistem komunikasi, dan lain-lain sesuai persyaratan. Hal ini agar pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan baik serta untuk keamanan petugas, pasien serta masyarakat dari risiko peralatan medis, bahaya getaran, panas, bising atau radiasi.

Realisasi nilai Akreditasi Rumah Sakit RSUD Kabupaten Temanggung dari tahun 2018 s.d 2023 triwulan I dapat dilihat pada tabel berikut ini :

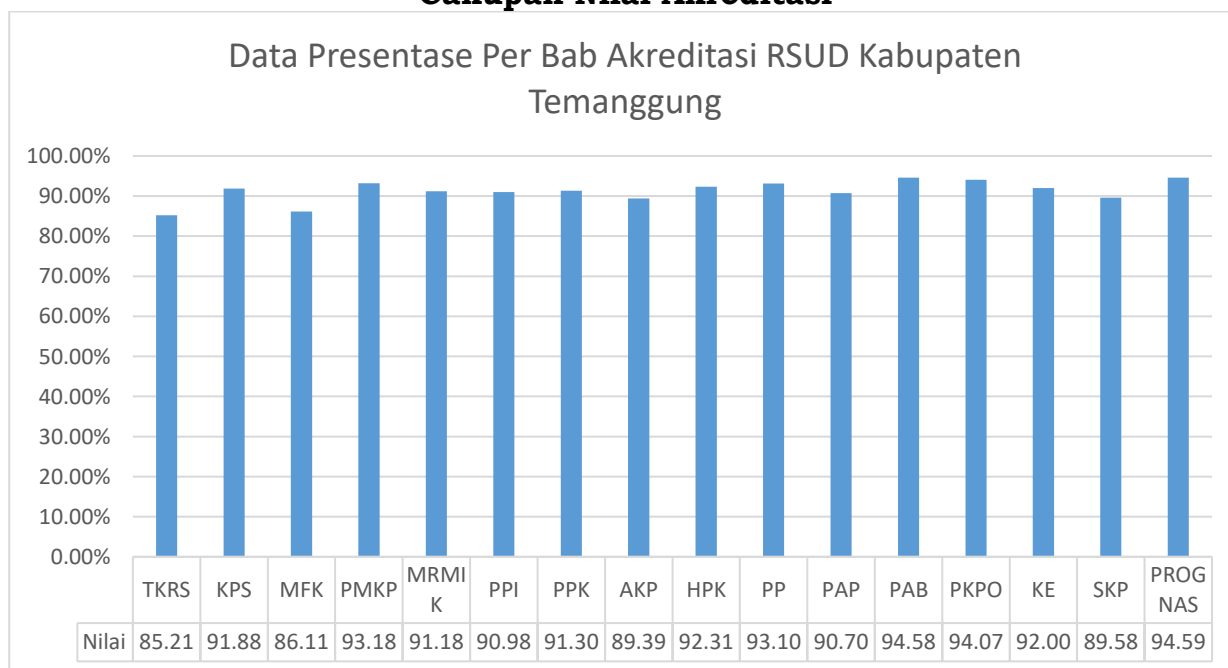
Tabel II.5
Nilai Akreditasi Rumah Sakit Di Kabupaten Temanggung
tahun 2018 s.d 2023 TW II

INDIKATOR KINERJA DAERAH	REALISASI KINERJA					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Bab yang mendapatkan nilai > 80%	15	16	16	16	16	16
Jumlah Bab	15	16	16	16	16	16
Nilai Akreditasi RSUD (%)	86.8	84.87	84.87	84.87	91,26	91,26

**Angka tahun 2023 menggunakan perhitungan tahun 2022 TW IV*

Pada bulan November 2022 RSUD Kabupaten Temanggung telah melaksanakan survei akreditasi dengan menggunakan Standar Akreditasi Rumah Sakit versi Kementerian Kesehatan Tahun 2022 dimana dari 16 BAB yang disurvei semua BAB mendapatkan nilai diatas 80% sehingga mendapatkan sertifikat Akreditasi dengan status Paripurna. Sertifikat akreditasi tersebut berlaku mulai dari 30 November 2022 sampai dengan 30 November 2026.

Gambar II.1
Cakupan Nilai Akreditasi



Evaluasi Hasil Capaian Standar Pelayanan Minimal RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

I. PELAYANAN IGD :

1. Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa

Standar : 100%

Capaian : 100%

Hasil : Tercapai

2. Jam buka pelayanan Gawat Darurat
 - Standar : 24 jam
 - Capaian : 24 jam
 - Hasil : Tercapai
3. Pemberian pelayanan Gawat Darurat yang bersertifikat BLS/PPGD/GELS/ALS
 - Standar : 100%
 - Capaian : 98.1%
 - Hasil : **Belum Tercapai**
 - Permasalahan :
 - Pada triwulan ketiga ada beberapa sertifikat pelatihan yang habis masa berlakunya dan belum sempat memperbarui
 - Rekomendasi :
 - Kepala Instalasi memiliki update data terkait masa berlaku sertifikat petugas sehingga resertifikasi sesuai masa berlaku.
4. Ketersediaan Tim Penanggulangan Bencana
 - Standar : 1 Tim
 - Capaian : 1 Tim
 - Hasil : Tercapai
5. Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat
 - Standar : ≤ 5 menit
 - Capaian : $(1 + 1 + 0.99 + 0.99) / 4 = 0.99$ menit
 - Hasil : Tercapai
6. Kepuasan pelanggan pada Gawat Darurat
 - Standar : $\geq 70\%$
 - Capaian : $(95.9\% + 96.3\% + 96.3\% + 97.9\%) / 4 = 96.6\%$
 - Hasil : Tercapai
7. Kematian pasien ≤ 24 jam di Gawat Darurat
 - Standar : $\leq 2 \%$
 - Capaian : $(0.0036\% + 0.003\% + 0.003\% + 0.002\%) / 4 = 0,0029 = 2,9^{0}/_{00}$
 - Hasil : **belum tercapai**
 - Permasalahan :
 - Kebanyakan kasus Penyakit Dalam, dimana kondisi pasien waktu datang ke RS dalam kondisi sudah kritis

Rekomendasi :

- Koordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk diinformasikan ke puskesmas agar dilakukan penanganan kegawatan pasien dan stabilisasi pasien secara maksimal sebelum dirujuk ke RS
- Peningkatan kegiatan sosialisasi terkait kesehatan sehingga pasien tidak jatuh ke kondisi sakit yang parah.

8. Tidak ada keharusan untuk membayar uang muka

Standar : 100%

Capaian : 100%

Hasil : Tercapai

II. PELAYANAN RAWAT JALAN

1. Pemberi pelayanan di klinik spesialis

Standar : 100%

Capaian : $(99.87\% + 100\% + 99.16\% + 99.7\%) / 4 = 99,68\%$

Hasil : **Belum tercapai**

Permasalahan :

- Ada Dokter yang hanya ada 1 orang per KSM, sehingga apabila Dokter yang bersangkutan ijin, tidak ada yang menggantikan, layanan tutup.

Rekomendasi :

- Perlu ada layanan 2 Klinik untuk SDM dokter spesialis lebih dari satu
- Usul untuk menambah dokter sesuai ABK.

2. Ketersediaan pelayanan Rawat Jalan

Standar : tercapai 4 pelayanan dasar

Capaian : tercapai 4 pelayanan dasar yaitu Anak, Dalam, Kebidanan dan Bedah

Hasil : Tercapai

3. Buka Pelayanan sesuai Ketentuan

Standar : 08.00 – 13.00 WIB setiap hari kecuali Jumat 08.00 – 11.00 WIB

Capaian : buka pelayanan sesuai ketentuan

Hasil : Tercapai

4. Waktu tunggu di Rawat Jalan

Standar : ≤ 60 menit

Capaian : $(117.80 + 20.75 + 165.2 + 81.62) / 4 = 96,34$ menit

Hasil : **Belum tercapai**

Permasalahan :

- Komitmen jadwal layanan belum sepenuhnya dilaksanakan oleh dokter spesialis
- Pengguna pendaftaran online masih dibawah 50 persen

Rekomendasi :

- Menghimbau dokter spesialis untuk mematuhi jam buka layanan sesuai komitmen yang disepakati agar pasien tidak menunggu terlalu lama
- Melakukan sosialisasi pendaftaran online lewat media social, edaran kewajiban pendaftaran online untuk pasien lama, dll

5. Kepuasan pelanggan pada Rawat Jalan

Standar : $\geq 90\%$

Capaian : $(90.47\% + 90.47\% + 90.47\% + 95.87\%) / 4 = 91,82\%$

Hasil : Tercapai

6. Pasien Rawat Jalan Tuberkulosis yang ditangani dengan strategi DOTS

Standar : $\geq 60\%$

Capaian : 100%

Hasil : Tercapai

7. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB

Standar : $\geq 60\%$

Capaian : 100%

Hasil : Tercapai

8. Kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS

Standar : $\geq 60\%$

Capaian : $(96.5\%+96.7\%+90\%+93.5\%) = 94.18\%$

Hasil : Tercapai

III. PELAYANAN RAWAT INAP

1. Pemberi pelayanan di Rawat Inap

Standar : dokter spesialis dan perawat DIII (100%)

Capaian : 100%

Hasil : Tercapai

2. Dokter Penanggung Jawab Pasien Rawat Inap

Standar : 100%

Capaian : 100%

Hasil : Tercapai

3. Ketersediaan pelayanan Rawat Inap
 Standar : Pelayanan Anak, Dalam, Kebidanan, Bedah
 Capaian : Pelayanan Anak, Dalam, Kebidanan, Bedah
 Hasil : Tercapai
4. Jam Visite dokter spesialis
 Standar : 100% (08.00 – 14.00 WIB)
 Capaian : $(90.72 + 88.92 + 90.83 + 92.67) / 4 = 90.78\%$
 Hasil : **Belum tercapai**
 Permasalahan :
 - Kurang disiplinnya beberapa Dokter
 Rekomendasi :
 - Berkoordinasi dengan bagian kepegawaian untuk memberikan teguran kepada Dokter yang *visite* tidak tepat waktu
 - Sosialisasi internal pada forum Komite Medik terkait ketepatan jam *visite* kepada pasien.
5. Kejadian Infeksi Paska Operasi
 Standar : $\leq 1,5 \%$
 Capaian : $(0.0\%+0.0\%+2.05\%+0.96\%) / 4 = 0,75\%$
 Hasil : Tercapai
6. Angka Kejadian Infeksi Nosokomial
 Standar : $\leq 1,5 \%$
 Capaian : $(0.69\%+0.30\%+0.56\%+0.08\%) / 4 = 0,41\%$
 Hasil : Tercapai
7. Tidak adanya pasien kejadian pasien jatuh yang berakibat kecacatan / kematian
 Standar : 100 %
 Capaian : $(99,98 + 99,96 + 99,93 + 99,85) / 4 = 99.93\%$
 Hasil : **Belum tercapai**
 Permasalahan :
 - Masih banyak pasien tidak ditunggu keluarga walaupun hanya sebentar
 - Pasien menolak imobilisasi meskipun sudah diedukasi
 Rencana tindak lanjut
 - Pengkajian terkait resiko jatuh pasien lebih dioptimalkan
 - Kepatuhan intervensi pencegahan resiko jatuh.
 - Pemetaan sarana prasarana bed pasien yang lebih safety bagi pasien-pasien resiko jatuh

8. Kematian Pasien > 48 jam

Standar : $\leq 0,24 \%$

Capaian : $(1.91 + 1.80 + 1.74 + 1.68) / 4 = 1.78\%$

Hasil : **Belum tercapai**

Permasalahan :

- Sistem EWS belum berjalan dengan baik
- Kondisi penyakit pasien yang kompleks

Rekomendasi :

- Sistem EWS harus dijalankan di semua bangsal baik sarana dan SDM nya
- Apabila terjadi kegawatan harus dikonsultasikan agar pasien mendapat penanganan yang tepat
- Kordinasi dengan sub bag diklat terkait kebutuhan pelatihan dokter umum untuk meningkatkan kapasitasnya

9. Kejadian pulang paksa

Standar : $\leq 5 \%$

Capaian : $(2,69 + 2,62 + 1,74 + 1,09) / 4 = 2,035\%$

Hasil : Tercapai

10. Kepuasan pelanggan Rawat Inap

Standar : $\geq 90\%$

Capaian : $(100 + 100 + 92,95 + 100) / 4 = 98.24\%$

Hasil : Tercapai

11. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB

Standar : $\geq 60\%$

Capaian : $(100 + 93,33 + 100 + 100) / 4 = 100\%$

Hasil : Tercapai

12. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS

Standar : $\geq 60\%$

Capaian : $(100 + 93,33 + 100 + 96,77) / 4 = 97,53\%$

Hasil : Tercapai

IV. PELAYANAN INSTALASI BEDAH SENTRAL :

1. Waktu tunggu operasi elektif

Standar : ≤ 2 hari

Capaian : $(1.031 + 1.02 + 1.002 + 1.007) / 4 = 1,015$ hari

Hasil : Tercapai

2. Kejadian kematian di meja operasi
Standar : $\leq 1\%$
Capaian : Triwulan I – IV = 0%
Hasil : Tercapai
3. Tidak adanya kejadian operasi salah sisi
Standar : 100%
Capaian : Triwulan I – IV = 100%
Hasil : Tercapai
4. Tidak adanya kejadian operasi salah orang
Standar : 100%
Capaian : Triwulan I – IV = 100%
Hasil : Tercapai
5. Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi
Standar : 100%
Capaian : Triwulan I – IV = 100%
Hasil : Tercapai
6. Tidak ada kejadian tertinggalnya benda asing pada tubuh pasien setelah operasi
Standar : 100%
Capaian : 100%
Hasil : Tercapai
7. Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi dan sebab penempatan ET
Standar : $\leq 6\%$
Capaian : 0%
Hasil : Tercapai

V. PELAYANAN PERSALINAN & PERINATOLOGI

1. Kejadian Kematian Ibu karena Persalinan
 - a. Karena perdarahan
Standar : $< 1\%$
Capaian : 0%
Hasil : Tercapai
 - b. Karena pre eklamsi
Standar : $\leq 30\%$
Capaian : 0.065 %
Hasil : Tercapai

- c. Karena sepsis
 Standar : $\leq 0,2\%$
 Capaian : 0%
 Hasil : Tercapai
2. Pemberi pelayanan persalinan normal
 Standar : layanan dilakukan oleh dr. Sp. OG, dr Umum dan Bidan
 Capaian : layanan dilakukan oleh dr. Sp. OG, dr Umum dan Bidan
 Hasil : Tercapai
3. Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit
 Standar : Tim Ponek
 Capaian : Tim Ponek
 Hasil : Tercapai
4. Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi
 Standar : layanan dilakukan oleh dr. Sp. OG, dr. Sp. A dan dr. Sp. An
 Capaian : layanan dilakukan oleh dr. Sp. OG, dr. Sp. A dan dr. Sp. An
 Hasil : Tercapai
5. Kemampuan menangani BBLR 1500gr – 2500gr
 Standar : 100%
 Capaian : $(100 + 100 + 100 + 100) / 4 = 100\%$
 Hasil : Tercapai
6. Pertolongan persalinan melalui Sectio Caesaria
 Standar : $\leq 20\%$
 Capaian : $(27.13 + 27.32 + 27.13 + 35.08) / 4 = 29.17\%$
 Hasil : **Belum tercapai**
 Permasalahan :
 - Sebagai RS Tipe B pasien datang merupakan kasus rujukan
 Rekomendasi
 - Peningkatan kualitas pelayanan persalinan melalui Sectio Caesaria
7. Keluarga Berencana Mantap
 Standar : 100%
 Capaian : $(27.13 + 47.40 + 0 + 16.19) / 4 = 22.68\%$
 Hasil : **Belum tercapai**
 Permasalahan :
 - Beberapa pasien menolak saat di edukasi
 Rekomendasi
 - Penggiatan konseling KB saat ANC

8. Kepuasan pelanggan

Standar : $\geq 80\%$

Capaian : $(94.06 + 88.44 + 91 + 96.16) / 4 = 92.41 \%$

Hasil : Tercapai

VI. PELAYANAN INTENSIF CARE UNIT (ICU)

1. Rata-rata pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama ≤ 72 jam

Standar : $\leq 3\%$

Capaian : $(0 + 0.76 + 0 + 0) / 4 = 0,19\%$

Hasil : Tercapai

2. Pemberi pelayanan Unit Intensif

Standar : 100 % (1. Dokter spesialis anestesi dan dokter spesialis lain;

2. Perawat D3 dengan sertifikat Mahir ICU)

Capaian : $(75\% + 60\% + 60\% + 57.1\%) / 4 = 63.025\%$

Hasil : **Belum tercapai**

Permasalahan :

- Belum semua perawat memiliki sertifikat mahir ICU

Rekomendasi

- Diadakan pelatihan perawat mahir ICU

VII. PELAYANAN RADIOLOGI :

1. Waktu tunggu pelayanan Thorax photo

Standar : ≤ 3 jam

Capaian : Triwulan I – IV = < 2 jam

Hasil : Tercapai

2. Pelaksana Ekspertisi hasil pemeriksaan Rontgen

Standar : $\geq 80\%$

Capaian : $(99.19+99.79+99.39+99.47) / 4 = 99,46\%$

Hasil : Tercapai

3. Kejadian Kegagalan Pelayanan Radiologi

Standar : $\leq 2\%$

Capaian : $(1.03 + 0.2 + 0.6 + 0.52) / 4 = 0,59\%$

Hasil : Tercapai

4. Kepuasan pelanggan
Standar : $\geq 80\%$
Capaian : Triwulan I – IV = 90%
Hasil : Tercapai

VIII. PELAYANAN LABORATORIUM :

1. Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium
Standar : ≤ 140 menit
Capaian : $(58 + 58.178 + 47.60 + 58.58) / 4 = 55.58$ menit
Hasil : Tercapai
2. Pelaksana ekspertisi hasil pemeriksaan laboratorium
Standar : Dokter spesialis patologi klinik
Capaian : ada 2 dokter spesialis patologi klinik
Hasil : Tercapai
3. Tidak adanya kesalahan penyerahan hasil pemeriksaan Laboratorium
Standar : 100 %
Capaian : $(100 + 100 + 100 + 100) / 4 = 100\%$
Hasil : Tercapai
4. Kepuasan pelanggan
Standar : $\geq 80\%$
Capaian : $(90 + 90 + 90 + 90) / 4 = 90\%$
Hasil : Tercapai

IX. PELAYANAN GAKIN :

1. Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan
Standar : 100%
Capaian : $(100 + 100 + 100 + 100) / 4 = 100\%$
Hasil : Tercapai

X. PELAYANAN BANK DARAH RUMAH SAKIT (BDRS)

1. Pemenuhan Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan lanjut
Standar : 100 %
Capaian : $(100 + 100 + 100 + 100) / 4 = 100\%$
Hasil : Tercapai
2. Kejadian reaksi tranfusi
Standar : 0.01 %

Capaian : $(1,39 + 0,41 + 2,27 + 0.84) / 4 = 1.22\%$

Hasil : **belum tercapai**

Permasalahan :

- Ada beberapa kasus kejadian reaksi tranfusi yaitu reaksi menggigil dan gatal-gatal

Rekomendasi :

- Koordinasi dengan PMI sebagai Penyuplai darah di RSUD Kabupaten Temanggung terkait kualitas darah.
- Penggunaan PRC Leukodepleted
- Restriksi pemberian tranfusi

XI. PELAYANAN LAUNDRY :

1. Tidak adanya kejadian linen yang hilang

Standar : 100%

Capaian : Triwulan I – IV = 100%

Hasil : Tercapai

2. Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap

Standar : 100 %

Capaian : $(99.73\% + 99.83\% + 98.27\% + 97.89\%) / 4 = 98,93\%$

Hasil : **Belum tercapai**

Permasalahan :

- Serah terima linen tidak dengan check list

Rekomendasi :

- SPO serah terima linen dengan menggunakan check list

XII. PENGELOLAAN LIMBAH

1. Baku Mutu Limbah Cair

Standar : 100%

Capaian : Triwulan I – IV = 100%

Hasil : Tercapai

2. Pengelolaan limbah padat berbahaya sesuai dengan aturan

Standar : 100 %

Capaian : Triwulan I – IV = 100%

Hasil : Tercapai

XIII. PELAYANAN REHABILITASI MEDIS

1. Kejadian drop out pasien terhadap pelayanan rehabilitasi yang direncanakan
Standar : $\leq 50\%$
Capaian : $(31\% + 27\% + 27\% + 30\%) / 4 = 28,75\%$
Hasil : Tercapai
2. Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan Rehabilitasi Medik
Standar : 100%
Capaian : 100%
Hasil : Tercapai
3. Kepuasan pelanggan
Standar : $\geq 80\%$
Capaian : $(95\% + 93\% + 94\% + 93\%) / 4 = 93,75\%$
Hasil : Tercapai

XIV. PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH

1. Waktu terhadap pemulasaraan jenazah
Standar : ≤ 2 jam
Capaian : $(24.87 + 24.85 + 25 + 25.9) / 4 = 25.16$ menit
Hasil : Tercapai
2. Angka kecepatan waktu penyelesaian Ve R
Standar : $\geq 90\%$
Capaian : 100%
Hasil : Tercapai
3. Penyelesaian VeR luar sama dengan atau kurang dari 7 hari
Standar : $\geq 95\%$
Capaian : 100%
Hasil : Tercapai

XV. PELAYANAN AMBULANCE / KERETA JENAZAH

1. Waktu pelayanan Ambulance / kereta jenazah
Standar : 24 jam
Capaian : 24 jam
Hasil : Tercapai
2. Kecepatan memberikan pelayanan Ambulance / Kereta Jenazah di RS
Standar : ≤ 30 menit
Capaian : $(14.93 + 15.30 + 24.85 + 14.25) / 4 = 17.33$ menit
Hasil : Tercapai

XVI. PELAYANAN INSTALASI PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT (IPSR)

1. Kecepatan waktu menangani kerusakan alat

Standar : $\geq 70\%$

Capaian : $(89\% + 84\% + 90\% + 83\%) / 4 = 86,5\%$

Hasil : Tercapai

2. Ketepatan waktu pemeliharaan alat

Standar : 100%

Capaian : $(88\% + 78\% + 63\% + 70\%) / 4 = 74,75\%$

Hasil : **Belum tercapai**

Permasalahan :

- Adanya kekurangan tenaga ATEM
- Keterbatasan anggaran pemeliharaan alat

Rekomendasi :

- Penambahan tenaga ATEM sesuai perhitungan ABK
- Usul penambahan anggaran

3. Peralatan laboratorium dan alat ukur lain yang terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi

Standar : 100%

Capaian : $(100\% + 72\% + 6\% + 3\%) / 4 = 45.25\%$

Hasil : **Belum tercapai**

Permasalahan :

- Keterbatasan anggaran

Rekomendasi :

- Usul penambahan anggaran

XVII. PENCEGAHAN PENGENDALIAN INFEKSI (PPI):

1. Tersedianya anggota PPI yang terlatih

Standar : 75% terlatih

Capaian : $(80.95\% + 83.33\% + 83.33\% + 83.33\%) / 4 = 82.73\%$

Hasil : Tercapai

2. Ketersediaan APD

Standar : 60%

Capaian : 100%

Hasil : Tercapai

3. Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomial RS
Standar : 75%
Capaian : $(84.21\% + 72.22\% + 76.47\% + 76.19\%) / 4 = 77.27\%$
Hasil : tercapai

XVIII.PELAYANAN GIZI

1. Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien
Standar : $\geq 90\%$
Capaian : $(98 + 98 + 98 + 98) / 4 = 98\%$
Hasil : Tercapai
2. Sisa makan yang tidak termakan pasien
Standar : $\leq 20\%$
Capaian : $(15.59\%+14.5\%+14.6\%+14.0\%) / 4 = 14.67\%$
Hasil : Tercapai
3. Tidak adanya kesalahan dalam pemberian diet
Standar : 100%
Capaian : $(98\% + 98\% + 98\% + 93,3\%) / 4 = 96,82\%$
Hasil : **Belum tercapai**
Permasalahan:
 - Adanya kurang telitian petugasRekomendasi
 - Meningkatkan koordinasi antar petugas untuk saling mengingatkan terkait ketelitian petugas
4. Jumlah permintaan makanan yang terlayani
Standar : 100%
Capaian : Triwulan I – IV = 100%
Hasil : Tercapai
5. Jumlah konsultasi gizi rawat jalan yang tertangani
Standar : $\geq 90\%$
Capaian : Triwulan I – IV = 100%
Hasil : Tercapai
6. Jumlah konsultasi gizi rawat inap yang tertangani
Standar : $\geq 90\%$
Capaian : $(98 + 98 + 98 + 100) / 4 = 98,5\%$
Hasil : Tercapai

XIX. ADMINISTRASI MANAJEMEN

1. Tidak lanjut penyelesaian hasil pertemuan tingkat direksi
Standar : 100%
Capaian : $(100 + 55,96 + 84,40 + 100) / 4 = 85,09 \%$
Hasil : **Belum tercapai**
Permasalahan :
 - Ada permasalahan yang masih dalam proses penyelesaianRekomendasi :
 - Pembagian tugas yang jelas sesuai hasil rapat.
2. Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja
Standar : 100%
Capaian : Triwulan I-IV 100%
Hasil : Tercapai
3. Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat
Standar : 100%
Capaian : Triwulan I-IV 100%
Hasil : Tercapai
4. Ketepatan waktu pengurusan kenaikan gaji berkala
Standar : 100%
Capaian : 100%
Hasil : Tercapai
5. Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 16 jam pertahun
Standard : $\geq 60\%$
Capaian : $(100\%+100\%+100\%+100\%) / 4 = 100\%$
Hasil : Tercapai
6. *Cost recovery*
Standar : $\geq 40\%$
Capaian : $(116,92\%+71,96\%+75,65\%+60,51\%) / 4 = 81,26\%$
Hasil : Tercapai
7. Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan
Standar : 100%
Capaian : 100%
Hasil : Tercapai
8. Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap
Standar : ≤ 2 jam
Capaian : $(19,24 + 19,45 + 18,45 + 30) / 4 = 21,78$ mnt
Hasil : Tercapai

9. Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu
Standar : 100%
Capaian : $(100 + 100 + 100 + 100) / 4 = 100\%$
Hasil : Tercapai

XX. PELAYANAN REKAM MEDIS

1. Kelengkapan pengisian rekam medis 24 jam setelah selesai pelayanan

Standar : 100%

Capaian : $(85.21\%+84.95\%+92.47\%+95.45\%) / 4 = 89.52\%$

Hasil : **Belum tercapai**

Permasalahan :

- Ada dokter part timer / dokter tamu yang tidak setiap hari datang ke RS

Rekomendasi :

- Koordinasi dengan ruangan dan kasir Rawat Inap untuk segera mengembalikan dokumen ke Rekam Medis dalam kurang dari 24 jam
- Berkoordinasi dengan komite medik sosialisasi untuk pengisian rekam medis, menempatkan dokter sebagai pelengkap rekam medis.

2. Kelengkapan informed concent setelah mendapatkan informasi yang jelas

Standar : 100%

Capaian : $(99.74\%+99.30\%+99.24\%+98.29\%) / 4 = 99,14\%$

Hasil : **Belum tercapai**

Permasalahan :

- Ada beberapa ruangan yang belum melengkapi informed concent

Rekomendasi :

- Koordinasi dengan ruangan terkait

3. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan

Standar : ≤ 10 menit

Capaian : $(10.21 + 10.04 + 9.50 + 7.38) / 4 = 9,28$ menit

Hasil : Tercapai

4. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap

Standar : ≤ 15 menit

Capaian : $(11.09 + 4.13 + 5.48 + 6.21) / 4 = 6.705$ menit

Hasil : Tercapai

XXI. PELAYANAN FARMASI

1. a. Waktu tunggu pelayanan obat jadi

Standar : ≤ 30 menit

Capaian : $(34+31+27+28) / 4 = 30$ menit

Hasil : **Belum tercapai**

Permasalahan :

- belum semua klinik menggunakan e resep

Rekomendasi :

- koordinasi kendala terkait klinik-klinik yang belum e resep.

b. Waktu tunggu pelayanan obat racikan

Standar : ≤ 60 menit

Capaian: $(34+36+33+31) / 4 = 33.5$ menit

Hasil : Tercapai

2. Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian obat

Standar : $\geq 97\%$

Capaian : $(98\% + 98\% + 99\% + 98.67\%) / 4 = 98.41\%$

Hasil : Tercapai tetapi belum 100% sehingga masih ada kesalahan pemberian obat

3. Kepuasan pelanggan

Standar : $\geq 80\%$

Capaian : $(89.50\% + 89.25\% + 84\% + 84\%) / 4 = 86,68\%$

Hasil : Tercapai

4. Penulisan resep sesuai formularium

Standar : $\geq 97\%$

Capaian : $(99\% + 98\% + 99\% + 98.67\%) / 4 = 98,7\%$

Hasil : Tercapai

Capaian SPM RSUD Kabupaten Temanggung sebesar 80,41 % dari 97 standar dalam SPM terdapat 19 standar yang belum tercapai

Tindak lanjut atas standar yang belum tercapai adalah sebagai berikut :

I. BIDANG PELAYANAN

1. Menghimbau dokter spesialis untuk mematuhi jam buka layanan sesuai kesepakatan
2. Menghimbau DPJP agar visite sesuai ketentuan jam visite dokter
3. Meningkatkan sistem *Early Warning System* (EWS) di setiap bangsal
4. Memastikan setiap dokter jaga selalu mengikuti pelatihan yang wajib (Pelatihan ACLS, BTLS)
5. Melaksanakan Audit Medis Perinatologi

6. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat agar dapat di informasikan ke PKM di wilayah Kabupaten Temanggung agar dilakukan penanganan kegawatan pasien dan stabilisasi pasien secara maksimal sebelum dirujuk ke rumah sakit.
7. Melakukan sosialisasi berulang terkait kepatuhan jam layanan Poliklinik pada forum komite medis.
8. Mengoptimalkan pengkajian pasien resiko jatuh, kepatuhan inervensi pencegahan resiko jatuh dan pemetaan sarana prasarana bed pasien yang lebih safety bagi pasien resiko jatuh.
9. Berkoordinasi dengan Sub Bagian Diklat untuk mengadakan pelatihan guna meningkatkan kapasitas dokter umum agar pasien memperoleh penanganan yang tepat sesuai kebutuhan.
10. Berkoordinasi dengan Sub Bagian Diklat untuk mengadakan pelatihan perawat mahir ICU.
11. Membuat permohonan ke PMI untuk meningkatkan kualitas dalam pembuatan darah tranfusi
12. Menghimbau penggunaan PRC leukodepleted dan retriksi pemberian tranfusi darah.
13. Menghimbau kepada dokter jaga /DPJP untuk segera menyelesaikan pengisian berkas Rekam Medis, utamanya untuk pasien yang meninggal
14. Menyiapkan berkas Rekam Medis pasien pulang di Poliklinik untuk dokter tamu
15. Menghimbau kepada dokter untuk menandatangani Informed Consent dengan lengkap

II. BIDANG PENUNJANG MEDIK

1. Menyediakan tempat tidur khusus untuk mengurangi resiko jatuh pada pasien.
2. Mendorong PMI terkait untuk memberikan jaminan mutu persediaan darahnya.
3. Menyusun SPO serah terima linen dengan menggunakan check list.
4. Mengusulkan penambahan alat-alat service untuk memperbaiki peralatan di RS.
5. Melakukan evaluasi dan analisa terhadap alat-alat yang sudah dibeli, karena ada beberapa alat yang mudah rusak
6. Mengusulkan penambahan perbaikan anggaran kalibrasi dan perbaikan alat.

7. Meningkatkan ketelitian dan ketertiban terhadap SPO di Instalasi Gizi.
8. Melengkapi sarana dan prasarana di Farmasi Rawat Jalan dengan sistem antrian dengan e resep
9. Mengupayakan layanan farmasi di Rawat Jalan lebih cepat dan informative

III. BIDANG KEPERAWATAN

1. Mendorong perawat / petugas ruangan untuk aktif menghubungi dokter yang belum visite
2. Perlu ada komitmen untuk mencatat jam visite dokter by name di masing-masing ruangan
3. Memastikan setiap petugas pemberi asuhan selalu mengikuti pelatihan wajib dan tersertifikasi.
4. Menghimbau agar transportasi darah transfusi dengan cold box sesuai aturan
5. Menghimbau kepada perawat terkait kelengkapan pengisian Informed Consent

IV. BAGIAN UMUM

1. Mendorong PKRS agar melakukan sosialisasi kesehatan agar pasien tidak berada pada kondisi kesehatan yang buruk dan sangat parah baru ke IGD rumah sakit.
2. Melakukan penambahan tenaga dokter yang hanya ada 1 dokter untuk 1 bidang spesialis sesuai ABK.
3. Melakukan sosialisasi pendaftaran online lewat media social dan media cetak terkait pendaftaran online poliklinik untuk pasien lama.
4. Melakukan peneguran kepada dokter dan atau SDM pemberi layanan kesehatan terkait pelanggaran peraturan jam kerja agar ketepatan waktu layanan di poliklinik tercapai.
5. Setiap Rapim perlu disampaikan notulen rapat bulan sebelumnya, sehingga diketahui progres tindak lanjut rapat sebelumnya
6. Ada pembagian tugas yang jelas dalam menindaklanjuti permasalahan di rapat.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RSUD Kabupaten Temanggung

Isu-isu strategis yang bersumber dari internal :

1. Mutu pelayanan
2. Cakupan pelayanan
3. Sarana dan prasarana rumah sakit belum terpenuhi sesuai standar rumah sakit kelas B dan rujukan regional, demikian juga karena masa pakai alat yang sudah relatif lama sehingga menyebabkan alat berfungsi kurang optimal.
4. Terbatasnya lahan untuk pengembangan pelayanan dan lahan parkir.
5. Belum cukupnya penerimaan BLUD mengcover seluruh biaya operasional BLUD.
6. Jumlah tenaga kesehatan belum memadai untuk kebutuhan spesialisik dan sub spesialisik.
7. SIM belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan unit pelayanan dan kebutuhan eksternal

Isu-isu strategis yang bersumber dari eksternal :

1. Penerapan SJSN melalui BPJS.
2. Keterbatasan dana pemerintah pusat (APBN) dan dana pemerintah daerah (APBD) dalam mensubsidi RS.
3. Perubahan perilaku yang mengakibatkan perubahan pola penyakit.
4. Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat dan canggih mendorong masyarakat menuntut ketersediaan akses informasi pelayanan kesehatan melalui sistem informasi manajemen yang cepat dan akurat

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD memuat rencana kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif dengan mendorong partisipasi masyarakat. Adapun review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 RSUD Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.6
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024 RSUD Kabupaten Temanggung

No	KETERANGAN			RANCANGAN AWAL RKPD 2024			HASIL ANALISIS KEBUTUHAN		
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7
	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)					347.959.193.417			388.379.358.452
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	RSUD	Capaian Nilai Akreditasi RSUD	100	%	347.959.193.417	100	%	360.000.000.000
	Kegiatan :Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1	paket	320.000.000.000	3	paket	225.000.000.000
	Sub Kegiatan : Pengadaan Alat Kesehatan /Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	1	Unit	185.000.000.000	20	unit	20.000.000.000
	Sub Kegiatan : Pengembangan Rumah Sakit	RSUD	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah saki				1	unit	197.128.408.210
	Sub Kegiatan : Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakia, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehtaan	RSUD	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan				36	Paket	7.871.591.790
	Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	RSUD	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				1	dokumen	135.000.000.000
	Sub Kegiatan : Operasional Pelayanan Rumah Sakit		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	2	dokumen	135.000.000.000	2	dokumen	135.000.000.000
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	RSUD							
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	RSUD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	468	orang	27.959.193.417	468	orang	28.379.358.452
	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	468	orang	27.959.193.417	468	orang	28.379.358.452

Secara umum, hasil review terhadap rancangan awal RKPD adalah terdapat perubahan nominal pada pagu anggaran di luar rancangan awal RKPD 2024.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Kajian usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan bagian dari kegiatan penjaringan aspirasi masyarakat terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap kegiatan pembangunan yang direncanakan, sebagai representasi kebutuhan masyarakat.

Adapun usulan kegiatan dari masyarakat melalui Musrenbang yang diampu oleh RSUD Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel II.7 Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan

NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

a. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional

Pembangunan Nasional tahun 2024 mengangkat tema "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan" yang dijabarkan dalam 7 Prioritas Nasional (PN), yakni:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaannya, RKP 2024 memiliki pedoman 8 Arah Kebijakan, yaitu:

1. Pengurangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan;
3. Penguatan Daya Saing Usaha;
4. Revitalisasi Industri dan Penguatan Riset Terapan;
5. Pembangunan Rendah Karbon dan Transisi Energi;
6. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas;
7. Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara; dan
8. Pelaksanaan Pemilu 2024.

b. Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Temanggung

Arah Kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Temanggung adalah Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia, Pemulihan Ekonomi, Dan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik. Fokus pembangunan pada tahun 2024 adalah:

1. peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman, dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, dan peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah;
2. pemulihan ekonomi melalui penambahan investasi, optimalisasi pemakaian produk dalam negeri, dan penekanan laju inflasi; pengembangan pariwisata dan kebudayaan berwawasan lingkungan.
3. pemantapan reformasi birokrasi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

c. Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan RSUD Kabupaten Temanggung

Kebijakan pembangunan RSUD Kabupaten Temanggung tahun 2024 diarahkan penyelesaian dan penuntasan program pembangunan RSUD Kabupaten Temanggung dalam rangka pencapaian visi dan misi RSUD Kabupaten Temanggung serta prioritas layanan unggulan stroke dan jantung. Maka kebijakan pembangunan RSUD Kabupaten Temanggung tahun 2024 difokuskan sebagai berikut :

1. Pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar RS kelas B pendidikan untuk mendukung pelayanan unggulan stroke dan jantung.
2. Pemenuhan SDM yang berkualitas.
3. Peningkatan digitalisasi terintegrasi dalam mendukung pelayanan rumah sakit.

Adapun telaah terhadap Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional dan Kabupaten Temanggung yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Kabupaten Temanggung :

Tabel III.1
Telaah Terhadap Prioritas Kebijakan Nasional dan Kabupaten Temanggung

No	Prioritas dan Kebijakan Tahun 2024		
	Nasional	Kabupaten Temanggung	RSUD Kabupaten Temanggung
1	Arah Kebijakan: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;	Arah Kebijakan : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Manusia, Pemulihan Ekonomi, Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.	Arah Kebijakan : penyelesaian dan penuntasan program pembangunan RSUD Kabupaten Temanggung dalam rangka pencapaian visi dan misi RSUD serta prioritas layanan unggulan stroke dan jantung.
2	Prioritas : Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan	Prioritas : peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan dasar bidang kesehatan, pendidikan, sosial, dan perumahan dan permukiman, dalam rangka percepatan penurunan stunting, percepatan penurunan kemiskinan ekstrim, dan peningkatan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah;	Prioritas : 1. Pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar RS kelas B pendidikan untuk mendukung pelayanan unggulan stroke dan jantung. 2. Pemenuhan SDM yang berkualitas. 3. Peningkatan digitalisasi terintegrasi dalam mendukung pelayanan rumah sakit.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja RSUD Kabupaten Temanggung

Untuk mendukung Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025 adalah “Temanggung Makin Maju, Mandiri, Aman, Adil dan Sejahtera”, yang dijabarkan melalui misi nomor 2 yaitu Mewujudkan kondisi sosial dan budaya masyarakat yang bermoral, beretika, berbudaya, beretos kerja, berkemampuan, sehat, dan cerdas berbasis pada nilai-nilai luhur bangsa dan keagamaan dalam rangka pencapaian masyarakat yang sejahtera lahir dan batin. RSUD temanggung mempunyai tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel III.2
Tujuan dan Sasaran RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2024

No	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target
1	Tujuan : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	75,71
2	Sasaran : Menurunnya Angka Kesakitan dan Angka Kematian	Presentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	90
3	Program : Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan nilai akreditasi	%	100

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

Rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan RSUD Kabupaten Temanggung di tahun 2024 ada 2 Program, 3 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel IV.1
Rencana Program Dan Kegiatan RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024								Catatan Penting	Alokasi		Kinerja Anggaran Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana 2025		Sumber Dana
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif	Sumber Dana	Anggaran 2023		Alokasi	Realisasi s/d TW II	%	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)		
				Target Kinerja	Satuan	Program	Keluaran Sub Kegiatan								Hasil Kegiatan	Tolok Ukur		Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	BELANJA								347.959.193.417			183.989.596.355	183.989.596.355	70.827.495.909	38,50%			205.000.000.000	
1	Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar																		
1.02	Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan																		
1.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota								27.959.193.417			28.379.358.452	28.379.358.452	15.687.216.258	55,28%			0	
5.1	BELANJA OPERASI								27.959.193.417			28.379.358.452	28.379.358.452	15.687.216.258	55,28%			-	
5.1.01	Belanja Pegawai																		
1.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								27.959.193.417			28.379.358.452	28.379.358.452	15.687.216.258	55,28%			-	
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan pegawai	Kabupaten Temanggung	14	bulan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			27.959.193.417	DAU		28.379.358.452	28.379.358.452	15.687.216.258	55,28%				DAU
	Tambahan Penghasilan PNS		Kabupaten Temanggung			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota													
1.02.02	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit		52	%				185.000.000.000			13.610.237.903	13.610.237.903	-	0,00%			70.000.000.000	
									185.000.000.000			13.610.237.903	13.610.237.903	-	0,00%			70.000.000.000	
1.02.02.2.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota																		
1.02.02.2.01.05	Pengembangan Rumah Sakit	Tersedianya gedung dan sarpras pendukungnya	Kabupaten Temanggung	1	paket	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			185.000.000.000	DAK								60.000.000.000	DAK dan DAU

Kode	Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan	Rencana Kerja Tahun 2024								Catatan Penting	Alokasi		Kinerja Anggaran Tahun 2023			Prakiraan Maju Rencana 2025		Sumber Dana
			Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja					Pagu Indikatif	Sumber Dana		Anggaran 2023	Alokasi	Realisasi s/d TW II	%	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.)	
				Target Kinerja	Satuan	Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan								Tolok Ukur	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan (DAK)											285.489.600	285.489.600		0,00%				DAK dan DAU
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya alat kesehatan	Kabupaten Temanggung	90	unit	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					DAK	5.453.156.513	5.453.156.513		0,00%			10.000.000.000	DAK dan DAU
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin (DAU)											5.023.804.770	5.023.804.770		0,00%				DAU
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai (DAU)											2.847.787.020	2.847.787.020	166.231.345	5,84%				DAU
		Cakupan nilai akreditasi RSUD		100	%														
1.02.02.2.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								135.000.000.000			142.000.000.000	142.000.000.000	55.140.279.651	38,83%			135.000.000.000	
1.02.02.2.02.32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Terlaksananya kegiatan-kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit	Kabupaten Temanggung	76	kegiatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat			135.000.000.000	BLUD		142.000.000.000	142.000.000.000	55.140.279.651	38,83%			135.000.000.000	BLUD

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) RSUD Kabupaten Temanggung tahun 2024 telah kami susun dalam rangka mengimplementasikan RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) RSUD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026. Renja ini merupakan acuan dalam pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) RSUD Kabupaten Temanggung tahun 2024 sehingga seluruh kegiatan yang dilakukan komponen Rumah Sakit akan menjadi lebih efektif, efisien dan terpadu. Renja disusun untuk mencapai Visi dan melaksanakan Misi RSUD Kabupaten Temanggung sehingga bisa mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat.

Catatan penting dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Kabupaten Temanggung tahun anggaran 2022 dan 2023 yang perlu mendapatkan perhatian adalah demi tercapainya pelayanan unggulan stroke dan jantung maka diperlukan sarana, prasarana, dan alat kesehatan pendukung. Berdasarkan hal tersebut, perlu dukungan anggaran dari Pemerintah Kabupaten Temanggung untuk pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan untuk terwujudnya Rumah Sakit yang terpercaya sebagai pusat layanan dan pendidikan kesehatan.

Kami berharap semoga Renja ini dapat mengantarkan RSUD Kabupaten Temanggung dalam meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Temanggung, Juli 2023

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG



dr. TETTY KURNIAWATI, M.Kes., Sp.S.

Pembina Tingkat I
NIP. 19760401 200312 2 010

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung telah menyelesaikan penyusunan/perencanaan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024, yang merupakan bentuk perencanaan program dan kegiatan selama jangka waktu 1 (satu) tahun.

Adapun tujuan disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung tahun 2024 adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Demikian Renja Kerja tahun 2024 ini kami susun semoga dapat menjadikan acuan dan sebagai peningkatan kinerja di tahun yang akan datang.

Temanggung, 2023
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. EDY CAHYADI, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19730619 199303 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	7
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika Penulisan	10
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2022	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan Capaian Renstra Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung	24
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung	81
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD	84
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ..	97
2.6. Inovasi Perangkat Daerah.....	98
2.7. Penghargaan.....	98
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	100
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	100
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung	107
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	111
4.1 Program dan Kegiatan Satpol PP dan Pemadam Kebakaran ...	111
BAB IV PENUTUP	127

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan
Pembangunan 2

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran s.d Tahun 2022	12
Tabel 2.2	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran s.d Triwulan I Tahun 2023	17
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Triwulan I Tahun 2023 Kabupaten Temanggung	25
Tabel 2.4	Indeks Rasa Aman dari Tahun 2017-2023 TW I	29
Tabel 2.5	Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	30
Tabel 2.6	Cakupan Penegakan Perda dan Perbup	32
Tabel 2.7	Tabel Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup sampai dengan Tahun 2023 TW I	33
Tabel 2.8	Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	34
Tabel 2.9	Rasio Petugas Satpol PP Kabupaten Temanggung Tahun 2018-Tahun 2023 TW I	35
Tabel 2.10	Data Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Temanggung Tahun 2023	36
Tabel 2.11	Rasio Jumlah Linmas Per RT Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW I	39
Tabel 2.12	Persebaran Anggota Linmas di Kecamatan Se-Kabupaten Temanggung Tahun 2023	40
Tabel 2.13	Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	41
Tabel 2.14	Presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada Tahun 2018 s/d 2023 TW I	42
Tabel 2.15	Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	43
Tabel 2.16	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K4 Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d 2023 TW I	44
Tabel 2.17	Tabel Data Pelanggaran Perda Terkait K4 per kecamatan Tahun 2023	45
Tabel 2.18	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW I	46
Tabel 2.19	Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2023 s/d TW I	47
Tabel 2.20	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW I	53
Tabel 2.21	Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	53
Tabel 2.22	Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	54
Tabel 2.23	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW I	56
Tabel 2.24	Data Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2023 TW I	57

Tabel 2.25	Prosentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW I	59
Tabel 2.26	Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	60
Tabel 2.27	Daftar Personil Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran s.d Tahun 2023 TW I	61
Tabel 2.28	Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3.000-5.000 Liter Pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW I	64
Tabel 2.29	Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran Tahun 2023	65
Tabel 2.30	Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW I	67
Tabel 2.31	Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	68
Tabel 2.32	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi yang dilaksanakan oleh kelompok Relawan (Balakar dan atau lainnya) yang dibentuk di bawah Pembinaan Pemadam Kebakaran Temanggung s.d Tahun 2023 TW I	70
Tabel 2.33	Cakupan Penanganan Bencana non Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2017 s.d Tahun 2022 TW IV	71
Tabel 2.34	Tabel Daftar Penyelamatan dan Evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Pemadam Kebakaran Tahun 2023 TW I	72
Tabel 2.35	Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024	86
Tabel 2.36	Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat (hasil musrenbang RKPD Kecamatan)	97
Tabel 2.37	Daftar inovasi perangkat daerah 2019-2021	98
Tabel 2.38	Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2021	98
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024	108
Tabel 4.1	Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Temanggung Tahun 2024	112
Tabel 4.2	Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Temanggung Tahun 2024	116

BAB I**PENDAHULUAN****1.1. Latar Belakang**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, telah diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dimana dalam penyusunan RKPD diperlukan masukan dari Perangkat Daerah berupa Rencana Kerja Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka 1 (satu) tahun yang memuat kondisi pelayanan Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah, serta rencana pendanaan Perangkat Daerah untuk 1 (satu) tahun yang akan datang.

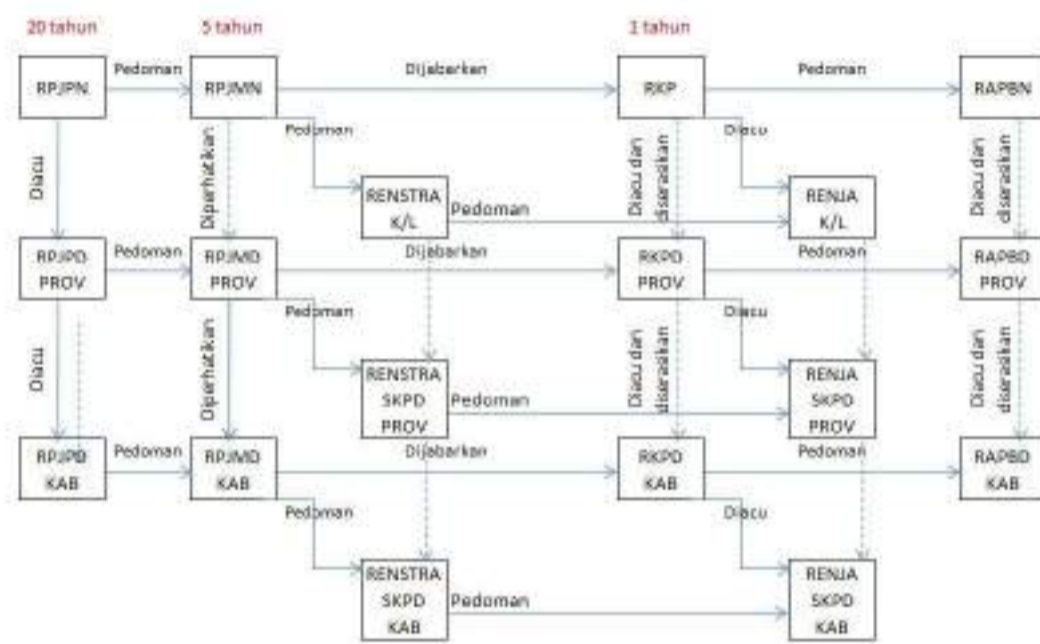
Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Perubahan renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD oleh Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sesuai dengan jangka waktu RPD. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2024 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan

berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2024.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ;



- 2) Kondisi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 4) Data Pokok Pembangunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

b. Analisis gambaran pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan I tahun 2023, dan perkiraan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun lalu berdasarkan renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;

- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;
- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan

Pemadam Kebakaran tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 5) Penerapan Protokol Kesehatan dalam semua kegiatan;
- 6) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- 7) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayananserta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh (Perangkat Daerah). Namun dalam proses ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi

birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;

Penyempurnaan rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan kerja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan saran dan masukan dari tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2024;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2024;
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 adalah sebagai pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran untuk Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2024 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama kurun waktu 1 tahun yaitu Tahun 2024;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V PENUTUP

BAB II**EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN****2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 dan Capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2019-2023**

Dalam melakukan penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 terhadap capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018-2023, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2023.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2022 dan Triwulan I Tahun 2023 terhadap target di Tahun 2023.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018-2023 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun ke-empat pelaksanaan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2018-2023 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
s.d Tahun 2022

No	Bidang/ Program/Kegi atan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2021		Target 2022			Realisasi 2022		Capaian 2022		Realisasi s/d 2022		Capaian s/d 2022		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K	Rp.	K	Rp			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	19
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																			
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5.041.656.00 0	5.302.199.979		5.089.580.020		95,99					
a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	bulan	70	-			14	5.041.656.00 0	5.302.199.979	14	5.089.580.020	100	99,99					
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								127.999.400	302.999.140		285.687.550		94,29					
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Artibut Kelengkapannya							6	127.999.400	127.999.400	6	125.061.050	100	97,70					
b	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan							12	0	175.000.000	12	160.626.500	100	91,79					
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah								168.383.150	85.733.150		811.794.150		95,41					

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	bulan	60				12	6.999.950	6.999.950	12	6.989.000	100	99,84				
b.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	bulan	60				12	94.400.000	18.940.000	12	18.240.250	100	96,31				
c.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	bulan	60				12	6.999.700.	9.793.900	12	7.162.000	100	73				
d.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Tersedianya Makanan dan Minuman	bulan	60				12	5.000.000	3.000.000	12	2.892.000	100	96				
e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan	60				12	54.983.500	46.999.300	12	46.510.400	100	98,96				
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								259.223.800	257.224.000		232.849.255		90,52				
a	Penyedia Jasa Surat Menyurat							12	1.999.800	0	12	0	100	0,00				
b.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan	60				12	70.000.000	70.000.000	12	61.716.364	100	88,17				
c.	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor dan Tersedianya Lembur serta Gaji SS dan Tenaga Pendukung Administrasi 1 orang 12 bulan	bulan	60				12	187.224.000	187.224.000	12	171.130.891	100	91,40				
5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah								129.997.500	138.010.000		137.480.740	100	99,97				

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																		
a.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas jabatan	bulan	60				12	50.000.000	72.510.000	12	72.489.740	100	99,97					
b.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						12	79.997.500	65.500.000	12	65.486.131	100	99,98					
Total Program									5.727.259.850	6.086.166.269		5.827.886.846		90,52					
2 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum																			
1.	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								920.000.000	1.182.000.000		1.086.922.320		91,96					

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

a.	pencegahan Gangguan Ketertiban dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan, Patroli, pengamanan, dan Pengawalan	Terlaksananya Patroli, Deteksi Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, dan terbayarnya Gaji SS Banpol sejumlah 30 orang	bulan	60				12	20.000.000	92.000.00	12	88,195.320	100	95,86				
b.	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penertiban PKL, Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	bulan	60		12		12	850.000.000	976.504.000	12	893.273.000	100	91,48				
c.	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Korpsik dan Penampilan dalam Upacara Kenegaraan	bulan	60		12		12	50.000.000	113.496.000	12	105.454.000	100	92,91				
Total Program									920.000.000	1.182.000.000		1.086.922.320		91,96				
3 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																		
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota								1.652.756.000	1.822.690.800		1.810.151.708		99,31				

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

a.	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	tercukupinya gaji ss damkar dan perlengkapannya	bulan	60		12		12	77.008.600	148.708.600	12	148.237.293	100	99,68				
b.	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran & Alat Pelindung Diri	Tertanganinya kebakaran,terlanya operasi tangkap tawon, oli/solar tumpah,tanah longsor,penanga	bulan	60		12		2	293.383.200	106.160.000	12	105.841.265	100	99,70				
c.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri							12	201.843.400	560.682.200	12	553.353.150	100	98,69				
d.	Pembinaan aparatur Pemadaman Kebakaran							12	1.080.520.800	1.007.140.000	12	1.002.720.000	100	99,56				
2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran								99.479.000	165.700.000		163.672.800		98,78				
a.	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	terselenggaranya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat	bulan	60		12		12	99.479.000	165.700.000	12	163.672.800	100	98,88				
	Total Program								1.752.235.000	1.988.390.800		1.973.824.508		99,27				

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
s.d Triwulan I Tahun 2023

No	Bidang/ Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Satuan	Target Akhir Renstra		Realisasi s/d 2022		Target 2023			Realisasi 2023 Triwulan I		Capaian 2023		Realisasi s/d 2023		Capaian s/d 2023		Ket
				K	Rp	K	Rp	K	Rp (RENJA)	Rp (DPA)	K	Rp	K (%)	Rp (%)	K	Rp.	K	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17=(8+21)	18	18	19
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																			
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								5.340.990.412	4.858.599.266		1.069.164.921		22,01					
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	bulan					14	5.340.990.412	4.858.599.266	3	1.069.164.921	21, 43	22,01					
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								346.015.000	409.375.800		256.460.100		62,65					
a	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Artibut Kelengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian Dinas Satgas Damkar beserta kelengkapannya						6	146.015.000	94.185.000	3	872.000	50, 00	0,93					
b	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Terlaksananya sosialisasi barang kena cukai						12	200.000.000	315.190.800	3	255.587.300	25, 00	81,09					
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah								179.000.000	178.857.000		27.390.500		15,31					
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	bulan					12	10.000000	10.000.000	3	0	25, 00	0,00					

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan				12	55.000.000	55.000.000	3	0	25,00	0,00				
c	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor dan alat kebersihan kantor	bulan				12	25.000.000	25.000.000	3	2.898.500	25,00	11,59				
d	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercukupinya Barang Cetak dan Penggandaan	bulan				12	10.000.000	10.000.000	3	1.356.400	25,00	13,56				
e	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya bahan minuman	bulan				12	39.000.000	39.000.000	3	6.514.000	25,00	16,70				
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	bulan				12	40.000.000	39.857.000	3	16.621.600	25,00	41,70				
4	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							560.000.000	530.000.000		489.355.800		92,33				
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					5	560.000.000	530.000.000	3	489.355.800	60,00	92,33				
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							251.674.000	251.674.000		58.197.337		23,12				
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	bulan				12	70.000.000	70.000.000	3	16.991.638	25,00	24,27				
b	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	bulan				12	9.500.000	9.500.000	3	0	25,00	0,00				

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

c	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Tercukupinya honor tenaga keamanan, kebersihan, jasa spanduk/karangan bunga, iklan ucapan selamat	bulan					12	172.174.000	172.174.000	3	41.205.699	25,00	23,93				
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								195.000.000	316.000.000		17.399.692		5,51				
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Dinas	bulan					12	60.000.000	60.000.000	3	2.031.750	25,00	3,39				
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tercukupinya BBM dan pelumas serta Kendaraan Dinas serta biaya pajak kendaraan dinas	bulan					12	50.000.000	50.000.000	3	15.367.942	25,00	30,74				
c	Pemeliharaan Mebel	Terpeliharanya Mebel	bulan					12	5.000.000	5.000.000	3	0	25,00	0,00				
d	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	bulan					12	50.000.000	25.000.000	3	0	25,00	0,00				

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	bulan					12	150.000.000	176.000.000	3	0	25,00	0,00				
Total Program									6.872.679.412	6.544.506.066		1.917.968.350						
2 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum																		
1	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								926.990.000	913.990.000		198.325.398		21,70				
a	pencegahan Gangguan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan, Patroli, pengamanan, dan Pengawasan	Terlaksananya Patroli, Deteksi Dini, pengamanan, dan Pengawasan pejabat negara dan daerah	bulan					12	92.000.000	79.000.000	3	10.140.000	25,00	12,84				
b	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Terbayarnya honor SS Banpol, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan dan terselenggaranya pelaksanaan PILKADES	bulan					12	834.990.000	834.990.000	3	188.185.398	25,00	22,54				
2	Penegakan Perda Kabupaten Kota dan Peraturan Bupati/Walikota								0	734.809.200		0		0,00				
a	Penanganan Atas Pelanggaran	Tertanganinya Pelanggaran	bulan					12	0	734.809.200	3	0	25,00	0,00				

	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota																
	Total Program							926.990.000	1.648.799.200		198.325.398		12,03					
3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran																	
1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota							1.156.620.000	1.201.037.900		310.259.298		25,83					
a	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya respon time Damkar dan meminimalisir dampak kejadian kebakaran berupa korban jiwa dan harta benda	bulan					12	111.582.100	156.000.000	3	47.825.436	25,00	30,66				
b	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Terlindunginya keselamatan petugas Damkar dalam penanganan kejadian kebakaran	bulan					12	12.417.900	12.417.900	3	11.520.000	25,00	92,77				
c	Pembinaan aparatur Pemadaman Kebakaran	Tercukupinya honor SS Satgas Damkar, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan	bulan					12	1.032.620.000	1.032.620.000	3	250.913.862	25,00	24,30				
	Total Program							1.156.620.000	1.201.037.900		310.259.298		25,83					

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2022 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2018-2023.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran berupa:

1. Capaian kinerja kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan kegiatan sbb :
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Artibut Kelengkapannya
 - c. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
 - d. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor
 - e. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - g. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - h. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - i. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - j. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - k. Penyedia Jasa Surat Menyurat
 - l. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - m. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor
 - n. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - o. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - p. pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, pelaksanaan, Patroli, pengamanan, dan Pengawasan

- q. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
 - r. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
 - s. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - t. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran & Alat Pelindung Diri
 - u. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Penanggulangan Kebakaran Dan Alat Pelindung Diri
 - v. Pembinaan aparatur Pemadaman Kebakaran
 - w. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
2. Realisasi kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada
 3. Realisasi kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, adalah tidak ada

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2022, maka dapat dikatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **sangat memuaskan** yaitu dengan nilai **90,88%**, Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Capaian Kinerja : 95,94 % kategori Baik

2. Meningkatnya Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Capaian Kinerja : 85,88 % kategori Baik

Dari Tabel 2.1. dan Triwulan I tahun 2023 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2022 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

2.2.1. Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel. 2.3
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Triwulan I Tahun 2023
Kabupaten Temanggung

No	INDIKATOR KINERJA	Satuan	TARGET					REALISASI					Capaian s/d 2023 (%)	Status
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Indek Rasa Aman	angka	3,15	4,41	4,42	4,43	4,44	4,23	4,36	4,48	4,55	4,55	100	TT
2	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	TT
3	Rasio Linmas per RT	Rasio	1,48	1,62	1,62	1,62	1,62	1,38	1,38	1,42	1,42	1,42	87,84	UK
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	%	n.a	n.a	100	100	100	0	0	100	100	100	100	TT
5	Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten	%	60,64	60,64	60,64	60,81	61,00	60,64	60,64	60,64	60,64	60,42	99,38	UK
6	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	%	69,8	69,8	69,8	69,8	69,8	42,86	55,56	76,67	60,00	62,50	89,54	UK
7	Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten	angka	40	41	42	43	44	n.a	n.a	310	468	137	100	TT
8	Presentase aparaturnya yang memenuhi standar kualifikasi	%	40	41	42	43	44	33,96	35,19	32,14	80,00	96,36	100	TT
9	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	n.a	n.a	100	100	100	0	0	47,73	43,75	42,86	42,86	UK

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 5 terdiri dari:
 - a. Indek Rasa Aman.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah SDM Kabupaten Temanggung yang tidak menyukai konflik, kondisi geografis sebagai sebuah wilayah administratif di pegunungan yang kecil.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Dinamika kota kecil di pegunungan menjadi salah satu destinasi persembunyian yang aman bagi para teroris.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah diberikan pelatihan teknis dan alokasi anggaran anggaran penghitungan dari UP5AD kepada OPD.
 - b. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah SDM Satpol PP yang melaksanakan Penegakan Perda dengan pendekatan non yustisial yang humanis dan persuasive.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Belum berfungsinya PPNS secara maximal.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah secara rutin melaksanakan sosialisasi dan mengintensifkan patroli dan mengikutsertakan personil untuk mengikuti diklat atau bimbingan teknis.
 - c. Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah tidak terdapat dampak dari pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap produk-produk hukum Daerah
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah sosialisasi dan pembinaan pada pelanggar Perda dan Perkada

- d. Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah informasi yang diterima tidak terlambat.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah sarana dan prasarana yang terbatas serta tempat kejadian yang susah untuk dijangkau
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah peningkatan sarana dan prasarana penunjang kegiatan .
 - e. Persentase aparatur yang memenuhi standar kualifikasi
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya alokasi anggaran diklat /bintek yang tersedia di BKPSDM.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Penyedia/instansi yang menyelenggarakan diklat sangat terbatas
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah mengikuti kegiatan - kegiatan yang bersifat pengembangan kapasitas aparatur pemadam kebakaran
2. Capaian indikator dengan status Upaya Keras ada 4 terdiri dari:
- a. Rasio Linmas per RT
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah jumlah Linmas yang ada sudah sangat memadai.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah persebaran Linmas di tiap desa/kelurahantidak merata.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pembinaan Linmas ke desa/kelurahan.
 - b. Cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah telah ditentukan Wilayah Menejemen Kebakaran (WMK).
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah jumlah pos yang tidak seimbang dengan luas wilayah
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Penambahan pos kebakaran.
 - a. Tingkat waktu tanggap (Response Time Rate)
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah informasi yang diterima tidak terlambat, lokasi mudah dijangkau, ketersediaan sumber air mudah didapatkan.

- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah TKP merupakan medan yang sulit dijangkau, informasi/laporan kejadian kebakaran terlambat, sumber air tidak mudah dijangkau/sulit atau bahkan tidak ada keberadaannya.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah memberikan sosialisasi kepada warga agar cepat memberikan laporan bila terjadi kebakaran
- d. Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah informasi kejadian kebakaran tidak terlambat.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah jarak dan kondisi geografis yang mendukung
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah Penambahan pos kebakaran.

Realisasi Capaian kinerja tahun 2023 untuk persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran masih belum mencapai target yaitu masih sebesar 42,86%, untuk itu perlu upaya keras untuk mencapai target dengan berbagai rencana aksi yang meliputi :

- a. Pembangunan Pos Damkar mengacu kepada Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran/RISK di (Ngadirejo, Parakan dan Tembarak)
- b. Pembangunan groundtang/ penampungan air dan sumber air di Pos Candirotto, Pos Temanggung dan Pos Maron
- c. Penambahan personil damkar mengacu ke Analisis Beban Kerja
- d. Pemenuhan sarana dan prasarana Damkar sesuai Permendagri No.122 tahun 2018 (kendaraan Damkar,APD personil damkar, Sarpras pemadam Damkar)

2.2.2.Data Pokok

Data Pokok Data Pokok pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok **Bidang Ketrentaman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** dan Data Pokok Bidang

Bidang Pemadaman Kebakaran, dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok Bidang **Ketrentaman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

Indeks Rasa Aman

Definisi “Rasa Aman” berdasarkan UU No 9 Tahun 1999 pasal 30 ayat 1 menyatakan bahwa rasa aman merupakan suatu hak yang diterima secara pribadi oleh manusia atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Implementasi dari Indikator Rasa Aman dalam kajian ini adalah untuk mengukur rasa aman yang dirasakan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.

Ada empat komponen yang terdapat dalam Indikator Rasa Aman, antara lain: 1) Keamanan dari Bencana; 2) Pemenuhan Kesejahteraan Sosial; 3) Perlindungan dan Pemanfaatan atas Kebhinekaan, dan 4) Keamanan dari Kekerasan.

Indeks Rasa Aman merupakan salah satu variabel dalam Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), sebagai variabel yang menyatakan perasaan masyarakat terhadap rasa aman di daerahnya. Indeks Rasa Aman terdiri dari 4 indikator yakni kesadaran hukum, organisasi sipil, mitigasi resiko sosial dan penyelesaian sengketa secara beradab.

Untuk memperoleh angka indeks rasa aman, didapatkan dari survey indeks pembangunan masyarakat berdasarkan survey dari Tim P5 Universitas Diponegoro Semarang.

Realisasi indeks rasa aman di Kabupaten Temanggung diperoleh berdasarkan survey dari Tim P5 Universitas Diponegoro Semarang tahun 2022 adalah 4,55 (skala 1-5) dengan kategori sangat baik.

Tabel 2.4

Indeks Rasa Aman dari Tahun 2017-2023 TW I

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Rasa Aman	Angka	n.a	4,23	4,36	4,48	4,55	4,55

sumber data : P5 Universitas Diponegoro Tahun 2023 TW I

Pada tahun 2018 belum dilaksanakan perhitungan Indeks Rasa Aman, baru di tahun 2019 mulai dilaksanakan perhitungan Indeks Rasa Aman dari Tim P5 Universitas Diponegoro Semarang. Adapun faktor pendorong, penghambat dan upaya penyelesaian capaian kinerja pembangunan daerah Triwulan I tahun 2023 adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 2.5
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR SASARAN	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENYELESAIAN
1	Indeks Rasa Aman	1. Adanya kerjasama antar Instansi terkait untuk berkoordinasi; 2. Adanya peran serta masyarakat untuk memberikan laporan kejadian. 3. Media social membantu mempercepat penyampaian informasi kejadian kebakaran serta sebagai sarana sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat	.	1. Koordinasi dan memaksimalkan peran aktif antar instansi terkait; 2. Memberikan sosialisasi dan pembinaan tentang penegakan Perda/Perbup /Produk hukum lainnya; 3. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan; 4. Mengadakan sosialisasi dan pembinaan Linmas 5. Memberikan sosialisasi dan edukasi tentang pencegahan, penyelamatan dan evakuasi kebakaran 6. Peningkatan kapasitas SDM melalui Diklat atau Bimtek

1. Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan penegakan peraturan daerah, yang selanjutnya disebut perda dan peraturan kepala daerah.

Pada prinsipnya penegakan perda dan peraturan kepala daerah merupakan upaya yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menjamin dan memastikan perda dan peraturan kepala daerah tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Apabila terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah, satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu untuk menyelesaikannya.

Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh Satuan Polisi Pamong Praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yaitu tindakan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, Satuan Polisi Pamong Praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rumus Cakupan penegakan perda dan/atau perbup adalah Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan bupati yang diselesaikan di tahun bersangkutan dibagi Jumlah pelanggaran perda dan/atau peraturan bupati yang dilaporkan dan/atau dipantau di tahun bersangkutan dikali 100%.

Cakupan penegakan perda dan perbup pada tahun 2018 s/d 2023 TW I dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Cakupan Penegakan Perda dan Perbup
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018-2023 TW I

Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023 TW I
Pelanggaran Perda/Perbup yang ditangani	kasus	275	462	1903	1880	2759	502
Pelanggaran Perda/Perbup yang dilaporkan atau dipantau	kasus	315	462	1903	1880	2759	502
Cakupan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	%	87,3	100	100	100	100	100

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tw I

Dari tabel yang disajikan di atas dapat dilihat bahwa pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati tahun 2018 mengalami penurunan dikarenakan di tahun 2018 penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati baru mencakup perda reklame dan Perda PGOT. penanganan terhadap pelanggaran perda dan perbup penyelesaiannya hanya sebatas sosialisasi, pendataan dan pembinaan kepada pelanggar Perda dan Perbup (preventif non yustisial).

Tahun 2023 strategi penanganan pelanggaran perda reklame sedikit berubah yaitu dengan adanya instruksi bapak Bupati agar tiap Kecamatan membantu Satpol PP dalam menertibkan reklame yang melanggar perda. Meskipun dengan keterbatasan sarana serta anggaran semua pelanggaran Perda dapat terselesaikan (100 %). Selain pelanggaran perda k4 / reklame juga terdapat pelanggaran Perda PGOT yaitu adanya anak- anak punk yang mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat yang kebanyakan berasal dari luar daerah. pada bulan februari 2021 tim Penegakan Perda Satpol PP juga berhasil menutup aktifitas galian c di desa Kwadungan Jurang Kecamatan Kledung dan permasalahan sewa penggunaan lahan Pemda di perumahan Madureso

Temanggung. Tahun 2021 situasi di Indonesia masih mengalami pandemi covid 19 termasuk juga di Kabupaten Temanggung. Dampak adanya pandemi covid 19 sangat terasa ,untuk di Satpol PP anggaran giat penertiban mengalami banyak penurunan karena di alihkan untuk giat penanganan covid 19 , akan tetapi dengan semua keterbatasan itu tidak menghalangi Satpol PP Kabupaten Temanggung dalam berkarya menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati .

Adapun pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pada tahun 2023 TW I dapat tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Tabel Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup
Sampai dengan Tahun 2023 TW I

No.	Jenis Pelanggaran Perda	Perda / Perbup	Lokasi Kegiatan	Jumlah
1	PGOT	No. 3 tahun 2013	Wilayah Kabupaten Temanggung (20 Kec)	4
2	IMB	No. 15 tahun 2011		-
3	Minuman Beralkohol	No. 5 tahun 2015		-
4.	Reklame	No. 33 tahun 2011		434
5.	PKL	No. 3 tahun 2019		64
6.	Protokol Kesehatan	No. 45 tahun 2020 (Perbup)		-
JUMLAH				502

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tw I

Jenis Pelanggaran dimaksud sesuai dengan hasil giat operasi di lapangan terkait dengan perda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengemis, Gelandangan, Orang Terlantar dan Tuna Susila (PGOT), Perda Nomor 15 Tahun 2011 tentang IMB dan Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol, Perda Nomor 33 Tahun 2011 tentang Reklame. serta penambahan penegakan Peraturan Daerah No. 3 tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Penegakan Peraturan Bupati Nomor 45 tahun 2020 tentang penerapan protokol kesehatan pencegahan virus Covid 19. Adapun faktor pendorong, penghambat dan upaya penyelesaian capaian kinerja pembangunan daerah Triwulan I tahun 2023 adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 2.8
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENYELESAIAN
1	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kelompok masyarakat yang ikut mensosialisasikan Perda 2. Memaksimalkan keberadaan personil dan prasarana yang ada. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk patuh dan tertib Perda/Perbup/produk hukum lainnya 2. Kurangnya dukungan sarpras dalam pelaksanaan tugas. 3. Terbatasnya personil yang memiliki kualifikasi dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas. 4. Terbatasnya dukungan anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara rutin melaksanakan sosialisasi dan mengintensifkan patroli 2. Mengikutsertakan personil untuk mengikuti diklat atau bimbingan teknis 3. Koordinasi dan memaksimalkan peran aktif antar instansi terkait; 4. Memberikan sosialisasi dan pembinaan tentang penegakan Perda/Perbup /Produk hukum lainnya; 5. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan

3. Rasio Petugas Satpol PP

Menurut ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan beberapa indikator penghitungan jumlah Polisi Pamong Praja. Kriteria umum meliputi: jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah APBD dan rasio belanja aparatur. Sedangkan kriteria teknis meliputi: klasifikasi besaran organisasi perangkat daerah, jumlah peraturan daerah, jumlah peraturan kepala daerah, jumlah desa/kelurahan, tingkat potensi konflik sosial kemasyarakatan, jumlah kecamatan, aspek karakteristik dan kondisi geografis.

Rumus untuk memperoleh angka rasio petugas Satpol PP adalah jumlah anggota Satpol PP dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

Rasio petugas Satpol PP tahun 2018 s/d 2023 TW I dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9
Rasio Petugas Satpol PP

Kabupaten Temanggung, Tahun 2018 s/d Tahun 2023 TW I

Uraian	satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023 TW I
Jumlah Penduduk	Orang	780.148	791.264	795.556	795.556	800.429	800,429
Jumlah anggota Satpol PP	Orang	114	104	86	66	65	65
Rasio Petugas Satpol PP	Orang	1,4	(1,33)	1,08	0,82	0,81	0,81
Jumlah Minimal	Orang	150	150	150	150	150	150
Kekurangan	Orang	36	43	64	84	85	85

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tw I

Menurut analisa penghitungan dan penetapan jumlah Pol PP dari kriteria tersebut, jumlah Satpol PP di Kabupaten Temanggung seharusnya sebanyak 150 sampai dengan 250 pegawai, sedangkan jumlah Pol PP yang ada di Kabupaten Temanggung baru tersedia sejumlah 65 personil (menurun dikarenakan ada mutasi pegawai dan ada pegawai yg pensiun, dengan jumlah itu masih terdapat kekurangan minimal sejumlah 85 personil, akan tetapi dengan jumlah personil yang ada sudah dapat melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Fluktuasi pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan adanya penarikan Satpol PP yang bertugas mengamankan asset daerah digantikan oleh Satpam, mutasi pegawai, Satpol PP Kecamatan yg menjadi staf Kecamatan, dan pensiun maupun Satpol PP yang meninggal dunia.

Tabel 2.10
 DATA PEGAWAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN TEMANGGUNG
 TAHUN 2023

NO	NAMA	NIP	JABATAN	PANGKAT	GOL/ RUANG
1	Drs. EDY CAHYADI, M.M	19730619 199303 1 003	Kasatpol PP	Pembina Tingkat I	IV/b
2	TOTOK NURSETYANTO, S.STP	19830530 200112 1 005	Sekretaris	Pembina	IV/a
3	HARIS PRIAMBODO, S.STP	19841117 200312 1 004	Kabid Trantibum	Penata Tk. I	III/d
4	MUH. AKBAR, S.Sos, M.Si	19710217 199403 1 006	Kasi Gakda	Pembina	IV/a
5	SEJO KAHONO, S.Ag	19660307 199403 1 009	Kasi Linmas	Penata	III/d
6	ANIK PANIYATI, S.Sos	19700506 199803 2 005	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	Penata Tk. I	III/d
7	RUDIYETI HERMITA SURATNAWATI, SP	19750127 200701 2 006	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Penata Tk. I	III/d
8	KUNCORO	19690122 199103 1 005	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penata	III/c
9	JOKO SANTOSA, SE	19730814 201001 1 003	Bendahara	Penata Muda	III/a
10	M. FAKHRUDIN, S.A.P	19810212 200901 1 002	Pengelola keamanan dan ketertiban	Penata Muda	III/a
11	JOKO NURSUSILO, S.AP	19810723 201001 1 001	Penyidik	Penata Muda	III/a
12	SUSILO HANDAYANI, S.A.P	19810807 201001 1 005	Pengelola Data	Penata Muda	III/a
13	WARISO SUGIYARTO, S.A.P	19820728 201001 1002	Analisis Manajemen Perkantoran	Penata Muda	III/a
14	NUR SOLEH, S.A.P	19830305 201001 1 004	Pengelola Keuangan	Penata Muda	III/a
15	HERI KURNIAWAN, S.AP	19830720 201001 1 004	Penyidik	Penata Muda	III/a
16	DWI SETYORINI, S.AP	19840305 201001 2 002	Penyidik	Penata Muda	III/a
17	ELIYA, S.A.P	19840419 201001 2 004	Pengolah Data penindakan dan Sarana Operasi	Penata Muda	III/a
18	FRANSISKA DIAN MAYASARI, S.A.P	19850518 201001 2 003	Pengelola Data	Penata Muda	III/a

19	RAKHMANTO	19650402 200701 1 023	Pranata Tata Praja	Pengatur Tk. I	II/d
20	MIFTACHUROHMAN	19801218 200901 1 001	Pranata Tata Praja	Pengatur Tk. I	II/d
21	MUH. KHOERUN	19810315 200901 1 001	Pranata Tata Praja	Pengatur Tk. I	II/d
22	TRI HANDOYO	19811029 201001 1 002	Pranata Tata Praja	Pengatur Tk. I	II/d
23	NUR ZUBAIDI	19811219 201001 1 002	Pranata Tata Praja	Pengatur Tk. I	II/d
24	MARJOKO	19820102 201001 1 003	Pranata Tata Praja	Pengatur Tk. I	II/d
25	AFANDI	19820303 201001 1 003	Pranata Tata Praja	Pengatur Tk. I	II/d
26	IMAM SUPRIYANTO	19820425 201001 1 002	Pranata Tata Praja	Pengatur Tk. I	II/d
27	MENIK DWI SETIYANTI	19830504 201001 2 003	Pranata Tata Praja	Pengatur Tk. I	II/d
28	M. ABROR	19830601 201001 1 004	Pranata Tata Praja	Pengatur Tk. I	II/d
29	EKO MAHANTORO	19840829 201001 1 002	Pranata Tata Praja	Pengatur Tk. I	II/d
30	WINARKO	19800818 200901 1 003	Pranata Tata Praja	Pengatur	II/c
31	EKA BUDI HARIYADI	19830525 201001 1 004	Pranata Tata Praja	Pengatur	II/c
32	KHUSNI ZAKI ZAMANI, A.Md.Kom.	19941010 202202 1 003	Terampil-Pranata Komputer	Pengatur	II/c
33	TRIAMARYANI, A.Md.Ak.	19950514 202202 2 002	Verifikator Keuangan	Pengatur	II/c
34	DAHLAN ZULKARNAIN	19710101 200901 1 009	Pramu Bakti	Juru Tingkat I	I/d
35	MUKHAMAD RIYADO SHOLICHIN	19830531 201001 1 004	Pengemudi	Juru	I/c
	TENAGA BANTU POL PP				
36	AGUNG SANTOSA				
37	ALDO MAULANA PUTRA				
38	ANDREAS PUTRA AJI SETIAWAN				
39	ARDIAN BAGAS PRATAMA				
40	AZIZ SOLICHUDIN				
41	BAYU NUGROHO				
42	CHOIRUL MUBAROK				

43	ERLINA RISKI ASTITI				
44	FASA WIDI KURNIAWAN				
45	GHUFRON AFFISINA				
46	IWAN WIDODO				
47	LAILIA NUR FARIDA				
48	LINDA ZARZA ARLITA				
49	MUHAMMAD SALAFUDIN				
50	MUKHAMAD ABDUL BASIT				
51	MUHAMMAD JA'VAR SODIK				
52	NAZARUDIN ULYA				
53	NURVITA OCTIANA				
54	OKTA DWI NUGROHO				
55	OKTA MARY BAGUS HARJANTO				
56	PAMUNGKAS MEILISA PUSPITASARI				
57	RATNA MAUDY INDRAWASNO				
58	RIZKI NUR FAEDAH				
59	RIZKY YANASARI				
60	ROHMAT AHYAKUL KARIM				
61	ROSSI DEWI RIANA				
62	THUBAGUS NUR MA'ARIF				
63	WAHYU AHMAD FAUZI				
64	WILDAN MAULANA BAEDHOWI				
65	YULI YANA				

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tw I

Di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Temanggung tidak terdapat Satpol PP dikarenakan petugas Satpol PP melimpah menjadi staf kecamatan dan beberapa personil yang telah purna tugas.

4. Rasio Linmas per RT

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta

upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketentraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala desa, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) merupakan satuan yang memiliki tugas membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala Desa/Kelurahan, membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran, membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat, membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan, membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu upaya pertahanan negara, membantu pengamanan obyek vital dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

Untuk memperoleh angka rasio linmas dapat digunakan rumus Rasio jumlah satuan linmas per RT atau sebutan lainnya adalah jumlah satuan linmas dalam satu kabupaten/kota dibagi jumlah RT atau sebutan lainnya dalam satu kabupaten/kota. Rasio Linmas tahun 2018 s/d 2023 TW I dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11
Rasio Jumlah Linmas Per RT

Kabupaten Temanggung, Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW I

NO	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023 TW I
1.	Jumlah Linmas	8.184	8.184	8.184	8.414	8.414	8.414
2.	Jumlah RT	5.916	5.916	5.916	5.913	5.913	5.913
3.	Rasio	1,4	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4

Sumber data : laman.temanggungkab.go.id website resmi Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tw I

Dari tabel di atas tercantum bahwa rasio jumlah anggota Linmas per RT telah mencukupi akan tetapi sebaran anggota Linmas belum merata.

Namun dengan jumlah anggota Linmas yang ada telah dapat dikatakan Linmas Kabupaten Temanggung dapat melaksanakan tugas perlindungan masyarakat.

Jumlah anggota Linmas di Kabupaten Temanggung tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 2.12
Persebaran Anggota Linmas di Kecamatan se-Kabupaten
Temanggung Tahun 2023

No.	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah RT	Jumlah Linmas (orang)	Rasio
1.	Bulu	19	302	547	1,8
2.	Tembarak	13	224	370	1,6
3.	Temanggung	25	562	775	1,3
4.	Pringsurat	14	364	514	1,4
5.	Kaloran	14	416	337	0,8
6.	Kandangan	16	378	489	1,2
7.	Kedu	14	424	430	1,0
8.	Parakan	16	357	412	1,1
9.	Ngadirejo	20	426	450	1,0
10.	Jumo	13	273	395	1,4
11.	Tretep	11	141	341	2,4
12.	Candiroto	14	275	420	1,5
13.	Kranggan	13	382	348	0,9
14.	Tlogomulyo	12	156	372	2,3
15.	Selompampang	12	128	368	2,8
16.	Bansari	13	189	386	2,0
17.	Kledung	13	160	393	2,4
18.	Bejen	14	170	406	2,3
19.	Wonobojo	13	209	364	1,7
20.	Gemawang	10	312	297	0,9
Jumlah		289	5.913	8.414	1,4

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah linmas di Kabupaten Temanggung dari rasio 1 : 1 (satu RT : satu Linmas), sudah mencukupi, namun penyebarannya yang kurang merata. Di Kecamatan Kaloran jumlah RT 416 sedangkan jumlah linmasnya

337 orang, sehingga ada kekurangan 79 linmas, di Kecamatan Kranggan kekurangan 34 linmas, di Kecamatan Gemawang kekurangan 15 Linmas. Akan tetapi di kecamatan yang lain jumlah linmasnya rata-rata lebih banyak dr jumlah RT. Adapun faktor pendorong, penghambat dan upaya penyelesaian capaian kinerja pembangunan daerah Triwulan I tahun 2023 adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 2.13

Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENYELESAIAN
1	Rasio Linmas per RT	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah Linmas usia tua masih cukup banyak. Adanya alokasi ADD dan AD kel. Untuk pembinaan Linmas 	<ol style="list-style-type: none"> Animo masyarakat untuk menjadi anggota Linmas sangat kecil, karena tidak mendapatkan gaji/upah/tunjangan /santunan apa pun, sehingga anak muda lebih memilih untuk bekerja di sektor ekonomi yang lain. Up date data jumlah Linmas sangat sulit dilaksanakan kaena dari pihak desa kesulitan untuk melaksanakan pendataan (ujung-ujungnya dikira memberi bantuan) Sebaran jumlah Linmas yang tidak merata 	1.mengadakan sosialisasi dan pembinaan linmas ke desa/kelurahan

5. Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada

Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda adalah jumlah warga yang mengalami kerugian akibat dari penegakan Perda dan Perkada baik kerugian materiil maupun luka-luka, sedangkan jumlah kejadian adalah jumlah

kegiatan Satpol PP dalam melaksanakan penertiban ataupun penegakan Perda dan Perkada.

Rumus Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada yaitu Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dibagi Jumlah kejadian dikali 100 %.

Rumus untuk mengetahui Presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada adalah jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda dan Perkada dibagi jumlah kejadian dikali 100 %.

Tabel. 2.14

Presentase warga negara yang memperoleh layanan
Akibat dari penegakan Hukum Perda dan Perkada
Tahun 2018 s/d 2023 TW I

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023 TW I
1.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Perda	n.a	n.a	n.a	0	0	0
2.	Jumlah kejadian	n.a	n.a	n.a	1880	1470	188
3.	Presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan Hukum Perda dan Perkada	n.a	n.a	n.a	100	100	100

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung tahun 2023 TW I

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa indikator presentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada merupakan indikator program baru pada tahun 2022 triwulan I. Capaian presentase warga yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada pada Tahun 2023 triwulan I sebesar 100%, angka itu di peroleh dari, Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada di tahun 2023

triwulan I adalah 0 (nol), dengan pengertian bahwa Satpol PP dalam melaksanakan penertiban dan penegakan Perda selalu mengedepankan persuasif dan humanis, sehingga tidak ada gesekan ataupun benturan yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun luka-luka. Jumlah kejadian pada Tahun 2023 triwulan I sebanyak 188. Jumlah 188 adalah jumlah kegiatan Satpol PP dalam melakukan penertiban dan penegakan hukum Perda dan Perkada, di tahun 2023 sampai dengan triwulan I. Adapun faktor pendorong, penghambat dan upaya penyelesaian capaian kinerja pembangunan daerah Triwulan I tahun 2023 adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 2.15
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENYEKESAIAN
1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	1. Dalam melaksanakan penertiban dan penegakan Perda selalu mengedepankan persuasif dan humanis, sehingga tidak ada gesekan ataupun benturan yang mengakibatkan kerugian baik materiil maupun luka-luka	1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang penegakan perda dan Perbup 2. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung penegakan Perda dan Perbup	1. Sosialisasi pada masyarakat tentang penegakan Perda dan Perbup 2. Peningkatan kapasitas PPNS

6. Tingkat penyelesaian pelanggaran K4 (ketertiban, ketenteraman, keindahan, dan kesehatan)

Penyelesaian pelanggaran K4 (ketertiban, ketenteraman, keindahan dan kesehatan) di Kabupaten/Kota adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan masyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan (Perda PGOT, IMB, Reklame, Minuman Beralkohol, PKL dan Protokol Kesehatan). Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram, serta menjaga keindahan dan kesehatan.

Rumus tingkat penyelesaian pelanggaran K4 (ketertiban, ketentraman, keindahan dan kesehatan) di Kabupaten/Kota adalah Pelanggaran K4 yang terselesaikan dibagi jumlah Pelanggaran K4 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP dikali x100%.

Tabel 2.16

Tingkat penyelesaian pelanggaran K4
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018 s.d. 2023 TW I

No	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023 TW I
1.	Jumlah pelanggaran K4 (kasus)	249	246	931	1880	2759	502
2.	Jumlah pelanggaran K4 yang diselesaikan (kasus)	209	246	931	1880	2759	502
3.	Tingkat penyelesaian pelanggaran K4 (%)	87,3	100	100	100	100	100

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tw I

Dari tabel di atas tercantum bahwa jumlah pelanggaran K4 pada tahun 2023 TW I cukup banyak . pelanggaran K4 untuk perda reklame yang bervariasi jenisnya yaitu iklan prodak rokok, iklan tempat pendidikan mulai dari play group sampai perguruan tinggi, iklan perumahan, iklan produk kartu telekomunikasi, sangat banyak ditemukan pada Tahun 2023 triwulan I. Pelanggaran perda PGOT berada di dua kecamatan yaitu temanggung dan kecamatan Parakan, adanya warga masyarakat yang menyalahi ijin IMB dan belum memiliki IMB adalah jenis pelanggaran yang terkait ijin IMB, pelanggaran perda Minuman Beralkohol hanya terdapat satu yaitu di wilayah kota temanggung. Tingkat penyelesaian pelanggaran K4 Kabupaten Temanggung adalah 100%. Data pelanggaran Peraturan Daerah/terkait K4 Tahun 2023 TW I tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.17
Tabel Data Pelanggaran Perda terkait K4 per kecamatan
Tahun 2023 TW I

N0	Kecamatan	Jumlah Pelanggaran
1	Temanggung	75
2	Tlogomulyo	20
3	Tembarak	14
4	Selopampang	12
5	Kranggan	46
6	Pringsurat	41
7	Kaloran	16
8	Kandangan	25
9	Kedu	52
10	Bulu	32
11	Jumo	20
12	Parakan	37
13	Kledung	22
14	Bansari	9
15	Ngadirejo	30
16	Candiroto	15
17	Wonoboyo	6
18	Tretep	4
19	Bejen	19
20	Gemawang	7
		502

Sumber data: Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tw I

7. Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah frekuensi patroli yang dilaksanakan oleh kelompok anggota satuan polisi pamong praja untuk selanjutnya disebut kelompok patroli (KP) di setiap kecamatan yang berada di kabupaten/kota.

Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan, antara lain:

- a. tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan;
- b. antar batas wilayah; dan
- c. tempat keramaian/hiburan.

Apabila telah tercipta kondisi 3 (tiga) kali patroli dalam sehari di seluruh kecamatan pada kabupaten/kota, maka kinerja minimal dari pelaksanaan patroli tersebut telah dianggap terpenuhi.

Rumus persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah Banyaknya kelompok patroli

dibagi Banyaknya kelompok kecamatan (jumlah wilayah Kecamatan) dalam wilayah kabupaten/kota.

Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman tahun 2018 s/d 2023 TW I adalah sebagai berikut:

Tabel 2.18

Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Temanggung

Tahun 2018 s.d. Tahun 2023 TW I

NO	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023 TW I
1.	Banyaknya patroli dalam satu tahun	50	52	265	503	727	80
2.	Jumlah kecamatan	20	20	20	20	20	20
3.	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	2,5	2,6	13,25	25,15	36,3 5	3,6

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tw I

Berdasarkan tabel di atas, cakupan kegiatan patroli siaga dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Sampai pada triwulan I tahun 2023 kegiatan patroli dilakukan sebanyak 72 patroli, Patroli dilaksanakan ditempat tempat wisata dan patroli rutin malam untuk menjaga kondusifitas ketentraman dan ketertiban umum. Di samping kegiatan patroli rutin di beberapa kecamatan. kegiatan patroli ini sangat penting untuk menggali data awal pelanggaran-pelanggaran tramtibum agar dapat digunakan untuk giat penertiban dan penegakan Perda selanjutnya. Kegiatan patroli dapat berjalan lancar meskipun tidak diikuti peningkatan dan penambahan personil serta sarana prasarana secara signifikan.

Data Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dilaksanakan pada tahun 2023 TW I tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.19
Patroli Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Tahun 2023 s/d TW I

No	Kecamatan	Lokasi	Jumlah Keg. Patroli	Hasil
1	Temanggung	Citywalk Jalan Jendral Soedirman, Taman Kali Progo dan Aloon-aloon Temanggung	53 x patroli	Didapati beberapa anak punk dan remaja yang mengkonsumsi miras, dan beberapa PKL yang melanggar Perda
		Pasar Kliwon, Taman Pengayoman		Didapati PKL yang berjualan di Trotoar dan bahu jalan, dan beberapa anak punk
				Sosialisasi pencegahan dan penanganan covid 19 dan sosialisasi agar masyarakat mengikuti vaksinasi
2	Kledung	Taman Posong, Kruwisan	1x patroli	Sosialisasi pencegahan dan penanganan covid 19 dan sosialisasi agar masyarakat mengikuti vaksinasi.
		Rest Area		Ditemukan beberapa spanduk dan banner yang melanggar Perda
3	Kaloran	Pasar Kaloran	1 x patroli	Didapati sejumlah pelanggaran K4 (spanduk melintang dan banner di pohon) Sosialisasi pencegahan dan penanganan covid 19 dan sosialisasi agar masyarakat mengikuti vaksinasi
4	Kandangan	Jalur kecamatan	2 x patroli	Didapati spanduk dan banner yang melanggar

				Perda
		Wilayah kecamatan		Sosialisasi pencegahan dan penanganan covid 19 dan sosialisasi agar masyarakat mengikuti vaksinasi
5	Tembarak	Pasar Menggoro	1 x patroli	Terdapat spanduk dan banner yang melanggar Perda
		Jalur kecamatan		Sosialisasi pencegahan dan penanganan covid 19 dan sosialisasi agar masyarakat mengikuti vaksinasi
6	Parakan	Taman Bambu Runcing	4 x patroli	Didapati beberapa anak punk, serta beberapa spanduk dan banner yang melanggar Perda
		Pasar legi Parakan		Sosialisasi pencegahan dan penanganan covid 19 dan sosialisasi agar masyarakat mengikuti vaksinasi
7	Ngadirejo	Pasar Ngadirejo	2 x patroli	Beberapa PKL di bahu jalan dan trotoar, spanduk dan banner yang melanggar Perda, Sosialisasi pencegahan dan penanganan covid 19 dan sosialisasi agar masyarakat mengikuti vaksinasi
8	Candiroto	Pasar Candiroto	1 x patroli	Sosialisasi pencegahan dan penanganan covid 19 dan sosialisasi agar masyarakat mengikuti vaksinasi Ditemukan beberapa spanduk dan banner yang melanggar Perda
9	Kedu	Wilayah Kecamatan Kedu	5 x patroli	Spanduk melintang dan banner di pohon
		Pasar Kedu		Soialisasi pencegahan

				dan penanganan covid 19 dan sosialisasi agar masyarakat mengikuti vaksinasi
10	Selopampang	Pasar Selopampang dan jalur kecamatan	1 x patroli	Beberapa spanduk dan banner melintang di jalan Sosialisasi pencegahan dan penanganan covid 19 dan sosialisasi agar masyarakat mengikuti vaksinasi
11	Bansari	Wilayah Kecamatan Bansari	0 x patroli	Sosialisasi pencegahan dan penanganan covid 19 dan sosialisasi agar masyarakat mengikuti vaksinasi Ditemukan beberapa spanduk dan banner yang melanggar Perda
12	Bejen	Wilayah kecamatan	0 x patroli	Sosialisasi pencegahan dan penanganan covid 19 dan sosialisasi agar masyarakat mengikuti vaksinasi Ditemukan beberapa spanduk dan banner yang melanggar Perda
13	Bulu	Wilayah Kecamatan Bulu	2 x patroli	Beberapa spanduk melintang dan banner di pohon Sosialisasi pencegahan dan penanganan covid 19 dan sosialisasi agar masyarakat mengikuti vaksinasi
14	Jumo	Pasar Jumo Jalur kecamatan	1 x patroli	Beberapa spanduk dan banner yang melanggar Perda
15	Pringsurat	Pasar Pingit	1 x patroli	Didapati beberapa produk rokok ilegal, spanduk, banner yg melanggar Perda, Bangunan yg blm

				berijin, PGOT yg berkeliaran di jalan
16	Kranggan	Badran	3 x patroli	Ditemukan beberapa anak punk, spanduk dan banner yg melanggar Perda
		Pasar Kranggan		
		Kawasan industry/pabrik		
		Jalan nasional		
17	Tretep	Wilayah kecamatan	0 x patroli	Patroli pelanggaran Perda dan Perbup
18	Tlogomulyo	Ruas jalan di Kecamatan Tlogomulyo	2 x patroli	Ditemukan beberapa PKL dan spanduk, banner yg melanggar Perda
19	Wonobojo	Wilayah kecamatan	0 x patroli	Patroli pelanggaran Perda dan Perbup
20	Gemawang	Wilayah kecamatan	0 x patroli	Patroli pelanggaran Perda dan Perbup
Jumlah			80	

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 TW I

8. Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran daerah Kabupaten/Kota. bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas lingkungan dan/atau wilayah potensi kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat WMK untuk mendapat layanan proteksi ancaman bencana kebakaran, maka cakupan pelayanan bencana kebakaran di kabupaten/kota dijabarkan sebagai berikut:

- a. WMK dibentuk pada pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- b. WMK perlu dilengkapi dengan mitigasi, sistem peringatan dini dapat melalui alarm dan sejenisnya, pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK, kesiapsiagaan, pos pelayanan

pemadam kebakaran, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.

- c. WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap (*response time*) dari pos pelayanan pemadam kebakaran terdekat yang memiliki satuan petugas pemadam kebakaran yang terlatih bersertifikasi, memiliki mobil pemadam kebakaran dan/atau peralatan penyemprotan pemadam api yang terintegrasi dengan ketersediaan sumber air dan/atau penyemprotan racun api dan alat pendukung pemadam api sesuai dengan tipologi kebakaran.

Daerah layanan WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap, tingkat waktu tanggap pada permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dan tingkat waktu tanggap pada kawasan hutan dan kebakaran tertentu tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit, satuan petugas pemadam kebakaran lengkap unit mobil atau mesin pompa air pemadam kebakaran atau sarana dan prasana pemadam lainnya telah tiba di tempat kejadian kebakaran yang langsung melakukan penyemprotan air dan/atau bahan pemadam api lainnya, pertolongan penyelamatan jiwa dan keselamatan harta benda.

Berdasarkan ketentuan ini, kepala daerah menetapkan bahwa setiap lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi ancaman kebakaran diwajibkan membentuk WMK dengan berdasarkan rencana induk sistim proteksi kebakaran dengan tujuan pengurangan resiko kebakaran dengan luas disesuaikan dengan kondisi dan jenis potensi atau tipologi kebakaran serta menyusun rencana induk sistem proteksi kebakaran dengan tujuan antara lain Pengurangan resiko kebakaran serta penyelamatan dan evakuasi korban.

Dengan penambahan pos layanan pemadam dapat memangkas waktu tanggap darurat (*response time rate*). Suatu lingkungan dan/atau kawasan yang tidak membentuk WMK dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi (*unprotected area*). Pemerintah kabupaten/ kota dalam membentuk suatu kawasan WMK harus menyediakan:

- a. Pos Pelayanan Pemadam Kebakaran beserta garasi untuk mobil pemadam dan letak Pos Pemadam berada di tengah suatu

kawasan WMK;

- b. Mobil Pemadam meliputi 1 unit truk pemadam kebakaran, 1 unit truk tanki air/ *water supply* dan 1 unit mobil *rescue*;
- c. Menyediakan personel pemadam kebakaran yang terlatih, minimal 6 personil dalam 1 unit kendaraan termasuk Alat Perlindungan Diri (APD) bagi personil Damkar;
- d. Sarana dan prasarana pada tanggap darurat serta sarana pendukung penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran maupun non kebakaran.
- e. Rumus cara perhitungan indikator adalah:

Jumlah luas WMK kabupaten/kota

$$\frac{\text{Jumlah luas potensi ancaman kebakaran kabupaten/ kota}}{\text{Jumlah luas WMK kabupaten/kota}} \times 100\%$$

Dalam Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK) Kabupaten Temanggung terdapat 6 (enam) pos pelayanan WMK yaitu Pos Mako Temanggung, Pos Pemadam Candioto, Pos Pemadam Pringsurat, Pos Pemadam Ngadirejo, Pos Pemadam Parakan, Pos Pemadam Tembarak.

Sampai saat ini baru berdiri 3 (tiga) pos pelayanan Pemadam Kebakaran yaitu:

1. Pos Mako Temanggung yang berada di lingkungan OPD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, beralamat di Jl. Lingkar Utara Maron Temanggung; Wilayah Pelayanan Kebakarannya yaitu : Kecamatan Temanggung, Kecamatan Tembarak, Kecamatan Selopampang, Kecamatan Tlogomulyo.
2. Pos Pemadam Wilayah Candioto yang terletak dibelakang Kantor Kecamatan Candioto, beralamat di Jl. Candioto no. 32; Wilayah Pelayanan Kebakarannya yaitu : Kec Candioto, Kec Bejen, Kec Tretep, Kec Wonoboyo.
3. Pos Pemadam Wilayah Pringsurat yang terletak dibelakang Kantor Kecamatan Pringsurat, beralamat di Jl. Raya Pringsurat

no. 1. Wilayah Pelayanan Kebakarannya yaitu : Kec Pringsurat, Kec Kaloran, Kec Kranggan.

Cakupan pelayanan bencana kebakaran tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW I dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018
s.d Tahun 2023 TW I

Uraian	satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023 TW I
Jumlah WMK Kabupaten/Kota	km2	528	528	528	528	528	528
Jumlah wilayah Kabupaten	km2	870,65	870,65	870,65	870,65	870,65	870,65
Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten	%	60,64%	60,64%	60,64%	60,64%	60,64%	60,64%

Sumber data : Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung, Tahun 2023 Tw I

Dari data di atas, cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten tidak mengalami peningkatan dikarenakan sampai dengan tahun 2023 TW I tidak dapat terlaksana pembangunan pos pemadam kebakaran sehingga tidak terdapat penambahan pos, sehingga apabila melihat jangkauan luas layanan Kabupaten Temanggung cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten masih terbatas sejumlah 60% dari seluruh wilayah Kabupaten Temanggung. Adapun faktor pendorong, penghambat dan upaya penyelesaian capaian kinerja pembangunan daerah Triwulan I tahun 2023 adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 2.21

Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENYELESAIAN
----	-------------------	------------------	-------------------	--------------------

1	Cakupan Penanganan bencana kebakaran Kabupaten	Kondisi suhu udara yang dingin di Temanggung karena topologi pegunungan dan perbukitan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Temanggung memiliki wilayah yang luas. 2. Topologi Temanggung yang pegunungan, perbukitan dan lembah. 3. Model permukiman yang berkerumun mengakibatkan akses jalan lingkungan yang kecil. 4. pengetahuan warga mengenai bahaya kebakarna masih rendah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan sarapras 2. Peningkatan kompetensi pegawai 3. Pemberdayaan masyarakat
---	--	--	--	--

9. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*)

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

Rumus tingkat waktu tanggap daerah layanan WMK adalah Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam tingkat waktu tanggap dibagi Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK dikali 100%. Adapun faktor pendorong, penghambat dan upaya penyelesaian capaian kinerja pembangunan daerah Triwulan I tahun 2023 adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 2.22
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENYELESAIAN
----	-------------------	------------------	-------------------	--------------------

1	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate)	<p>1. sudah ada tambahan pos damkar di dua lokasi pringsurat dn candiroto yg dpt sedikit mempercepat rentang kendali saat terjadi kebakara.</p> <p>2. Kondisi kabupaten temanggung yang masih tidak terlalu padat khususnya kepadatan dijalan raya, kepadatan hanya terjadi dilokasi dn waktu tertentu saja</p> <p>3. media sosial membantu mempercepat informasi terjadinya kebakaran sampai kepada pos damkar untuk segera diantisipasi dn ditanggulangi</p>	<p>1. kondisi kendaraan damkar yang kurang layak untuk pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaran khususnya saat dipergunakan dlm kondisi kecepatan tinggi, berisi air dn jalan yg berliku, naik turun atau gelombang yg dpt membahayakan keselamatan org yg ada ddlm kendaraan maupun yg berada di sekitar kendaraan damkar</p> <p>2. kondisi pemukiman yang berkelompok serta akses jalan yang kecil, menyulitkan kendaraan damkar untuk cepat sampai ke lokasi kejadian</p> <p>3. kompetensi anggota damkar khususnya penerapan strategi pemadaman disesuaikan dengan objek yg terbakar dn lingkungan sekitarnya perlu ditingkatkan, karena setiap kebakaran memiliki strategi pemadaman yg berbeda agar proses pemadaman dpt cepat, efektif dn efisien</p> <p>4. kesadaran masyarakat saat terjadi kebakaran masih rendah, mulai dari masyarakat yg tdk memberi jalan untuk kendaraan damkar meski sudah dinyalakan sirine maupun masyarakat yg berkerumun di lokasi kebakaran untum photo2 atau nonton yg menghambat pergerakan anggota</p>	memberikan sosialisasi kepada warga agar cepat memberikan laporan bila terjadi kebakaran
---	--	--	--	--

			<p>dn kendaraan damkar dlm proses pemadaman</p> <p>5. kondisi peralatan pemadam kebakaran seperti (mesin pompa air, selang, y koneksi, nozel, dll) yang sudah tua dan lapuk karena usia dn sering dipergunakan menakibatkan proses pemadaman lambat, lama, tidak efektif dn efisien contohnya, selang yg bocor di beberapa titik, nozel yg semprotannya tidak sempurna, dll</p>	
--	--	--	---	--

Realisasi persentase Tingkat Waktu Tanggap di Kabupaten Temanggung dari tahun 2018 s.d 2023 TW I dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.23
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate)
Kabupaten Temanggung, Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW I

NO	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023 TW I
1.	Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu 15 menit	44	33	30	23	21	5
2.	Jumlah kasus kebakaran dalam Jangkauan WMK	63	77	54	30	35	8
3.	Tingkat Waktu Tanggap (response time rate-%)	69,8%	42,86%	55,56%	76,67%	60%	62,5%

a : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tw I

Response time memiliki beberapa faktor kendala sebagai berikut:

- a) Dari 14 kasus kebakaran di Temanggung, hanya 8 kasus kebakaran yang terjadi dalam jangkauan WMK
- b) Lokasi kasus kebakaran yang berbeda-beda tempat setiap tahunnya;

- c) Keterlambatan masyarakat dalam melaporkan berita kebakaran;
- d) Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran;
- e) kepadatan penduduk dan kemacetan lalu lintas;
- f) Perubahan kondisi lalu lintas;
- g) Perbedaan waktu tanggap yang dipengaruhi oleh kecepatan unit mobil kebakaran yang sebagian sudah berumur;
- h) Hambatan *akseleri* unit pemadam kebakaran antara lain wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, jalan sempit, dll;
- i) Luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candiroto serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi.
- j) Belum optimalnya koordinasi instansional.

Data kejadian kebakaran selama tahun 2023 TW I dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.24
Data Kebakaran Kabupaten Temanggung
Tahun 2023 TW I

N O	Tanggal	Inf o Ma su k	Sa mp ai lo ka si	Se le sa i	Pe mi lik/ Pel apo r	Alamat	Fungs i Bang un an Yang Terba kar	Penye bab	Keru gian	Aset yang tersel amatk an	Korb an Jiwa	Korb an Terd amp ak
1	02/01/2023	23.27	23.39	0003	Ibu Turi	Sejayan RT 02 RW 01 Campursari Bulu	rumah	rokok	Rp 170.000.000	Rp 800.000.000	Nihil	7
2	03/01/2023	06.51	06.55	0706	safir a	Ngadipiro Walitelon Utara Temanggung	Dapur	Tabung gas	Rp 150.000.000	Rp 300.000.000	Nihil	4
3	14/01/2023	12.40	01.15	0200	war ga	Kledung Rt 004 RW 002	Ruma h	Konsle tung	Rp 120.000.000	Rp 1.200.000.000	Nihil	8

				5				listrik	0	0		
4	18/01/2023	05.00	05.11	06.31	warga	Kranggan RT 01 RW 05	Kabel Listrik JTT (Jaringan Tegangan Tinggi)	Konsletung listrik			Nihil	
5	18/01/2023	21.20	21.25	03.30	BP Haris	Sapuran Wonosobo	penampungan				Nihil	
6	25/01/2023	22.35	22.42	23.16	bp didik	Kebondalem Pringsurat	Depo kayu	Konsleting Listrik	Rp 50.000.000	Rp 200.000.000	Nihil	33
7	28/01/2023	04.10	04.30	07.13	Bp Mar diyat	Jetis Lor Kauman Parakan	Warung angkri ngan	tungku	Rp 150.000.000	Rp 300.000.000	Nihil	28
8	02/02/2023	16.46	16.49	17.04	Bp. Sum arto no	Tegalsari Sidorejo Maron	Ruko	Kompor	5.000.000	Rp 200.000.000	Nihil	15
9	10/02/2023	17.52	18.10	19.05	Bp. Tugi yono	Selosabrang Bejen	Rumah	Tungku	Rp 30.000.000	Rp 150.000.000	Nihil	33
10	15/02/2023	15.45	16.00	17.00	Ibu Siti	Wonogiri, Gentan Kranggan	Kabel PLN	Konsleting Listrik	Rp 500.000	Rp 5.000.000	Nihil	77
11	26/02/2023	18.51	19.03	20.07	ibu Ningsing	Kupen Kauman Pringsurat	Rumah hunian	Konsleting Listrik	Rp 150.000.000	Rp 800.000.000	Nihil	56
12	02/03/2023	09.48	10.03	10.30	Ban gkit	Ngimbrang Kauman Bulu	Rumah hunian	Konsleting Listrik	30.000.000	Rp 800.000.000	Nihil	70
13	08/03/2023	14.40	14.59	15.05	Warga	Karangsari Parakan	Rumah hunian	Konsleting Listrik	Rp 500.000.000	Rp 750.000.000	Nihil	66
14	24/03/2023	09.00	09.22	09.05	Ibu Istiyana	Setrobayan Ngadimulyo	Rumah hunia	Tungku	Rp 5.000	Rp 120.000	Nihil	38

				5	h	Kedu	n		.000	0.000		
15	31/03/2023	05.15	05.34	08.37	Bp Sla met	Namgunsari Badran Kranggan	Kanda ng ayam	Konsle ting Listrik	Rp 9.000 .000. 000		Nihil	15

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Tahun 2022 Tw IV

Keterangan :

1. Tabel Warna Merah menerangkan respontime di atas 15 menit
2. Warna Putih menerangkan respontime di bawah 15 menit
3. Tabel Warna Hijau menerangkan masuk dalam WMK (Wilayah Manajement Kebakaran RISPK)
4. Tabel Warna Biru menerangkan penanganan Kebakaran di Luar Wilayah Kabupaten Temanggung

10. Presentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi

Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran pada kabupaten/kota yang memenuhi standar kualifikasi adalah Satuan Petugas Pemadam Kebakaran yang telah bersertifikasi melalui proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran. Cara perhitungan/Rumus perhitungan prosentase aparatur pemadam yang memenuhi standar kualifikasi adalah Jumlah Satgas Damkar memiliki sertifikasi sesuai standar kualifikasi dibagi Jumlah Satgas Damkar dikali 100%.

Tabel 2.25

Prosentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi Kabupaten Temanggung Tahun 2018 s.d. Tahun 2023 TW I

NO	Uraian	Tahun
----	--------	-------

		2018	2019	2020	2021	2022	2023 TW I
1.	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar	18	18	19	18	44	53
2.	Jumlah aparatur pemadam kebakaran	53	53	54	56	55	55
3.	Prosentase Aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi	33,9%	35,9%	35,19 %	32,14 %	80%	96,36%

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 TW I

Sesuai tabel diatas prosentase aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi Kabupaten Temanggung di tahun 2020 adalah 19 orang di awal tahun 2021 ada satu personil pemadam yang pindah tugas (mutasi) sehingga personil dan yang memenuhi standar menjadi 18 orang, Pada tahun 2022 ini ada penambahan personil yang mengikuti diklat sehingga aparatur Pemadam yang memenuhi standar kualifikasi sebanyak 23 orang, Pada bulan November 2022 ada penambahan personil yang mengikut diklat sebanyak 21 personil Dan pada tahun 2023 ada penambahan personil yang mengikuti diklat sebanyak 9 orang jadi jumlah keseluruhan yang mengikuti diklat sebanyak 53 personil. Adapun faktor pendorong, penghambat dan upaya penyelesaian capaian kinerja pembangunan daerah Triwulan I tahun 2023 adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 2.26
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	REKOMENDASI TINDAK LANJUT

1	Persentase Aparatur yang Memenuhi Standar Kualifikasi	1. anggota damkar melaksanakan latihan mandiri berdasarkan tayangan youtube atau sharing pengalaman dari yang sudah pelatihan. 2. kejadian kebakaran khususnya penyelamatan lainnya mulai bervariasi sehingga bisa dijadikan ajang latihan dan menambah pengalaman	1. Biaya pelatihan peningkatan kompetensi damkar yang mahal. 2. Informasi terkait pelatihan terbatas. 3. Alokasi anggaran untuk peningkatan kompetensi damkar dari pemerintah masih terbatas dan kecil	Mengikuti kegiatan ² yang bersifat pengembangan kapasitas aparatur Damkar (baik pelatihan maupun lomba)
---	---	--	--	--

Jumlah aparatur Pemadam Kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi dalam setiap tahun hanya mengalami sedikit peningkatan, terkendala dengan minimnya anggaran untuk biaya diklat bagi petugas dan status Satgas Damkar yang merupakan *supporting staff* sehingga tidak dapat dibiayai dari biaya Pendidikan dan Pelatihan BKPSDM Kabupaten Temanggung. Daftar anggota *pemadam* yang memiliki sertifikat tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.27

Daftar Personil Bidang Pemadam Kebakaran
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
s.d Tahun 2023 TW I

No.	Nama	NIP	Jabatan	Golongan/ Ruang	Sertifikat
1	2	3	4	5	6
1	RAMA ADHITIA CAHYA.SIP.MAP	19870303 200701 1 002	Kabid Damkar	III/d	Pemadam Tingkat I , Rescue Pertolongan dan Penyelamatan serta Inspeksi Proteksi Kebakaran
2	WAHYU HARYANTO	19650312 199003 1 012	Kepala Seksi Pencegahan	III/d	

			dan Pemberdayaan		
3	EDI IRWANTO,S.A.P	19860430 201001 1 001	Kasi Pemadaman, Penyelamatan dan evakuasi kebakaran	III/b	
4	BAMBANG SUPRIYONO	19670228 199303 1 009	Operator Mesin	III/b	Pemadam Tingkat I
5	DEDY CHRISTANTO, S.AP	19811220 200801 1 008	Pranata Pemadam Kebakaran	III/a	Pemadam Tingkat I
6	MUSTRIWANTO, S.AP	19760229 200701 1 005	Pranata Pemadam Kebakaran	III/a	Pemadam Tingkat I
7	ARIF BUDI HARSANTO, S.Sos	19840609 201001 1 001	Pranata Pemadam Kebakaran	III/a	Pemadam Tingkat I
8	TRI ADE GIANTARA	19801104 200801 1 010	Operator Mesin	II/d	Pemadam Tingkat I
9	FARID NUR IKHSAN	19850324 200801 1 005	Operator Mesin	II/d	Pemadam Tingkat II
10	EDI SUSILO	19800705 200901 1 002	Operator Mesin	II/c	Pemadam Tingkat I
11	TONI KUSTANTO	19830418 201001 1 002	Operator Mesin	II/c	Pemadam Tingkat I
12	ELING SETIYONO	19830808 201001 1 002	Operator Mesin	II/c	Pemadam Tingkat I
13	ARIF SOFWAN	19840609 201001 1 001	Operator Mesin	II/c	Pemadam Tingkat I
14	ACHMAD SYAFI'	19760622 200701 1 007	Operator Mesin	II/a	Pemadam Tingkat I
15	WALDI HARSANTO	19770206 200801 1 009	Operator Mesin	I/d	Pemadam Tingkat I
Satgas Pemadam Kebakaran					
16	AHMAD SYARIF A.	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
17	ANDI ACHMAD MUZAKAR	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat I
18	ANGGIANSYAH MADHON S.	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat I

19	ARDYARDANY PUTRA	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
20	ARLI TAUFIK	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
21	AWAN SUKMA FEBRIYANTO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
22	BAYU KURNIAWAN	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
23	BAGUS SATRIO W.	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
24	BHURHANUDIN ALFANI R.	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
25	DAVIT HIMAWAN UTOYO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
26	DHIMAS BANGKIT PANUNTUN	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
27	FAJAR PRASTIYO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
28	FAJRIYAH WIDI ASTUTI	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
29	FANDI CAHYA PRADANA	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
30	HAFIDZ NURUL AMIN	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
31	HARIS PRASETYO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
32	HASAN TAFSIR	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
33	IRA CAHYANING	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
34	ISROK HADIYANTO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
35	IVAN PAMUNGKAS	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
36	JONTA AYOMAGE AKITA	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
37	KENJI EGI RIKO SAPUTRO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
38	KOKO SEPTIANTORO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
39	LUKMAN KHAQIM	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
40	MARTHA EDY FIRMANSYAH	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
41	MOCHAMAD FAIZAL R.	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
42	MUHAMMAD HASBI ASSIDIQI	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
43	MUHAMMAD NURROKHIM	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
44	MUHAMMAD TOYYIB NUR RAHMAN	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
45	NUR RIFA FADHLIKA	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
46	OVAN ADI RIYANTO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
47	PANGESTU MULYA NOVANTO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1
48	RUDI PRASETYO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat 1

49	SADDAM GIRI SANTOSO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat I
50	SEPTIAN DWI CAHYO AJI	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat I
51	SLAMET ARIYANTO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat I
52	SUHUD KURNIAWAN	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat I
53	TAUFIK PRASTYAWAN	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat I
54	TULUS SETYANTO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat I
55	UJIEK PRASTIYO	-	Satgas	-	Pemadam Tingkat I

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 TW I

Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3.000 – 5.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Mobil Damkar adalah salah satu sarana pemadam kebakaran yang digunakan oleh personil Damkar, Satlakar, Balakar atau sebutan lainnya untuk memenuhi waktu tanggap darurat kebakaran yang cepat dan tepat dalam pengurangan resiko kebakaran.

Mobil damkar dan/atau mesin damkar sebagai identitas bentuk kepedulian pemerintah daerah memberi perlindungan dari bahaya kebakaran terhadap seluruh asset yang berada di lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran.

Jumlah mobil dan/atau mesin damkar Di atas 3000-5000 Liter pada WMK adalah cakupan mobil dan/atau mesin pemadam kebakaran yang disediakan pemerintah daerah yang layak pakai untuk mendukung tindakan waktu tanggap darurat kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran dan/atau WMK.

Cara perhitungan Persentase Cakupan WMK yang memiliki Mobil dan/atau Mesin Damkar Laik Pakai adalah Jumlah WMK memiliki mobil dan/atau mesin damkar yg laik pakai dibagi Jumlah WMK atau Lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran dikali 100%.

Tabel 2.28

Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3.000-5.000 liter

Pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

Kabupaten Temanggung

Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW I

NO	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023 TW I
1.	Jumlah mobil pemadam kebakaran di atas 3.000-5.000 liter pada WMK	10	10	10	10	10	10
2.	Jumlah mobil kebakaran pada WMK	13	13	13	13	13	13
3.	Rasio Mobil Pemadam Kebakaran di atas 3.000-5.000 liter pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	76,92%	76,92%	76,92%	76,92%	76,92%	76,92%

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 Tw I

Sebagian dari data tabel di atas sejak tahun 2018-2022 TW I untuk prosentase rasio mobil Damkar tidak mengalami peningkatan atau penambahan armada baru meskipun beberapa dinyatakan tidak layak. Hal tersebut dikarenakan:

- a. Sebagian armada pemadam kebakaran kondisinya sudah berumur dan spesifikasinya kurang handal untuk menempuh medan yang berat dengan membawa muatan air;
- b. Ada kendaraan yang rusak karena pernah mengalami kecelakaan saat menuju lokasi kebakaran. Dikarenakan keterbatasan anggaran untuk perbaikan chassis dan body kendaraan sehingga torsi/ tenaga dan performa kendaraan kurang maksimal.

Data kendaraan Pemadam Kebakaran dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29

Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran

Tahun 2023

No	Nama Kendaraan	Nopol	Merk	Seri	Tahun Pembuatan	Kondisi kendaraan
1	PMK 01	AA 9591 LE	Isuzu	FTR 33/200 Ps	2004	Kurang Layak

2	PMK 02	AA 9590 LE	Isuzu	NKR 66/100 Ps	2004	Tidak layak dan tidak bs digunakan
3	PMK 03	AA 9589 LE	Isuzu	NKR 66/100 Ps	2004	Tidak Layak dan tidak bs digunakan
4	TA. 4000L	AA 9533 JE	Isuzu	NKR 66/100 Ps	2004	Layak
5	Tanki Air. 5000L	AA 9597 ME	Mitsubishi	FE 349/ 120 Ps	2006	Layak
6	PMK 04 (Ziegler)	AA 9585 PE	Hino	Dutro/ WU342R/ 130 HD	2012	Tidak Layak
7	FIRE JEEP	AA 9593 AE	Toyota	Hilux Pick Up 2,5L D	2014	Layak
8	AYYAX CSR	AA 9599 BE	Mitsubishi	Colt Diesel FE 74HDV	2016	Layak
9	TA CSR	AA 9531 KE	Mitsubishi	Colt Diesel FE Super HD	2016	Layak
10	AYYAX PRINGSURAT	AA 9596 AE	Mitsubishi	Colt Diesel FE 74HDV	2015	Layak
11	TA PRINGSURAT	AA 9560 JE	Isuzu	NKR 71 E2-2	2015	Layak
12	AYYAX CANDIROTO	AA 9597 AE	Mitsubishi	Colt Diesel FE 74HDV	2015	Layak
13	TA CANDIROTO	AA 9559 JE	Isuzu	NKR 71 E2-2	2015	Layak

Sumber data: Satpol PP Damkar Kabupaten Temanggung, 2023 Tw I

11. Persentase warga negara yang memperoleh Layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (*response time*) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan yang terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi.

Rumus indikatornya sebagai berikut

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah. $\times 100\%$

Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun X

Tabel 2.30

Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Tahun 2018 s.d Tahun 2023 TW I

NO	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023 TW I
1.	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah.	44	33	30	21	28	6
2.	Jumlah kejadian di kabupaten/ kota pada tahun X	63	77	54	44	64	14
3.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	69,8%	42,5%	55,5%	47,72	43,75%	42,85%

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 TW I

Perhitungan untuk layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi yang dilaksanakan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung merupakan SPM yang baru ditetapkan di tahun 2018. Total untuk layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi yang dilaksanakan Pemadam Kebakaran yaitu 15 kejadian Kebakaran, yang digunakan sebagai perhitungan hanya 14 dikarenakan

terdapat 1 pelayanan kejadian kebakaran yang terjadi di luar wilayah Kabupaten Temanggung.

Dari data tabel 2.18 untuk capaian layanan SPM Sub urusan kebakaran kabupaten/ kota yang dilaksanakan oleh Pemadam Kebakaran pada Tahun 2023 Triwulan I baru tercapai 42,85% menurun dari Tahun 2022, dikarenakan pada tahun 2022 Triwulan IV kasus kebakaran banyak terjadi di luar Wilayah WMK. Untuk tahun 2023 triwulan I jumlah kebakaran mencapai 44 kasus dan yang respontime kurang dari 15 menit sejumlah 6 kasus, sehingga capaian layanan kebakaran mencapai 42,85%. Adapun faktor pendorong, penghambat dan upaya penyelesaian capaian kinerja pembangunan daerah Triwulan I tahun 2023 adalah sesuai tabel berikut :

Tabel 2.31
Faktor Pendorong, Penghambat dan Upaya Penyelesaian
Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

NO	INDIKATOR PROGRAM	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	UPAYA PENYELESAIAN
1	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	1) Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat tentang upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran 2) Sarana Media sosial sangat membantu memberikan informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan mempercepat menyampaikan informasi	1) wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, jalan sempit, dll; 2) Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran; 3) Luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candiroto serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan	1) Peningkatn sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan kebakaran 2) Pemenuhan sarana sumber air (groundtank) di Pos Damkar

		kejadian kebakaran sampai ke pos Damkar untuk segera ditindaklanjuti	evakuasi. 4) Terbatasnya Sumber air dan belum tersedianya sumber air (groundtank) di masing - masing Pos untuk mempercepat proses pelayanan kebakaran	
--	--	--	--	--

12.Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi yang dilaksanakan oleh kelompok relawan (Balakar dan atau lainnya) yang dibentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran

Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi yang dilaksanakan oleh kelompok relawan Pemadam Kebakaran (Balakar, Redkar dan atau lainnya) yang dibentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran sesuai dengan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 364.1-306 tahun 2020 tentang Pedoman Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran, di Kabupaten Temanggung penghitungan indikatornya sebagaimana tercantum di Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2008 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

Rumus cara perhitungan indikator adalah:

Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun x dalam tingkat waktu tanggap oleh kelompok relawan (Balakar dan atau lainnya) yang dibentuk di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran/ Perangkat Daerah

Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun x $\frac{X}{100\%}$

Tabel 2.32

Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi yang dilaksanakan oleh Kelompok Relawan (Balakar dan atau lainnya) yang di bentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran Temanggung s.d Tahun 2023 Tw I

NO	Uraian	Tahun 2023 TW I
1.	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/ kota pada tahun X dalam tingkat waktu tanggap oleh kelompok Relawan (Balakar dan atau lainnya) yang di bentuk di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran	0
2.	Jumlah kejadian di kabupaten/ kota pada tahun X	64
3.	Capaian layanan SPM Sub Urusan kebakaran di kabupaten/ kota yang dilaksanakan Oleh Kelompok Relawan (Balakar dan atau lainnya) yang di bentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran	0%

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 TW I

Dari data tabel 2.19 untuk capaian layanan SPM Sub urusan kebakaran kabupaten/ kota yang dilaksanakan oleh Kelompok Relawan (Balakar dan atau lainnya) yang di bentuk di bawah pembinaan Pemadam Kebakaran pada Tahun 2023 Triwulan I tidak tercapai sama sekali atau 0%. Hal ini dikarenakan tidak adanya anggaran yang mendukung Pembentukan Kelompok Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di Temanggung dan Tidak adanya anggaran Sarana Prasarana yang akan digunakan Kelompok Relawan (REDKAR) dalam menangani Kebakaran untuk jumlah kasus kebakaran tahun 2023 TW I dapat dilihat pada tabel sebelumnya yaitu tabel 2.19.

13. Cakupan Penanganan Bencana Non Kebakaran Kabupaten

- a. Evakuasi sarang tawon;
- b. Penanganan pohon tumbang;
- c. Penanganan kecelakaan lalu lintas;
- d. Percobaan bunuh diri;

- e. Evakuasi korban terjatuh di sumur;
- f. Evakuasi korban hanyut;
- g. dll.

Rumus indikatornya yaitu jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/ Perangkat Daerah di kabupaten/ kota dalam tahun X. Untuk satuan indikatornya adalah jumlah dan jenis, berikut data layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran).

Tabel 2.33

Cakupan penanganan bencana non kebakaran kabupaten Tahun 2017 s.d Tahun 2022 TW IV

NO	Uraian	Tahun					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023 TW I
1.	jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat nonkebakaran) dalam Tahun X	n.a	105	268	310	468	137

Sumber data : Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 TW I

Penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Pemadam Kebakaran terdapat 137 kasus pada tahun 2023 sampai dengan Triwulan I terdiri dari :

- a. Evakuasi Sarang Tawon 73 (Tujuh Puluh Tiga) kali;
- b. Penangan tanah longsor 7 (Tujuh) kali;
- c. Penanganan hewan buas/berbisa 27 (Dua Puluh Tujuh) kali;
- d. Penanganan Pohon Tumbang 8 (Delapan) kali;
- e. Penanganan solar tumpah di jalan 9 (Sembilan) kali;
- f. Penanganan Cincin sulit di Lepas 7 (Tujuh) kali;
- g. Penyemprotan material di jalan 3 (Tiga) Kali;
- h. Penanganan kunci mobil terkunci dalam mobil 0 () kali;

- i. Penanganan Orang Tercebur Sumur 0 () Kali;
- j. Evakuasi korban Kecelakaan/ laka 3 (Tiga) kali;
- k. Giat penanganan konsleting listrik () kali.

Tabel 2.34

Tabel daftar penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh

Pemadam Kebakaran Tahun 2023 TW I

NO	PENANGGULANGAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI			PENYEBAB	OBJEK PENYELAMATAN	KERUGIAN/ KORBAN
	HARI / TANGGAL	WAKTU	LOKASI			
1	Minggu 1 Januari 2023	21.25 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Lingkungan Kebonsari Temanggung	Sudah lama bersarang	Bp Cahyono/ Rumah hunian	Nihil
2	Minggu 1 Januari 2023	22.58 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Somokaton Pandemulyo Bulu	Sudah lama bersarang	Bp Wahyu/ Rumah	1 orang tersengat lebah
3	Minggu 1 Januari 2023	22.40 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Bendo Depokharjo Parakan	Sudah lama bersarang	Bp Mustofa/ Rumah	Nihil
4	Minggu 1 Januari 2023	23.15 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Dudun Padureso Ds Padureso Parakan	Sudah lama bersarang	Bp Widiyatmoko/ Rumah	Nihil
5	Minggu 1 Januari 2023	00.00 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Petirejo Ngadirejo	Sudah lama bersarang	Bp Bambang/ Rumah	Nihil
6	Senin 2 Januari 2022	13.49 WIB	Giat evakuasi kera di Baturisari Candirito (animal rescue)	Mencari makan	Bp Bejo/ pemukiman warga	Nihil
7	Senin 2 Januari 2022	21.21 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Perum Korpri Badran blok c no 39 Temanggung	Sudah lama bersarang	Bp Windu/ rumah	Nihil
8	Senin 2 Januari 2022	22.10 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Perum Korpri Badran blok c no 96 Temanggung	Sudah lama bersarang	Bp Arba'i/ Rumah	Nihil
9	Senin 2 Januari 2022	20.39 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Perum Madureso Asri Cekelan Temanggung	Sudah lama bersarang	Bp Bambang/ Rumah	
10	3 Januari 2023	20.30 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Dusun Mayongan Jeketro Kledung	Sudah lama bersarang	Bp Utoyo/ rumah	1 orang tersengat lebah
11	3 Januari 2023	21.53 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Dsn Tejosari Kauman	Sudah lama bersarang	ibu diah/ Rumah	1 orang tersengat lebah

			Parakan			
12	3 Januari 2023	23.00 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Dsn Semondo Mondoretno Bulu	Sudah lama bersarang	Ibu Dini/ Rumah	Nihil
13	Rabu 4 Januari 2023	19.30 WIB	Giat pembersihan materiak tanah longsor di Jl Kranggan Kaloran Gentan Kranggan Temanggung	curah hujan	Warga/ Jalan	4 orang pengendara sepeda motor terjatuh
14	Rabu 4 Januari 2023	21.12 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Kayogan Sidorejo Temanggung	Sudah lama bersarang	Bp Hari/ rumah	1 orang tersengat lebah
15	Kamis 5 Januari 2023	00.50 WIB	Giat pembersihan material tanah longsor di Jl Raya Kaloran Sumowono, Lamuk Kalimanggis Kaloran	curah hujan	Anggota polri/ pengguna jalan	Nihil
16	Kamis 5 Januari 2023	13.00 WIB	Giat pembersihan material tanah longsor di Karangmulyo Gentan Kranggan Temanggung	curah hujan	Darmadi/ pengguna jalan	Nihil
17	Kamis 5 Januari 2023	13.29 WIB	Giat pembersihan material tanah longsor di Jl Raya Kaloran Sumowono, Lamuk Kalimanggis Kaloran	curah hujan	Bpk Thoifur/ pengguna jalan	Nihil
18	Kamis 5 Januari 2023	19.56 WIB	Giat evakuasi pohon tumbang di Projo Madureso Temanggung	curah hujan	Ibu indah/ pengguna jaan	1 orang luka
19	Jum'at 6 Januari 2023	15.34 WIB	Giat evakuasi ular di Soropadan Pringsurat	Mencari makan	Ibu Sulis/ rumah	Nihil
20	Sabtu 7 Januari 2023	15.25 WIB	Giat evakuasi ular di Papoan Madureso Temanggung	Mencari makan	Bp Gito/ rumah	Nihil
21	Sabtu 7 Januari 2023	19.50 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Bagusani Selopampang	Sudah lama bersarang	Bp Agus/ TPQ	2 Org tersengat
22	Sabtu 7 Januari 2023	19.15 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Jl Raya Ngadirejo Tmg	Sudah lama bersarang	Bp Suhodo/ apotik	2 Org tersengat
23	Sabtu 7 Januari 2023	20.10 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Wonoboyo RT 010	Sudah lama bersarang	Ibu Suprapti/ rumah	Nihil
24	Sabtu 7 Januari 2023	21.34 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Kwagean Bansari	Sudah lama bersarang	Bp Mujari/ rumah	3 orang tersengat
25	Kamis 12 Januari 2023	16.15 WIB	Giat evakuasi cincin di mako Damkar Temanggung	kekecilan	ibu Lestari/ jari tangan	
26	Jumat 13 Januari	13.37 WIB	Giat evakuasi ular di Ngimbrang Kauman Bulu	Mencari makan	Bp Bothok/ Warung	

	2023					
27	Jumat 13 Januari 2023	20.03 WIB	Giat Evakuasi sarang tawon di Ngijingan Candimulyo Kedu	Sudah lama bersarang	Bp Ujiyanto/ rumah	1 orang tersengat lebah
28	Jumat 13 Januari 2023	21.25 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di SDN Pagersari Ngempon Tlogomulyo	Sudah lama bersarang	Ibu Sarinah/ gedung sekolah	4 orang tersengat lebah
29	Jumat 13 Januari 2023	20.24 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Krajan Candiroto	Sudah lama bersarang	Bp Khabib/ rumah	1 orang tersengat lebah
30	Jumat 13 Januari 2023	20.55 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di jamusan Jumo Temanggung	Sudah lama bersarang	B andri S/ jalan menuju sawah	9 orang tersengat lebah
31	Sabtu 14 Januari 2023	13.14 WIB	Giat pembersihan material tanah longsor di Pesantren Wonobooyo	curah hujan	Rohmadi/ pengguna jalan	1 pengendara terjatuh
32	Minggu 15 Januari 2023	13.19 WIB	Giat pelepasan Cincin di Pos Damkar Pringsurat	kekecilan	Sdr Angga/ jari tangan	Nihil
33	Senin 16 Januari 2023	00.39 WIB	Giat pembersihan solar tumpah	isi tanki penuh	Bp Toro/ pengguna jalan	Nihil
34	Senin 16 Januari 2023	20.14 WIB	Giat animal rescue (kucing) di dsn branti Kandangan	terjepit tumpukan kayu	Bp Ade kurniawan/ kucing	Nihil
35	Jumat 20 Januari 2023	19.24 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Jl Perintis Kemerdekaan Jurang Temanggung	Sudah lama bersarang	Ibu Endah/ rumah	Nihil
36	Jumat 20 Januari 2023	19.29 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Jl Raya Bejen Tretep Tlogo Tretep	Sudah lama bersarang	Bp oyong/ gedung sekolah	2 Org tersengat
37	Sabtu 21 Januari 2023	09.45 WIB	Giat evakuasi pemotongan kayu di Gowak Kranggan Pringsurat	Membahayakan penghuni rumagh (mengenai molo atap rumah)	Bp Joko/ Rumah	Nihil
38	Sabtu 21 Januari 2023	12.19 WIB	Giat evakuasi korban tersengat listrik di Mangunsari Ngadirejo	tersengat listrik	Puskesmas Candiroto	1 orang
39	Sabtu 21 Januari 2023	20.44 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Dsn Dakaran Geblok Kaloran	Sudah lama bersarang	Aji wijayanto/ rumah	1 orang tersengat lebah
40	Sabtu 21 Januari 2023	22.03 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di kauman Gondangwayang Kedu	Sudah lama bersarang	Ibu Waliyati/ rumah	Nihil

41	Sabtu 21 Januari 2023	20.20 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Gondang Manggong Ngadirejo Temanggung	Sudah lama bersarang	Bapak Marsidi/ rumah	2 Org tersengat
42	Minggu 22 Januari 2023	15.00 WIB	Giat evakuasi ular di Perum Candi Asri Kedu	Mencari makan	Ibu Isti/ rumah	Nihil
43	Minggu 22 Januari 2023	21.00 WIB	Giat evakuasi ular di Banyurip Temanggung	Sudah lama bersarang	Bp Nasim/ rumah	1 org tersengat
44	Minggu 22 Januari 2023	15.00 WIB	Giat penyemprotan material tanah di Jamusan Jumo	Pasca baksos grastrack	Bp Anton/ jalan	Nihil
45	Senin 23 Januari 2023	11.45 WIB	Giat evakuasi ular di kauman Candiroto	Mencari makan	Bp Aji/ rumah	Nihil
46	Senin 23 Januari 2023	19.40 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Krajan Pringsurat Temanggung	Sudah lama bersarang	Rumah	2 orang tersengat
47	Selasa 24 Januari 2023	07.15 WIB	Giat evakuasi ular di Perum Candi Asri Candimulyo	Mencari makan	Ibu Vita/ rumah	Nihil
48	Selasa 24 Januari 2023	14.13 WIB	Giat penyemprotan tumpahan material di payungan Walitelon Utara	isi tanki penuh	Bp Subandi/ jalan	2 org pengendara terjatuh
49	Selasa 24 Januari 2023	15.30 WIB	Giat evakuasi cincin di mako Damkar Temanggung	kekecilan	Sdr Bagus/ jari tangan	
50	Rabu 25 Januari 2023	20.43 WIB	Giat evakuasi kucing di Mujahidin Temanggung	terjebak di atap	Bp Eri/ kucing	Nihil
51	Rabu 25 Januari 2023	20.00 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Gondangan Temanggung	Sudah lama bersarang	Bp M Fathurohman/ rumah	9 orang tersengat lebah
52	Jum'at 27 Januari 2023	20.00 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Dotakan Candiroto	Sudah lama bersarang	Ibu Juminem/ rumah	Nihil
53	Jum'at 27 Januari 2023	21.12 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Jogomertan Kauman Parakan	Sudah lama bersarang	Ibu Alea Rochim/ rumah	Nihil
54	Jum'at 27 Januari 2023	22.23 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Krajan Kandangan Temanggung	Sudah lama bersarang	Aprilintia/ rumah	Nihil
55	Sabtu 28 Januari 2023	20.30 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Gondangan Tlogorejo	Sudah lama bersarang	Bp M Fathur	Nihil
56	Minggu 29 Januari 2023	15.15 WIB	Giat evakuasi ular di desa Pringsurat Kecamatan Pringsurat	Mencari makan	Bp Eko Puspojo/ rumah	Nihil

57	Minggu 29 Januari 2023	18.59 WIB	Giat evakuasi ular di desa Kauman Ngimbrang Bulu Temanggung	Mencari makan	Ibu Bingah/ rumah	Nihil
58	Minggu 29 Januari 2023	21.03 WIB	Giat evakuasi sarang tawon di Paingan Purworejo Temanggung	Sudah lama bersarang	Bp Ari	Nihil
59	Senin 30 Januari 2023	20.47 WIB	Giat evakuasi ular di Banyurip Timur Temanggung	Mencari makan	Bp Totok	Nihil
60	Jum'at 3 Februari 2023	21.32 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Pikatan Water Park Temanggung	Sudah lama bersarang	Pengunjung tempat wisata	2 orang tersengat
61	Sabtu 4 Februari 2023	21.00 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Jurang Danupayan Temanggung	Sudah lama bersarang	Penghuni Rumah	2 orang tersengat
62	Senin 6 November 2023	19.46 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Dinas Pendidikan Kab Temanggung	Sudah lama bersarang	Seluruh Karyawan Dinas	2 orang tersengat
63	Rabu 8 Februari 2023	14.28 WIB - Selesai	Giat evakuasi pohon tumbang di Jalan Perintis Kemerdekaan Tlogorejo Temanggung	curah hujan	Pengguna jalan	Nihil
64	Kamis 9 Februari 2023	19.30 WIB - Selesai	Giat evakuasi pohon tumbang di Krecek Candirotto Temanggung	curah hujan	Pengguna jalan	Nihil
65	Jum'at 10 Februari 2023	17.26 WIB - Selesai	Giat evakuasi pohon tumbang di Kalianpo Pringsurat	curah hujan	Pengguna jalan	Nihil
66	Sabtu 11 Februari 2023	10.27 WIB - Selesai	Giat evakuasi pohon tumbang di Jragan Tembarak	curah hujan	Pengguna jalan	Nihil
67	Sabtu 11 Februari 2023	19.55 WIB - Selesai	Giat Evakuasi Sarang Tawon di Gedung Pertanian Kertosari	Sudah lama bersarang	Penghuni Gedung	2 Orang trsengat lebah
68	Sabtu 11 Februari 2023	19.46 WIB - Selesai	Giat Evakuasi Sarang Tawon di Kebonagung Kecamatan selopampang	Sudah lama bersarang	Penghuni rumah	1 Orang tersengat lebah
69	Sabtu 11 Februari 2023	19.44 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Nglaruk Bantir Candirotto	Sudah lama bersarang	Penghuni rumah	Nihil
70	Minggu 12 Februari 2023	06.30 WIB - Selesai	Giat evakuasi cincin di mako Damkar Temanggung	kekecilan	Pemilik Cincin	Nihil
71	Minggu 12 Februari 2023	16.47 WIB - Selesai	Giat Evakuasi ular di Banyurip Temanggung	Mencari makan	Penghuni Rumah	Nihil
72	Senin 13 Februari 2023	19.47 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Banjarsari Kebumen Pringsurat	Sudah lama bersarang	Penghuni rumah	Nihil

73	Senin 13 Februari 2023	20.27 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di SDN Tlogorejo Temanggung	Sudah lama bersarang	Seluruh siswa dan pengajar SD	2 Orang tersengat lebah
74	Selasa 14 Februari 2023	20.55 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di batikan Soropadan Pringsurat	Sudah lama bersarang	Penghuni Rumah	Nihil
75	Selasa 14 Februari 2023	21.00 WIB - Selesai	Giat animal rescue (ular) di dsn Malebo Karangwuni Pringsurat	Mencari makan	Penghuni rumah	Nihil
76	Kamis 16 Februari 2023	20.05 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di SD Muhamadiyah Temanggung	Sudah lama bersarang	Seluruh siswa dan pendidik	2 Orang tersengat lebah
77	Jum'at 17 Februari 2023	10.15 WIB - Selesai	Giat penyemprotan solar tumpah di Maron Permai Sidorejo Temanggung	isi tanki penuh	Pengguna jalan	1 pengendara terjatuh
78	Minggu 19 Januari 2023	20.45 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Karangwuni Sriwungu Tlogomulyo	Sudah lama bersarang	Penghuni Rumah	Nihil
79	Senin 20 Februari 2023	17.50 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di SDN 2 Muncar Gemawang	Sudah lama bersarang	Seluruh siswa dan pendidik	8 Siswa tersengat lebah
80	Senin 20 Februari 2023	11.55 WIB - Selesai	Giat animal rescue (biawak) di Dotakan Candiroto Temanggung	Mencari makan	Penghuni rumah	Nihil
81	Senin 20 Februari 2023	12.07 WIB - Selesai	Giat animal rescue (ular) di Kauman Candiroto Temanggung	Mencari makan	Penghuni rumah	Nihil
82	Sabtu 25 Februari 2023	19.03 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Mujahidin Giyanti Temanggung	Sudah lama bersarang	Pengguna tempat ibadah (Masjid)	1 Orang tersengat lebah
83	Senin 27 Februari 2023	19.09 WIB - Selesai	Giat penyemprotan solar tumpah di jalan Kranggan Pringsurat (Pasar Bedono)	isi tanki penuh	Pengguna jalan	9 Pengendara motor terjatuh
84	Senin 27 Februari 2023	20.00 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Ngimbrang Bulu Temanggung	Sudah lama bersarang	Penghuni rumah	4 orang tersengat lebah
85	Selasa 28 Februari 2023	13.12 WIB - Selesai	Giat pembersihan solar tumpah di Pagerjuran Jamusan Jumo	Sudah lama bersarang	Pengguna Jalan	2 Pengendara terjatuh
86	Kamis 2 Maret 2023	20.18 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Alun-alun Temanggung	Sudah lama bersarang	pengunjung	Nihil
87	Jum'at 3 Maret 2023	19.46 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Larangan Luwuk Bejen	Sudah lama bersarang	bangunan sekolah dan penghuni	Nihil
88	Jum'at 3 Maret 2023	20.07 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Bagusani Selopampang Temanggung	Sudah lama bersarang	penghuni rumah	2 Orang tersengat lebah

89	Sabtu 4 Maret 2023	05.45 WIB - Selesai	Giat evakuasi ular di Madureso Temanggung	Mencari makan	Bp Yayan (rumah hunian)	Nihil
90	Sabtu 4 Maret 2023	20.15 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Mendongan Muntung Candirotro	Sudah lama bersarang	Penghuni Rumah	1 Orang tersengat lebah
91	Minggu 5 Maret 2023	09.52 WIB - Selesai	Giat evakuasi pohon tumbang di Margasari Jampirejo Temanggung	Membahaya kan bangunan Masjid	Pengguna tempat ibadah (Masjid)	Nihil
92	Minggu 5 Maret 2023	13.53 WIB - Selesai	Giat evakuasi ular di Krajan Pringsurat Temanggung	Mencari makan	Penghuni Rumah	Nihil
93	Minggu 5 Maret 2023	20.18 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Brojolan Barat Temanggung	Sudah lama bersarang	Penghuni Rumah	1 Orang tersengat lebah
94	Senin 6 Maret 2023	20.34 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Perim Argodewi Mungseng Giyanti Temanggung	Sudah lama bersarang	Penghuni Rumah	1 Orang tersengat lebah
95	Selasa 7 Maret 2023	14.12 WIB - Selesai	Giat evakuasi ular di Gandokan Kranggan Temanggung	Mencari makan	Penghuni Rumah	Nihil
96	Selasa 7 Maret 2023	20.11 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Jurang Kedungumpul Kandangan	Sudah lama bersarang	Penghuni Rumah	1 Orang tersengat lebah
97	Kamis 9 Maret 2023	11.08 WIB - Selesai	Giat penyemprotan solar tumpah di Petirejo Ngadirejo	Isi tangki penuh	Pengguna jalan	Nihil
98	Kamis 9 Maret 2023	20.32 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Legoksari Temanggung	Sudah lama bersarang	Pengunjung fasilitas umum	1 Orang tersengat lebah
99	Kamis 9 Maret 2023	19.48 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Combrang Selosabrang Bejen	Sudah lama bersarang	Penghuni Rumah	5 Orang tersengat lebah
100	Jum'at 10 Maret 2023	11.07 WIB - Selesai	Giat evakuasi ular di Geneng Kowangan Temanggung	Mencari makan	Penghuni Rumah	Nihil
101	Jum'at 10 Maret 2023	17.18 WIB - Selesai	Giat evakuasi ular di Bendan Mudal Temanggung	Mencari makan	Penghuni Rumah	Nihil
102	Sabtu 11 Maret 2023	21.20 WIB - Selesai	Giat evakuasi ular di Rowoseneng Krajan Kandangan	Mencari makan	Penghuni Rumah	Nihil
103	Minggu 12 Maret 2023	12.05 WIB - Selesai	Giat evakuasi mobil terperosok ke selokan di Sariyam Parakan Temanggung	Terperosok ke dalam selokan	Pemilik kendaraan	Nihil
104	Minggu 12 Maret 2023	19.18 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Tloyo Karanggedong Ngadirejo	Sudah lama bersarang	Penghuni Rumah	1 Orang tersengat lebah

105	Minggu 12 Maret 2023	20.36 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Sempon Sriwungu Tlogomulyo	Sudah lama bersarang	Penghuni Rumah	Nihil
106	Minggu 12 Maret 2023	22.56 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Jubug Wanutengah Parakan	Sudah lama bersarang	Penghuni Rumah	Nihil
107	Senin 13 Maret 2023	19.05 WIB - Selesai	Giat penyemprotan solar tumpah di Jalan Raya Kranggan	Isi tangki penuh	Pengguna Jalan	5 Pengendara Sepeda Motor terjatuh
108	Senin 13 Maret 2023	16.09 WIB - Selesai	Giat Evakuasi kera di paponan Kecamatan Parakan	Mencari makan	Warga	Nihil
109	Senin 13 Maret 2023	21.15 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Dalangan Campursari Bulu	Sudah lama bersarang	Penghuni Rumah	Nihil
110	Selasa 14 Maret 2023	08.01 WIB - Selesai	Giat penyemprotan solar tumpah di Jl Geneng Temanggung	Isi tangki penuh	Pengguna Jalan	3 Pengendara Sepeda Motor terjatuh
111	Rabu 15 Maret 2023	13.04 WIB - Selesai	Giat evakuasi ular di Jambon Kerokan Tlogomulyo	Mencari makan	penghuni rumah	Nihil
112	Rabu 15 Maret 2023	19.16 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Dukuh Karawitan Candirotto	Sudah lama bersarang	penghuni rumah	10 orang twrsengat lebah
113	Jum'at 17 Maret 2023	07.57 WIB - Selesai	Giat evakuasi ular di Kauman Candirotto	Mencari makan	penghuni rumah	Nihil
114	Jum'at 17 Maret 2023	15.27 WIB - Selesai	Giat evakuasi pohon tumbang di Punduhan Kandangan	Curh hujan	Pengguna jalan	Nihil
115	Jum'at 17 Maret 2023	21.24 WIB - Selesai	Giat evakuasi ular di Karangsari Salamsari Kedu	Mencari makan	Penghuni rumah	Nihil
116	Sabtu 18 Maret 2023	06.25 WIB - Selesai	Giat evakuasi korban laka lantas di JL Ambarawa Soropadan Pringsurat	Laka Lantas	pengemudi mobil	1 orang terjepit
117	Sabtu 18 Maret 2023	20.40 WIB - selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Perum Candi Asri CandiMulyo Kedu	Sudah lama bersarang	penghuni rumah	1 Orang tersengat lebah
118	Sabtu 18 Maret 2023	19.56 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Batikan Soropadan Pringsurat	Sudah lama bersarang	penghuni rumah	1 Orang tersengat lebah
119	Minggu 19 Maret 2023	20.13 WIB - Selesai	Giat evakuasi ular di Dsn Sragan Menggoro Tembararak	Mencari makan	penghuni rumah	Nihil
120	Selasa 21 Maret 2023	20.37 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Bangunsari Bansari	Sudah lama bersarang	penghuni rumah	1 Orang tersengat lebah
121	Rabu 22 Maret 2023	21.03 WIB -	Giat evakuasi sarang tawon di Tejolopo Tegalrejo Bulu	Sudah lama bersarang	penghuni rumah	1 Orang tersengat lebah

		Selesai				
122	Kamis 23 Maret 2023	20.30 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Tegaltenu Manding Temanggung	Sudah lama bersarang	penghuni rumah	1 Orang tersengat lebah
123	Sabtu 25 Maret 2023	20.20 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Krajan Pringsurat	Sudah lama bersarang	penghuni rumah	1 Orang tersengat lebah
124	Sabtu 25 Maret 2023	20.30 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Jamusan Jumo	Sudah lama bersarang	penghuni rumah	1 Orang tersengat lebah
125	Minggu 26 Maret 2023	14.07 WIB - Selesai	Giat evakuasi pohon tumbang di Jalan Magelang Semarang	Curh hujan	pengguna jalan	1 orang luka
126	Minggu 26 Maret 2023	21.12 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Margasari Jampirejo	Sudah lama bersarang	penghuni rumah	1 Orang tersengat lebah
127	Minggu 26 Maret 2023	21.25 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Krajan Patekan Wonobojo	Sudah lama bersarang	pengguna jalan	Nihil
128	Senin 27 Maret 2023	07.54 WIB - Selesai	Giat Evakuasi Cincin di Mako Induk Temanggung	Kekecilan	Ibu Sarimi	Nihil
129	Senin 27 Maret 2023	13.40 WIB - Selesai	Giat Evakuasi Tanah Longsor di Demangan Pingit Pringsurat	Kekecilan	Ibu Reni	Nihil
130	Senin 27 Maret 2023	17.00 WIB - Selesai	Giat Evakuasi Cincin di Mako Induk Temanggung	Kekecilan	Ibu Reni	Nihil
131	Selasa 28 Maret 2023	10.11 WIB - Selesai	Giat penyemprotan tumpahan material di Jl Diponegoro	Kelebihan muatan	Pengguna Jalan	Nihil
132	Selasa 28 Maret 2023	17.17 WIB - Selesai	Giat evakuasi Material Tanah Longsor di Demangan Pingit Pingsurat	Curah hujan	Pengguna jalan	Nihil
133	Rabu 29 Maret 2023	15.00 WIB - Selesai	Giat evakuasi Material Tanah Longsor di Demangan Pingit Pingsurat	Curah hujan	Pengguna jalan	4 Pengendara terjatuh
134	Kamis 30 Maret 2023	09.55 WIB - Selesai	Giat penyemprotan solar tumpah Jl Dr Cipto Temanggung	Isi tangki penuh	Pengguna jalan	2 Pengendara terjatuh
135	Kamis 30 Maret 2023	21.03 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Jetis Ngimbrang Bulu Temanggung	Sudah lama bersarang	penghuni rumah	1 Orang tersengat lebah
136	Kamis 30 Maret 2023	21.53 WIB - Selesai	Giat evakuasi sarang tawon di Jetis Ngimbrang Bulu Temanggung	Sudah lama bersarang	penghuni rumah	1 Orang tersengat lebah
137	Jum'at 31 Maret 2023	18.45 WIB - Selesai	Giat penyemprotan tumpahn minyak di Jl Parakan Wonosobo Paponan	Isi tangki penuh	pengguna jalan	15 pengendara spm terjatuh

Sumber data: Satpol PP dan Damkar Kabupaten Temanggung Tahun 2023 TW I

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dari 9 indikator terdapat 4 indikator yang belum mencapai target 100 %, antara lain:

- Indikator Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Hal ini disebabkan karena jumlah linmas di Kabupaten Temanggung dari rasio 1 : 1 (satu RT : satu Linmas), sudah mencukupi, namun penyebarannya yang kurang merata. Di Kecamatan Kaloran jumlah RT 416 sedangkan jumlah linmasnya 349 orang, sehingga ada kekurangan 67 linmas, di Kecamatan Kedu kekurangan 99 linmas, di Kecamatan Kranggan kekurangan 15 linmas. Akan tetapi di kecamatan yang lain jumlah linmasnya rata-rata lebih banyak dr jumlah RT.

- Indikator Cakupan Penanganan Bencana Kebakaran Kabupaten

Hal ini disebabkan karena cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten tidak mengalami peningkatan dikarenakan sampai dengan tahun 2023 belum terdapat tambahan pembangunan pos pemadam kebakaran sehingga tidak terdapat penambahan pos, sehingga apabila melihat jangkauan luas layanan Kabupaten Temanggung cakupan penanganan bencana kebakaran kabupaten masih terbatas sejumlah 60% dari seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.

- Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate).

Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa kendala diantaranya :

- a) Kondisi kendaraan damkar yang kurang layak untuk pelaksanaan operasi penanggulangan kebakaran khususnya saat dipergunakan dlm kondisi kecepatan tinggi, berisi air dn jalan yg berliku, naik turun atau gelombang
- b) Kondisi peralatan pemadam kebakaran seperti (mesin pompa air, selang, y koneksi, nozel, dll) yang sudah tua dan lapuk
- c) wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, jalan sempit, Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran
- Indikator Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Hal ini disebabkan karena Response time memiliki beberapa faktor kendala sebagai berikut:

- a) Terbatasnya sumber air dan belum tersedianya suber air (Goundtank);
- b) Lokasi Pos Pemadam Kebakaran yang terlalu jauh dari lokasi kebakaran ;
- c) kepadatan penduduk dan kemacetan lalu lintas;
- d) Perubahan kondisi lalu lintas;
- e) Perbedaan waktu tanggap yang dipengaruhi oleh kecepatan unit mobil kebakaran yang sebagian sudah berumur;
- f) Hambatan *akseleri* unit pemadam kebakaran antara lain wilayah Kabupaten Temanggung yang berkontour pegunungan, portal, jalan sempit, dll;
- g) Luasnya daerah layanan tidak sebanding dengan jumlah Pos Pembantu yang hanya berdiri di Pringsurat dan Candiroto serta minimnya sarana dan prasarana untuk pendukung penyelamatan dan evakuasi.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, antara lain :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), baik dalam

hal SDM Satuan Polisi Pamong Praja maupun Pemadam Kebakaran.

2. Masih minimnya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memenuhi Standar Kualifikasi
3. Kurangnya sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
4. Masih kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dalam upaya melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
5. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap kesadaran penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kesadaran terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
6. Menurunnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan;
7. Kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya ketentraman dan ketertiban umum;
8. Perlunya peningkatan kemampuan SDM Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Petugas Pemadam Kebakaran dalam menghadapi permasalahan kedepan yang semakin kompleks;
9. Sarana dan prasarana pendukung untuk peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran masih belum memenuhi standar kebutuhan;

- Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar dilakukan upaya penunjang pelaksanaan kegiatan melalui :

1. Intensifikasi rapat koordinasi di tingkat *low manager* sampai dengan pengambil kebijakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian kinerja kegiatan dinas
2. Terdapat dukungan, peran serta dan kerjasama dengan kemitraan dalam rangka penegakan perda
3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana dinas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat lebih memudahkan komunikasi dan interaksi dengan

masyarakat guna mewujudkan pelayanan prima penegakan perda.

4. Melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai.
5. Melaksanakan sosialisasi, edukasi dan pembinaan secara rutin dan mengintensifkan patroli
6. Mengikutsertakan personil untuk mengikuti Diklat, bimbingan teknis, ataupun mengikuti lomba yang bersifat pengembangan kapasitas aparatur
7. Ketersediaan anggaran yang memadai sebagai penunjang keberhasilan pencapaian target tujuan

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

Terdapat penambahan sub kegiatan di luar rancangan awal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung, yaitu sejumlah 1 (satu) sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum

Sesuai hasil analisa kebutuhan terdapat penambahan anggaran pada beberapa sub kegiatan yaitu:

- a. Fasilitasi kunjungan tamu
- b. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- c. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- d. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

- f. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
- g. Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas
- h. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
- i. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
- j. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri
- k. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung diri
- l. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung
- m. Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran
- n. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
- k. Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.35
Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2024

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						1	PERENCANAAN PEMBANGUNAN						
A.	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						A.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah						
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	4.858.599.266	a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggung	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	14	bulan	4.858.599.266	
2	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah						2	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah						
a	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	paket	138.615.000	a	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1	paket	138.615.000	
b	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500	Orang	200.000.000	b	Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan	Kab. Temanggung	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500	Orang	200.000.000	
3	Administrasi umum perangkat daerah						3	Administrasi umum perangkat daerah						

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
a	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	bulan	10.000.000	a	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	bulan	10.000.000	
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	50.000.000	b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Paket	50.000.000	
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	17.500.000	c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	Paket	17.500.000	
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	bulan	20.000.000	d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	bulan	20.000.000	
e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	bulan	10.000.000	e	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	bulan	10.000.000	
f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	bulan	44.000.000	f	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	bulan	76.000.000	Penambahan anggaran 32.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						
No	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
g	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggara n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	bulan	55.000.000
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Temanggung	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2	unit	85.000.000
b	Pengadaan Mebel	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	30.000.000
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	5.000.000
d	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	250.000.000
5	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah					

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Usuran/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	
g	Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	bulan	80.000000	Penam bahan anggar an 30.000 .000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
a	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab Temanggung	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	4	unit	170.000.000	Penam bahan anggar an 85.000 .000
b	Pengadaan Mebel	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	30.000.000	
c	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2	Unit	5.000.000	
d	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	Unit	250.000.000	
	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	bulan	65.000.000	a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	bulan	65.000.000	
b	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	bulan	7.500.000	b	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	bulan	7.500.000	
c	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	bulan	172.174.000	c	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	bulan	172.174.000	
6	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah							Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						
a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12	bulan	70.000.000	a	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12	bulan	70.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024						
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
b	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Temanggung	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	12	bulan	65.000.000
c	Pemeliharaan mebel	Kab. Temanggung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	Paket	5.000.000
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1	Unit	30.000.000
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1	Unit	125.000.000
B	Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum					
1	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota					

HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	
b	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Kab. Temanggung	jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	12	bulan	65.000.000	
c	Pemeliharaan mebel	Kab. Temanggung	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1	Paket	5.000.000	
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1	Unit	60.000.000	Penam bahan anggar an 30.000 .000
e	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1	Unit	125.000.000	
B	Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum						
1	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota						

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
a	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Kab. Temanggung	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12	bulan	120.883.400	a	Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	Kab. Temanggung	Jumlah Kasus Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12	bulan	120.883.400	
b	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kab. Temanggung	Jumlah penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	12	bulan	50.000.000	b	Penindakan atas gangguan ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kab. Temanggung	Jumlah penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	12	bulan	50.000.000	

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
c	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Terbayarnya honor SS Banpol 30 orang x 13 bulan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan (Rp. 865.181.000)	12	bulan	865.181.000	c	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Kab Temanggung	Terbayarnya honor SS Banpol 30 orang x 13 bulan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan (Rp. 865.181.000)	12	bulan	865.181.000	
d	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Kab Temanggung	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum			0	d	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Kab Temanggung	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	12	dokumen		
e	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi manusia	Kab. Temanggung K	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	paket	339.000.000	e	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi manusia	Kab Temanggung	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	paket	339.000.000	Sudah termasuk anggaran hasil musrenbang RKPD 229.000.000

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
f	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Temanggung	Jumlah kerjasama antar instansi dalam penanganan PKL dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lainnya	12	bulan	30.000.000	f	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Temanggung	Jumlah kerjasama antar instansi dalam penanganan PKL dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum lainnya	12	bulan	30.000.000	
g	Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Temanggung	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	12	bulan	14.595.600	g	Pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Kab. Temanggung	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	12	bulan	14.595.600	
2	Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota						2	Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/wali kota						
a	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	Kab. temanggung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12	bulan	60.000.000	a	Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	12	bulan	60.000.000	
C	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						C	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						
1	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota						1	Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota						

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
a	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	bulan	72.299.900	a	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Temanggung	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	12	bulan	156.499.900	Terdapat penambahan anggaran 84.200.000
b	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	12	bulan	59.000	b	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Kab Temanggung	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	12	bulan	96.059.000	Terdapat Penambahan anggaran 96.000.000
c	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Kab. Temanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung	12	bulan	59.000	c	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Kab Temanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung	12	bulan	162.650.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
d	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Kab. Temanggung	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulan Kebakaran	12	bulan	1.032.620.000	d	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Kab Temanggung	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulan Kebakaran	12	bulan	1.032.620.000	
2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						
a	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkun gan yang Dipersyaratka n Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12	bulan	19.981.000	a	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Kab Temanggung	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Ged ung/Lingkun gan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	12	bulan	29.667.000	anggr kuran g 9.686. 600 total anggr menja di 29.667 .000
3	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran						3	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran						
a	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Kab. Temanggung	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulan Kebakaran Setiap Tahunnya	1	paket	134.455.000	a	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Kab Temanggung	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulan Kebakaran Setiap Tahunnya	1	paket	661.718.000	Penam bahan anggar an hasil Musre nbang RKPD

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

RANCANGAN AWAL RKPD 2024							HASIL ANALISIS KEBUTUHAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keter angan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
b	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprasi Damkar	1	Paket	45.564.000	b	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran	Kab. Temanggung	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Saprasi Damkar	12	bulan	1.261.468.000	anggaran kurang 1.170.904.000 totalnya menjadi 1.216.468.000

Sumber : satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran. Namun dalam proses ini Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2.36

Usulan usulan program dan kegiatan masyarakat
(hasil Musrenbang RKPD Kecamatan)

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan
1	Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Ngadirejo	Terlaksananya pelatihan kapasitas Satlinmas	109.000.000	
2	Program Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum Kegiatan Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Pringsurat	Terlaksananya pelatihan kapasitas Satlinmas	120.000.000	
3	Program Pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Wonoboyo	- Terlaksananya pelatiha pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan Terlaksananya pengadaan APAR	100.000.000	

	masyarakat dalam pencegahan kebakaran				

2.6 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ada 2 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.37
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/Tahun
		SDM	Anggaran				
1.	Satpol PP Sahabat Santri	Satpol PP, stokholder di Pondok Pesantren	APBD	Mengadakan sosialisasi bersama dan kegiatan untuk meningkatkan amal makruf nahi mungkar	Perjanjian Kerjasama	Meningkatnya kesadaran masyarakat lewat amar makruf nahi mungkar dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Temanggung	2020 Juara II Lomba Inovasi Satpol PP Tingkat Provinsi Jawa Tengah
2.	Satlinmas Geplak Gandem	Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)	APBD	Melaksanakan sosialisasi dan membentuk Barisan Relawan beranggotakan Satlinmas	Barisan Relawan Satlinmas dalam pencegahan kebakaran	Satlinmas sebagai garda terdepan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	2020 Juara II Lomba Inovasi Satlinmas Satpol PP Tingkat Provinsi Jawa Tengah

2.7 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ada 2 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.38
Daftar Inovasi Perangkat Daerah
2019-2021

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana/ Tahun
		SDM	Anggaran				
1.	Satpol PP Sahabat Santri	Satpol PP, stokholder di Pondok Pesantren	APBD	Mengadakan sosialisasi bersama dan kegiatan untuk meningkatkan amal makruf nahi mungkar	Perjanjian Kerjasama	Meningkatnya kesadaran masyarakat lewat amar makruf nahi mungkar dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Temanggung	2020 Juara II Lomba Inovasi Satpol PP Tingkat Provinsi Jawa Tengah
2.	Satlinmas Geplak Gandem	Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)	APBD	Melaksanakan sosialisasi dan membentuk Barisan Relawan beranggotakan Satlinmas	Barisan Relawan Satlinmas dalam pencegahan kebakaran	Satlinmas sebagai garda terdepan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran	2020 Juara II Lomba Inovasi Satlinmas Satpol PP Tingkat Provinsi Jawa Tengah

BAB III**TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN****3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung yang melaksanakan urusan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat. Dalam rangka melaksanakan urusan tersebut, maka Satpol PP dan Pemadam Kebakaran perlu melakukan telaahan terhadap kebijakan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memasukkan indikator baru yang belum termuat dalam RPJMD 2019-2023 berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal pada SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dengan jenis pelayanan dasar terdiri atas :

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum ;

Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi:

- pelayanan kerugian materil; dan
- pelayanan pengobatan.

Kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada.

Kerugian materiil sebagaimana dimaksud terdiri atas:

- rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan

- o rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.

Pelayanan pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

Penerima Jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum, yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda provinsi dan kabupaten/kota serta Perkada. Warga negara dengan kriteria:

- o yang mengalami kerugian materil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Perda dan Perkada; dan/atau
- o berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Perda dan Perkada.

Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar dilaksanakan dengan cara menaksir dan menghitung kerugian materi yang dialami yang melibatkan juru taksir sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dimuat dalam:

- o Program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Pemerintah Daerah; dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dalam bentuk dokumen RPJMD dan RKPD;
- o Dokumen perencanaan perangkat daerah dalam bentuk dokumen Renstra dan Renja; dan dokumen anggaran Pemerintah Daerah dalam bentuk APBD.
- o Satpol PP dalam menyusun dokumen rencana perangkat daerah agar memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar;
- o Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dituangkan dalam dokumen Renstra dan dokumen Renja;

- o Tim anggaran Pemerintah Daerah memastikan pendanaan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya;
- o Penyediaan pelayanan kerugian materi dan pelayanan pengobatan yang dilakukan oleh Satpol PP;
- o Dan Satpol PP menetapkan capaian standar Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah warga negara yang terkena dampak dan telah tertangani setiap tahunnya.

Dalam hal terdapat warga negara:

- ➔ Terkena dampak kerugian materil akibat penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan perbaikan atas barang atau aset pribadi yang layak;
- ➔ Terkena dampak kerugian cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan tindakan pengobatan pertolongan pertama; dan terkena dampak kerugian cedera fisik yang memerlukan penanganan lebih lanjut akibat penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP memberikan fasilitasi pengobatan di pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit umum Pemerintah Daerah.
- ➔ Perbaikan atas kerugian materil dan cedera fisik ringan pendanaannya 2,5 (dua koma lima persen) dari anggaran operasional kegiatan penegakan Perda dan Perkada.

- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
 - c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana ;
 - d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana ;
 - e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota ;

Dikarenakan penerapan SPM belum masuk di dalam RPJMD 2018-2023 maka untuk kedua jenis layanan dasar tersebut masih diuraikan dalam indikator berdasarkan Permendagri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kabupaten/Kota sebagai berikut :

1. Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat.

Pelayanan Pemeliharaan Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat mencakup 3 (tiga) indikator pelayanan, yaitu :

a. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota

Cakupan penegakan perda dan peraturan kepala daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan polisi pamong praja untuk menyelesaikan setiap terjadi pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah yang dilakukan oleh warga masyarakat, badan hukum maupun aparat pemerintah baik pelanggaran perda yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang dipantau oleh anggota satuan polisi pamong praja.

Penyelesaian pelanggaran perda dan peraturan kepala daerah oleh satuan polisi pamong praja dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur satuan polisi pamong praja yaitu tindakan *preventif non yustisial* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja. Apabila pelanggaran terhadap perda mengandung unsur pidana dan daerah tersebut telah memiliki PPNS, satuan polisi pamong praja dapat meneruskan proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan

b. Patroli Siaga Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat adalah frekuensi patroli yang dilaksanakan oleh kelompok anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk selanjutnya disebut kelompok patroli (KP) di setiap kecamatan yang berada di kabupaten/kota.

Patroli dilakukan pada lokasi yang sangat memerlukan pantauan, antara lain: tempat-tempat atau lokasi yang dianggap rawan, antar batas wilayah, dan tempat keramaian/hiburan.

Apabila telah tercipta kondisi 3 (tiga) kali patroli dalam sehari di seluruh kecamatan pada kabupaten/kota, maka kinerja minimal dari pelaksanaan patroli tersebut telah dianggap terpenuhi.

- c. Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat di Kabupaten/Kota
Rasio petugas linmas di kabupaten/kota adalah jumlah satuan perlindungan masyarakat pada tingkat RT atau sebutan lainnya yang tugasnya membantu pelayanan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut membantu memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

2. Pelayanan Penanggulangan Bencana Kebakaran

Pelayanan penanggulangan bencana kebakaran mencakup pelayanan kepada masyarakat pada pra kebakaran, saat kejadian kebakaran dan *pasca* kebakaran di kawasan permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri, hutan dan lahan yang merupakan wilayah yurisdik tanggung jawab pemerintah daerah otonom.

Untuk menghindari kekosongan pelayanan kepada masyarakat ditetapkan SPM indikator kinerja pemerintahan daerah sebagai alat ukur akses dan mutu pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di daerah. Pengaturan SPM penanggulangan kebakaran meliputi:

- a. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten/Kota
Bencana kebakaran adalah setiap peristiwa bencana yang disebabkan karena kebakaran dan dapat menimbulkan kerugian materiil maupun korban jiwa, gangguan kesehatan dan lingkungan. Cakupan pelayanan bencana kebakaran mencerminkan berapa persen luas lingkungan dan/atau wilayah potensi kebakaran dan rentan kebakaran yang mendapat WMK untuk mendapat layanan proteksi ancaman bencana kebakaran.

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di kabupaten/kota adalah:

- WMK dibentuk pada pengelompokan hunian yang memiliki kesamaan kebutuhan proteksi kebakaran dalam batas wilayah yang ditentukan secara alamiah maupun buatan.
- WMK perlu dilengkapi dengan mitigasi, sistem peringatan dini dapat melalui alarm dan sejenisnya, pemberitahuan kebakaran yang terintegrasi dalam WMK, kesiapsiagaan, pos pelayanan pemadam kebakaran, sarana dan prasarana pencegahan dan penanggulangan kebakaran.
- WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap (*response time*) dari pos pelayanan pemadam kebakaran terdekat yang memiliki satuan petugas pemadam kebakaran yang terlatih bersertifikasi, memiliki mobil pemadam kebakaran dan/atau peralatan penyemprotan pemadam api yang terintegrasi dengan ketersediaan sumber air dan/atau penyemprotan racun api dan alat pendukung pemadam api sesuai dengan tipologi kebakaran.

Daerah layanan WMK ditentukan oleh tingkat waktu tanggap, tingkat waktu tanggap pada permukiman, bangunan gedung publik, pabrik/industri tidak lebih dari 15 (lima belas) menit dan tingkat waktu tanggap pada kawasan hutan dan kebakaran tertentu tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit, satuan petugas pemadam kebakaran lengkap unit mobil atau mesin pompa air pemadam kebakaran atau sarana dan prasana pemadam lainnya telah tiba di tempat kejadian kebakaran yang langsung melakukan penyemprotan air dan/atau bahan pemadam api lainnya, pertolongan penyelamatan jiwa dan keselamatan harta benda.

Berdasarkan ketentuan ini, kepala daerah menetapkan bahwa setiap lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi ancaman kebakaran diwajibkan membentuk WMK dengan berdasarkan rencana induk sistim proteksi kebakaran dengan tujuan pengurangan resiko kebakaran dengan luas disesuaikan dengan kondisi dan jenis potensi atau tipologi kebakaran serta menyusun rencana induk sistim proteksi kebakaran dengan tujuan pengurangan resiko kebakaran.

Suatu lingkungan dan/atau kawasan yang memiliki potensi ancaman kebakaran tetapi tidak membentuk WMK

dikategorikan sebagai daerah tidak terlindungi (*unprotected area*).

Daerah yang sudah membentuk WMK maka satuan tugas pemadam kebakaran harus melakukan inspeksi secara berkala terhadap peralatan proteksi kebakaran dan menyediakan personel pemadam kebakaran yang terlatih, sarana dan prasarana pada tanggap darurat antara lain mobil pemadam kebakaran, pompa air pemadam api yang dapat digunakan dimana saja, pos pelayanan pemadam kebakaran ditengah WMK.

b. Tingkat Waktu Tanggap (*Response Time Rate*) Daerah Layanan WMK

Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan WMK adalah rasio antara kejadian kebakaran yang tertangani dalam waktu tidak lebih dari 15 (lima belas) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada pemukiman, bangunan gedung, pabrik/industri dan tidak lebih dari 60 (enam puluh) menit tingkat waktu tanggap kebakaran pada kawasan hutan dan lahan dengan jumlah kejadian kebakaran di WMK.

c. Persentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi

Cakupan Satuan Petugas Pemadam Kebakaran pada kabupaten/kota yang memenuhi standar kualifikasi adalah Satuan Petugas Pemadam Kebakaran yang telah bersertifikasi melalui proses pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan yang berpotensi kebakaran dengan prinsip pengurangan resiko kebakaran.

d. Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter Pada WMK

Jumlah mobil dan/atau mesin damkar Diatas 3000-5000 Liter pada WMK adalah cakupan mobil dan/atau mesin pemadam kebakaran yang disediakan pemerintah daerah yang layak pakai untuk mendukung tindakan waktu tanggap darurat kebakaran pada lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran dan/atau WMK

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2024, maka tujuan dari penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 adalah:

a. Tujuan

Tujuan jangka menengah yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran selama Tahun 2024-2026 adalah **“Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas”** dengan memperhatikan indikator tujuan/sasaran yaitu **Indeks Rasa Aman**. Sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai upaya untuk mewujudkan Kabupaten Temanggung yaitu **Temanggung makin maju, mandiri, aman adil dan sejahtera**

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini adalah dalam rangka:

Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target (Perangkat Daerah) Kab. Temanggung pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1.
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR SASARAN	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2024	TARGET KONDISI AKHIR 2024
Meningkatnya penyediaan sarana prasarana wilayah yang berkualitas			Indeks Rasa Aman	angka	4,62	4,62
	Meningkatnya perlindungan dan keamanan masyarakat					
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Presentase Satlinmas yang terlatih	%	3,46	3,46
			Presentase pengaduan yang berkaitan dengan Trantibum yang ditindaklanjuti	%	100	100
			Persentase penegakan Perda/Perbup	%	100	100
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	48	48

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

		Penyelamatan non Kebakaran				
			Presentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100
			Presentase warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran oleh relawan kebakaran	%	100	100
			Presentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi	%	3,08	3,08

Sumber : Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kab. Temanggung Tahun 2024-2026.

Kebijakan dan strategi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024-2026.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung di Tahun 2024 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2024 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2024.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Temanggung Tahun 2024

RANCANGAN RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2024			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10.265.286.166	A	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	10.948.786.266	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.505.388.266	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.445.388.266	
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.858.599.266	a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.858.599.266	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.858.599.266		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.858.599.266	
b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	338.615.000	b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	338.615.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	138.615.000		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	138.615.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000	
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	263.500.000	c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	263.500.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.500.000		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	17.500.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	76.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	76.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80.000.000	
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	455.000.000	d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	455.000.000	

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.000.000		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.000.000	
	Pengadaan Mebel	30.000.000		Pengadaan Mebel	30.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000.000		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	250.000.000	
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.674.000	e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	244.674.000.	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.174.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.174.000	
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	345.000.000	f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	285.000.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	90.000.000		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	70.000.000	(20.000.000)
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	65.000.000		Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	65.000.000	
	Pemeliharaan Mebel	5.000.000		Pemeliharaan Mebel	5.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	60.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	20.000.000	(40.000.000)
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	125.000.000		Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	125.000.000	
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.554.660.000	2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.554.660.000	
a	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.494.660.000	a	Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.494.660.000	
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	120.883.400		Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	120.883.400	
	Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	50.000.000		Penindakan atas Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	50.000.000	
	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	940.181.000		Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	940.181.000	

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	0		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.000.000.000	1.000.000.000
	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	339.000.000		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	339.000.000	
	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.000.000		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30.000.000	
	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.595.600		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14.595.600	
b	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	60.000.000	b	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	60.000.000	
	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	60.000.000		Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	60.000.000	
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.205.237.900	3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.148.738.000	
a	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.385.237.900	a	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.328.738.000	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	156.499.900		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	(56.499.000)
	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	96.059.000		Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	96.059.000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100.059.000		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	100.059.000	
	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	1.032.620.000		Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	1.032.620.000	
b	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	39.981.000	b	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	39.981.000	
	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	39.981.000		Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	39.981.000	
c	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	780.019.000	c	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	780.019.000	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	134.455.000		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	134.455.000	
	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	645.564.000		Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	445.564.000	(200.000.000)
	JUMLAH	10.265.286.166		JUMLAH	10.948.786.266	683.500.100

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2024

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa terjadi kenaikan pagu indikatif Tahun 2024 sebesar Rp. 683.500.100,- Jika dilihat lebih jauh untuk kenaikan Belanja Sub kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum dikarenakan terdapat penambahan anggaran untuk kegiatan pengamanan Pilkada.

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kab. Temanggung Tahun 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1 0 5 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA								10.948.786 .266					
1 0 5 1	2.0 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4.858.599. 266					
1 0 5 1	2.0 0 1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.858.599. 266	DAU		Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	
1 0 5 1	2.0 0 5 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								338.615.00 0					
1 0 5 1	2.0 0 1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapan	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	138.615.00 0	DAU		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket	
1 0 5 1	2.0 0 2 Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan				Kantor Satpol PP dan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.00 0	DBHCH T		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	500 orang	

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

									Damkar Temanggung		Peraturan Perundang-Undangan								
1	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah														263.500.000
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Tercukupinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10.000.000	DAU			Tercukupinya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tercukupinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.000.000	DAU			Tercukupinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Paket	
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	17.500.000	DAU			Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	2 Paket	
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tersedianya ATK, alat dan bahan kebersihan	20.000.000	DAU			Tersedianya ATK, alat dan bahan kebersihan	1 Paket	
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tercukupinya Barang Cetak dan Penggandaan	10.000.000	DAU			Tercukupinya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	
1	0	0	2.0	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum harian pegawai, jamuan makan minum tamu	76.000.000	DAU	Pagu awal : 44.000.000, usulan tambahan : 32.000.		Tersedianya makan minum harian pegawai, jamuan makan minum tamu	12 Bulan	

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

														000, jumlah akhir : 76.000. 000			
1	0	0	2.0	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Kantor Satpol PP dan Damkar Temang gung		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	80.000.000	DAU	Pagu awal : 55.000. 000, usulan tamba han : 25.000. 000, jumlah akhir : 80.000. 000	Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	12 Bulan
1	0	0	2.0		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								455.000.00 0				
1	0	0	2.0	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				Kantor Satpol PP dan Damkar Temang gung		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	170.000.00 0	DAU	Pagu awal : 85.000. 000, usulan tamba han : 85.000. 000, jumlah akhir : 170.00 0.000 (untuk pengad aan motor patrol 4 unit)	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4 Unit
1	0	0	2.0	0	Pengadaan Mebel				Kantor Satpol PP dan Damkar		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tercukupinya Mebel yang dibutuhkan	30.000.000	DAU		Tercukupinya Mebel yang dibutuhkan	1 Paket

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

									Temanggung									
1	0	0	2.0	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tercukupinya Peralatan dan Mesin yang dibutuhkan	5.000.000	DAU		Tercukupinya Peralatan dan Mesin yang dibutuhkan	2 Unit		
1	0	0	2.0	0	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	250.000.000	DAU	Pengadaan Gudang penyimpanan barang bukti/sitaan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		
1	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							244.674.000						
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	65.000.000	DAU		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan		
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tercukupinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	7.500.000	DAU		Tercukupinya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan		
1	0	0	2.0	0	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tercukupinya Jasa honor penjaga keamanan dan petugas kebersihan kantor	172.174.000	DAU		Tercukupinya Jasa honor penjaga keamanan dan petugas kebersihan kantor	12 Bulan		
1	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							285.000.000						

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

1	0	0	2.0	0	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Tercukupinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.000.000	DAU	Pagu awal : 70.000.000, usulan tambahan : 20.000.000, jumlah akhir : 90.000.000 (untuk biaya STNK kendaraan Damkar)	Tercukupinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan		
1	0	0	2.0	0	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional atau lapangan				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah Kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Tercukupinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	65.000.000	DAU				12 Bulan	
1	0	0	2.0	0	Pemeliharaan Mebel				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah Mebel yang Dipelihara	Tercukupinya pemeliharaan mebel kantor	5.000.000	DAU		Tercukupinya pemeliharaan mebel kantor	1 Paket		
1	0	0	2.0	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.000.000	DAU	Pagu awal : 30.000.000, usulan tambahan : 30.000.000, jumlah akhir : 60.000.	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2 Unit		

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

															000				
1	0	0	2.0	1	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	125.000.000	DAU		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		
1	0	0			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM								2.554.660.000						
1	0	0	2.0		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota								2.494.660.000						
1	0	0	2.0	0	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Presentase pengaduan yang berkaitan dengan trantibum yang ditindak lanjuti	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Terlaksananya kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	120.883.400	DAU		Terlaksananya kegiatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	12 Bulan		
1	0	0	2.0	0	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Presentase penegakan Perda/Perbup	Jumlah Penertiban dan Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Terlaksananya penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	50.000.000	DAU		Terlaksananya penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	12 Bulan		
1	0	0	2.0	0	Koordinasi				Kantor		Jumlah Dokumen	Terbayarnya honor SS	940.181.00	DAU	Pagu	Terbayarnya honor SS	12		

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

	5	2	1	3	Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota				Satpol PP dan Damkar Temanggung		Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Banpol 30 orang x 13 bulan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan (Rp. 865.181.000) dan pengamanan Pilkades (75.000.000)	0		awal : 865.181.000, dapat tambahan untuk pengamanan Pilkades : 75.000.000, jumlah akhir : 940.181.000	Banpol 30 orang x 13 bulan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan (Rp. 865.181.000) dan pengamanan Pilkades (75.000.000)	Bulan	
1	05	02	2.01	04	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung				1.000.000.000	DAU				
1	05	02	2.01	05	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Presentase Satlinmas yang terlatih	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya (tambahan hasil musrenbang = kec. Ngadirejo Rp. 109.000.000,- dan kec. Pringsurat Rp. 120.000.000,-)	Terlaksananya peningkatan kapasitas Satlinmas dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan (tambahan hasil musrenbang = kec. Ngadirejo Rp. 109.000.000,- dan kec. Pringsurat Rp. 120.000.000,-)	339.000.000	DAU	Pagu awal : 110.000.000, dapat tambahan dari hasil Musrenbang 229.000.000 (kec Ngadirejo : 109.000.000 dan kec Pringsurat :	Terlaksananya peningkatan kapasitas Satlinmas dan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan (tambahan hasil musrenbang = kec. Ngadirejo Rp. 109.000.000,- dan kec. Pringsurat Rp. 120.000.000,-)	1 Paket	

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

															120.00 0.000, jumlah akhir : 339.00 0.000			
1	0	0	2.0	0	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Presentase penegakan Perda/Perbup	Jumlah Kerjasama antar instansi dalam penanganan PKL dan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum lainnya	Terlaksananya Kerjasama antar instansi dalam penanganan PKL dan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum lainnya	30.000.000	DAU		Terlaksananya Kerjasama antar instansi dalam penanganan PKL dan gangguan ketertarikan dan ketertiban umum lainnya	12 Bulan	
1	0	0	2.0	0	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Presentase penegakan Perda/Perbup	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	14.595.600	DAU		Terlaksananya Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertarikan dan Ketertiban Umum	12 Bulan	
1	0	0	2.0		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota								60.000.000					
1	0	0	2.0	0	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Presentase penegakan Perda/Perbup	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani sesuai SOP	Tertanganinya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan Bupati/Walikota	60.000.000	DAU		Tertanganinya Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan-Peraturan Bupati/Walikota	12 Bulan	
1	0	0			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN								1.948.738.000					
1	0	0	2.0		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman,								1.328.738.000					

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

					Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota												
1	0	0	2.0	0	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Tingkat Waktu Tanggap (Respon Time Rate) dalam Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya respon time damkar dari pos terdekat ke lokasi kebakaran sampai dengan air keluar maksimal 15 menit, Meminimalisir dampak kejadian kebakaran berupa korban jiwa dan harta benda	100.000.000	DAU	Pagu awal : 72.299.900, usulan tambahan : 84.200.000, jumlah akhir : 156.499.900 (untuk mencukupi BBM dan Oli)	Tercapainya respon time damkar dari pos terdekat ke lokasi kebakaran sampai dengan air keluar maksimal 15 menit, Meminimalisir dampak kejadian kebakaran berupa korban jiwa dan harta benda	12	Bulan
1	0	0	2.0	0	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri			Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Presentase warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Terlindunginya keselamatan petugas damkar dalam penanganan kejadian kebakaran	96.059.000	DAU	Pagu awal : 59.000, usulan tambahan : 100.000.000, jumlah akhir : 100.059.000 (untuk pengadaan peralatan Damkar)	Terlindunginya keselamatan petugas damkar dalam penanganan kejadian kebakaran	12	Bulan

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

1	0	0	2.0	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Presentase warga Negara yang Mempe roleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Terpenuhinya Standarisasi sarpras dalam penanganan kejadian kebakaran, terpenuhinya pengadaan APD	Terpenuhinya standarisasi sarpras dalam penanganan kejadian kebakaran	100.059.000	DAU		Terpenuhinya standarisasi sarpras dalam penanganan kejadian kebakaran	12 Bulan	
1	0	0	2.0	0	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung		Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Tercukupinya kebutuhan pokok aparatur damkar antara lain gaji Satgas Damkar (40 orang), jaminan Kesehatan/ketenagakerjaan dll	1.032.620.000	DAU		Tercukupinya kebutuhan pokok aparatur damkar antara lain gaji Satgas Damkar (40 orang), jaminan Kesehatan/ketenagakerjaan dll	12 Bulan	
1	0	0	2.0		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran								39.981.000					
1	0	0	2.0	0	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Presentase Bangunan/Gedung/Lingkungan yang menjadi prioritas inspeksi	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung /Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran	Terdatanya kualitas dan kuantitas sarpras proteksi kebakaran di instansi pemerintah, instansi swasta atau pemukiman masyarakat	39.981.000	DAU	Pagu awal : 19.981.000, usulan tambahan : 20.000.000, jumlah akhir : 39.981.000 (untuk pengadaan alat ukur	Terdatanya kualitas dan kuantitas sarpras proteksi kebakaran di instansi pemerintah, instansi swasta atau pemukiman masyarakat	12 Bulan	

RENJA 2024 | (PERANGKAT DAERAH)

														hydrant)			
1	0	0	2.0		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran												
	5	4	4														
1	0	0	2.0	0	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Presentase warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (tambahan hasil musrenbang Kec. Wonoboyo = Rp. 100.000.000,-)	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kejadian kebakaran dan pelaksanaan kegiatan hasil musrenbang	134.455.000	DAU	Pagu awal : 34.455.000, dapat tambahan dari hasil Musrenbang : 100.000.000 (kec wonoboyo : 100.000.000)	Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kejadian kebakaran dan pelaksanaan kegiatan hasil musrenbang	1 Paket
1	0	0	2.0	0	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				Kantor Satpol PP dan Damkar Temanggung	Presentase warga Negara yang memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Sarpras Damkar	Terpenuhinya Sarpras Pendukung Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat / relawan damkar	445.564.000	DAU	Pagu awal : 45.564.000, usulan tambahan : 600.000.000, jumlah akhir : 645.564.000	Terpenuhinya Sarpras Pendukung Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat / relawan damkar	1 Paket

BAB V

PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2024 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2022. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2024 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Belanja Operasional sebesar 93 %, realisasi Belanja Modal sebesar 7 %, belanja Daerah sebesar 8.888.633.674, sehingga dapat dikatakan kinerja efisien dan efektif. Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional sebesar 97,01 %,

realisasi Belanja Modal sebesar 2,99 %, belanja Daerah Sebesar 4.118.528.891

Dalam Renja Tahun Anggaran 2024 (Perangkat Daerah) mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp. 10.948.786.266,- yang terdiri dari 3 program antara lain program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum , program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan non Kebakaran.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung Tahun 2024 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Temanggung dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 3 Juli 2023

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN TEMANGGUNG

Drs. EDY CAHYADI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730619 199303 1 003